

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB/SDGs INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF 2019



**RINGKASAN EKSEKUTIF
PELAKSANAAN PENCAPAIAN
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)
TAHUN 2019**



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

ISBN : 978-602-53813-5-5

Penyelaras Akhir : Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc

Reviewer : Amalia Adininggar Widyasanti, Nina Sardjunani

Editor : Vivi Yulaswati, Josaphat Rizal Primana, Oktorialdi, Diani Sadia Wati, Maliki, Anang Noegroho Setyo Moeljono, Pungkas Bahjuri Ali, Amich Alhumami, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Tri Dewi Virgiyanti, Yahya Rachman Hidayat, Mahatmi Parwitasari Saronto, Leonardo Adypurnama, Muhammad Cholifihani, Mia Amalia, Medrilzam, Sri Yanti, Nur Hygiawati Rahayu, Prahesti Pandanwangi, Eka Chandra Buana

Tim Pendukung : Indriana Nugraheni, Rachman Kurniawan, Setyo Budiantoro, Sanjoyo, Khairanis Rahmanda Irina, Chiquita Abidin, Farhana Zahrotunnisa, Thas Saralah, Fitriyani Yasir, Sandra Pratiwi, Alimatul Rahim, Lendi Andita, Tissa Riani, Abdul Halim, Anita Wahyuni Yamin, Vernanda Fairuz, Ardhiantie, Fadlan Muzakki, Diky Avianto, M Robbi Qawi

Layout/Desain : Ongky Arisandi, Alimatul Rahim

Diterbitkan Oleh:

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.



Kementerian PPN/
Bappenas

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB/SDGs INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF 2019



Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)



We support the Sustainable Development Goals





We support the Sustainable Development Goals

SUHARSO MONOARFA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
selaku Koordinator Pelaksana Nasional TPB/SDGs

KATA PENGANTAR

Sejak disepakati pada tanggal 25 September 2015 oleh 193 negara pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) di tahun 2030. Wujud komitmen tersebut ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Amanat Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 telah menghasilkan tiga (3) dokumen penting dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia, yaitu: Rencana Aksi Nasional (RAN) periode 2017-2019, Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Peta Jalan SDGs menuju 2030. Perpres itu menjadi landasan dan payung hukum bagi semua pihak dalam melaksanakan TPB/SDGs.

Pemerintah Indonesia terus mendorong pelaksanaan TPB/SDGs dilakukan secara inklusif oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan TPB/SDGs di Indonesia terus menerapkan prinsip “tidak adasatupun yang tertinggal atau “*no one left behind*” sebagai prinsip utama TPB/SDGs baik di tingkat nasional dan daerah. Pentingnya inklusivitas yang dilaksanakan telah menjadi salah satu capaian Indonesia dan menjadi pembelajaran bagi negara lain. Prinsip inklusivitas ini dituangkan dalam wujud kerja sama multipihak yang dilakukan oleh pemerintah dan nonpemerintah yang meliputi akademisi, CSO, filantropi, dan pelaku usaha, serta didukung parlemen. Pencapaian TPB/SDGs di Indonesia juga tidak lepas dari dukungan dan kerja sama mitra pembangunan.

Sebagai wujud dedikasi dalam mengukur pencapaian TPB/SDGs, pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun laporan pencapaian TPB/SDGs di tahun 2019. Laporan TPB/SDGs tahun 2019 ini adalah laporan tahunan pertama sebagai hasil dari pemantauan dan evaluasi atas progres dan pencapaian TPB/SDGs, yang targetnya ditetapkan pada RAN 2017-2019. Proses penyusunan laporan ini juga dilakukan secara inklusif, partisipatif dan terbuka dengan melibatkan seluruh platform dari unsur pemerintah, akademisi, CSO, filantropi dan pelaku usaha serta kaum pemuda, yang dilakukan melalui konsultasi secara tatap muka (*offline*) maupun secara media virtual (*online*).

Hasil dalam laporan ini menjelaskan capaian target-target yang diukur dengan indikator TPB/SDGs yang terdiri dari yang telah tercapai, memiliki kecenderungan kemajuan yang akan tercapai, serta yang memerlukan perhatian khusus. Dari tahun 2017-2019, kita telah berhasil mencapai sebagian besar target yang ditetapkan dalam RAN TPB/SDGs 2015-2019. Hasil capaian ini dapat membantu kita untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari pelaksanaan TPB/SDGs. Kitapun perlu mencermati target-target yang belum tercapai dan merencanakan kebijakan dan strategi serta program yang lebih baik dan jitu untuk pencapaian target-target TPB/SDGs di masa depan. Mengingat tahun 2030 hanya tinggal satu dekade lagi, pencapaian TPB/SDGs harus menjadi fokus dan perhatian kita selama 10 tahun ke depan. Dengan terjadinya pandemi COVID-19, TPB/SDGs menjadi semakin relevan untuk terus dilaksanakan sebagai upaya membangun kembali yang berbasis pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya kami berharap semoga laporan ini dapat membantu semua



pihak untuk terus meningkatkan aksi dan strategi serta kolaborasi yang aktif untuk mencapai TPB/SDGs di tahun 2030.

Penyusunan laporan tahunan TPB/SDGs 2019 tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih masukan dan pemikiran kepada seluruh pihak yang terlibat, berperan dan berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Oktober 2020



Suharso Monoarfa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Selaku Koordinator Pelaksana Nasional TPB/SDGs

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) telah disepakati 193 negara di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015. Sebagai negara yang turut menggarap konsep SDGs, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan dan mencapainya pada tahun 2030. Wujud komitmen tersebut, ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Perpres itu menjadi landasan dan payung hukum bagi semua pihak dalam melaksanakan TPB/SDGs.

Amanat Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 telah menghasilkan tiga (3) dokumen penting dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia, yaitu: Rencana Aksi Nasional (RAN) periode 2017-2019, Rencana Aksi Daerah (RAD)¹ dan Peta Jalan SDGs menuju 2030. Salah satu upaya penting dan strategis yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah mengarusutamakan target TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Sebanyak 94 target TPB/SDGs telah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Selanjutnya target SDGs yang diintegrasikan makin banyak, dari 164 target TPB/SDGs yang relevan sebanyak 124 target telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020 – 2024. Pemerintah daerah juga melakukan pengarusutamaan SDGs ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Pengarusutamaan ini menjadi dasar penyusunan rencana aksi pencapaian SDGs nasional (RAN) dan daerah (RAD).

Pelaksanaan prinsip utama TPB/SDGs secara inklusif oleh pemerintah dan nonpemerintah untuk memastikan “tidak ada satupun yang tertinggal atau *no one left behind*”, telah menjadi salah satu capaian Indonesia dan menjadi pembelajaran bagi negara lain. Kerjasama multi pihak itu dilakukan oleh pemerintah dan nonpemerintah yang meliputi akademisi, CSO, filantropi dan pelaku usaha, serta didukung parlemen. Bentuk kontribusi serta inisiatif yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam mendukung TPB/SDGs antara lain: 1). Penyelenggaraan *World Parliamentary Forum* yang digagas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia sejak tahun 2017; 2). Kolaborasi antara filantropi dan pelaku usaha yang tergabung dalam FBI4SDGs (Filantropi dan Bisnis Indonesia untuk SDGs) dalam mendukung pembiayaan TPB/SDGs melalui skema *blended finance*; 3). Terbentuknya SDGs centers di berbagai universitas baik negeri maupun swasta²; 4). Terbentuknya *SDGs Academy* yang digagas oleh Tanoto Foundation bersama dengan UNDP Indonesia. Disamping itu selaku Koordinator pelaksanaan TPB/SDGs Kementerian PPN/BAPPENAS memprakarsai pembentukan *SDGs Financing Hub* dan telah diluncurkan oleh oleh Bapak Wakil Presiden RI pada tahun 2019.

¹ Per September 2020 telah ditetapkan 27 Peraturan Gubernur untuk Rencana Aksi Daerah, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIYogyakarta, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Bangka Belitung.

² Per September 2020 telah terbentuk 19 SDGs Center, yaitu Universitas Riau, Universitas Andalas, Universitas Bengkulu, Universitas Lampung, LPPI, Universitas Indonesia, Universitas Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Jember, Universitas Mataram, Universitas Hasanuddin, Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Islam Riau, Universitas Syiah Kuala, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Palangka Raya

PENCAPAIAN TPB/SDGs Tahun 2019

Laporan TPB/SDGs tahun 2019 ini adalah laporan tahunan kinerja TPB/SSGs pertama dari pemantauan dan evaluasi atas kemajuan dan pencapaian TPB/SDGs, yang targetnya telah dicantumkan pada RAN 2017-2019. Di tingkat internasional, Pemerintah Indonesia telah dua kali menyampaikan *Voluntary National Reviews* (VNR) pada tahun 2017 (sumber data capaian hingga 2016) dan 2019 (sumber data capaian hingga Maret 2019) pada *High-Level Political Forum on Sustainable Development* (HLPF SD) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. VNR merupakan laporan capaian TPB/SDGs untuk tingkat global yang berisi capaian atas 17 Tujuan (*Goals*) yang disusun berdasarkan prinsip keterbukaan dan inklusif, dengan melibatkan pihak pemerintah dan nonpemerintah. Dokumen VNR Indonesia dinilai dan ditetapkan oleh PBB sebagai salah satu dokumen VNR terbaik³ pada tahun 2017 sehingga Indonesia diminta untuk mengikuti *SDGs Investment Fair* pada April 2019. Laporan Indonesia dinilai memiliki rencana, kebijakan dan proyek investasi yang potensial. Selain itu, VNR Indonesia tahun

2019 yang disampaikan pada bulan Juli juga mendapat apresiasi tinggi dari *Firma White & Case LIP* yang mengkaji 47 VNR tentang SDG 16 (Tujuan 16). VNR Indonesia diapresiasi sangat baik karena antara lain : 1) mencakup mayoritas target SDG 16 dengan data dukung yang terdisagregasi; 2) secara spesifik menampilkan peran perempuan dalam implementasi SDG16; dan 3) memberikan contoh konkrit partisipasi perempuan dan pemuda dalam pencapaian SDG 16.

Pencapaian TPB/SDGs di Indonesia juga tidak lepas dari dukungan dan kerja sama mitra pembangunan. Di tahun 2019, telah diluncurkan *SDGs Dashboard* yang bertujuan memantau perkembangan indikator capaian TPB/SDGs, yang merupakan dukungan dari UNICEF. ADB juga mendukung finalisasi perumusan Roadmap SDGs Indonesia menuju 2030 yang telah diluncurkan oleh Bapak Wakil Presiden RI pada acara *Annual Conference SDGs 2019*. Selain itu, JICA juga mendukung dalam pengembangan *SDGs E-Monev* untuk memantau dan mengukur program pemerintah dan nonpemerintah agar dapat terintegrasi dan mudah dalam memantau, mengevaluasi serta menganalisisnya untuk pelaporan serta GIZ yang mendukung perumusan *e-monev* dari nonpemerintah dan Sekretariat SDGs serta UNDP dan DFAT yang sejak awal telah mendukung Sekretariat SDGs.

Laporan tahun 2019 ini dirumuskan untuk memantau serta mengukur kinerja capaian target-target melalui serangkaian indikator TPB/SDGs Indonesia yang telah ditetapkan pada RAN TPB/SDGs 2017-2019. Laporan ini menampilkan perkembangan capaian dari indikator TPB/SDGs yang dikelompokkan dalam tiga (3) kategori:

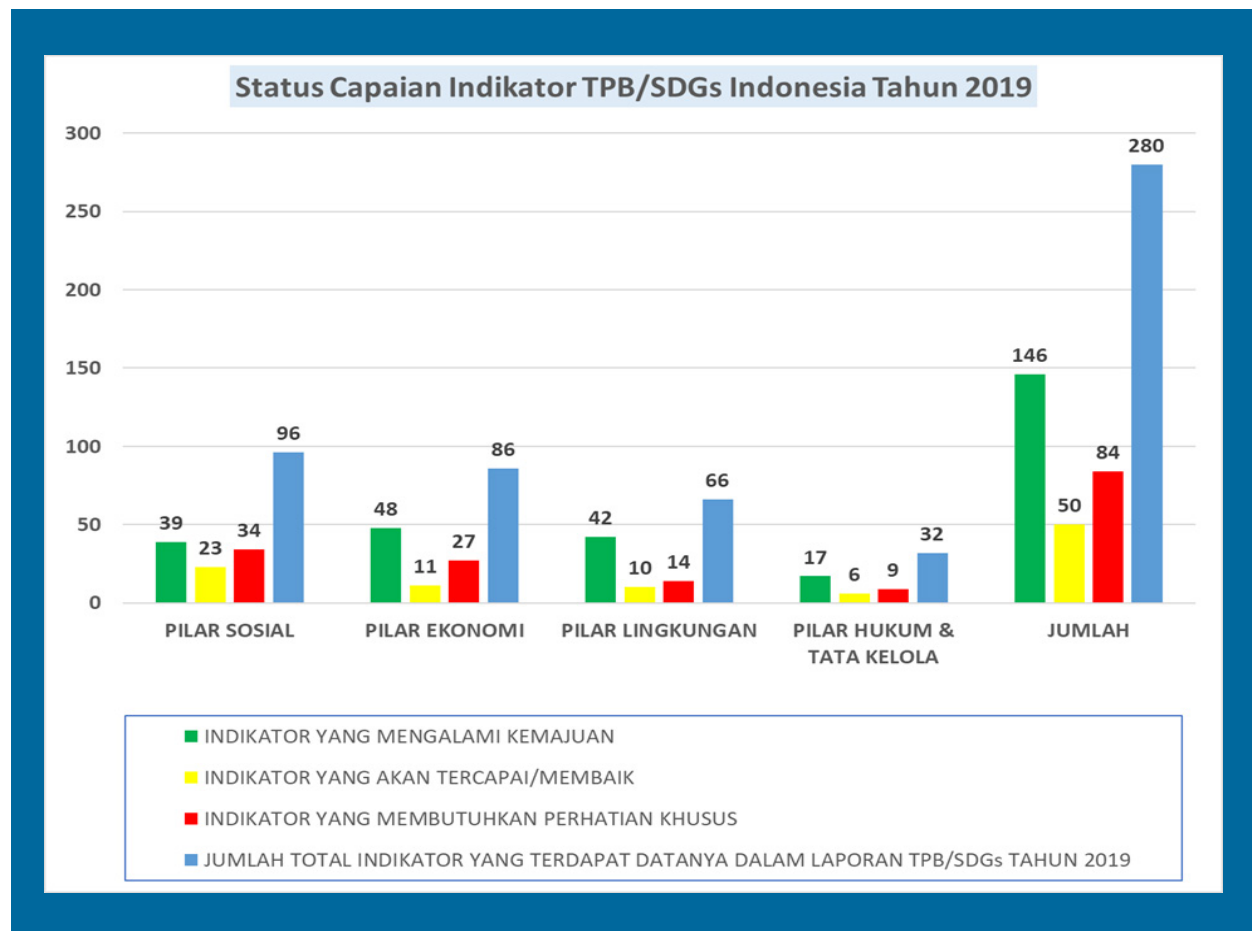
1. Indikator yang mengalami kemajuan (ditandai dengan status warna hijau), artinya indikator-indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019;
2. Indikator yang akan tercapai atau membaik (ditandai dengan status warna kuning), yaitu indikator yang mengalami tren peningkatan dari data dasar (*baseline*) namun belum mencapai target tahun 2019;

³ Enam negara yang diundang pada SDGs Investment Fair 2019 yaitu Indonesia, Nigeria, Kenya, Bostwana, Zimbabwe, dan Kosta Rika.

3. Indikator yang membutuhkan perhatian khusus (ditandai dengan status warna merah), adalah indikator yang trennya menurun dari data dasar (*baseline*) atau sama sekali tidak mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2019;

Proses penyusunan laporan dilakukan secara inklusif dan terbuka dengan melibatkan seluruh platform partisipatif baik dari unsur pemerintah, akademisi, CSO, filantropi dan pelaku usaha juga kaum pemuda, serta melalui konsultasi secara tatap muka (*offline*) maupun secara media virtual (*online*).

Berikut rekapitulasi indikator berdasarkan pengelompokan kategori status pencapaian indikator TPB/SDGs untuk setiap pilar pembangunan TPB/SDGs di Indonesia.



Pada diagram Rekapitulasi Status Indikator TPB/SDGs ini tergambar bahwa capaian TPB/SDGs 2019 meliputi 280 indikator yang dianalisa terdapat datanya dan tercantum pada RAN 2017-2019. Separuh dari total indikator tersebut atau sekitar 52 persen atau 146 indikator telah mencapai target yang ditetapkan pada RAN 2017-2019 untuk laporan tahun 2019. Bila ditambahkan 18 persen atau 50 indikator yang menunjukkan tren akan membaik, maka terdapat sekitar

70 persen dari 280 indikator TPB/SDGs yang telah tercapai dan mengalami kemajuan menuju pencapaian lebih baik. Akan tetapi, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar dalam pencapaian target TPB/SDGs khususnya untuk indikator yang memerlukan perhatian khusus yang mencakup sekitar 30 persen atau 84 indikator.

Berikut ringkasan pencapaian dari setiap Tujuan atas indikator-indikator yang mengalami kemajuan serta indikator yang juga masih menjadi tantangan untuk dihadapi dan harus menjadi perhatian setiap pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah untuk secara bersama-sama mengatasinya.

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan



Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan.

- Tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen pada tahun 2009 berhasil diturunkan menjadi 9,22 persen pada tahun 2019. Capaian Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan nasional sebesar satu digit yang dimulai pada Maret tahun 2018 (9,82 persen) merupakan kinerja pertama dalam sejarah Indonesia. Demikian pula, Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP USD 1,9 per kapita/hari) berhasil diturunkan secara signifikan menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2019 dari 18,43 persen pada tahun 2009.
- Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan bantuan untuk 9,8 juta orang pada tahun 2019 dengan anggaran mencapai 32,7 Triliun Rupiah untuk akses layanan dasar. Selain itu, masyarakat miskin dan rentan telah memperoleh akses air minum layak mencapai 61,15 persen pada tahun 2015, dan terus meningkat menjadi 84,91 persen pada tahun 2019 serta akses sanitasi layak juga mengalami peningkatan dari 47,08 persen menjadi 66,57 persen pada kurun waktu yang sama.

Tantangan utama yang dihadapi dalam menurun kemiskinan adalah laju penurunan tingkat kemiskinan yang semakin melambat. Kemiskinan kronis (*hard core poverty*) menunjukkan adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk periode yang

lama. Semakin rendah tingkat kemiskinan, maka semakin mendekati kemiskinan kronis. Kemiskinan yang semakin menyentuh kronis memerlukan pendekatan dan strategi yang berbeda dan lebih terintegrasi. Selain permasalahan penduduk miskin kronis, tingginya penduduk yang rentan jatuh miskin juga merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia, terutama jika terjadi guncangan bencana (ekonomi, sosial, alam, maupun non-alam).

Arah kebijakan untuk upaya percepatan penurunan kemiskinan ke depan sesuai dengan RPJMN 2020-2024 antara lain dengan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran yang mencakup 1) integrasi penyaluran bantuan sosial pangan dan subsidi energi tepat sasaran (listrik dan LPG); 2) integrasi penyaluran bantuan tunai bersyarat untuk kesehatan dan pendidikan, yang menyediakan insentif untuk mendorong partisipasi sekolah hingga perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan; 3) peningkatan sinergi DTKS dengan data dasar kependudukan serta basis data program bantuan sosial lainnya; 4) perluasan dan penguatan penyaluran bantuan sosial non-tunai yang menyediakan berbagai pilihan saluran dan instrumen pembayaran yang saling terkoneksi; dan 5) penguatan fungsi pendampingan untuk fasilitasi pendataan dan pelaksanaan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku penerima manfaat. Selain itu, untuk mendukung peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin dan rentan, maka diperlukan pendampingan dan fasilitasi pendanaan lanjutan bagi usaha produktif kelompok miskin dan rentan yang prospektif.

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan



Tujuan 2. Tanpa Kelaparan.

- Selama 4 tahun terakhir, ketahanan pangan nasional telah meningkat ditunjukkan dengan angka Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) telah menurun dari 10,73 persen pada 2015 menjadi 7,66 persen pada tahun 2019 serta Skala Pengalaman Ketidakamanan Pangan (FIES), juga menurun dari 8,66 persen pada 2017 menjadi 5,42 persen pada tahun 2019. Namun demikian, prevalensi *stunting* dan *wasting* pada anak balita masih cukup tinggi yaitu 27,7 persen *stunting* dan 7,4 persen *wasting* pada 2019.
- Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Indonesia membaik, ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) dari 81,4 (2014) menjadi 90,8 (2019).

Tantangan utama yang dihadapi untuk mencapai tanpa kelaparan yaitu meskipun PoU dan FIES telah membaik, namun masih menghadapi prevalensi *stunting*, *wasting*, dan *defisiensi* zat-zat gizi mikro yang tinggi pada anak balita, serta kelebihan berat badan dan obesitas. Oleh karena itu, sistem pangan perlu dikembangkan dengan pendekatan holistik dan terintegrasi untuk mengatasi tingkat kekurangan gizi dan kekurangan gizi mikro dan bersama-sama dengan kelebihan berat badan dan obesitas.

Tantangan utama yang dihadapi untuk mencapai tanpa kelaparan yaitu meskipun PoU dan FIES telah membaik, namun masih menghadapi prevalensi *stunting*, *wasting*, dan defisiensi zat-zat gizi mikro yang masih relatif tinggi pada anak balita, serta kelebihan berat badan dan obesitas. Oleh karena itu, sistem pangan perlu dikembangkan dengan pendekatan holistik dan terintegrasi untuk mengatasi tingkat kekurangan gizi dan kekurangan gizi mikro dan bersama-sama dengan kelebihan berat badan dan obesitas.

Arah kebijakan dalam mengatasi persoalan pangan dan gizi yaitu: (1) Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat; (2) Menjaga pertanian yang berkelanjutan dan praktik pertanian terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi berkelanjutan; (3) Memperkuat komunikasi perubahan sosial dan perilaku dalam konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan diet; (4) Memperluas penyediaan makanan untuk populasi yang rentan melalui program perlindungan sosial, termasuk perluasan makanan sumber protein serta makanan untuk bayi dan anak kecil; (5) Percepatan pengurangan *stunting* dengan meningkatkan efektivitas intervensi spesifik dan perluasan dan penajaman intervensi spesifik; (6) intervensi fortifikasi untuk garam dengan yodium, tepung dengan zat besi dan minyak goreng kelapa sawit dengan Vitamin A untuk memastikan asupan mikronutrien yang memadai bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera



Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

- Capaian utama dari Tujuan 3, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, antara lain peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB), serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi sebesar 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015). Capaian Angka Kematian Balita (AKBa), Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB) terus menunjukkan penurunan sejak periode 1991 hingga tahun 2017. AKBa menunjukkan penurunan dari 40

kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 32 pada tahun 2017.

- Kejadian Malaria di Indonesia berhasil dipertahankan di bawah 1 persen. Tren faktor risiko penyakit tidak menular seperti persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun, prevalensi tekanan darah tinggi, dan prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun serta belum dapat memenuhi target RPJMN 2019. Angka kelahiran remaja/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR) usia 15-19 tahun dan angka kelahiran total/*Total Fertility Rate* (TFR) menunjukkan penurunan.
- Fasilitas kesehatan yang memiliki paket obat esensial terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun disamping itu *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan masih belum mencapai target RPJMN 2019.

Dalam mencapai kehidupan sehat dan sejahtera, tantangan yang dihadapi adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan pendidikan dan promosi kesehatan, peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan kesehatan.

Dalam rangka pencapaian target SDGs bidang kesehatan, arah dan kebijakan sebagai berikut: 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; 2) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; dan 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas



Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas.

- Pendidikan yang berkualitas merupakan hal yang penting dalam membentuk sumberdaya manusia yang berdaya saing. Pendidikan diawali pada usia dini menunjukkan hampir semua anak usia 6 tahun memperoleh pelayanan pembelajaran terorganisir baik di tingkat Pra-sekolah (Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD) maupun di tingkat sekolah dasar. Selama 16 tahun terakhir antara tahun 2002 dan 2018, indikator ANAR anak usia 6 tahun mengalami perbaikan yang sangat pesat atau meningkat sebesar 36 persen.
- Tingkat partisipasi pemuda dalam pendidikan menunjukkan tren yang positif baik pada pendidikan formal dan non-formal termasuk kursus. Selama periode 2009-2018, terjadi peningkatan yang cukup pesat yaitu sekitar 14 persen. Kesempatan pemuda untuk mendapatkan pendidikan formal/non-formal termasuk kursus telah setara antara perempuan dan laki-laki. Partisipasi pendidikan di jenjang pendidikan tinggi yang masih rendah sebesar 30,28 persen (2019) dan menunjukkan peningkatan yang lambat dari 25,26 persen (2015). APK PT juga belum mampu memenuhi harapan sebesar 36,73 persen (2019). Namun demikian, pengukuran kualitas hasil pembelajaran berdasarkan PISA (*Programme for International Student Assessment*) dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), menunjukkan bahwa proporsi siswa yang dapat mencapai kompetensi minimal untuk matematika dan membaca masih rendah.
- Ketercapaian cakupan pendidikan juga didorong oleh keberhasilan Indonesia dalam memberikan layanan pendidikan yang setara antara perempuan dan laki-laki yang ditunjukkan nilai Rasio APM perempuan dan laki-laki semakin mendekati 100 persen seperti halnya pada tahun 2019.

- Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indonesia mengalami kemajuan jika dilihat dari persentase guru yang sudah berkualifikasi S1/DIV. Persentase guru berkualifikasi di jenjang SD mengalami kenaikan 4,14 persen, dari 84,21 persen di tahun 2017 menjadi 88,35 persen di tahun 2018. Kenaikan juga terjadi di jenjang SMP, SMA, dan SMK.

Tantangan yang dihadapi untuk mencapai pendidikan berkualitas erat kaitannya dengan pemenuhan akses pendidikan, kualitas pembelajaran dan pengajaran, pendidikan keterampilan serta vokasi, dan penguatan pendidikan 1 tahun pra-sekolah.

Dalam rangka pencapaian target SDGs bidang Pendidikan, arah dan kebijakan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2) Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; 3) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; 4) Memperkuat penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah; 5) Meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.

keputusan.

- Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus meningkat dengan spektrum yang semakin beragam. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15-64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.
- Upaya pencegahan perkawinan anak belum mencapai target *Roadmap* SDGs tahun 2019 sebesar 10,59 persen. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun baru mencapai 10,82 persen (2019).
- Partisipasi perempuan di lembaga legislatif di tingkat nasional masih belum memenuhi kuota 30 persen sesuai dengan perundangan, meskipun menunjukkan tren yang meningkat dari 17,32 persen pada tahun 2014 menjadi 20,52 persen pada tahun 2019.

Dalam mencapai kesetaraan gender, tantangan yang dihadapi adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu perlindungan perempuan dan anak perempuan terhadap tindak kekerasan dan praktik tidak baik, serta isu pemberdayaan perempuan dalam semua bidang kehidupan. Selain itu, kita masih menghadapi tantangan belum optimalnya pelaksanaan layanan integratif terhadap korban kekerasan dan pelanggaran hak pada kaum perempuan.

Dalam rangka pencapaian target SDGs 5, arah dan kebijakan adalah sebagai berikut: 1). Mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya; 2). Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; dan 3). Meningkatkan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO.

Tujuan 5 Kesetaraan Gender



Tujuan 5. Kesetaraan Gender.

- Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tidak hanya terkait dengan SDG 5 tetapi juga terkait dengan pengukuran tujuan lain yang memiliki target spesifik pada masalah gender. Ringkasan ini menyajikan informasi terkait dengan perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan serta kesempatan yang setara bagi perempuan dalam pengambilan

Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak



Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak.

- Pada tahun 2019, sebanyak 89,27 persen rumah tangga di Indonesia memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (Susenas BPS, 2019). Sementara itu, untuk kategori akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan belum memiliki baseline data pengukuran kualitas air minum. Perhitungan akses air minum aman dilakukan menggunakan estimasi perhitungan akses nasional sehingga didapatkan angka capaian akses aman sebesar 6,7 persen (Kualitas biologi Survei Kualitas Air/SKA 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kualitas fisik air minum berdasarkan Susenas BPS 2018)
- Akses terhadap layanan sanitasi layak (termasuk sanitasi aman) mengalami peningkatan dari 62,95 persen pada tahun 2015 menjadi 77,44 persen di tahun 2019, namun belum mencapai target sebesar 90 persen. Adapun untuk jumlah desa/kelurahan yang masih melaksanakan praktik-praktik *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah sebanyak 24.857 desa/kelurahan (Kementerian Kesehatan, 2019).

Tantangan dalam mencapai target air bersih dan sanitasi layak adalah belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum, belum optimalnya operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (*3T: Too much, Too little, Too dirty*), serta permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.

Arah kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain: 1) Penyediaan akses air minum layak dan aman dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara

untuk penyediaan air minum layak maupun aman; 2) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; 3) Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau



Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau.

- Konsumsi listrik nasional terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 konsumsi listrik nasional baru 910 kilowatt jam (kWh) per kapita. Kemudian meningkat menjadi 1.084 kWh/kapita pada tahun 2019. Peningkatan konsumsi listrik nasional ini selaras dengan kemajuan perekonomian nasional.
- Rasio elektrifikasi pada tahun 2014 sebesar 84,35 persen pada tahun 2019 menjadi 98,89 persen. Capaian tersebut telah melampaui target RPJMN 2015-2019 sebesar 96,60 persen. Upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dilakukan melalui penambahan jaringan melalui listrik pedesaan dan pendistribusian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Tantangan dalam kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan meliputi: 1) adanya pengelolaan dan pemanfaatan energi yang kurang efisien; 2) kecukupan pasokan energi terutama gas, dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil; 3) pemanfaatan sumber daya energi secara maksimal untuk bahan baku industri; 4) kualitas dan kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa; 5) pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas; 6) konsumsi energi yang belum efisien, penghematan energi di sektor industri, transportasi, bangunan dan sarana komersial perlu terus ditingkatkan dengan

potensi penghematan sekitar 30 persen dari penggunaan energi saat ini; dan 7) belum adanya fasilitas cadangan penyangga energi nasional untuk mengantisipasi kondisi krisis dan darurat energi.

Arah kebijakan kedepannya antara lain: 1) Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan; 2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik; 3) Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik; 4) Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan.

Meski pertumbuhan ekonomi relatif stabil di atas 5 persen, namun masih belum mencapai target. Antara lain, hal ini disebabkan tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Selain itu, rendahnya kualitas SDM juga perlu perhatian khusus karena berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan dokumen RPJMN tahun 2020-2024, arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi mencakup penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi adalah 1) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; 2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, 3) Melakukan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi; dan 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kerja sama industri.

Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi



Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

- Dalam rentang 2015-2019, Pemerintah telah berhasil menciptakan 11,88 juta lapangan kerja, melebihi target 10 juta lapangan pekerjaan.
- Pada Agustus 2019, TPT turun menjadi 5,28 persen (2019) dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,34 persen.
- Sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong perekonomian Indonesia, mengalami kemajuan yang baik. Menurut Laporan *The Travel & Tourism Competitiveness Report* yang dirilis WEF (*World Economic Forum*), peringkat indeks daya saing pariwisata Indonesia di dunia naik menjadi peringkat 40 di tahun 2019 dari peringkat 42 di tahun 2017.
- Minat wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia makin meningkat, ditunjukkan data Desember 2019 mengalami kenaikan 1,88 persen dibanding jumlah kunjungan pada Desember 2018.

Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur



Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.

- Infrastruktur mengalami berbagai kemajuan, seperti kondisi mantap jalan nasional mencapai target 98 persen pada tahun 2019 dari 89 persen pada tahun 2015; pembangunan jalan tol melebihi target 1.000 km kumulatif pada tahun 2019, yaitu 1.461 km dan jumlah bandar udara yang telah dibangun terus bertambah, yaitu 2 unit pada tahun 2015 menjadi 15 unit kumulatif pada tahun 2019. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMN 2015-2019.
- Infrastruktur TIK juga terus ditingkatkan untuk menunjang konektivitas digital, dimana proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband* meningkat

dari 93 persen pada tahun 2015 menjadi lebih dari 100 persen pada tahun 2019.

- Industri pengolahan nonmigas, sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, pada tahun 2015 menyerap 13,5 persen tenaga kerja, dan terus meningkat menjadi 14,9 persen pada tahun 2019. Namun demikian, proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB turun dari 18,2 persen pada tahun 2015 menjadi 17,6 persen pada tahun 2019, dengan laju pertumbuhannya tidak dapat dipertahankan pada 5,1 persen seperti pencapaian pada tahun 2015, namun menurun menjadi 4,3 persen pada tahun 2019.
- Pertumbuhan industri dan pembangunan infrastruktur memiliki dampak besar pada lingkungan, dan sudah ada kenaikan persentase perubahan emisi GRK dari 15,5 persen pada tahun 2015 menjadi 23,46 persen pada tahun 2019, namun belum mencapai target 26 persen pada tahun 2019.
- Peningkatan inovasi yang dihasilkan melalui riset, yang dapat menghasilkan penelitian dan inovasi terkait industri yang lebih ramah lingkungan dan infrastruktur yang mendukung konektivitas, juga terus diupayakan, dengan proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB terus ditingkatkan dari 0,20 persen pada tahun 2015 menjadi 0,23 persen pada tahun 2019.

Tantangan yang dihadapi dalam mencapai Tujuan 9 yaitu: 1) Pembangunan infrastruktur yang masih belum optimal, khususnya integrasi infrastruktur yang sudah ada; 2) Penguatan upaya pertumbuhan industri pengolahan non migas yang belum optimal; 3) Penguatan peran industri kecil melalui pemberian akses pembiayaan, teknologi tepat guna, dan pasar yang masih sedikit; 4) Alokasi anggaran untuk riset yang masih hanya bergantung pada pendanaan pemerintah; 5) Peningkatan kapasitas inovasi yang didukung oleh kualitas SDM dan infrastruktur yang memadai.

Demi memperkuat pencapaian Tujuan 9, arah dan kebijakan yang dilakukan ke depannya, meliputi: 1) Membangun infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat; 2) Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja,

dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; 3) Menguatkan pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi; 4) Menuntaskan dan memanfaatkan infrastruktur TIK; 5) Melaksanakan pembangunan rendah karbon; 6) Meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi.

Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan



Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan.

- Kesenjangan terus menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio Gini dari 0,402 pada tahun 2015 menjadi 0,380 pada tahun 2019. Hal ini juga terjadi pada angka kemiskinan, yang terus menurun dari 11,13 pada tahun 2015 menjadi 9,22 pada tahun 2019.
- Percepatan pembangunan desa menunjukkan hasil baik, dengan bertambahnya lebih dari 2.000 desa yang masuk kategori Desa Mandiri, serta lebih dari 5.000 Desa Tertinggal yang terentaskan.
- Namun, pembangunan di daerah tertinggal masih memerlukan upaya yang lebih besar lagi, masih ada 62 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal juga belum mencapai target yaitu dari 6,53 persen pada tahun 2015 menjadi 5,01 persen pada tahun 2018. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menurun dari 18,80 pada tahun 2015 menjadi 17,06 pada tahun 2019, namun laju penurunan ini masih relatif lambat.
- Pengurangan kesenjangan terus diupayakan dengan meningkatkan persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat dan peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Anggaran belanja fungsi perlindungan sosial

pemerintah pusat terus meningkat dari 1,7 persen (proporsi terhadap belanja Pemerintah Pusat) di tahun 2015 menjadi 12,3 persen pada tahun 2019, dan anggaran tersebut perlu terus ditingkatkan. Peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan meningkat dari 6 persen pada tahun 2015 menjadi 41,43 persen pada tahun 2019 untuk pekerja formal dan meningkat dari 1 persen pada tahun 2015 menjadi 3,57 persen pada tahun 2019 untuk pekerja informal, namun angka pencapaian ini belum mencapai dari target.

- Selain itu, memastikan kesempatan yang sama dan kesetaraan hukum juga merupakan salah satu bentuk penurunan kesenjangan. Salah satu upaya dalam kesetaraan hukum adalah dengan memastikan kebijakan yang tidak memihak dan diskriminatif. Jumlah kebijakan yang diskriminatif berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut HAM internasional perlu menurun, namun jumlah kebijakan belum menurun dari 421 pada jangka waktu 2010 – 2016, menjadi 438 pada tahun 2019. Penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan berhasil mencapai target 89,99 persen di tahun 2019.

Tantangan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan untuk menurunkan kesenjangan adalah masih adanya kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan, laju penurunan rasio Gini dan angka kemiskinan juga masih lambat, serta masih banyak data yang perlu diperbaharui serta keterpilahannya. Perluasan kepesertaan jaminan sosial serta keberlanjutan pembiayaan iuran sebagai jaring pengaman sosial juga masih menjadi tantangan.

Dalam upaya pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mengurangi kesenjangan, arah dan kebijakan yang dilakukan ke depannya, meliputi: 1) Mengentaskan kemiskinan; 2) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; 3) Memperkuat pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi; 4) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; dan 5) Melakukan pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan.

Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan



Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.

- Presentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau baru mencapai 56,51 persen pada tahun 2019 yang dihitung berdasarkan empat aspek minimal kelayakan hunian, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan serta akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak. Sementara itu, aspek yang berkontribusi tertinggi terhadap rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni adalah tidak adanya akses sanitasi layak sebesar 11,64 persen.
- Sampah perkotaan yang tertangani sebesar 67,40 persen (KLHK, 2019). Sisa dari sampah tersebut tidak tertangani dan dibuang langsung ke lingkungan sehingga sangat berpotensi menimbulkan pencemaran.

Tantangan dihadapi terkait isu di Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan antara lain, 1) Terbatasnya akses terhadap pembiayaan perumahan terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta berpenghasilan tidak tetap; 2) Pembinaan dan pengawasan di bidang perumahan dan kawasan permukiman belum optimal; dan 3) Tantangan penanganan sampah pada dukungan infrastruktur pembuangan dan pengangkutan sampah.

Berdasarkan Dokumen RPJMN 2020-2024, arah kebijakan terkait Tujuan 11 adalah: 1) meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; 2) pembangunan perkotaan, untuk Perencanaan Wilayah Metropolitan di Luar Jawa; 3) Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan pengurangan dan penggunaan kembali; dan 4).

Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab



Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

- Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan *the 10-Years Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns* di Indonesia. Sampai tahun 2020 telah terdapat 11 sektor kolaborasi tematik *quickwins* program SCP di Indonesia yaitu sektor industri, kehutanan, energi, pariwisata, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, komunikasi dan informasi, inovasi teknologi, keuangan, pertanian, kelautan dan perikanan.
- Penerapan SNI ISO 14001 bagi perusahaan di Indonesia terus mengalami peningkatan. SNI ISO 14001 merupakan standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Selama kurun waktu 2009 - 2018 jumlah perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan SNI ISO 14001 cenderung meningkat dari 794 perusahaan (2009) menjadi 1.944 perusahaan (2018)⁴.
- Produk ramah lingkungan yang teregister mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019. Tercatat pada tahun 2019 sebanyak 23 produk yang telah diregister sebagai produk yang memenuhi ekolabel tipe I. Angka ini naik signifikan dari tahun 2016 hanya 4 produk. Demikian pula dengan ekolabel tipe II dari 18 produk tahun 2016 menjadi 27 produk di tahun 2019.

Pelaksanaan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti: 1) Belum optimalnya intervensi kebijakan operasional mengenai penerapan prinsip-prinsip SCP dalam "*business cycle*" dan "*business process*" di pihak pemerintah, swasta dan masyarakat secara menyeluruh termasuk dalam hal pendanaan; 2) Adanya hubungan negatif antara

pertumbuhan ekonomi yang menurunkan kualitas lingkungan dan cadangan sumberdaya alam; 3) Belum optimalnya penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan untuk (konsep "*decoupling*") menjadi pembangunan yang berkelanjutan; dan 4) Belum lengkapnya ketersediaan data dan informasi mengenai pelaksanaan SCP di Indonesia.

Arah kebijakan untuk dapat memperkuat Tujuan 12, juga tercantum dalam RPJMN 2020-2024, melalui: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan; 2) Penanganan Limbah; 3) Pengembangan industri hijau dan 4). Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk sampah plastik.

⁴ <https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objid=18808772&objAction=browse&viewType=1>

Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim



Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim.

- Sampai dengan tahun 2019, capaian potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) adalah sebesar 23,46 persen dari *baseline* akumulatif. Adapun untuk capaian penurunan emisi GRK tahunan pada tahun 2019 adalah sebesar 20,77 persen atau 401.822,53 ribu Ton CO₂e. Sementara intensitas Emisi GRK pada tahun 2019 adalah sebesar 420 ton CO₂e/miliar rupiah yang berasal dari implementasi seluruh sektor pembangunan rendah karbon.
- Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI mengalami penurunan dari 169,6 di tahun 2015 menjadi 130,4 pada tahun 2019. Sementara itu, nilai kerugian ekonomi akibat bencana cenderung mengalami penurunan meskipun

fluktuatif. Pada tahun 2019, kerugian ekonomi akibat bencana sebesar 6,26 triliun rupiah (0,06 persen PDB). Adapun untuk jumlah korban yang meninggal dan hilang akibat bencana sebanyak 684 jiwa dan untuk korban yang terdampak dan mengungsi sebanyak 5.365.951 jiwa (2019).

Tantangan dalam penanganan perubahan iklim dan penanggulangan bencana antara lain adanya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik ancaman multi bencana. Sekitar 75 persen infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan/bahaya. Selain itu, tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah pun masih lemah.

Arah kebijakan untuk mengatasi hal tersebut ke depannya adalah: 1) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan 2) Pembangunan Rendah Karbon. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, melalui strategi penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim. Adapun untuk Pembangunan Rendah Karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, meliputi pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembangan industri hijau, serta rendah karbon pesisir dan laut.

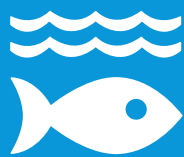
18/2014. Dengan penetapan ini, maka pemantauan WPP sebagai wilayah untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia dapat dilakukan secara seimbang.

- Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun dengan nilai tidak melebihi 80 persen dari total tangkapan lestari (*Maximum Sustainable Yield-MSY*). Pada tahun 2019 proporsi tangkapan jenis ikan masih berada pada kisaran nilai 56,6 persen, artinya tangkapan jenis ikan masih pada batas biologis yang aman.
- Selama kurun waktu 2015-2019 Indonesia telah berhasil meningkatkan jumlah luas kawasan konservasi perairan dari 17,30 juta ha (2015) dari target sebesar 16,5 juta ha di tahun 2015 menjadi 23,14 juta ha. Capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 20 juta Ha di tahun 2019. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang dalam rangka pemenuhan komitmen global dan didukung dengan komitmen pemerintah daerah menetapkan kawasan konservasi dalam rencana zonasi provinsi.

Berbagai tantangan yang muncul dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan antara lain, 1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif; 2) Belum termanfaatkannya potensi produksi perikanan dengan adanya peningkatan pemberantasan IUU fishing; 3) Belum optimalnya regulasi sebagai dasar pengaturan pemanfaatan bantuan pendanaan bagi nelayan skala kecil; 4) Belum optimalnya produktivitas dan kualitas hasil tangkapan perikanan yang menerapkan praktik berkelanjutan; dan 5) sebelas (11) WPP yang telah ditetapkan masih memerlukan peningkatan pengelolaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Arah kebijakan kedepannya yang akan diterapkan, adalah: 1) Menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP,

Tujuan 14 Ekosistem Lautan



Tujuan 14. Ekosistem Lautan.

- Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir. Hal ini didukung dengan melakukan penilaian stok perikanan komprehensif secara teratur di 11 lokasi WPP, mengembangkan Platform Perikanan Berkelanjutan untuk semua pemangku kepentingan, dan penataan perizinan; 2) Mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; 3) Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan serta perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; 4) Meningkatkan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan; 5) Mencegah dan memulihkan kerusakan sumber daya laut melalui konservasi dan merehabilitasi kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan pencegahan pencemaran laut; dan 6) Memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, dan merusak (*IUU Fishing dan Destructive Fishing*).

84.067,08 Ha, meskipun masih di bawah target sebesar 100.000 Ha.

- Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem pada tahun 2018 mencapai 622.861,59 Ha. Luas capaian ini telah memenuhi target tahun 2019 sebesar 500.000 Ha.
- Selama kurun waktu 2015-2019, jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks *Management effectiveness Tracking Tool* (METT) minimal 70 persen terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mendapat nilai METT minimal 70 persen telah mencapai 255 KPA.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Selama tahun 2019, jumlah KPHK (konservasi) dan KPHL (lindung) telah memenuhi target sebanyak 106 KPHK (target 100), 190 KPHL (target 182) sedangkan capaian KPHP (produksi) tercatat 347 (target 340).
- Selama kurun waktu 2015-2019, jumlah spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi mengalami peningkatan yang signifikan mencapai penambahan 24 spesies (2019). Angka ini telah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2019 sebesar 10 spesies.

Tantangan dalam mencapai Tujuan 15 adalah masih terdapatnya pelanggaran hukum di bidang SDA dan lingkungan hidup, seperti illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin, serta penguasaan hutan non-prosedural. Selain itu, terjadinya penyusutan luas habitat ideal satwa langka terancam punah di empat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi) yang didorong oleh peningkatan luas perkebunan monokultur yang semakin menekan tutupan hutan dan dapat mengakibatkan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Arah kebijakan kedepannya yaitu: 1) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2) Mengurangi laju deforestasi di Indonesia; serta 3) Mengurangi laju degradasi hutan.

Tujuan 15 Ekosistem Daratan



Tujuan 15. Ekosistem Daratan.

- Perubahan tutupan hutan dapat menyebabkan laju deforestasi semakin meningkat. Perubahan ini dipicu oleh kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga menyebabkan hilangnya tutupan hutan. Sampai tahun 2018 proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan mencapai 49,8 persen. Angka ini diprediksi akan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 50,6 persen.
- Selama kurun waktu 2015-2019, luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya terus mengalami peningkatan. Hasil capaian pada tahun 2019 cukup baik sebesar

Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh



Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

- Akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan sebagai upaya untuk memberikan akses pada keadilan kepada masyarakat khususnya kelompok rentan.
- Jumlah penerima akta kelahiran yang menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, baik untuk kategori anak maupun untuk anak di bawah usia 5 tahun sebagaimana diukur oleh indikator global meningkat menjadi 76,65 persen (2019) dari 72,65 persen (2015).
- Dari sisi tata kelola, proporsi pengeluaran pemerintah terhadap anggaran yang disetujui serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang juga menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya.
- Upaya pemberantasan korupsi yang masih belum optimal terlihat dari tren capaian IPAK sebesar 3,70 (2019) yang belum mencapai target 4 di tahun 2019. Pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan, dimana pada presentase instansi pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi Baik dan persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik masih rendah dan belum mencapai target.
- Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian menunjukkan kecenderungan menurun. Selain itu isu kekerasan terhadap anak masih perlu perhatian khusus selain karena datanya masih perlu terus dikembangkan mengingat metodologi survei yang berubah juga upaya pencegahan yang harus terus ditingkatkan.

- Masih rendahnya keterwakilan perempuan yang menduduki posisi atau jabatan sebagai pengambil keputusan di tingkat eksekutif dan di parlemen. Dari kuota 30 persen untuk keterwakilan perempuan di parlemen, tercatat pada tahun 2019, jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI sebesar 20,52 persen, DPRD Provinsi sebesar 17,53 persen dan DPRD Kabupaten/Kota sebesar 15,27 persen. Tren capaian Indeks Demokrasi Indonesia perlu mendapat perhatian terutama pada aspek Indeks Lembaga Demokrasi maupun Indeks Kebebasan Sipil. Sedangkan pada aspek Indeks Hak-Hak Politik, terlihat adanya perbaikan dimana capaian pada tahun 2019 sebesar 70,71, melampaui target pencapaian yang telah ditetapkan di 2019 yaitu sebesar 68.

Kualitas dan kapasitas layanan publik dalam merespon kebutuhan kelompok rentan masih menjadi tantangan utama dalam mencapai Tujuan 16, sehingga akses pada sistem yang responsif pun tidak merata. Masih ditemukan pula tantangan di isu peningkatan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif, serta bantuan hukum untuk kelompok rentan, serta ketersediaan data dan informasi yang belum memadai sebagai dasar perencanaan pembangunan yang inklusif.

Arah dan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut adalah: 1). Konsolidasi Demokrasi; 2). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 3). Penegakan Hukum Nasional; dan 4). Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan



Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

- Mobilisasi sumber daya domestik merupakan salah satu modal utama dalam

pelaksanaan TPB/SDGs. Salah satunya bersumber dari rasio penerimaan pajak terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB), dengan pencapaian yang belum signifikan yaitu sebesar 9,76 persen (2019) dari target >12 persen yang telah ditargetkan.

- Capaian ekspor nonmigas memiliki kecenderungan fluktuasi yang menurun sedangkan pencapaian target Free Trade Agreement lebih baik dalam beberapa tahun terakhir.
- Indikator penting yang mendukung target jaringan konektivitas besar untuk menghubungkan seluruh penjuru negeri adalah tercapainya 100 persen pembangunan jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional, serta meningkatnya pengguna internet secara signifikan selama hampir 10 tahun terakhir yang telah mencapai 64,8 persen (2019) dari 17,6 persen (2010).
- Target terkait data statistik di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang positif antara lain indikator terkait jumlah pengguna data untuk perencanaan pembangunan yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir serta terjadinya perbaikan manajemen dan pelayanan data oleh BPS juga telah berkontribusi pada kepuasan pengguna data. Namun Indonesia masih belum dapat mencapai upaya dibangunnya vital statistics registration untuk mencatat kematian dan kelahiran.
- Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerja Sama Triangular (KST) yang merupakan dua langkah terkombinasi Indonesia untuk lebih aktif dalam kerja sama pembangunan internasional terus meningkat komitmennya. Melalui KSST komitmen Indonesia diwujudkan dengan dukungan kepada negara-negara berkembang lain dalam menerapkan SDGs dan memastikan tidak ada seorangpun tertinggal di negara-negara mitra.

Tujuan 17 sebagai Tujuan yang merupakan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) dan berupaya merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan TPB/SDGs masih menghadapi tantangan. Diantaranya berkaitan dengan isu Pembayaran utang, Teknologi Informasi dan Komunikasi, penerapan penurunan tarif

perdagangan, serta Ketersediaan data dan statistik dalam penerapan TPB/SDGs.

Arah dan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai target di Tujuan 17 adalah: 1) Optimalisasi penerimaan negara; 2) Peningkatan nilai tambah ekonomi yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya peningkatan remitansi pekerja migran; 3) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi; 4) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); 5) Penuntasan infrastruktur TIK; 6) Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi; dan 7) Memperkuat kerja sama pembangunan internasional.



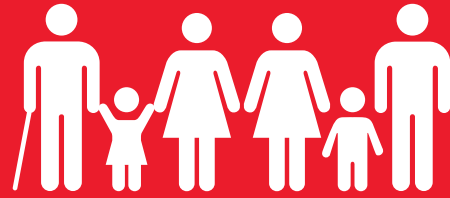
We support the Sustainable Development Goals



**TUJUAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**



1 TANPA KEMISKINAN



Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun



I. PENDAHULUAN

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun merupakan tujuan pertama dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan perlindungan sosial, meningkatkan akses layanan dasar bagi seluruh penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, dan membangun ketahanan terhadap dampak bencana alam dan non alam yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada sumber daya dan mata pencaharian masyarakat.

Pembahasan Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan difokuskan pada capaian tingkat kemiskinan, serta cakupan perlindungan sosial dan pelayanan dasar, dengan cakupan indikator TPB/SDGs seperti : (1) Tingkat kemiskinan ekstrim atau persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional pada *Purchasing Power Parity (PPP)* dengan batas US\$ 1.9 per kapita/hari; (2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional; (3) Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan; (4) Persentase rumah tangga 40% terbawah yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak; dan (5) Persentase rumah tangga 40% terbawah yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Selain itu diuraikan pula tantangan dan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

II. STATUS CAPAIAN

- Tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun. Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP USD 1,9 per kapita/hari) berhasil diturunkan secara

¹ PPP dengan batas US\$ 1.9 yang sama/flat mulai dari periode 2009-2018

² Garis Kemiskinan (GK) Nasional yang digunakan sesuai dengan perkembangan GK di setiap tahun



signifikan dari 18,43% pada tahun 2009 menjadi sekitar 2,7% pada tahun 2019..

- Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional berhasil diturunkan dari 14,15% pada tahun 2009 menjadi 9,22% pada tahun 2019. Capaian Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan nasional sebesar satu digit yang dimulai pada Maret tahun 2018 (9,82%) merupakan kinerja pertama dalam sejarah Indonesia.
- Program Keluarga Harapan (PKH) terus ditingkatkan untuk memastikan keluarga dengan status sosial ekonomi terendah mendapatkan akses layanan dasar melalui pemberian bantuan untuk 9,8 juta orang pada tahun 2019 dengan anggaran mencapai 32,7 Triliun Rupiah.
- Masyarakat miskin dan rentan telah memperoleh akses air minum layak mencapai 61,15% pada tahun 2015, dan terus meningkat menjadi 84,91% pada tahun 2019. Selain itu, akses sanitasi layak pada kelompok masyarakat miskin dan rentan juga mengalami peningkatan dari 47,08% menjadi 66,57% pada kurun waktu yang sama. Meskipun mengalami kemajuan kedua indikator tersebut belum mampu memenuhi target yang diharapkan.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

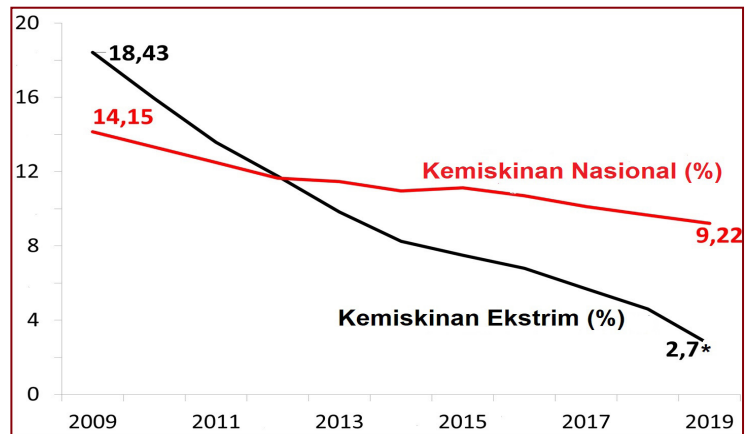
Tingkat Kemiskinan di Indonesia Menunjukkan Tren Menurun.

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 1.1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.							
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim.*	Bank Dunia	%	7,5	PM	2,7* (2019)	●
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS Susenas	%	11,13	8,5-9,5	9,22 (2019)	●

Catatan: Indikator 1.1.1 Tingkat Kemiskinan Ekstrim tidak terdapat di Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs 2015-2019, namun indikator ini dilaporkan saat ini untuk memperdalam perbandingan analisis kemiskinan di tingkat global dan tingkat nasional. (Angka Tahun 2019, merupakan hasil perhitungan sementara)

Upaya Pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan terlihat dari menurunnya tingkat kemiskinan dalam dasawarsa terakhir. Tingkat kemiskinan berdasarkan perhitungan *purchasing power parity* (PPP) USD 1,9 per kapita/hari (Bank Dunia), pada tahun 2019 mencapai sekitar 2,7% yang menurun signifikan dari 18,43% pada tahun 2009. Sementara itu, sesuai dengan garis kemiskinan nasional pada tahun 2019 penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berhasil turun menjadi 9,22% dari 14,15% pada tahun 2009.

Tahun	Kemiskinan ekstrim (1,9 USD)	Kemiskinan Nasional
2009	18,43	14,15
2010	15,95	13,33
2011	13,58	12,36
2012	11,76	11,66
2013	9,83	11,47
2014	8,25	10,96
2015	7,5	11,13
2016	6,8	10,70
2017	5,7	10,12
2018	4,6	9,66
2019	2,7*	9,22



Gambar 01. Perkembangan Pengurangan Kemiskinan Ekstrim dan Garis Kemiskinan Nasional, 2009-2019.

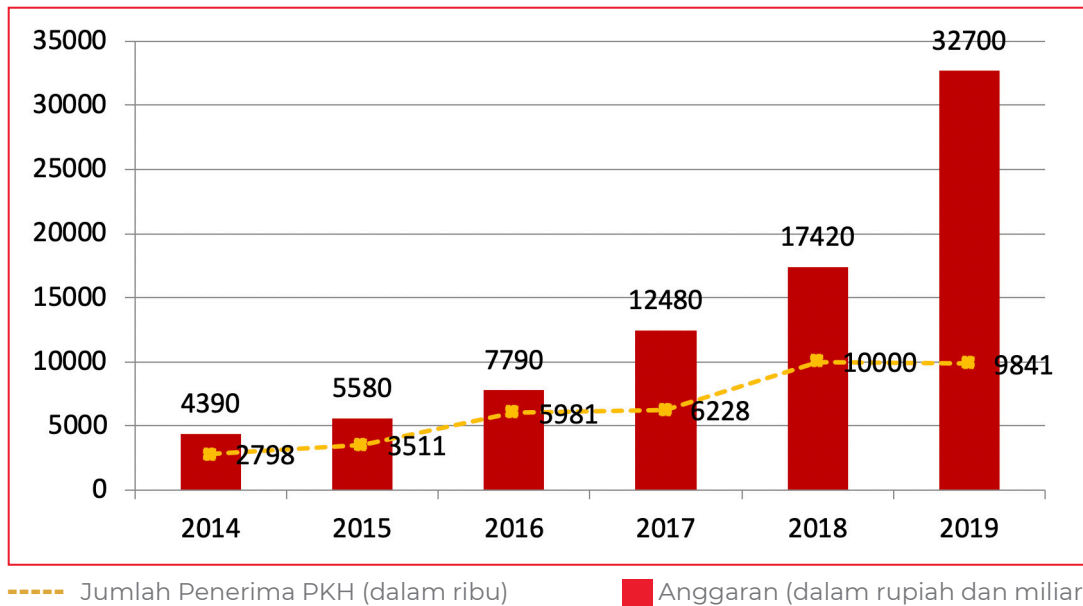
Sumber : Bank Dunia dan BPS Indonesia (Kondisi September).

Catatan*: Untuk Kemiskinan Ekstrim Tahun 2019 merupakan hasil perhitungan sementara.

Perlindungan Sosial.

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
1.3.1.(d)	Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DTKS Kementerian Sosial	Keluarga	3 Juta/ 2.8 Juta (2014)	10 Juta	9,8 Juta	●

Dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan, penataan bantuan sosial pada Program Keluarga Harapan/PKH (Bantuan Tunai Bersyarat) dilakukan melalui pemutakhiran pendataan penerima manfaat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan perluasan cakupan secara bertahap. Untuk memastikan keluarga dengan status sosial ekonomi terendah mendapatkan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, bantuan anggaran untuk cakupan penerima PKH tahun 2019 mencapai 32,7 Triliun Rupiah. Anggaran ini bertambah dua kali lipat dari tahun sebelumnya karena adanya perubahan mekanisme pemberian manfaat dari flat ke non-flat (pemberian bantuan mengikuti komposisi keluarga). Sejak tahun 2017, bagi keluarga miskin dengan penyandang disabilitas atau lansia juga diberikan bantuan melalui program ini.



Gambar 02.

Tren Jumlah rumah tangga dalam juta jiwa yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan Tahun 2014-2019.

Sumber: Kementerian Sosial, berbagai tahun

B. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS.

Pelayanan Dasar.

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p>							
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas Kor BPS	%	61,15 (2015)	100	84,91	▼
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas Kor BPS	%	47,08% (2015)	100	66,57	▼

Catatan: Data tahun 2015 dan 2019 diambil dari Dashboard BPS.

Akses terhadap layanan sumber air minum layak terutama untuk masyarakat miskin (kelompok penduduk dengan kesejahteraan 40% terendah) senantiasa ditingkatkan. Namun demikian belum mampu mencapai target yang direncanakan, yaitu 100% pada tahun 2019, proporsi masyarakat miskin dan



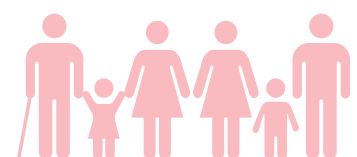
rentan yang telah memperoleh akses air minum layak mencapai 61,15%, dan terus meningkat menjadi 84,91% pada tahun 2019. Selain itu, akses sanitasi layak pada kelompok masyarakat miskin dan rentan juga mengalami peningkatan dari 47,08% pada tahun 2015 menjadi 66,57% pada tahun 2019.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI.

Tantangan utama yang dihadapi adalah laju penurunan tingkat kemiskinan yang semakin melambat. Kemiskinan kronis (*hard core poverty*) menunjukkan adanya penduduk yang selalu dibawah garis kemiskinan untuk periode yang lama. Semakin rendah tingkat kemiskinan, maka semakin mendekati kemiskinan kronis. Kemiskinan yang semakin menyentuh kronis memerlukan pendekatan dan strategi yang berbeda dan lebih terintegrasi. Selain permasalahan penduduk miskin kronis, tingginya penduduk yang rentan jatuh miskin juga merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia, terutama jika terjadi guncangan bencana (ekonomi, sosial, alam, maupun non-alam).

Selain itu, beberapa tantangan lain antara lain: 1) penyaluran bantuan sosial secara non-tunai yang belum merata terutama di daerah-daerah sulit dengan kondisi geografis sulit dan infrastruktur yang belum memadai; 2) permasalahan akurasi data yang menyebabkan masih tinggi exclusion dan inclusion error; dan 3) keterkaitan program yang berbasis bantuan dan pengurangan beban ke strategi peningkatan pendapatan yang belum optimal dilaksanakan.

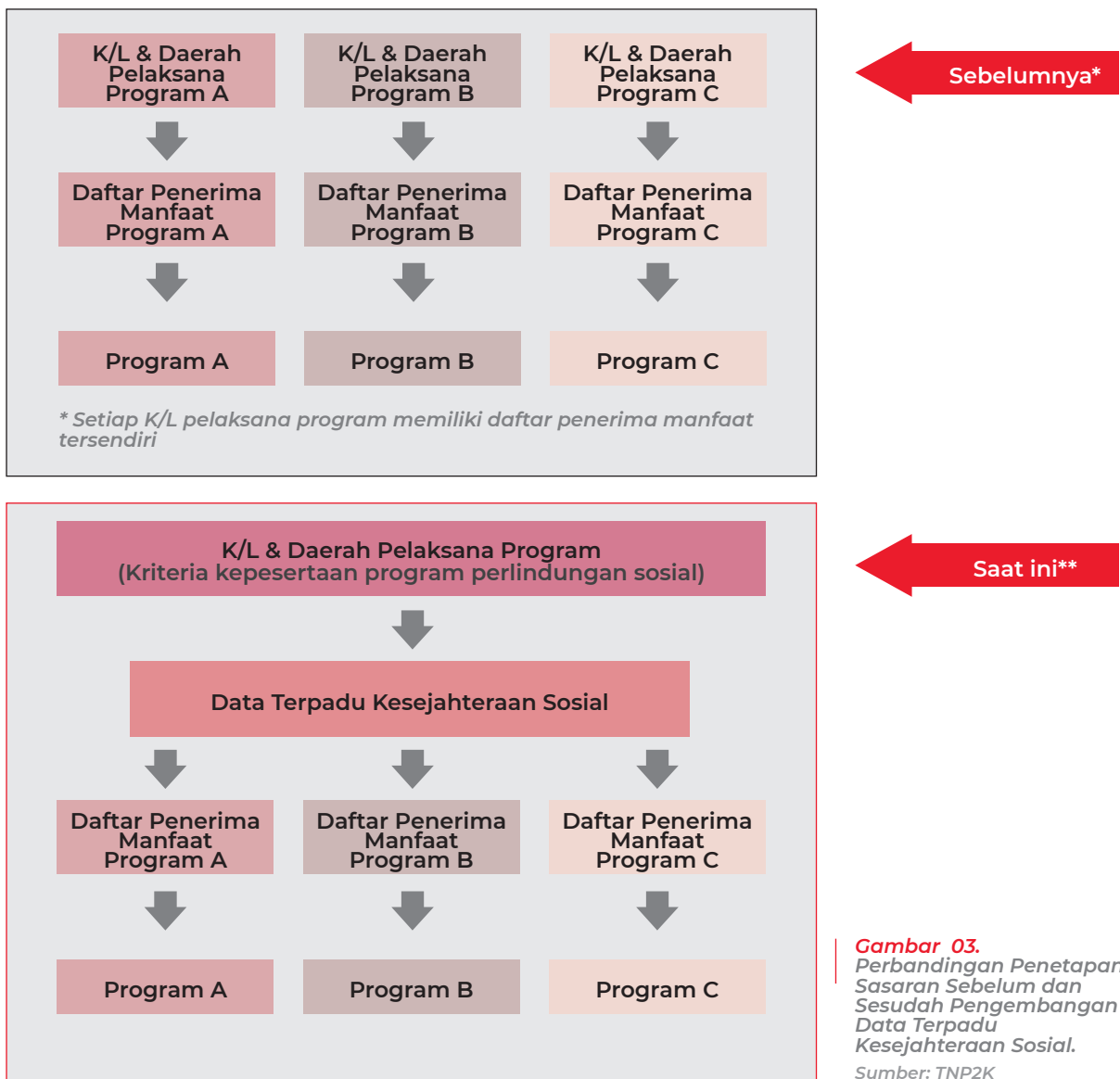
Terkait universal akses layanan dasar, tantangan capaian akses air bersih dan sanitasi untuk kelompok pendapatan 40% terbawah adalah dari infrastruktur yang belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia terutama daerah-daerah sulit dengan tingkat kemiskinan tinggi, selain itu, target pencapaian ini juga perlu didukung oleh kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, serta melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat agar program dapat diterima secara berkelanjutan.



III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS.

Pengembangan basis data terpadu mendorong komplementaritas antarprogram. Dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) atau yang saat ini disebut dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial menjadi lebih terfokus pada kelompok sasaran yang membutuhkan prioritas. Pemerintah mengembangkan DTKS yang berisikan informasi nama, alamat dan karakteristik lainnya yang mencakup sekitar 40% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Saat ini, pengelolaan DTKS dilakukan secara bersama lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.





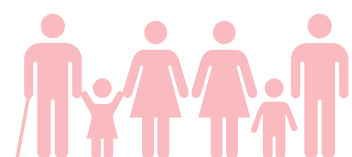
B. PEMANFAATAN DTKS UNTUK PENAJAMAN LOKASI PROGRAM

Hingga saat ini BDT telah diakses oleh 21 Kementerian dan Lembaga, dengan 56 akses data diberikan. Selain itu, DTKS juga telah diakses oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG sebagai sistem informasi pengelolaan satu data terpadu untuk penanggulangan kemiskinan. Selain program-program di Kementerian Sosial, DTKS juga dimanfaatkan untuk program-program lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, misalnya subsidi listrik dan gas, dan juga digunakan untuk program jaminan kesehatan nasional, termasuk untuk penanganan krisis/bencana. Semakin luasnya penggunaan DTKS sebagai basis analisis dan pemetaan kemiskinan akan mempertajam Pemerintah dan berbagai para pelaku lainnya untuk menysasar kantong-kantong kemiskinan, mengembangkan berbagai inovasi pemenuhan kebutuhan dasar dan kesempatan berusaha, serta melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang lebih *pro-poor* dan tepat sasaran.

C. PROGRAM PEDULI UNTUK AKSES JKN-KIS, PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI)

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) hadir melalui Program Peduli untuk mengoptimalkan implementasi Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam pemenuhan hak - hak dasar anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, PKBI fokus kepada Anak yang Mengalami Pidana Penjara (AMPP) yang belum mendapatkan identitas diri dan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga 1.267 anak diajukan sebagai peserta penerima JKN – KIS. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh PKBI di 8 wilayah intervensi Program terdapat 330 anak yang sudah mendapatkan layanan identitas dan 40 anak lainnya berhasil mendapatkan JKN.

Program peduli berupaya melakukan sosialisasi, advokasi dan memfasilitasi berbagai pihak untuk membangun ruang-ruang diskusi dan interaksi sehingga dapat membangun kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak dalam hal pemenuhan kebutuhan AMPP. Kerja-kerja PKBI di dalam Program Peduli berhasil membangun komitmen antara OPD, Masyarakat, *Stakeholder* dan Petugas LPKA untuk saling berkolaborasi dalam rangka memenuhi hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) melalui beberapa forum seperti forum anak dan forum keluarga, forum warga dan forum multistakeholder. Program ini telah berjalan di beberapa Provinsi di Indonesia yaitu Sumsel (LPKA Klas I Palembang, Klas II Bengkulu, Klas II Jakarta, Klas II Bandung, Klas I Blitar, Klas I Kupang dan Klas II Maros Sulawesi Selatan sejak tahun 2014 hingga saat ini.

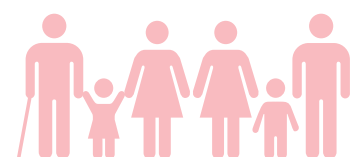




IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Arah kebijakan untuk upaya percepatan penurunan kemiskinan ke depan sesuai dengan RPJMN 2020-2024 antara lain dengan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran yang mencakup 1) integrasi penyaluran bantuan sosial pangan dan subsidi energi tepat sasaran (listrik dan LPG); 2) integrasi penyaluran bantuan tunai bersyarat untuk kesehatan dan pendidikan, yang menyediakan insentif untuk mendorong partisipasi sekolah hingga perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan; 3) peningkatan sinergi DTKS dengan data dasar kependudukan serta basis data program bantuan sosial lainnya; 4) perluasan dan penguatan penyaluran bantuan sosial non-tunai yang menyediakan berbagai pilihan saluran dan instrumen pembayaran yang saling terkoneksi; dan 5) penguatan fungsi pendampingan untuk fasilitasi pendataan dan pelaksanaan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku penerima manfaat. Selain itu, untuk mendukung peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin dan rentan, maka diperlukan pendampingan dan fasilitasi pendanaan lanjutan bagi usaha produktif kelompok miskin dan rentan yang prospektif.

Beberapa kebijakan tambahan untuk melengkapi hal tersebut terutama dalam mitigasi permasalahan kebencanaan adalah melalui reformasi perlindungan sosial: 1) disiplin perbaikan data serta pengembangan sistem pendataan terintegrasi menuju registrasi sosial ekonomi 100 persen, sehingga permasalahan ketidaktepatan data bisa dikurangi; 2) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif terhadap kebencanaan (alam, sosial, ekonomi, dan kesehatan); 3) pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan berkesinambungan; 4) pengembangan interoperabilitas sistem serta mekanisme distribusi untuk memudahkan penerima manfaat mengambil bantuan serta penggunaan PT POS maupun ojek online untuk daerah-daerah yang belum terjangkau mekanisme digital; dan 5) integrasi dan koordinasi bantuan sosial dan jaminan sosial menggunakan satu data paling mutakhir.





V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGs

TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 1.1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.</p>							
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Bank Dunia	%	7,5	PM	2,7* (2019)	●
<p>Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</p>							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS Susenas	%	11,13	8,5-9,5	9,22 (2019)	●
<p>Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</p>							
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BDT BPS, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial	%	51.8 (Oktober 2014)	95	Evaluasi RPJMN: 82,50 (prognosa 2019); Data Dit. PKKS: 83,6	▼
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	PBDT BPJS Ketenagakerjaan: Sakerjas BPS	%	Formal; 6	100	39,79 juta (2019)	●
				Informal: 1	10	PM	●
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	DTKS Kementerian Sosial	%	0,83	0,57	1,00	●
1.3.1.(d)	Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DTKS Kementerian Sosial	Keluarga	3,51 juta	10 Juta	9,8 Juta	●

Catatan*: Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2019 merupakan hasil perhitungan sementara



TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p>							
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	70,25	70	81,02	●
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	SDKI BKKBN dan BPS	%	RAN: 54,9 (2012) Dashboard TPB/SDGs: 59,72 (2015)	63	53,07	▼
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)	SDKI	%	RAN: 61,9 (2012); Dashboard TPB/SDGs: 64,72 (2015)	66	62,54	▼
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas Kor BPS	%	RAN: 61,15 (2015);	100	84,91	▼
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas Kor BPS	%	RAN: 47,08 (2015);	100	66,57	▼
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas Kor BPS	%	RAN: 13,8 (2015); Dashboard TPB/SDGs: 9,21 (2015); VNR: 12,60 (2015)	0	13,86	▼
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas Kor BPS	%	96,86	94,78	97,62	●



TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas Kor BPS	%	74,21	82	78,23	▼
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas Kor BPS	%	49,82	67,48	54,35	▼
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas Kor BPS	%	71,59	77,40	80,44	●
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas Kor BPS	%	95,58	100	98,01	▼

1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana	DIBI BNPB	Jiwa	NA	NA	meninggal dan hilang: 375 Ter-dampak dan meng-ungsi: 2,594,849 (2019)	●
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BNPB	Lokasi	-	-	39	-
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Kementerian Sosial, BNPB, Podes	Jiwa	16 juta	140.000	150.131	-
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Kementerian Sosial, BNPB, Podes	Jiwa		3.800	7.595	-
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; BNPB; Podes	Daerah	100	450	NA	NA



TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN

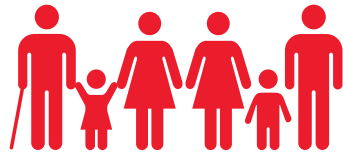
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BNPB	Indeks Risiko	169,4	144	135,8 (2018)	●
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	DIBI BNPB	Juta Rupiah	2.647.333 (2015)	NA	4.742.405 (2017)	●
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BNPB; Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen	69 (2015)	NA	26 (2018)	▼
<p>1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</p>							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Kementerian Keuangan	Rupiah	PM	PM	PM	●
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Kementerian Keuangan	Miliar Rupiah	Pendidikan: 156.186	PM	PM	●
				Kesehatan: 24.208,5	PM	PM	
				Perlindungan Sosial: 22,615,8	PM	PM	



DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2019). *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2017). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2018). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2018*. Jakarta: BAPPENAS.
- BNPB. (2017). *Laporan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)*. Jakarta: BNPB
- BNPB. (2015). *Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2015-2019*. Jakarta: BNPB
- BPJS Kesehatan. (2019). *Publikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan – Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan*. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2019). *Publikasi Sistem Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan– Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- BPS. (2012). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2015). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2015). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2019). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Buku Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 – Direktorat Jenderal Anggaran*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Sosial. (2019). *Laporan Basis Data Terpadu dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- PKBI. (2020). *Laporan Program Peduli – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia*
- TNP2K. (2017). *Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Bank Dunia (2015). *A Global Count of the Extreme Poor in 2012 - Data Issues, Methodology and Initial Results*. Poverty Global Practice Group & Development Data and Research Groups. Bank Dunia Group.







We support the Sustainable Development Goals

2 TANPA KELAPARAN



Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

TARGET 2-1



TARGET 2-2



TARGET 2-3



TARGET 2-4



TARGET 2-5



TARGET 2-A



TARGET 2-B



TARGET 2-C



I. PENDAHULUAN

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, gizi yang baik serta pertanian yang berkelanjutan pada tahun 2030 merupakan tujuan kedua dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Masyarakat membutuhkan akses pangan yang lebih baik serta promosi pertanian berkelanjutan yang lebih luas. Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani skala kecil menjadi prioritas untuk memastikan setiap orang memperoleh konsumsi pangan yang cukup dan berkualitas untuk menjalani hidup sehat.

Laporan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan ini akan membahas capaian perbaikan gizi dan penyediaan pangan, dengan cakupan indikator SDGs sebagai berikut: (1) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan; (2) Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan; (3) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita; (4) Prevalensi malnutrisi (*wasting*) anak pada usia kurang dari 5 tahun, (5) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan (6) Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Selain itu diuraikan pula tentang tantangan dan kebijakan untuk mengatasi masalah kekurangan gizi dan penyediaan pangan.

II. STATUS CAPAIAN

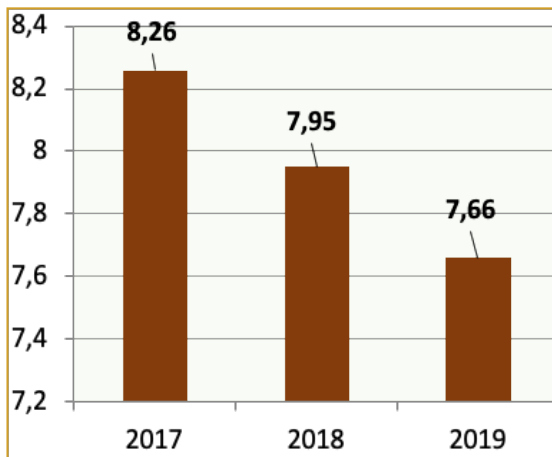
- Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) di Indonesia membaik yaitu dari sebesar 10,73% pada tahun 2015 menjadi 7,66% pada tahun 2019.
- Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan membaik yaitu dari 8,66% pada tahun 2017 menjadi 5,42% pada tahun 2019.
- Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita cenderung menurun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tetapi proporsinya masih cukup tinggi yaitu sebesar 27,7% pada tahun 2019. Prevalensi balita kurus (*wasting*) menurun cukup signifikan dari 13,6% (2007) menjadi 7,4% (2019).
- Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Indonesia membaik, ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) dari 81,4 (2013) menjadi 90,8 (2019).

A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

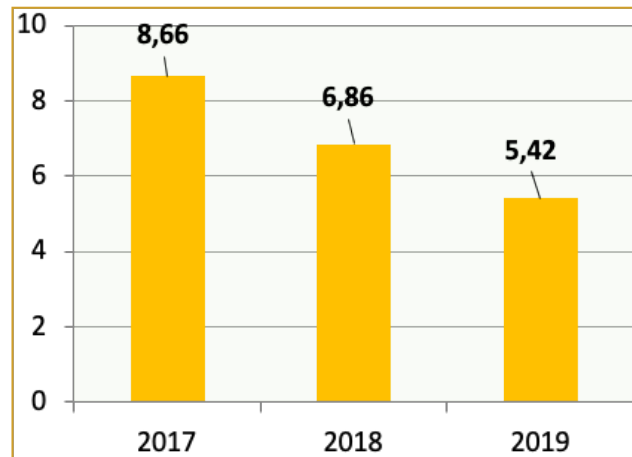
Akses Konsumsi Dan Kecukupan Pangan Makin Membaik.

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Susenans	%	10,73 (2015)	6,69 (road-map)	7,66	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. (<i>Food Insecurity Experience Scale</i>)	Susenans	%	8,66 (2017)	5,79 (road-map)	5,42	

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) di Indonesia cenderung membaik yaitu dari sebesar 10,73% pada tahun 2015 menjadi 7,66% pada tahun 2019. Selain itu, untuk Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale*) menunjukkan capaian yang baik dengan penurunan dari 8,66% pada tahun 2017 menjadi 5,42% pada tahun 2019.



Gambar 01. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)
Sumber : Susenas 2015-2019



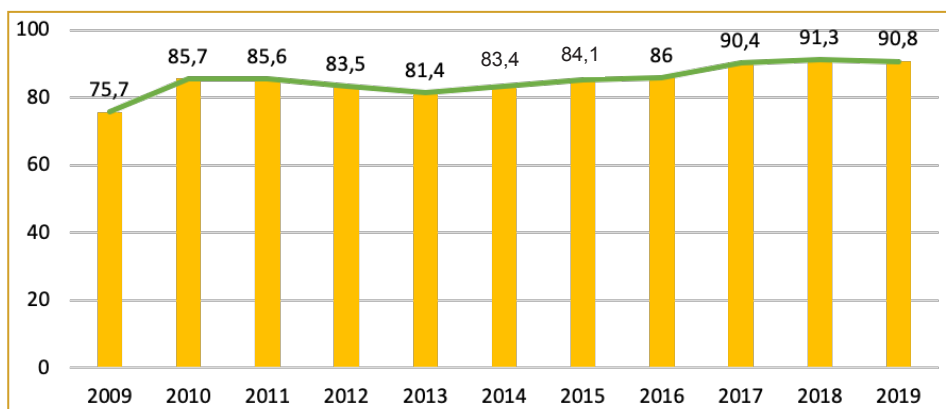
Gambar 02. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES)
Sumber : Susenas 2017-2019

Pola Konsumsi Pangan Penduduk Makin Membaik.

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.2 (c)	(i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita	Laporan Kementerian Pertanian	Skor	84,1 (2015)	92,5	Publikasi BKP: 90,8 (2019)	▶
			Kg	40,9 kg (2015)	54,5	PM	PM
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.							
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Saker-nas dan Data Nilai Tambah Pertanian BPS	Juta rupiah per tenaga kerja	30,09 (2015 -road-map) / 41,21	36,19 (road-map)	PM	▶

Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Indonesia membaik, ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) dari 75,7 (2009) menjadi 90,8 (2019). Hal ini menunjukkan bahwa keragaman pangan, pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi, aksesibilitas fisik dan ekonomi telah meningkat dari waktu ke waktu. Namun, keragaman konsumsi pangan tetap menjadi tantangan untuk terus ditingkatkan, hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan skor PPH 90,8 pada tahun 2019 dari 90,8 pada tahun 2018. Sehingga, penganeekaragaman

konsumsi pangan masih perlu ditingkatkan, utamanya konsumsi pangan hewani, serta sayur dan buah.



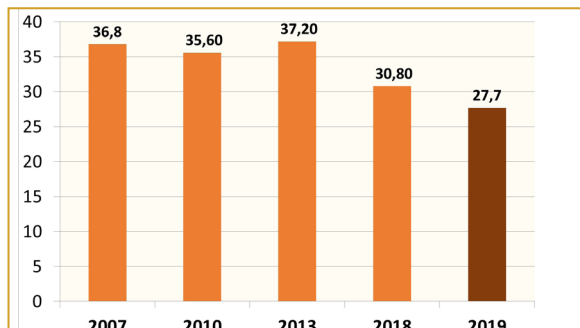
Gambar 03.

Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Tahun 2009-2019.
Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, 2009-2019.

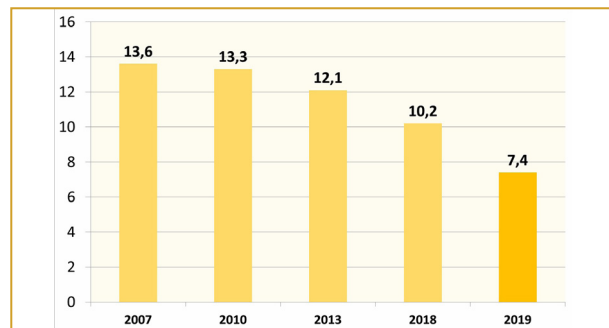
Perbaiki Gizi

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p>							
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Risk-esdas, Integrasi SSGBI dan Susenas	%	37,2 (2013)	29,1 (road-map)	27,7 (2019)	●
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (<i>wasting</i>) anak pada usia kurang dari 5 tahun	Risk-esdas, Integrasi SSGBI dan Susenas	%	12,1 (2013)	8,7 (road-map)	7,4 (2019) Integrasi SSGBI dan Susenas	●

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita cenderung menurun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, meskipun proporsinya masih cukup tinggi yaitu sebesar 27,7% pada tahun 2019. Untuk dapat memenuhi target RPJMN 2024 yaitu penurunan *stunting* pada balita menjadi 14% maka dibutuhkan laju penurunan *stunting* di tiap tahunnya sebesar 2,7%. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat rata-rata kasus penurunan *stunting* di dunia sekitar $\pm 1\%$ di tiap tahunnya. Sedangkan prevalensi balita kurus (*wasting*) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 12,1% (2013) menjadi 7,4% (2019).



Gambar 04.
Prevalensi Balita Stunting, 2007-2018
Sumber: Riskesdas, Integrasi SSGBI dan Susenas



Gambar 05.
Prevalensi Balita Wasting, 2007-2018
Sumber: Riskesdas, Integrasi SSGBI dan Susenas

B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

Penurunan Anemia pada Ibu Hamil belum mencapai harapan

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Riskesdas	%	37,1	28	48,9 (2018)	▼

Prevalensi anemia pada ibu hamil meningkat dari 37,1% pada tahun 2015 menjadi 48,9% pada tahun 2018. Anemia pada ibu hamil dapat mengakibatkan goyahnya pertumbuhan janin, risiko kematian ibu, bayi berat lahir rendah (BBLR), keguguran, dan kelahiran prematur. Risiko terbesar terjadi di kalangan wanita muda.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan dalam hal mengatasi permasalahan kekurangan gizi pada anak, erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas Kesehatan.

Dalam penyediaan pangan, tantangan dan masalah yang dihadapi antara lain: (1) konversi lahan pertanian terus berlangsung sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas; (2) degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta meningkatnya persaingan pemanfaatan air untuk penggunaan lain; (3) usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani



yang semakin tua (*aging farmer*) dan pendidikan formal yang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, dan pasar; (4) frekuensi dan intensitas kejadian bencana akibat perubahan iklim ekstrim semakin tinggi; (5) proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (*food losses and waste*) masih besar; (6) prasarana logistik dan distribusi pangan belum merata terutama di wilayah timur Indonesia, menyebabkan kecukupan dan kontinuitas penyediaan pangan terbatas dan berdampak pada risiko rentan pangan di wilayah tersebut; dan (7) rendahnya akses petani terhadap sumber pembiayaan dan kemitraan yang setara antara usaha pertanian skala kecil dan besar masih sangat terbatas.

III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Kampung Zimba: Wisata Edukasi Gizi Seimbang & Anti Stunting.

Kampung Zimba adalah Kampung Wisata Gizi Seimbang dan Anti Stunting yang berlokasi di Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Zimba adalah singkatan dari Gizi Seimbang. Kampung Zimba merupakan wahana edukasi yang melibatkan partisipasi warga, ahli gizi dari Puskesmas dan IPB serta relawan dari para pemuda desa. Kreasi wahana permainan edukasi gizi seimbang & anti *stunting*, melibatkan masyarakat sebagai subyek meningkatkan aspek pendidikan, kesehatan & ekonomi.

Zimbaland adalah kampung wisata, permainan, edukasi untuk peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman gizi seimbang dan program anti *stunting*.

Target dari *Project* Zimbaland adalah Ibu-ibu dan anak-anak di Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Kader dan Petugas Medis adalah sasaran program Anti *Stunting* di Kampung Zimba Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Terdapat 407 ibu menyusui (yang memiliki anak baduta-bawah dua tahun), 110 ibu hamil dan 50 kader posyandu.



Gambar 06. Presentasi Kampung Zimba di Acara SDGs Annual Conference 2018 yang dilakukan oleh Baban Sarbana yaitu Tokoh Pemuda Penggagas Kampung Zimba

Project Zimbaland melibatkan pemuda desa sebagai operator wahana edukasi, ibu-ibu sebagai penyedia olahan gizi seimbang, ahli gizi sebagai supervisor, pemerintah sebagai pendukung regulasi, dunia bisnis sebagai mitra. *Project Zimbaland* sudah dimulai sejak tahun 2016 melalui kreasi papan permainan edukasi gizi seimbang dan kegiatan pelatihan gizi seimbang. *Project Gizi Seimbang* dilakukan dengan membuat papan permainan gizi seimbang, melakukan sosialisasi melalui pelatihan, mengadakan *cooking class* dengan olahan gizi seimbang, membuat *mini project* di satu wilayah yang terdiri dari 90 keluarga.

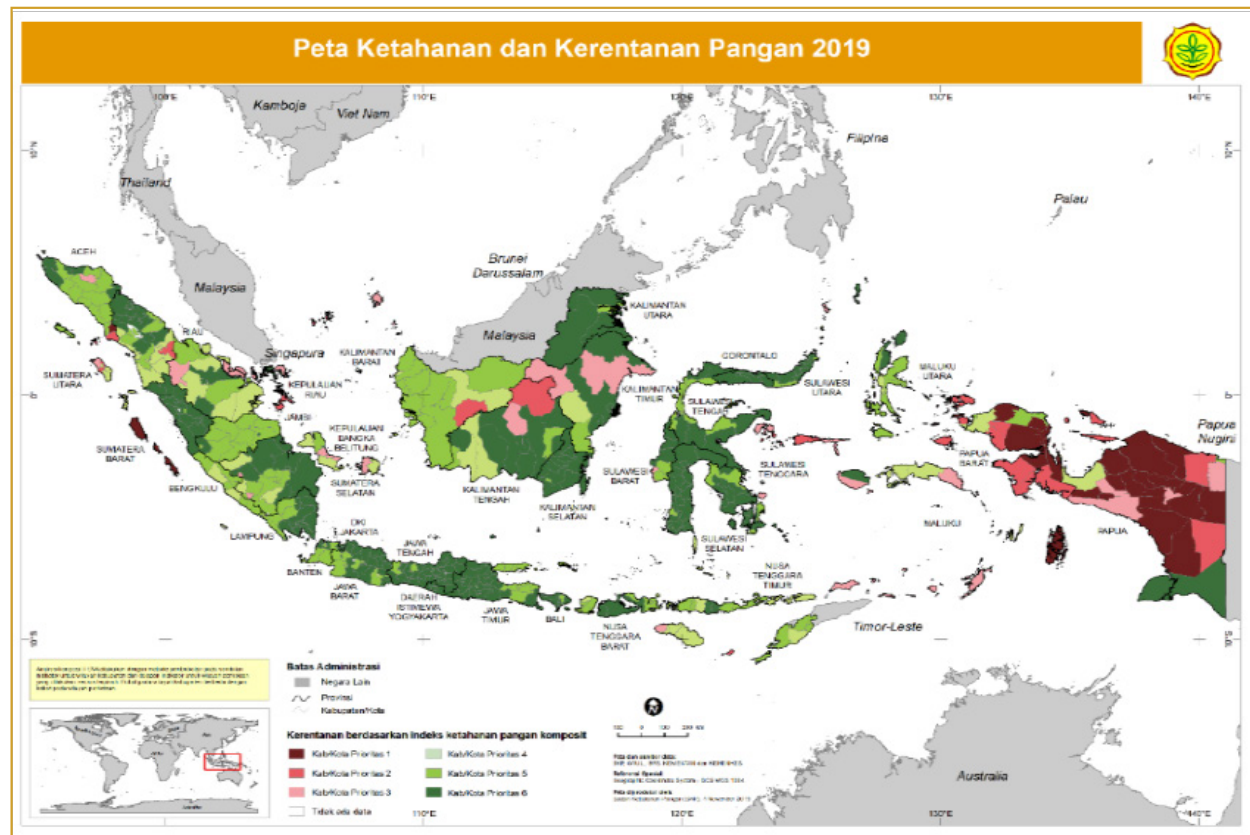


Gambar 07. Contoh Kegiatan yang dapat dilakukan di Kampung Zimba

Inovasi Gizi Seimbang dilakukan melalui metode bermain dan bercerita dengan media pembelajaran boardgame (papan permainan), kartu dongeng, *adventure game* dan *fun cooking class* dengan materi olahan tradisional. *Project Gizi Seimbang* mengubah warga yang awalnya tidak mengetahui informasi tentang gizi seimbang, bisa mengetahui tentang gizi seimbang dan diharapkan mengubah perilaku sehingga bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa. *Project Gizi Seimbang* berdampak pada pendidikan yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat; kesehatan melalui perubahan perilaku yang terkait dengan pola hidup sehat yang dinamakan Revolusi Meja Makan (menanam yang dimakan, memakan yang ditanam); dan ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan untuk pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi.

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganana kerawanan pangan dan gizi, Peta ketahanan dan kerentanan pangan merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Peta ketahanan dan kerentanan pangan menyediakan informasi lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.



Selain menyediakan informasi lokasi wilayah rentan pangan, peta ketahanan dan kerentanan pangan ini juga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. FSVA disusun menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. FSVA memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program intervensi baik di tingkat pusat dan daerah dengan melihat indikator utama yang menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan.

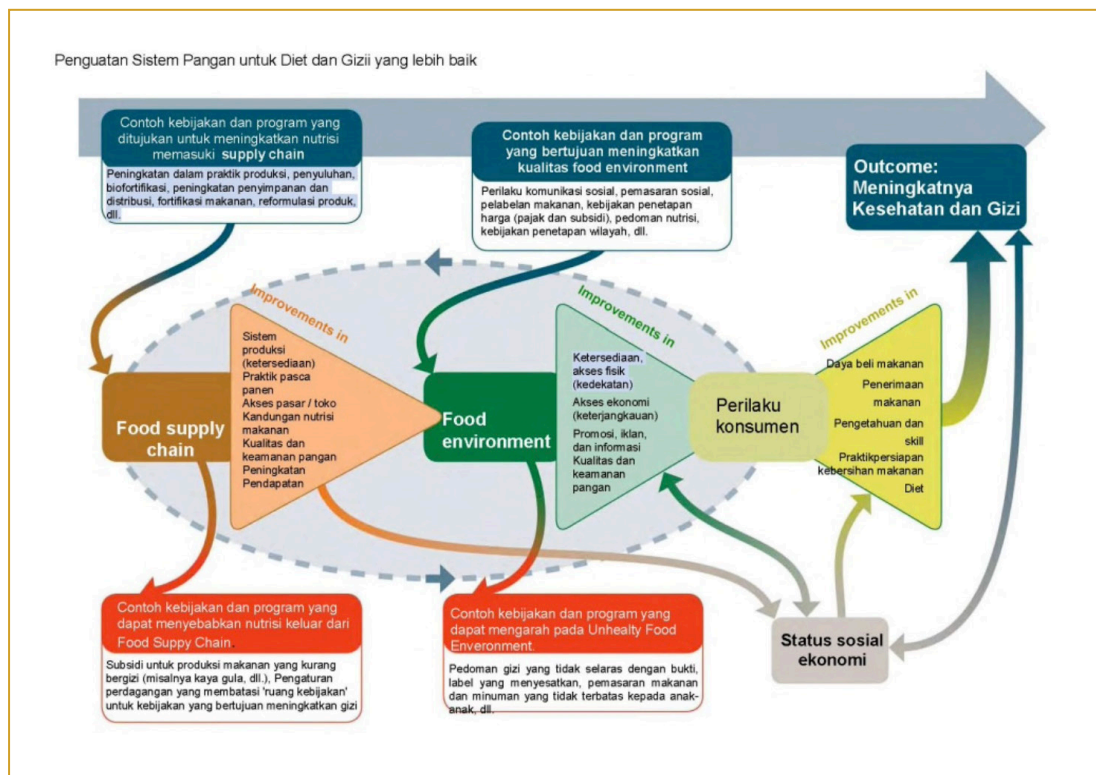
Pengutan Sistem Pangan Untuk Pemenuhan Konsumsi Dan Gizi Yang Lebih Baik.

Menurut publikasi laporan *Nutrition and Food System, The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition* pada September 2017, secara global, saat ini satu dari tiga orang mengalami malnutrisi. Jika tren berlanjut, akan meningkat menjadi satu dari dua orang pada tahun 2030. Hal ini sangat kontras dengan tujuan untuk mengakhiri semua bentuk malnutrisi pada tahun 2030. Malnutrisi merupakan bentuk dari: *undernutrition (underweight, stunting and wasting)*; *micronutrient deficiencies*; serta *overweight dan obesity*. Bentuk-bentuk malnutrisi ini mempengaruhi semua negara, baik maju maupun berkembang dan dapat berpaengaruh di dalam komunitas, rumah tangga dan individu.

Meskipun ada kemajuan yang dicapai selama beberapa dekade, yaitu kekurangan gizi (*undernourishment*) di Indonesia sebesar 7,95% pada tahun 2018 namun prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita masih cukup tinggi yaitu sebesar 30,8% serta prevalensi *wasting* (kurus) pada balita masih berada pada angka 7,4% (2019). Kekurangan gizi yang terjadi mempengaruhi seluruh siklus hidup dan pengaruhnya dapat meluas lintas generasi. Malnutrisi selama 1.000 hari pertama kehidupan

meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas dan membatasi pertumbuhan mental dan fisik serta kecerdasan anak-anak ke tingkat yang jauh di bawah potensi genetik mereka, yang memiliki konsekuensi penting bagi seluruh hidup mereka. Demikian pula, *micronutrient deficiencies* mengacu pada asupan vitamin dan mineral yang tidak memadai. Masyarakat masih memiliki masalah kesehatan yaitu kekurangan Vitamin A, zat besi, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B2 dan yodium terutama pada anak. Selain itu, data Riskesdas menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengalami *overweight* dan obesitas di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Sistem pangan saat ini lebih banyak dikaitkan dengan prevalensi *undernutrition* yang tinggi termasuk *stunting*, *wasting* dan mortalitas balita, serta prevalensi defisiensi mikronutrien, namun belum banyak memperhatikan permasalahan kelebihan gizi seperti kelebihan berat badan dan obesitas. Semua beban malnutrisi ini sangat terkait dengan Sistem Pangan. Pelaksanaan Sistem Pangan Modern ini merupakan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan gizi kurang dan defisiensi mikronutrien secara terintegrasi dengan *overweight* dan obesitas yang tinggi.



Sumber: Publikasi Laporan "Nutrition and Food System, The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, September 2017"

Sistem Pangan Modern ini mengumpulkan semua elemen (lingkungan, orang, input, proses, infrastruktur, institusi, dll.) dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, pemrosesan, distribusi, persiapan dan konsumsi makanan, dan *output*-termasuk *socio-economic and environment outcome*. Tiga unsur utama dalam sistem pangan ini yaitu *food supply chains*; *food environments*; and *consumer behaviour*.

Food Supply Chain mencakup semua kegiatan yang memindahkan makanan dari produksi ke konsumsi, termasuk produksi, penyimpanan, distribusi, pemrosesan, pengemasan, ritel dan pemasaran. Keputusan yang dibuat oleh banyak aktor di setiap tahap rantai ini memiliki implikasi untuk tahap lain. Mereka mempengaruhi jenis makanan yang tersedia dan dapat diakses, serta cara mereka diproduksi dan dikonsumsi.



Food Environment merujuk pada fisik, ekonomi, politik dan sosial-budaya dalam konteks bahwa konsumen terlibat dengan sistem pangan untuk memperoleh, menyiapkan dan mengkonsumsi makanan. *Food Environment* terdiri beberapa elemen yaitu ruang fisik tempat makanan diperoleh; membangun lingkungan yang mendukung yang memungkinkan konsumen mengakses ruang-ruang tersebut; penentu pribadi dalam pemilihan makanan (dengan latar belakang berbagai karakteristik pendapatan, pendidikan, nilai-nilai, keterampilan, dll.); dan norma-norma politik, sosial dan budaya yang mendasari interaksi ini. Elemen-elemen kunci dari *Food Environment* yang mempengaruhi pilihan makanan, penerimaan makanan dan diet adalah: akses fisik dan ekonomi untuk makanan (kedekatan dan keterjangkauan); promosi makanan, iklan dan informasi; dan kualitas dan keamanan pangan.

Consumer behavior mencerminkan pilihan konsumen pada makanan apa yang akan dibuat, akan diperoleh, disimpan, disiapkan dan dimakan, dan pada alokasi makanan untuk rumah tangga. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh preferensi pribadi yang ditentukan oleh selera, kenyamanan, budaya, dan faktor lainnya. Namun, perilaku konsumen juga dibentuk oleh lingkungan makanan yang ada. Perubahan kolektif dalam perilaku konsumen dapat membuka jalur menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan yang meningkatkan ketahanan pangan, Nutrisi dan kesehatan.

Ketiga komponen Sistem Pangan ini mempengaruhi kapasitas konsumen untuk mengadopsi sustainable diets yaitu melindungi dan menghormati keanekaragaman hayati dan ekosistem; diterima secara budaya; dapat diakses; adil secara ekonomi dan terjangkau; dan nutrisi yang memadai, aman dan sehat, seiring dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia.

Namun, sebuah *framework* yang dikeluarkan oleh UNICEF dan LANCET mengemukakan bahwa masalah gizi juga sangat berkaitan erat dengan keberadaan penyakit infeksi berulang sebagai penyebab langsung (*immediate causes*). Penyakit infeksi di masyarakat seperti diare sering dikaitkan dengan sanitasi yang buruk yang dikategorikan sebagai penyebab tidak langsung (*underlying cause*). Selain itu, pelayanan kesehatan yang tidak memadai juga dapat berkontribusi dalam kejadian malnutrisi. Agar program ketahanan pangan tidak bekerja sendiri dalam proses percepatan perbaikan gizi, maka perlu kerja sama dengan bidang lain. Dengan demikian, diperlukan upaya yang terintegrasi multisektor antara intervensi spesifik, yang menasar penyebab langsung terjadinya malnutrisi (*immediate causes*), dan intervensi sensitif yang menasar penyebab dasar (*underlying causes*).

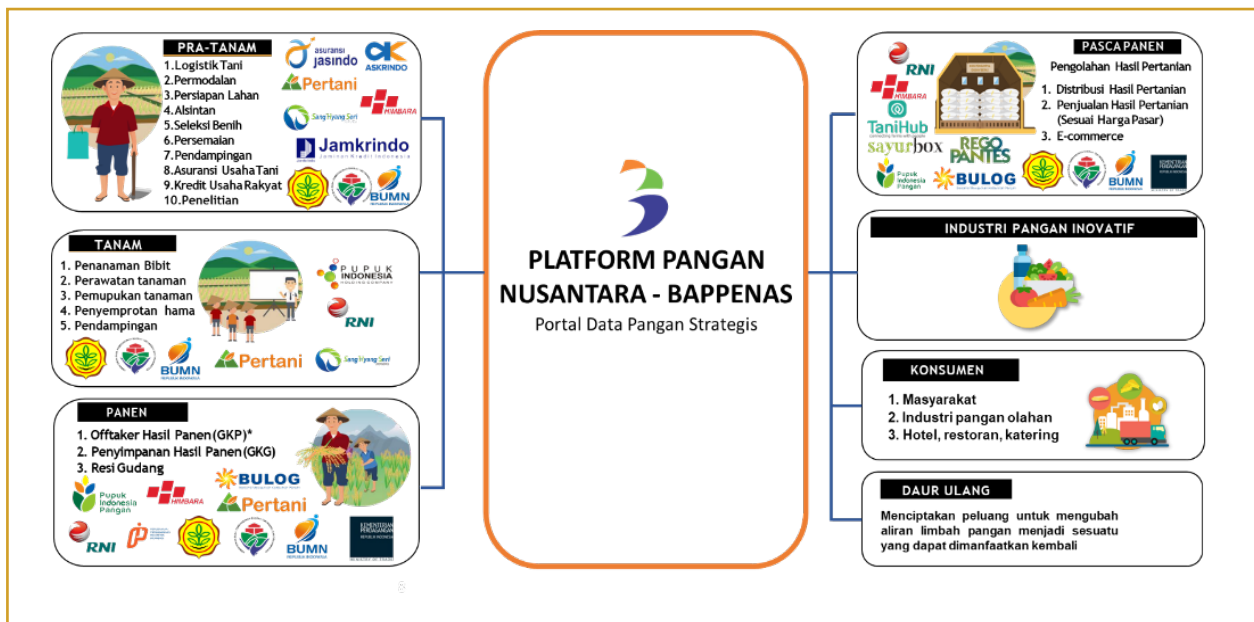
Penguatan platform sistem pangan multipihak.

Kemitraan multipihak menjadi instrument penting untuk pencapaian TPB/SDGs di Indonesia, Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden No.59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (TPB) yang menggaris bawahi pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Akademisi, Pelaku Usaha, Media dan Filantropi dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Kemitraan multipihak dapat menjadi instrumen yang menjembatani seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menyusun platform sistem pangan berkelanjutan Indonesia.

Platform Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia merupakan inisiatif *project Switch Asia Local Harvest* yang didukung oleh Uni Eropa serta program *Sustainable Diets for All* yang diimplementasikan oleh Hivos, berkolaborasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Platform ini diharapkan dapat menjadi wadah yang merepresentasikan pemangku kepentingan yang memiliki

peran dan fungsi yang berbeda di dalam sistem pangan, yang saling berkoordinasi, bekerjasama dan bersinergi untuk mewujudkan sistem pangan yang handal dan berkelanjutan di Indonesia. Platform ini telah menyelenggarakan beberapa kegiatan diskusi yang melibatkan dan didukung oleh pelaku dan pemangku kepentingan dalam sistem pangan Indonesia.

Saat ini BAPPENAS tengah mengkaji ulang rancangan sistem pangan Indonesia. Rancangan awal telah disusun dalam rangka membangun sistem pangan Indonesia yang handal dan berkelanjutan. BAPPENAS berkolaborasi dengan Platform Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia berencana mengadakan diskusi daring terbatas dengan jejaring anggota Platform Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia serta pemangku kepentingan terkait untuk menginformasikan, mendapatkan umpan balik, serta mendapatkan masukan dan insight guna menyempurnakan rancangan yang telah disusun tersebut.





IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Berdasarkan Dokumen RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dalam hal mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan penyediaan pangan meliputi:

- 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda**, mencakup: a) penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat; b) pengembangan system jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan; c) percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; d) peningkatan intervensi yang bersifat *lifesaving* dengan didukung bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan; e) penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*); f) penguatan system surveilans gizi; g) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan h) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.
- 2. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang akan dilaksanakan** dengan strategi a) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; b) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas an teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; c) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian dan kepastian pasar; d) meningkatkan produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian; e) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.
- 3. Strategi pembangunan pangan dan pertanian** mencakup (1) pengembangan benih padi biofortifikasi dan produk rekayasa genetik, fortifikasi beras, pengembangan nanoteknologi pangan, pengembangan pangan lokal, dan diversifikasi bahan pangan (2) Fasilitasi budidaya padi, jagung, ternak, ikan dan komoditas pangan strategis, serta penyediaan input produksi, (3) penguatan basis data petani dan nelayan, pembentukan korporasi petani dan nelayan, asuransi pertanian, pembiayaan inklusif, pelatihan dan penyuluhan, (4) pengelolaan lahan, termasuk lahan *suboptimal*, *lowland*, *upland*, dan lahan kering, efisiensi air, pertanian digital dan penggunaan teknologi pesawat nirawak, (5) penguatan sistem logistik pangan nasional, integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis termasuk ikan, platform pangan dan pertanian berbasis data *driven*, pengelolaan sistem pangan berkelanjutan
- 4. Revitalisasi sistem pangan nasional berkelanjutan** menjadi salah satu hal yang menjadi fokus ke depan, utamanya melalui produksi domestik berkelanjutan dan ketersediaan untuk mencukupi kebutuhan/permintaan pangan berkualitas dan aman; menciptakan lingkungan kondusif pengembangan industrialisasi pangan lokal dan stabilitas akses pangan, penguatan korporasi petani dan efisiensi distribusi pangan, dan bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan.



V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</p>							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Under-nourishment</i>).	Susenas	%	10,73 (2015)	6,69 (road-map)	7,66	▶
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	Integrasi SSGBI dan Susenas	%	19,6	17	16,3 (2019)	●
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (<i>Food Insecurity Experience Scale</i>).	Susenas	%	8,66 (2017)	5,79 (road-map)	5,42	●
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Susenas	%	12,96	8,5	8,23 (2018)	●
<p>Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p>							
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Integrasi SSGBI dan Susenas	%	37,2 (2013)	29,1 (road-map)	27,7	●
2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Riskesdas	%	32,9	28	29,9 (2018)	▶
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (<i>wasting</i>) anak pada usia kurang dari 5 tahun,	Riskesdas, Integrasi SSGBI dan Susenas	%	12,1 (2013)	8,7 (road-map)	7,4	●
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Riskesdas	%	37,1	28	48,9 (2018)	▼

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Riskesmas dan Susenas	%	38	50	44,3 (2018)	▶
2.2.2 (c)	(i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita	Laporan Kementerian Pertanian	Skor	84,1 (2015);	92,5	Publikasi BKP: 90,8 (2019)	▶
			Kg	40,9 kg (2015)	54,5	PM	PM
<p>Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.</p>							
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian BPS	rupiah per tenaga kerja	30,09 juta (2015) -roadmap) / 41,213	36,19 juta (roadmap)	PM	▶
<p>Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.</p>							
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	SK Menteri Pertanian	VUB Tanaman Pangan	16 (2015)	17	PM	▶
			Kumulatif VUB Hewan untuk pangan	5 (2016)	PM	11 (2019)*	●



TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Puslit-bang-nak, Kementeri-an Pertanian	Hewan Ternak	Data jumlah: 1 (2015); Data Proporsi: PM	PM	Data Proporsi: Berisiko: 0,46%; Tidak berisiko: 99,54%; Tidak diketahui: 0	

Catatan: * Pelepasan rumpun baru hasil penelitian dan sudah terdapat SK Mentan Tahun 2019: (1) KUB (ayam kampung galur betina); (2) Compass Agrinak (domba); (3) Mojomaster.agrinak (itik); (4) Alabimaster.agrinak (itik); (5) Reza.agrinak (kelinci); (6) Reksi.agrinak (kelinci); (7) Sensi.agrinak (ayam kampung); (8) IPB-D1 (ayam); (9) Pelung Ulu (ayam kampung); (10) Gungsi PKC (itik);(11) Ayam Sembawa





DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2019). *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2017). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2018). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2018*. Jakarta: BAPPENAS.
- BKP. (2018). *Laporan Data Skor Pola Pangan Harapan – Badan Ketahanan Pangan (BKP)*. Jakarta: BKP, Kementerian Pertanian
- BPS. (2019). *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2015). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2019). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Pertanian. (2019). *Laporan Data Hewan Ternak menurut Risiko Kepunahan - Puslitbangnak - Kementerian Pertanian*. Jakarta: Kementerian Pertanian
- Kementerian Kesehatan. (2013). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2017). *Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2019). *Laporan Akhir Penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan





We support the Sustainable Development Goals

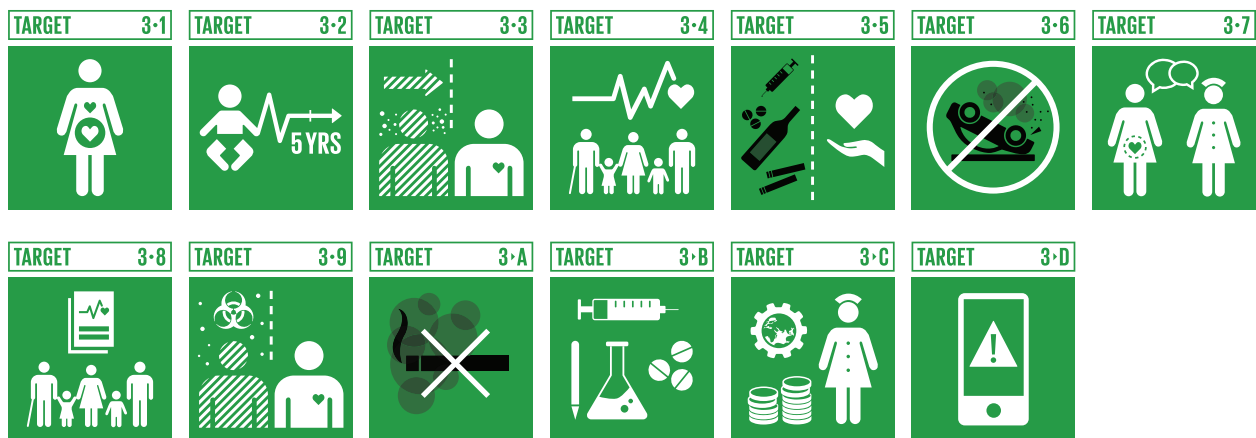


We support the Sustainable Development Goals

3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA



Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia



I. PENDAHULUAN

Upaya yang dilakukan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia adalah melalui beberapa target di antaranya:

TARGET	DESKRIPSI
Target 3.1	(1) Angka Kematian Ibu (AKI); (2) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan.
Target 3.2	(3) Angka Kematian Balita (AKBa); (4) Angka Kematian Neonatal (AKN); (5) Angka Kematian Bayi (AKB); (6) Persentase kabupaten/kota mencapai 80% imunisasi dasar.
Target 3.3	(7) Prevalensi HIV pada populasi dewasa; (8) Insiden TB per 100.000 penduduk; (9) Kejadian malaria per 1.000 orang; (10) Jumlah kabupaten/kota eliminasi malaria; (11) Persentase kabupaten/kota deteksi dini Hepatitis B; (12) Jumlah orang memerlukan intervensi penyakit kusta dan filariasis; (13) Jumlah provinsi eliminasi kusta; (14) Jumlah kabupaten/kota eliminasi filariasis.



TARGET	DESKRIPSI
Target 3.4	(15) Persentase merokok penduduk umur ≤ 18 tahun; (16) Prevalensi tekanan darah tinggi; (17) Prevalensi obesitas penduduk umur ≥ 18 tahun; (18) Angka kematian akibat bunuh diri; (19) Jumlah kabupaten/kota dengan puskesmas menyelenggarakan kesehatan jiwa.
Target 3.5	(20) Jumlah penyalahguna narkoba dan alkohol yang mengakses layanan rehabilitasi medis; (21) Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi; (22) Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapat rehabilitasi social; (23) Jumlah Lembaga rehabilitasi sosial penyalahguna NAPZA yang dibantu; (24) Prevalensi penyalahgunaan narkoba; (25) Konsumsi alkohol penduduk umur ≥ 15 tahun.
Target 3.6	(26) Angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas.
Target 3.7	(27) Proporsi PUS menggunakan kontrasepsi modern; (28) Prevalensi CPR semua cara; (29) Angka penggunaan MKJP modern; (30) Tingkat kelahiran pada remaja (ASFR); (31) Angka kelahiran total atau <i>Total Fertility Rate</i> (TFR).
Target 3.8	(32) Cakupan pelayanan kesehatan esensial; (33) <i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan; (34) Jumlah penduduk tercapai asuransi kesehatan per 1000 penduduk; (35) Cakupan JKN.
Target 3.9	(36) Proporsi kematian akibat keracunan.
Target 3.A	(37) Persentase merokok penduduk ≥ 15 tahun.
Target 3.B	(38) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas.
Target 3.C	(39) Kepadatan dan distribusi tenaga kerja.
Target 3.D	(40) Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan.

II. STATUS CAPAIAN

- Proses persalinan yang aman yaitu ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas kesehatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Meskipun cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan persalinan di fasilitas kesehatan cukup baik, namun kenyataannya kejadian kematian ibu di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015). Untuk mempercepat penurunan kematian ibu diperlukan komitmen dan terobosan-terobosan atau inovasi program untuk memenuhi target Roadmap SDGs Indonesia sebesar 131 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (ARR 5%).
- Capaian Angka Kematian Balita (AKBa), Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB) terus menunjukkan penurunan sejak periode 1991 hingga tahun 2017. Dengan demikian, target Roadmap SDGs tahun 2019 untuk



mengurangi AKBa menjadi 29,5 per 1.000 kelahiran hidup dan AKN 13,5 per 1.000 kelahiran hidup diperkirakan tercapai.

- Kejadian Malaria di Indonesia berhasil dipertahankan di bawah 1%. Namun, target SDGs menurunkan Insiden Tuberkulosis (TB) hingga 297 insiden per 100.000 penduduk pada tahun 2019 memerlukan upaya keras dalam pencapaiannya.
- Tren faktor risiko penyakit tidak menular seperti persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun, prevalensi tekanan darah tinggi, dan prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun serta belum dapat memenuhi target RPJMN 2019.
- Tren konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun sangat fluktuatif dan cenderung meningkat.
- Angka kelahiran remaja/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR) usia 15-19 tahun dan angka kelahiran total/*Total Fertility Rate* (TFR) menunjukkan penurunan, namun target RPJMN untuk menurunkan TFR sebesar 2,28 pada tahun 2019 belum tercapai.
- *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan masih belum mencapai target RPJMN 2019.
- Fasilitas kesehatan yang memiliki paket obat esensial terus meningkat dari tahun ke tahun.
- Distribusi tenaga kesehatan telah menunjukkan kemajuan, dimana target RPJMN untuk RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis telah tercapai.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Dan Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Terus Meningkat.

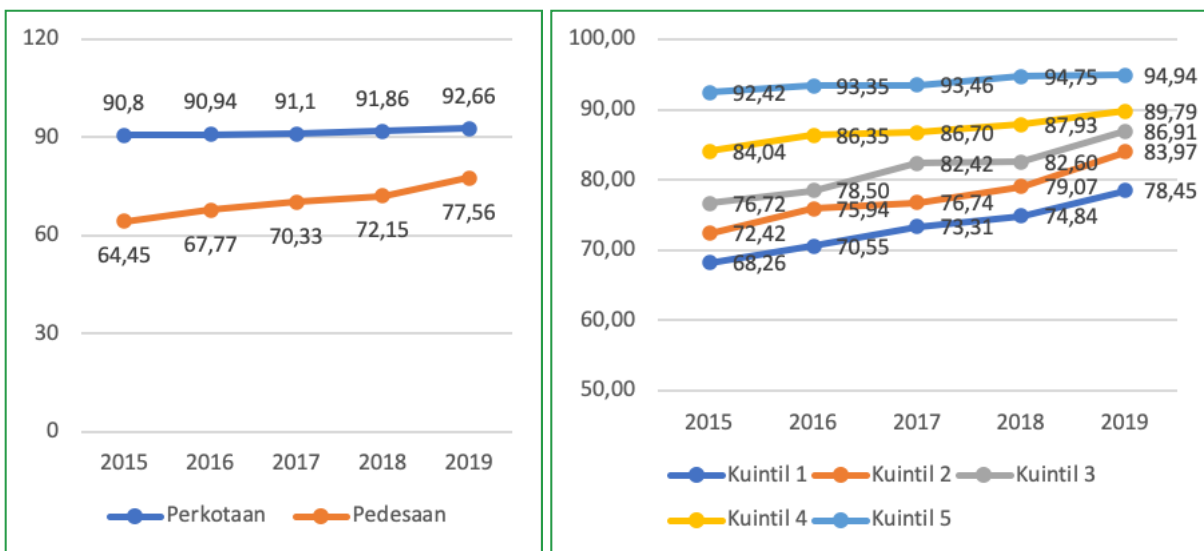
TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Susenas BPS	%	91.51 (2015)	-	94.71 (2019)	▶
3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Susenas BPS	%	77.63 (2015)	85 (RPJMN)	85.94 (2019)	▶

Proses persalinan yang aman yaitu ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas kesehatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penurunan AKI. Pada awal pelaksanaan SDGs, proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih telah mencapai 91,51% (Susenas, 2015) dan meningkat menjadi



94,71% pada tahun 2019. Peningkatan tersebut juga terlihat pada semua kelompok penduduk menurut status ekonomi, meskipun cakupan pada kelompok kuintil 1 (status ekonomi terendah) masih lebih rendah dari kelompok lainnya. Begitu juga cakupan tahun 2019 di perdesaan masih lebih rendah sebesar 77,56% dibandingkan di perkotaan sebesar 92,66%. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di daerah juga sangat baik rata-rata telah mencapai lebih dari 90% kecuali provinsi Papua sebesar 61% (2019).

Sementara itu, persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan sebesar 77,63% (Susenas, 2015) telah meningkat menjadi 85,94% (2019). Dengan demikian, target RPJMN 2019 sebesar 85% telah tercapai. Meskipun target tercapai, namun pada kenyataannya kejadian kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu terobosan dan inovasi kebijakan dengan daya ungkit tinggi harus dilakukan, terutama kebijakan yang spesifik wilayah dan tingkat sosial-ekonomi masyarakat.



Gambar 01. Tren Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Wilayah dan Status Ekonomi. Sumber : SDKI, BPS

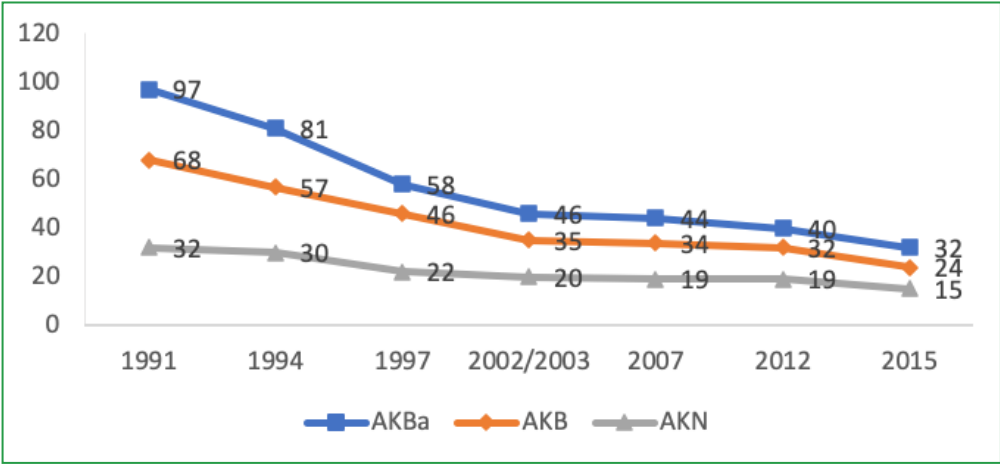
Angka Kematian Balita (Akba), Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (Akb) Terus Menurun.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	SDKI	Kematian per 1000 kelahiran hidup	40 (2012)	29.5 (Road-map); 25 (Global, 2030)	32 (2017)	▶

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

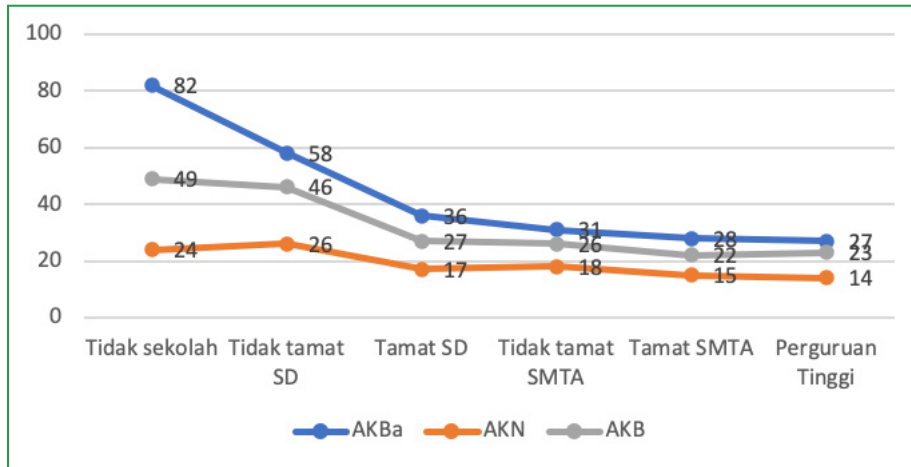
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	SDKI	Kematian per 1000 kelahiran hidup	19 (2012)	13.5 (Roadmap); 12 (Global, 2030)	15 (2017)	▶
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	SDKI	Kematian per 1000 kelahiran hidup	32 (2012)	21 (RKP)	24 (2017)	▶

Capaian AKBa, AKN dan AKB terus menunjukkan penurunan sejak periode 1991 hingga tahun 2017 seperti terlihat pada Gambar 112. Tren penurunan tersebut menunjukkan target Roadmap SDGs tahun 2019 untuk mengurangi AKBa menjadi 29.5 per 1.000 kelahiran hidup dan AKN 13,5 per 1.000 kelahiran hidup diperkirakan dapat tercapai apabila *Annual Reduction Rate* (ARR) sebesar 4% untuk AKBa dan 5% untuk AKN.



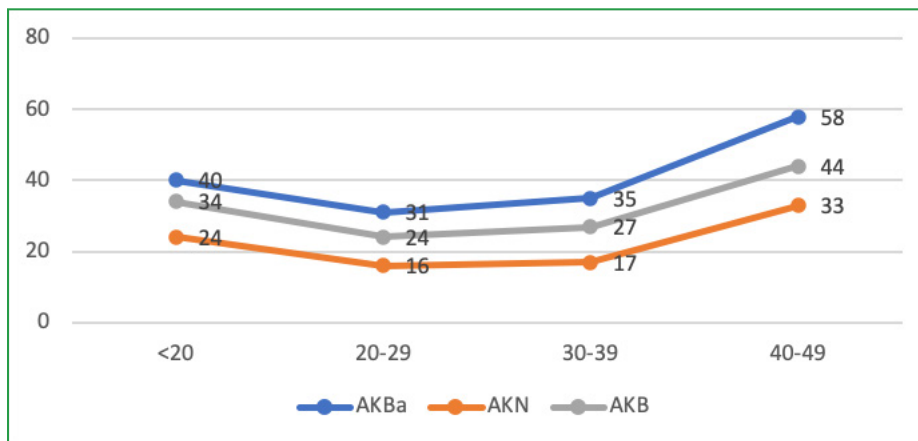
Gambar 02. Trend AKB, AKBa, dan AKN.
Sumber : Sumber : SDKI, BPS

Kematian anak dan bayi dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyertai sejak ibu hamil hingga bayi dilahirkan serta saat anak tersebut menjalani kehidupannya. Berdasarkan SDKI, kematian anak dan bayi mengalami penurunan di setiap kelompok pendidikan ibu, meskipun kematian pada ibu dengan latar belakang pendidikan tinggi jauh lebih rendah dibandingkan ibu dengan pendidikan rendah.



Gambar 03. Tren AKBa, AKN, dan AKB Menurut Tingkat Pendidikan Ibu, Tahun 2017.
Sumber : Sumber :SDKI, BPS

Apabila ditelaah berdasarkan umur ibu saat melahirkan, kematian bayi dan anak lebih banyak ditemukan pada kelompok ibu yang berisiko tinggi dengan umur kurang dari 20 tahun dan di atas 35 tahun. Kejadian kematian bayi dan anak semakin meningkat seiring dengan meningkatnya umur ibu di atas 35 tahun.



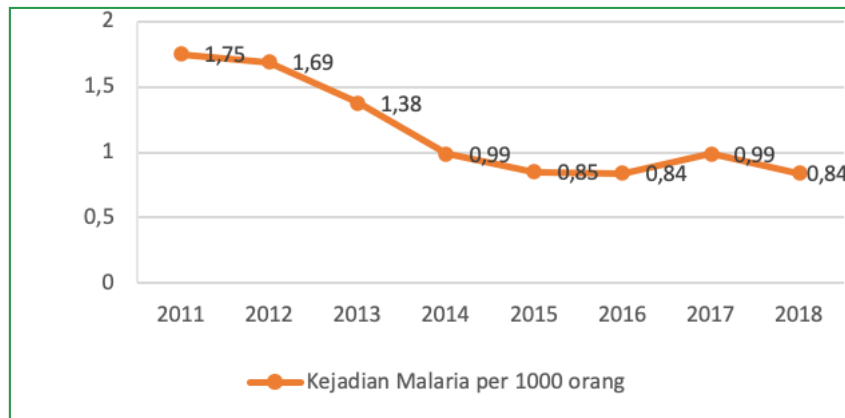
Gambar 04. Tren AKBa, AKN, dan AKB Menurut Umur Ibu saat Melahirkan, Tahun 2017.
Sumber : Sumber :SDKI, BPS

Kejadian Malaria di Indonesia Berhasil Dipertahankan di Bawah 1%.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	Kementerian Kesehatan	Kejadian per 1.000 orang	0.85 (2015)	<1 (RAN)	0.84 (2018)	●

Tren kejadian malaria berdasarkan API (*Annual Parasite Index/Insidensi Parasit Tahunan*) telah menurun dari 1,75 (2011) menjadi 0,84 per 1.000 populasi (2018).

Kondisi dibawah 1 mampu dipertahankan sejak 2014 hingga saat ini. Upaya untuk mempertahankan kondisi ini terutama menuju eliminasi malaria yaitu dilakukan dengan strategi spesifik berdasarkan stratifikasi endemisitas wilayah, yaitu: (1) strategi akselerasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berfokus pada pengobatan di semua fasilitas kesehatan, penemuan kasus secara aktif dan kelambunisasi berinsektisida; (2) strategi intensifikasi di daerah fokus di luar KTI, dengan penekanan pada perlindungan kelompok berisiko; dan (3) strategi eliminasi pada daerah dengan API<1 per 1.000 penduduk (endemis rendah) berfokus pada surveilans dan deteksi dini, serta penemuan kasus aktif



Gambar 05. Trend API.

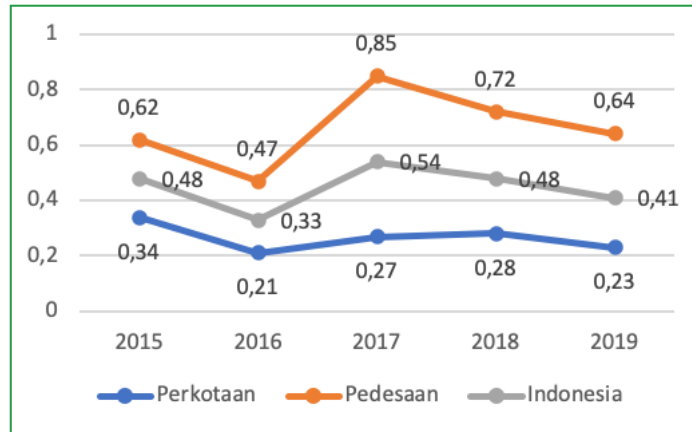
Sumber : Disease Prevention and Control Surveillance Report, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.

Tren Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Sangat Fluktuatif Dan Cenderung Meningkat.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Susenas, BPS	Liter per kapita	0.47 (2015)	PM	0.41 (2019)	▶

Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun menunjukkan perkembangan yang bervariasi selama periode 2015-2019, dari 0,48 (2015) menurun hingga 0,33 (2016) kemudian meningkat menjadi 0,54 (2017) dan menurun kembali menjadi 0,41 (2019).

Fenomena konsumsi alkohol yang fluktuatif terlihat baik di pedesaan maupun perkotaan dan diketahui bahwa konsumsi alkohol pada penduduk di pedesaan satu setengah (1,5) kali lipat lebih banyak dibandingkan penduduk di perkotaan.

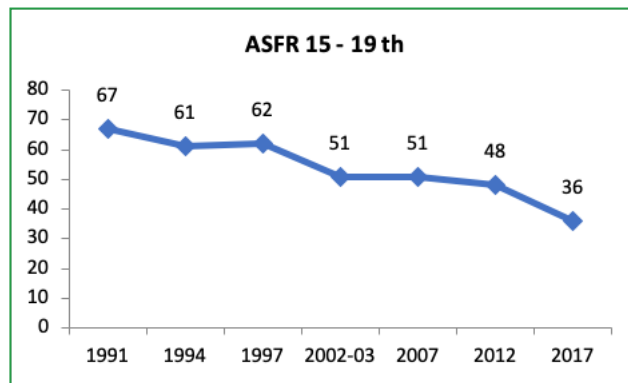


Gambar 06. Tren Konsumsi Alkohol (Liter per Kapita) Menurut Wilayah.
Sumber : Susenas, BPS.

Angka Kelahiran Pada Remaja Menunjukkan Penurunan.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	SDKI	Kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	48 (2012)	38 (2019)	36 (2017)	●

Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 67 (1991) menjadi 36 kelahiran per 1.000 perempuan (2017). Pada 2017, sebanyak 7% perempuan usia 15-19 tahun telah menjadi ibu, 5% sudah pernah melahirkan, dan 2% sedang hamil anak pertama. Di pedesaan, angka kelahiran pada remaja 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, masing-masing 51 dan 24 kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun.



Gambar 07. Tren Angka Kelahiran Remaja/ Age Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15-19 tahun.

Sumber : SDKI, BPS.



Komitmen Pemerintah Untuk Pengendalian Tembakau Menunjukkan Beberapa Kemajuan.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
3.a.1.*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Susenas, BPS	%	30.08 (2015)	PM	21.51 (2019)	

Upaya pengendalian tembakau di Indonesia menunjukkan beberapa kemajuan terutama dalam hal regulasi. Pemerintah telah menetapkan Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang merupakan gerakan lintas-sektor untuk meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta peningkatan lingkungan hidup sehat, termasuk pelaksanaan Kawasan tanpa rokok (KTR) melalui peraturan daerah atau peraturan gubernur/bupati. Dengan adanya aturan ini diharapkan konsumsi rokok menurun dan lingkungan sehat dapat tercipta

Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun terus mengalami penurunan selama periode 2015-2019. Pada awal pelaksanaan SDGs, penduduk umur ≥15 tahun yang merokok sebesar 30,08% (2015) menurun menjadi 28,97% pada tahun 2016, kemudian meningkat menjadi 29,25% pada tahun 2017. Namun, persentase tersebut kembali menurun menjadi 21,51% pada tahun 2019.

Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Paket Obat Esensial Terus Meningkatkan Dari Tahun Ke Tahun.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua							
3.b.3*	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Kementerian Kesehatan	%	79.38 (2015)	90 (RP-JMN)	96,34 (2019)	

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas menunjukkan peningkatan dari 79,38% (2015) menjadi 96,34% (2019). Capaian ini menandakan target RPJMN sebesar 90% pada tahun 2019 telah tercapai. Dengan demikian, diharapkan akses masyarakat terhadap obat esensial di Puskesmas dapat dipenuhi.



Sebagian Besar Tenaga Kesehatan Telah Terdistribusi Dengan Merata.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk				
	Dokter Spesialis			0.13 (2015)	0.11 (Renstra)	0.15 (2017)	●
	Dokter Umum			0.43 (2015)	0.45 (Renstra)	0.48 (2017)	●
	Dokter Gigi			0.11 (2015)	0.13 (Renstra)	0.11 (2017)	▶
	Perawat			1.51 (2015)	1.8 (Renstra)	2.1 (2017)	●
	Perawat Gigi			0.07 (2015)	0.18 (Renstra)	0.08 (2017)	▶
	Bidan			1.45 (2015)	1.2 (Renstra)	1.96 (2017)	●
	Tenaga Gizi			0.10 (2015)	0.14 (Renstra)	0.13 (2017)	●
	Tenaga Kesehatan Lingkungan			0.06 (2015)	0.18 (Renstra)	0.08 (2017)	▶
	Tenaga Keterampilan fisik			0.04 (2015)	0.05 (Renstra)	0.06 (2017)	●
	Tenaga Keteknisan Medis			0.08 (2015)	0.16 (Renstra)	0.12 (2017)	▶
	Tenaga Kesehatan Masyarakat			0.09 (2015)	0.18 (Renstra)	0.19 (2017)	●

Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan yang telah mencapai target RPJMN 2015-2019 diantaranya adalah dokter spesialis per 1.000 penduduk meningkat dari 0.127 (2015) menjadi 0.15 (2017); dokter umum per 1.000 penduduk meningkat dari 0.043 (2015) menjadi 0.48 (2017); perawat per 1.000 penduduk meningkat dari 1.51 (2015) menjadi 2.1 (2017); bidan per 1.000 penduduk meningkat dari 1.45 (2015) menjadi 1.96 (2017); tenaga gizi per 1.000 penduduk meningkat dari 0.10 (2015) menjadi 0.13 (2017); tenaga keterampilan fisik per 1.000 penduduk meningkat dari 0.04 (2015) menjadi 0.06 (2017); dan tenaga kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk meningkat dari 0.09 (2015) menjadi 0.19 (2017).

Sedangkan, kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak mencapai target RPJMN diantaranya dokter gigi per 1.000 penduduk stagnan sebesar 0.11 (2015-2017); perawat gigi per 1.000 penduduk meningkat dari 0.07 (2015) menjadi 0.08 (2017); tenaga kesehatan lingkungan per 1.000 penduduk meningkat dari 0.06 (2015) menjadi 0.08 (2017); dan tenaga keteknisan medis per 1.000 penduduk meningkat dari 0.08 (2015) menjadi 0.12 (2017).



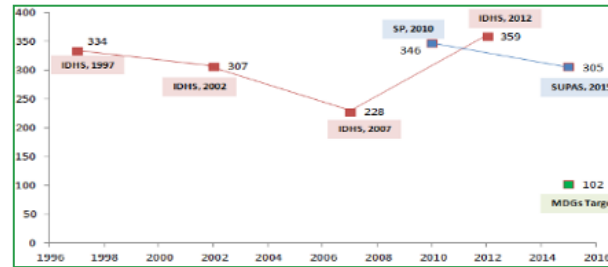
Distribusi tenaga kesehatan menunjukkan kemajuan terutama persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis. Capaian sebesar 62% menandakan bahwa target RPJMN tercapai. Disamping itu, rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk untuk tiap jenis tenaga semakin meningkat yang menunjukkan kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah membaik. Namun demikian, distribusi tenaga kesehatan terutama di Puskesmas belum menunjukkan kondisi yang diharapkan dimana tenaga-tenaga ini merupakan tenaga kesehatan promotif dan preventif seperti tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan gizi. Di tingkat RS, walaupun target tercapai, distribusi dokter spesialis masih menjadi masalah, terutama di wilayah timur dan DTPK.

B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS.

Walaupun Aki Menurun, Namun Masih Cukup Tinggi.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	SUPAS dan SP	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	305 (2015)	271 (RKP)	305 (2015)	▶

Pada periode akhir pelaksanaan MDGs, Angka kematian ibu (AKI) telah mengalami penurunan (*Annual Reduction Rate/ARR*) sebesar 2,4% setiap tahun dari 346 kematian (SP, 2010) menjadi 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015). Walaupun menurun, angka tersebut masih cukup tinggi. Target RKP 2019 sebesar 271 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2020 apabila upaya yang dilakukan Business as Usual (BAU) dan ARR masih sebesar 2,4%. Data Angka Kematian Ibu yang terbaru tahun 2020 baru dapat diperoleh dari hasil Sensus Penduduk 2020. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan terobosan-terobosan program yang inovatif untuk memenuhi target yang ditetapkan pada Roadmap SDGs Indonesia Menuju 2030 yaitu sebesar 131 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (ARR 5%) dan target SDGs global AKI sebesar kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (ARR 9,5%).



Gambar 08. Tren Angka Kematian Ibu.

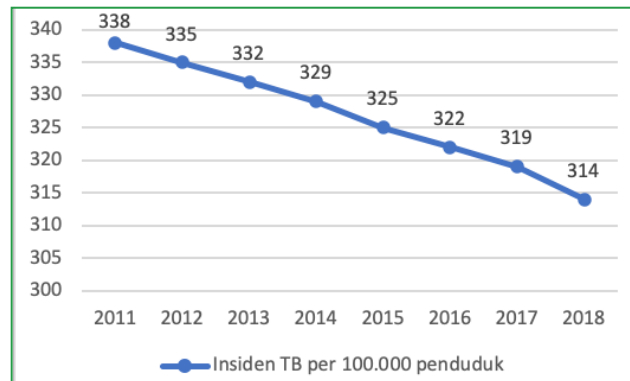
Sumber : Berbagai Publikasi.

Adapun distribusi kejadian kematian ibu menurut regional/pulau diketahui bahwa regional/pulau Nusa Tenggara, Maluku dan Papua memiliki kejadian tertinggi yaitu 489 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, lalu disusul regional/pulau Kalimantan sebanyak 466 kematian ibu dan regional /pulau Sumatera sebesar 344 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015). Ketiga regional/pulau tersebut memiliki kejadian AKI di atas rata-rata nasional sebesar 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan kejadian AKI di regional/pulau Jawa Bali dan regional Sulawesi dibawah rata-rata nasional, yaitu masing-masing sebanyak 247 kematian ibu dan 282 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Target SDGs Menurunkan Insiden Tuberkulosis (Tb) Memerlukan Upaya yang Keras Dalam Pencapaiannya.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kementerian Kesehatan	Kejadian per 100.000 penduduk	325 (2015)	297 (Roadmap)	314 (2019)	▶

Insiden Tuberkulosis (TB) menunjukkan penurunan yaitu 314 insiden per 100.000 penduduk (2018) dari sebelumnya 338 per 100.000 penduduk (2011). Namun demikian, target Roadmap SDGs sebesar 297 insiden per 100.000 penduduk pada tahun 2019 memerlukan upaya keras dalam pencapaiannya. Di sisi lain, target RPJMN untuk prevalensi tuberkulosis (TB) sebesar 245 per 100.000 penduduk diperkirakan tercapai seiring dengan tren penurunan dari 263 per 100.000 penduduk (2015) menjadi 250 per 100.000 penduduk (2018).

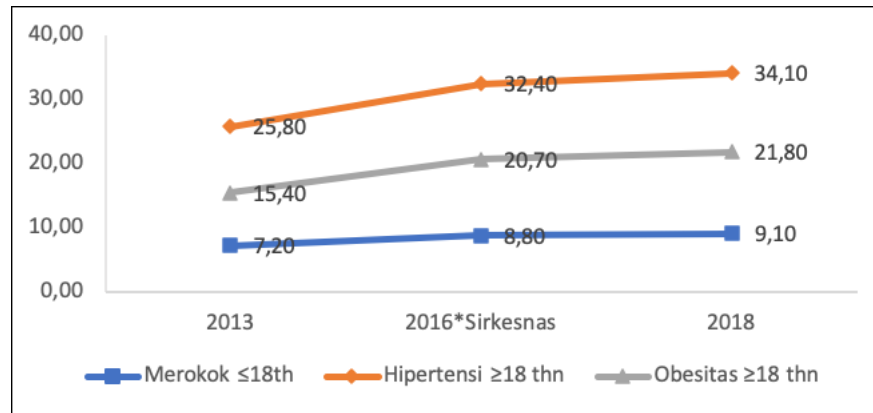


Gambar 09. Trend Insiden TB per 100.000 penduduk.
Sumber : Global TB Report.

Tren faktor risiko penyakit tidak menular menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Risikesdas	%	7.2 (2013)	5.4 (RPJMN)	9.1 (2018)	▼
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Risikesdas	%	25.8 (2013)	23.4 (RPJMN)	34.1 (2018)	▼
3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Risikesdas	%	15.4 (2013)	15.4 (RPJMN)	21.8 (2018)	▼

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Risikesdas), prevalensi hipertensi pada populasi berusia 18 tahun ke atas meningkat dari 25,8% (2013) menjadi 34,1% (2018). Selama periode yang sama, prevalensi obesitas pada populasi berusia 18 tahun ke atas meningkat dari 15,4% menjadi 21,8%. Perilaku merokok, selain dari pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik, berkontribusi pada peningkatan prevalensi PTM di Indonesia. Begitu juga, proporsi anak berusia 18 tahun ke bawah yang merokok meningkat dari 7,2% menjadi 9,1%.



Gambar 10. Tren Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular.

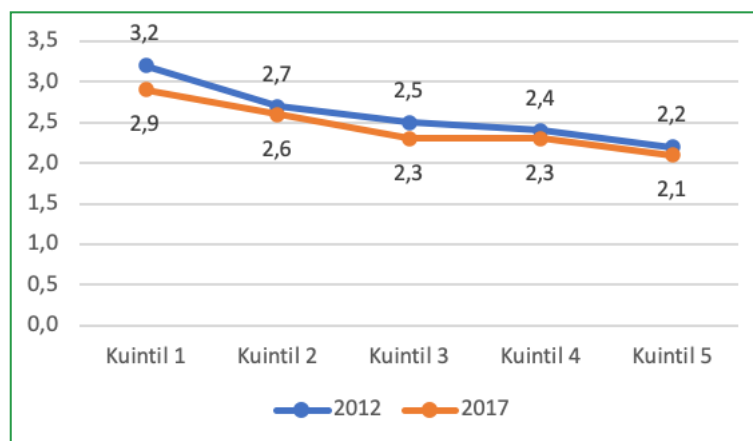
Sumber : Riskesdas 2013-2018, Sirkesnas 2016.

Pencapaian Angka Kelahiran Total fluktuatif selama periode 2012-2018.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)	SDKI	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	2.6 (2012)	2.28 (RPJMN)	2.4 (2017)	▼

Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) menurun dari 2,6 (2012) menjadi 2,40 (2017). Namun, penurunan tersebut masih jauh dari target RPJMN sebesar 2,28 di tahun 2019.

Pada periode yang sama, penurunan TFR juga terjadi pada setiap kelompok penduduk yang dibagi berdasarkan pendapatan dari kuintil 1 hingga kuintil 5 di mana semakin tinggi pendapatan maka semakin rendah tingkat kelahiran.



Gambar 11. Tren TFR Menurut Status Ekonomi.

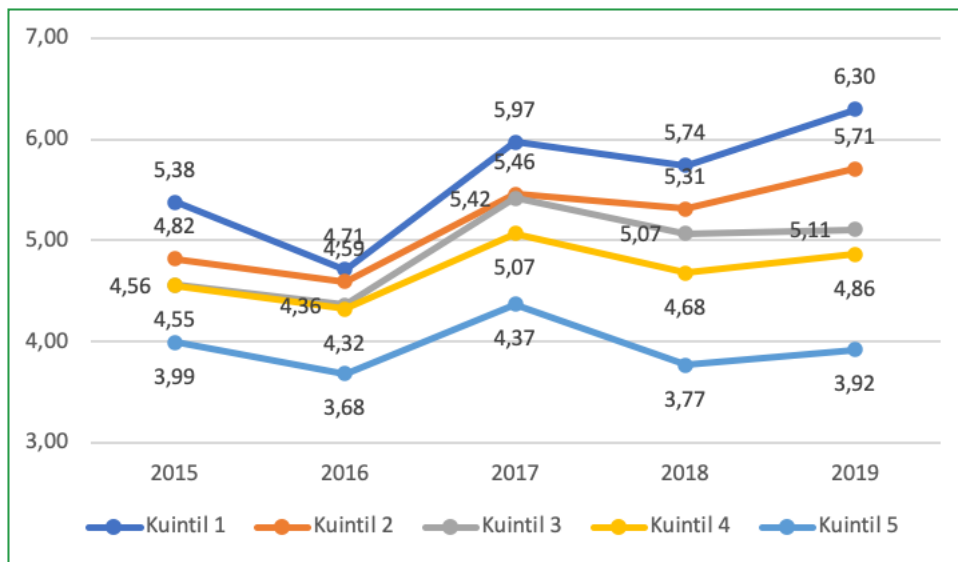
Sumber : SDKI, BPS.

Unmet Need Pelayanan Kesehatan masih belum mencapai target RPJMN 2019.

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Susenas, BPS	%	4.66 (2015)	1 (RPJMN)	5.18 (2019)	▼

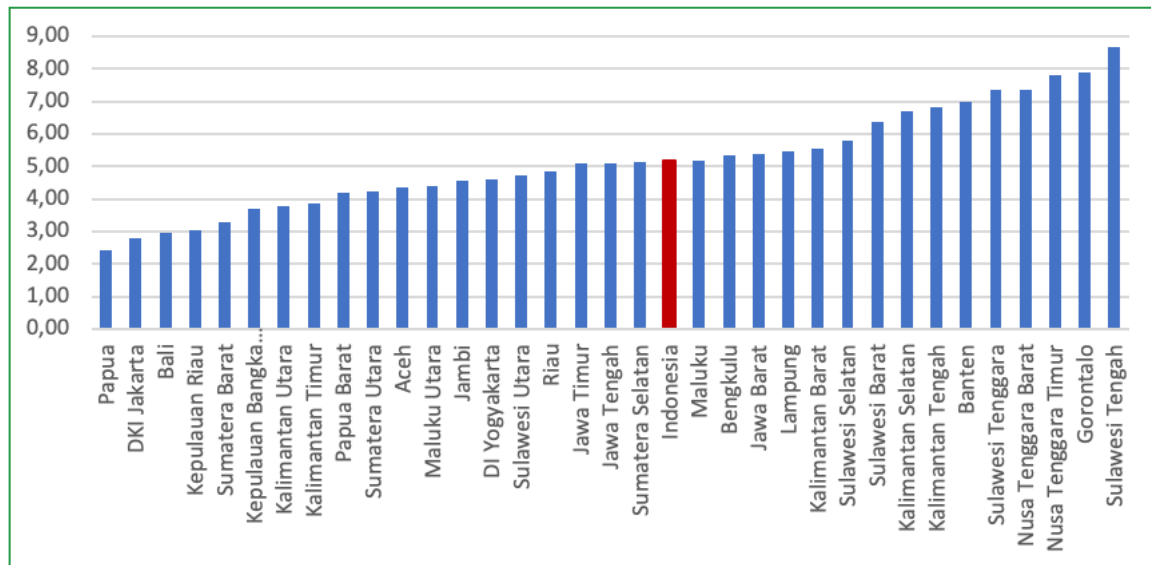
Perluasan cakupan kepesertaan JKN berdampak pada menurunnya *unmet need* pelayanan kesehatan, yaitu persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktifitas sehari-hari namun tidak berobat jalan. *Unmet need* pelayanan kesehatan menurun dari 9,9% pada tahun 2006 menjadi 4,91% pada tahun 2018, namun meningkat pada tahun 2019 menjadi 5,18%. Hal ini menyebabkan target RPJMN pada 2019 sebesar 1% *unmet need* pelayanan kesehatan belum tercapai.

Unmet need pelayanan kesehatan pada masing-masing kelompok penduduk kuintil 1 hingga kuintil 5 juga menunjukkan pergerakan yang bervariasi selama periode 2015-2019. Namun dapat diketahui bahwa semakin tinggi status ekonomi seseorang maka semakin rendah *unmet need* pelayanan kesehatan yang terjadi.



Gambar 12. Trend Unmet Need Pelayanan Kesehatan Menurut Status Ekonomi, Tahun 2019
Sumber : Susenas, BPS

Unmet Need pelayanan kesehatan pada sebagian besar provinsi telah berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 5,18%. Beberapa provinsi yang masih memerlukan perhatian khusus adalah Sulawesi Tengah (8,67%), Gorontalo (7,89%), Nusa Tenggara Timur (7,79%), Nusa Tenggara Barat (7,37%), dan Sulawesi Tenggara (7,34%).



Gambar 13. Unmet Need Pelayanan Kesehatan Tahun 2019.
Sumber : Susenas, BPS

III. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Kesehatan Ibu dan Anak

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif* (PONEK); 2) peningkatan layanan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi ibu, calon pengantin, serta remaja; 3) peningkatan pengetahuan ibu tentang perawatan antenatal dan pengasuhan anak; 4) peningkatan peran masyarakat melalui penguatan usaha kesehatan bersumber daya masyarakat seperti Desa Siaga, Program Perencanaan Persalinan dan Komplikasi Pencegahan (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi / P4K) dan Pos Kesehatan Terpadu (Posyandu); dan 5) peningkatan pendidikan dan promosi kesehatan, termasuk manfaat imunisasi.

Penyakit Menular

Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah: 1) peningkatan intervensi yang terbukti mencegah dan mengendalikan HIV/AIDS, TB, dan malaria seperti *voluntary, conseling, and testing* (VCT) untuk mengurangi kasus HIV/AIDS yang tidak dilaporkan; penggunaan metode *Rapid Molecular Test TB* untuk meningkatkan temuan kasus TB baru, dan penggunaan kelambu berinsektisida untuk mencegah penularan malaria; 2) perluasan penemuan kasus melalui peningkatan cakupan skrining terutama untuk kelompok risiko tinggi; 3) peningkatan efektivitas pengobatan, termasuk pencegahan *Multi Drug Resistance* (MDR); dan 4) peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS, TB dan Malaria.

Penyakit Tidak Menular (PTM)

Tantangan untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat PTM diantaranya: 1) meningkatkan cakupan skrining untuk PTM; 2) mengurangi gaya hidup tidak sehat seperti merokok, diet yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik; 3)



penguatan peraturan untuk pencegahan PTM seperti meningkatkan cukai hasil tembakau, memberlakukan larangan total iklan rokok, dan mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak; 4) menyediakan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik; dan 5) meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta fasilitas perawatan kesehatan karena jumlah prevalensi PTM meningkat; dan 5) meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta fasilitas perawatan kesehatan karena jumlah prevalensi PTM meningkat.

Kesehatan Reproduksi

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan partisipasi pendidikan perempuan untuk mencegah pernikahan dini; 2) peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan 3) peningkatan pendidikan kesehatan *reproduksi* terutama bagi anak usia sekolah.

Universal Health Coverage

Tantangan ke depan, adalah: 1) memperluas kepesertaan JKN terutama sektor informal dan pekerja; 2) meningkatkan kesiapan sisi penyedia pelayanan kesehatan melalui mendorong kerja sama yang lebih besar antara BPJS-Kesehatan dan fasilitas kesehatan swasta; dan 3) meningkatkan tata kelola JKN.

Tenaga Kesehatan

Tantangan pemenuhan tenaga kesehatan diantaranya: 1) menempatkan tenaga kesehatan di wilayah DTPK dan tidak diminati; 2) meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan untuk promotif dan preventif seperti tenaga kesehatan masyarakat, gizi dan kesehatan lingkungan; dan 3) meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan epidemiologi dan teknologi kesehatan

Farmasi dan Alat Kesehatan

Tantangan ke depan adalah: 1) meningkatkan penggunaan obat rasional (POR); 2) memperbaiki sistem *procurement*, penyimpanan dan distribusi terutama untuk DTPK; dan 3) mendorong kemandirian industri farmasi dalam negeri.

Box 01.
SMART BLAST MESSAGE,
“IBU HAMIL DAN IBU NIFAS PINTAR” AKI AKB MENURUN DI
KABUPATEN BANGKA

Latar belakang. Kabupaten Bangka merupakan kabupaten dengan Angka Kematian Ibu tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan 7 kabupaten/kota lainnya. Data pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu/AKI sebesar 188/100.000 Kelahiran Hidup, dengan jumlah absolut kematian ibu 12 orang. Kematian Bayi/AKB di Kabupaten Bangka pada tahun yang sama sebesar 7,5/1000 Kelahiran Hidup dengan jumlah kematian bayi absolut sebanyak 48 bayi. Kematian Balita (AKABA) 9,5/1000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian balita mencapai angka 61 Balita.

Berdasarkan masalah di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menginisiasi upaya penurunan AKI, AKB dan AKABA dengan meluncurkan program inovasi yaitu smart blast message. Program ini bersifat informatif dan edukatif melalui penyampaian informasi bagi ibu hamil dan ibu nifas sesuai dengan usia kehamilan dan usia bayi yang dilahirkan hingga 2 tahun. Ide dasar pelaksanaan program *smart blast message* yang dicanangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka ini berdasarkan analisa kasus kematian yang terjadi karena banyaknya komplikasi kebidanan yang belum mendapatkan pertolongan yang adekuat, kurangnya informasi & ilmu pengetahuan serta perilaku ibu hamil dan keluarga dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan serta tingginya kasus komplikasi yang ditemukan. Perlu dukungan dari Pemerintah Daerah mulai dari tingkat desa sampai kabupaten, tidak lupa juga keterlibatan dari anggota PKK, majelis taklim, forum komunikasi, organisasi masyarakat dan organisasi profesi serta semua komponen terkait. Pemerintah Kabupaten Bangka mengeluarkan beberapa kebijakan yang turut mensukseskan *smart blast message* ini, antara lain:

1. Instruksi Kepala Dinas Untuk membentuk TIM *smart blast message* Tingkat Kabupaten Bangka.
2. SK Bupati tentang pelaksanaan TIM *smart blast message* Tingkat Kabupaten Bangka Bangka.
3. MOU antar Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Institusi Pendidikan Akademi Kebidanan Sungailiat Bangka Tentang Peningkatan kualitas pelayanan kebidanan dan praktek klinik kebidanan.
4. MOU Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dan Bidan Praktek Mandiri Tentang Peningkatan kualitas Pelayanan Kebidanan dan Penerapan smart blast message.

Implementasi. Inovasi *smart blast message* ini memudahkan ibu hamil untuk mendapatkan informasi-informasi penting terkait kehamilan ibu serta pelayanan bayi baru lahir sehingga ibu dapat memberikan dan melakukan perawatan yang baik untuk ibu dan bayinya, selain itu *smart blast message* juga tidak membebankan biaya pulsa kepada ibu hamil yang mendaftar



kecuali hanya pada saat pendaftaran. *Smart blast message* merupakan media komunikasi satu arah dan bukan merupakan SMS Interaktif. Setelah ibu hamil mendaftar, *server* akan mengirimkan pesan-pesan kesehatan secara rutin setiap minggu sesuai usia kehamilan dan usia bayi. Materi yang akan disampaikan dalam program *smart blast message* disiapkan secara terpadu oleh lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Selanjutnya bidan desa, Puskesmas dan dinas kesehatan melakukan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) secara terus menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat.

Keberhasilan meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu nifas melalui inovasi ini dapat dilihat pada data hasil capaian kunjungan pertama (K1) 7106 kunjungan (98,94%), K4 ibu hamil (K4) 6647 kunjungan (92,85%), Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 6175 persalinan (94,64%) dan penanganan komplikasi pada ibu hamil mencapai 1128 kasus (85,35%). Dengan demikian AKI kabupaten Bangka pada tahun 2016 turun secara signifikan 50 % dari tahun 2015 yaitu menjadi 6 kasus kematian, sebelumnya 12 kasus kematian ibu pada 2015. Untuk kematian bayi juga mengalami penurunan yaitu dari 61 kasus kematian pada 2015 menjadi 51 kasus pada tahun 2016. Indikator kesehatan lainnya yaitu AKABA mengalami penurunan signifikan dari 13 kasus kematian balita pada tahun 2015 menjadi 5 kasus pada tahun 2016, dimana seluruh angka kematian balita ini didominasi kematian pada usia di atas 1 tahun

Box 02.

POSYANDU INTEGRASI INOVASI PROGRAM CSR PT. ADARO INDONESIA

Latar belakang. Desa Ambahai Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu kecamatan dengan kondisi geografis berupa dataran rendah 0-25 m dari permukaan laut dan tergenang secara periodik. Kondisi seperti ini menjadi kendala bagi masyarakat untuk akses ke tempat pelayanan kesehatan, hal ini menyebabkan tingginya kasus kematian ibu dan anak, termasuk rendahnya cakupan imunisasi pada balita.

Melihat kondisi ini masyarakat Desa Ambahai Kecamatan Paminggir berupaya untuk menyediakan posyandu aktif yang dapat membantu mereka dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Masyarakat secara bersama mengaktifkan kembali posyandu yang sudah ada dengan mengaktifkan kader kesehatan bersama Puskesmas Kecamatan Paminggir memilih kader-kader yang dapat menggerakkan posyandu.

Upaya ini mendapat dukungan dari Puskesmas Kecamatan Paminggir dan PT. Adaro Indonesia yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tabalong dan Balangan. Kader bersama pihak Puskesmas dan Tim PT. Adaro mengadakan *assessment* dengan masyarakat desa sehingga terpilih program KIBBLA (Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak).

Implementasi. Untuk meningkatkan kemampuan kader, Puskesmas bersama PT. Adaro melakukan peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan.



Kelas Darlan

Kelas Darta



Box 03.
GEREBEK PASAR LEGI
PUSKESMAS BUNGAH, KEC. BUNGAH, KAB. GRESIK
Cari penderita hipertensi bersama tukang parkir & tukang karcis
pasar legi

Latar belakang. Hipertensi termasuk 5 penyakit terbanyak yang ditemukan di Puskesmas Bungah pada tahun 2017. Sebagian besar penderita hipertensi tidak mengalami gejala sehingga ketika penderita datang ke puskesmas sudah dalam kondisi yang lebih berat bahkan setelah ada komplikasi. Beberapa tahun terakhir akibat terjadinya transisi perilaku dan gaya hidup, hipertensi menyerang penduduk pada usia yang lebih muda, oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan skrining kesehatan pada sasaran usia yang lebih muda sesuai dengan program pemerintah yaitu ≥ 15 tahun.

Puskesmas Bungah pada tahun 2017 skrining kesehatan pada 2844 orang. Melihat masih rendahnya cakupan skrining kesehatan di Puskesmas Bungah dalam rangka menjangkau kasus hipertensi, maka dilakukan inovasi dengan menjangkau masyarakat yang berkunjung ke Pasar Legi untuk dilakukan deteksi dini Hipertensi, kegiatan ini dikenal dengan Gerebek Pasar Legi. Inovasi ini cukup unik karena mitra kerja yang dipilih adalah petugas parkir dan petugas karcis Pasar Legi. Tempat pelaksanaan di pasar tradisional yaitu Pasar Legi di Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

Inovasi. Gerebek Pasar Legi mulai dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2018. Didahului dengan pembentukan tim kesehatan pada bulan Januari tahun 2018. Setelah itu dilaksanakan pertemuan lintas sektor dengan camat, danramil, kapolsek dan kepala desa Bungah untuk membahas kegiatan inovasi ini serta membantu dalam mempromosikan kegiatan ini sehingga masyarakat lebih banyak yang berpartisipasi serta ikut memfasilitasi kegiatan ini.

Selanjutnya dilakukan pembinaan dan edukasi pada petugas parkir dan petugas karcis dilaksanakan pada pertengahan Maret 2018 untuk memberikan wawasan pada mereka tentang tugasnya dalam inovasi Gerebek Pasar Legi. Keberlangsungan dan keberhasilan kegiatan ini terjadi karena ada dukungan semua sektor termasuk pemerintahan daerah. Adapun Indikator untuk evaluasi kegiatan adalah data jumlah pengunjung yang diperiksa di tenda kesehatan dan penemuan penderita hipertensi baru.

Tujuan. Gerebek Pasar Legi ini mampu mengubah pola pikir masyarakat dalam jangka panjang terutama tentang perlunya pemeriksaan kesehatan berkala meskipun tidak ada gejala penyakit serta pentingnya pola hidup sehat. Hal ini sesuai dengan tugas utama puskesmas dalam upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan. Melalui konseling yang diberikan saat Gerebek Pasar Legi bagi penderita hipertensi, penderita diharapkan mau berobat rutin untuk mencegah komplikasi hipertensi.

Kemitraan. Untuk optimalisasi pelaksanaan Grebek Pasar Legi maka secara berkala setiap 6 bulan dilakukan pertemuan tim Grebek Pasar Legi dengan mitra program yaitu petugas parkir dan petugas karcis Pasar Legi. Pertemuan ini ditujukan untuk melakukan pembinaan, evaluasi, serta memperkuat komitmen tim dan mitra dalam pelaksanaan program. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mitra tentang Hipertensi. Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui hasil dan kendala selama melaksanakan kegiatan agar bisa dicarikan solusi untuk kendala yang dihadapi.

Cakupan. Dengan inovasi Gerebek Pasar Legi ini, maka lebih banyak penderita hipertensi yang dapat dideteksi sejak dini. Dari data yang didapat, cakupan skrining hipertensi meningkat dari 2844 tahun 2017 menjadi 3128 tahun 2018.



V. KEBIJAKAN KE DEPAN

Dalam rangka pencapaian target SDGs bidang kesehatan, arah dan kebijakan pada RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, melalui:
 - a. Percepatan cakupan administrasi kependudukan
 - b. Integrasi sistem administrasi kependudukan
 - c. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, melalui:
 - a. Penguatan pelaksanaan jaminan sosial
 - b. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui:
 - a. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
 - b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
 - c. Peningkatan pengendalian penyakit
 - d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 - e. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan mencakup: i) penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; ii) pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; iii) pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan; iv) peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan; dan v) penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

VI. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	SUPAS dan SP	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	305 (2015)	271 (RKP)	305 (2015)	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Susenas BPS	%	91.51 (2015)	PM	94.71 (2018)	
3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Susenas BPS	%	77.63 (2015)	85 (RP-JMN)	85.94 (2019)	 Selanjutnya menjadi subindikator 3.1.2*
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	SDKI	Kematian per 1000 kelahiran hidup	40 (2012)	29.5 (Roadmap) 25 (Global, 2030)	32 (2017)	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	SDKI	Kematian per 1000 kelahiran hidup	19 (2012)	13.5 (Roadmap) 12 (Global, 2030)	15 (2017)	
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	SDKI	Kematian per 1000 kelahiran hidup	32 (2012)	21 (RKP)	24 (2017)	 Selanjutnya menjadi subindikator 3.2.1*
3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Kemenkes	%	66 (2015)	95	86 (Prognosa 2019)	 Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi



TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Riskesdas	%	15.4 (2013)	15.4 (RP-JMN)	21.8 (2018)	▼
3.4.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri	SRS Kemenkes	Kematian per 100.000 penduduk	1,77 (2014)	PM	NA	NA
3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Kementerian Kesehatan	Kabupaten / Kota	85 (2015)	280	407 (2019)	●

Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	*Kemenkes dan **BNN	Orang			NA	NA
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	BNN	Orang	10000 (2015)	22000	NA	NA
3.5.1(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Kementerian Sosial	Orang	PM	210	NA	NA Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
3.5.1(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	BNN	unit	PM	85	NA	NA Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkotika	BNN	%	1,7 (2015)	0,02	NA	NA Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Susenas, BPS	Liter per kapita	0.47 (2015)	PM	0.41 (2019)	▶

Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.



TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
3.a.1.*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Susenans, BPS	%	30.08 (2015)	PM	21.51 (2019)	▶
<p>Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua</p>							
3.b.3*	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan)	Kementerian Kesehatan	%	79.38 (2015)	90 (RPJMN)	96,34 (2019)	●
<p>Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</p>							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Kementerian Kesehatan	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk				
	Dokter Spesialis			0.13 (2015)	0.11 (Renstra)	0.15 (2017)	●
	Dokter Umum			0.43 (2015)	0.45 (Renstra)	0.48 (2017)	●
	Dokter Gigi			0.11 (2015)	0.13 (Renstra)	0.11 (2017)	▶
	Perawat			1.51 (2015)	1.8 (Renstra)	2.1 (2017)	●
	Perawat Gigi			0.07 (2015)	0.18 (RPJMN)	0.08 (2017)	▶
	Bidan			1.45 (2015)	1.2 (Renstra)	1.96 (2017)	●
	Tenaga Gizi			0.10 (2015)	0.14 (Renstra)	0.13 (2017)	●
	Tenaga Kesehatan Lingkungan			0.06 (2015)	0.18 (Renstra)	0.08 (2017)	▶
	Tenaga Keterampilan fisik			0.04 (2015)	0.05 (Renstra)	0.06 (2017)	●
	Tenaga Keteknisian Medis			0.08 (2015)	0.16 (Renstra)	0.12 (2017)	▶
	Tenaga Kesehatan Masyarakat			0.09 (2015)	0.18 (Renstra)	0.19 (2017)	●



DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2019). *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2017). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2018). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2018*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2018). *Roadmap of SDGs Indonesia Toward 2030*. Jakarta: BAPPENAS.
- BPJS Kesehatan. (2019). *Publikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan – Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan*. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- BPS. (1991). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (1994). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (1997). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2002/2003). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2007). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2010). *Sensus Penduduk (SP)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2012). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2015). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2015). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2015). *Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2016). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2017). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2017). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2019). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Kesehatan. (2013). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2016). *Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Global TB Report 2018*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia 2018*. Pusat Data dan Informasi. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2019). *Best Practices dan Inovasi 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2019). *Disease Prevention and Control Surveillance Report 2011-2018*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan.



We support the Sustainable Development Goals



We support the Sustainable Development Goals

4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua



I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, terdapat target-target yang harus dipenuhi diantaranya:

TARGET	DESKRIPSI
Target 4.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi anak dan remaja yang mencapai kemampuan minimum dalam membaca dan matematika 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 3. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 4. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 5. APK SD/MI/ sederajat 6. APK SMP/MTs/ sederajat 7. APK SMA/SMK/MA/ sederajat 8. Rata-rata lama sekolah



TARGET	DESKRIPSI
Target 4.2	9. Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) 10. APK PAUD
Target 4.3	11. APK SMA/SMK/MA/ sederajat 12. APK PT
Target 4.4	13. Proporsi remaja dan dewasa dengan kemampuan TIK
Target 4.5	14. Rasio APM Perempuan/laki-laki di setiap jenjang Pendidikan
Target 4.6	15. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun 16. Persentase angka melek aksara penduduk 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun
Target 4.7	17. Pengarusutamaan pendidikan kewarganegaraan dan pembangunan berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan
Target 4.A	18. Proporsi sekolah dengan akses terhadap listrik, internet, komputer, infrastruktur bagi kaum disabilitas, air minum, sanitasi layak, dan fasilitas cuci tangan
Target 4.B	19. Jumlah bantuan pemri kepada mahasiswa asing
Target 4.C	20. Persentase guru yang bersertifikat pendidik

Pembahasan Goal 4 akan mencakup 4 isu utama, yaitu: (1) Pemenuhan akses pendidikan; (2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) Pendidikan vokasi dan keterampilan untuk peningkatan keberkerjaan serta (4) Penguatan pendidikan 1 tahun pra-sekolah. Pembahasan mencakup analisa perkembangan capaian; kebijakan, strategi dan upaya yang dilakukan; praktik-praktik baik yang dilakukan dalam mendukung pencapaian SDG Tujuan 4; tantangan dan permasalahan yang masih dihadapi; serta upaya penguatan dan perbaikan ke depan.

Pendidikan merupakan suatu cara dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yang tertuang di dalam Preambule Undang Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan pendidikan merupakan faktor utama dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan keahlian yang berdaya saing, serta memiliki karakter dan budi pekerti yang unggul. Pembangunan pendidikan diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan yang merata dan meningkatnya kualitas, relevansi serta daya saing pendidikan. Pemenuhan layanan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Peningkatan layanan pendidikan berkualitas pada akhirnya akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian, karakter yang sesuai dan dapat mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh.



II. STATUS CAPAIAN

- Pengukuran berdasarkan PISA (*Programme for International Student Assessment*) dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), menunjukkan bahwa proporsi siswa yang dapat mencapai kompetensi minimal untuk matematika dan membaca masih rendah.
- Secara umum, dapat disimpulkan bahwa hampir semua anak usia 6 tahun memperoleh pelayanan pembelajaran terorganisir baik di tingkat Pra-sekolah (Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD) maupun di tingkat sekolah dasar. Selama 16 tahun terakhir antara tahun 2002 dan 2018, indikator ANAR anak usia 6 tahun mengalami perbaikan yang sangat pesat atau meningkat sebesar 36%.
- Tingkat partisipasi pemuda dalam Pendidikan menunjukkan tren yang positif baik pada pendidikan formal dan non-formal termasuk kursus. Selama periode 2009-2018, terjadi peningkatan yang cukup pesat yaitu sekitar 14%. Kesempatan pemuda untuk mendapatkan pendidikan formal/non-formal termasuk kursus telah setara antara perempuan dan laki-laki. Partisipasi pendidikan di jenjang pendidikan tinggi yang masih rendah sebesar 30,28% (2019) dan menunjukkan peningkatan yang lambat dari 25,26% (2015). APK PT juga belum mampu memenuhi target RPJMN 2015-2019 sebesar 36,73% (2019).
- Ketercapaian cakupan pendidikan juga didorong oleh keberhasilan Indonesia dalam memberikan layanan pendidikan yang setara antara perempuan dan laki-laki yang ditunjukkan nilai Rasio APM perempuan dan laki-laki semakin mendekati 1 (satu) seperti halnya pada tahun 2019.
- Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah cukup membuahkan hasil yang baik dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir. Hal ini dicerminkan oleh peningkatan kinerja berbagai indikator SDG4 yang dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran dan pengajaran berkualitas. Hal ini mencakup antara lain pemenuhan sekolah memiliki akses listrik, internet untuk tujuan pembelajaran, komputer untuk tujuan pembelajaran, sanitasi layak sesuai gender, air minum layak, dan alat cuci tangan layak.
- Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indonesia mengalami kemajuan jika dilihat dari persentase guru yang sudah berkualifikasi S1/DIV. Persentase guru berkualifikasi di jenjang SD mengalami kenaikan 4,14 persen, dari 84,21 persen di tahun 2017 menjadi 88,35% di tahun 2018. Kenaikan juga terjadi di jenjang SMP, SMA, dan SMK.

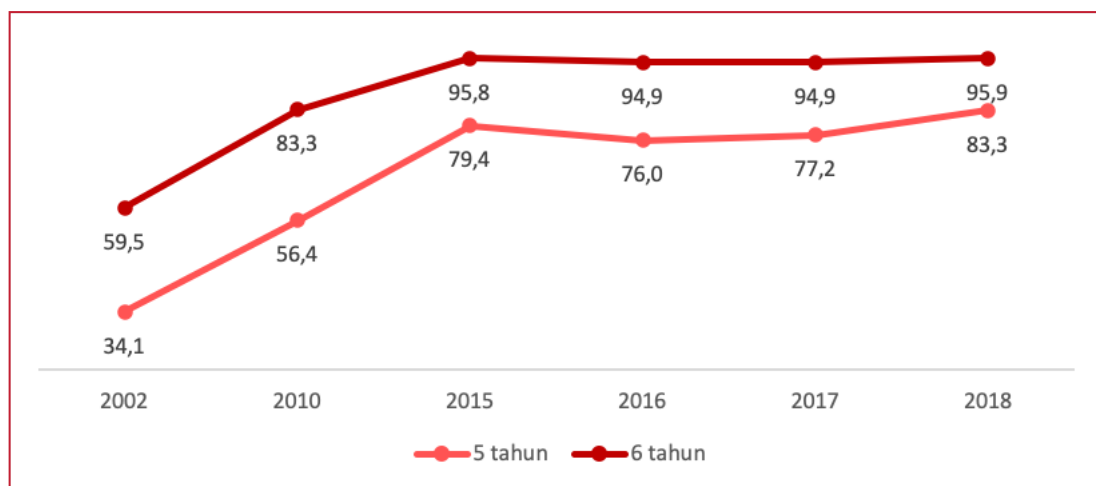


A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Penguatan Pendidikan 1 Tahun Pra-Sekolah

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar							
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Susenas BPS	%	95,8	PM	95,9 (2018)	●

Indikator global yang digunakan untuk melihat persentase penduduk usia 6 tahun yang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran terorganisir satu tahun sebelum sekolah dasar disebut dengan ANAR (*Adjusted Net Attendance Rate*).

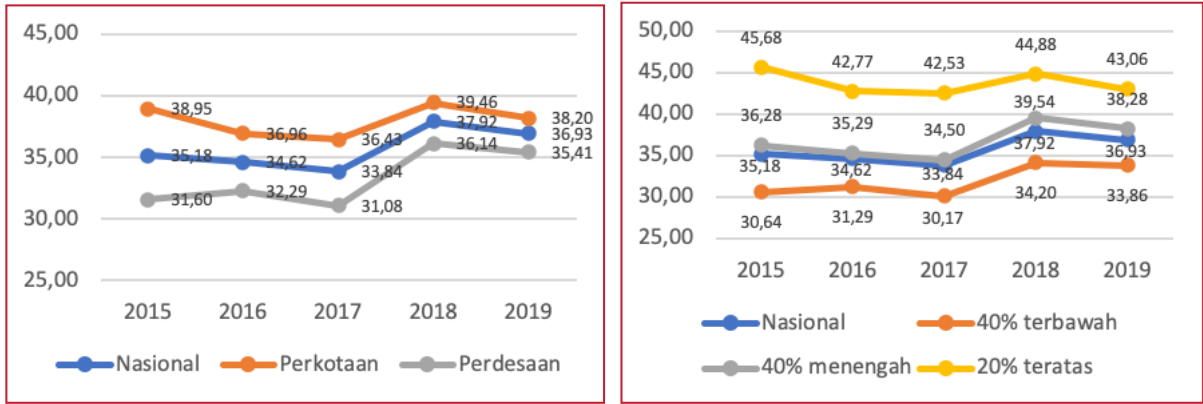


Gambar 01. Partisipasi Anak Umur 5 dan 6 Tahun dalam Pembelajaran Terorganisir, 2002, 2010, 2015-2018.

Sumber: Susenas Kor 2002, 2010, 2015-2018

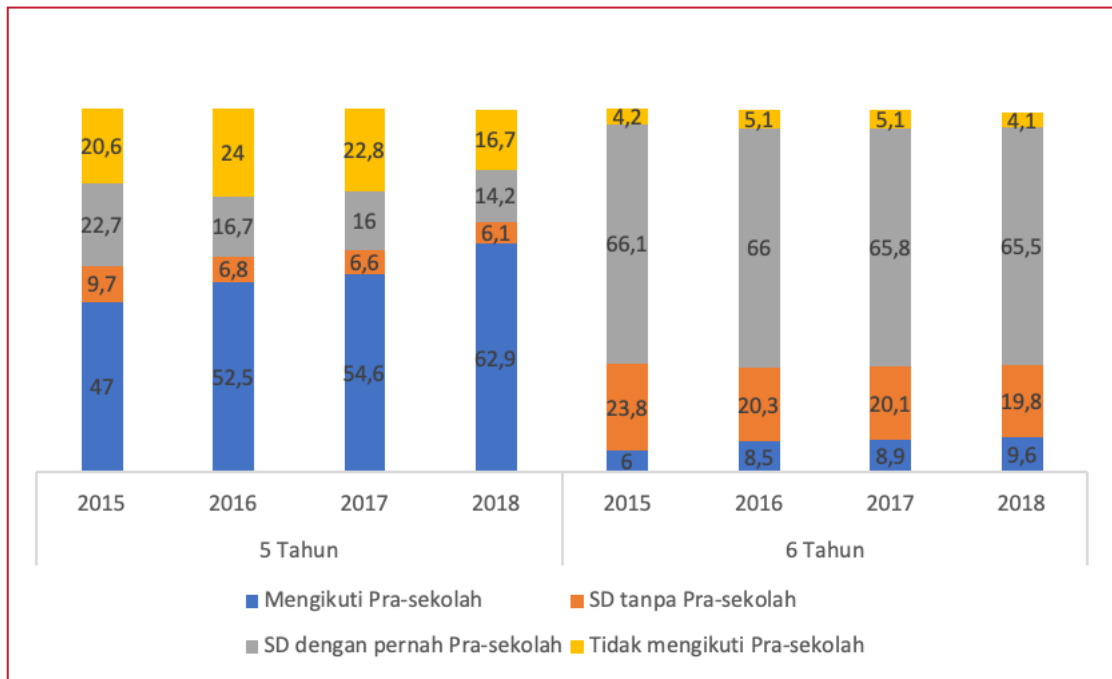
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa hampir semua anak usia 6 tahun memperoleh pelayanan pembelajaran terorganisir baik di tingkat Pra-sekolah (Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD) maupun di tingkat sekolah dasar. Selama 16 tahun terakhir antara tahun 2002 dan 2018, indikator ANAR anak usia 6 tahun mengalami perbaikan yang sangat pesat atau meningkat sebesar 36%.

Dari sekitar 86% anak usia 6 tahun yang bersekolah SD, 20% anak tidak pernah menempuh pendidikan Pra-sekolah (PAUD) dan dari 20% anak umur 5 tahun yang sudah bersekolah SD, 6,1% tidak pernah mengikuti pendidikan Pra-sekolah. Di tahun 2018, proporsi anak usia 6 tahun yang sedang menempuh pendidikan Pra-sekolah hanya sebesar 9,6% saja. Meski demikian, angka partisipasi ini telah meningkat sekitar 3,5% dari tahun 2015.



Gambar 02. Tren Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD menurut Wilayah dan Status Ekonomi
 Sumber: Susenas Kor, 2015-2019

Selanjutnya, di sisi lain Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD juga menunjukkan bahwa anak usia 3-6 tahun yang berpartisipasi di jenjang PAUD lebih tinggi pada wilayah perkotaan dan anak yang berasal dari kelompok keluarga dengan pendapatan 20% teratas. Namun, partisipasi pada tahun 2019 mengalami penurunan baik di perkotaan dan perdesaan maupun di setiap kelompok penduduk menurut status ekonomi. Begitu pula dengan APK PAUD pada anak penyandang disabilitas menurun tajam dari 40,02% (2018) menjadi 28,62% (2019).



Gambar 03. Partisipasi Anak Umur 5 dan 6 Tahun dalam Pembelajaran Terorganisir Berdasarkan Jenis Sekolah, 2015-2018
 Sumber: Susenas Kor, 2015-2019

Orangtua masih memasukkan anak mereka ke sekolah dasar sejak berusia di bawah 7 tahun. Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2018 sebagian besar anak usia 6 tahun (86%) sudah berada di sekolah dasar. Bahkan terdapat sebesar 20% anak usia 5 tahun di 2018 yang sudah berada di sekolah dasar. Padahal, berdasarkan anjuran Kemendikbud RI, anak semestinya mulai dimasukkan ke satuan pendidikan dasar (SD) setelah berusia 7 tahun.

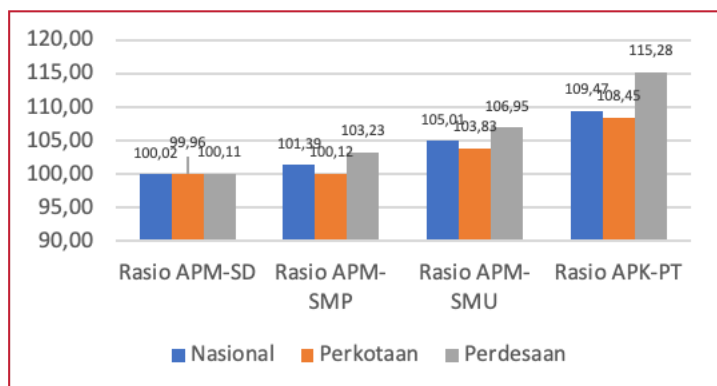
Disparitas gender dalam pendidikan telah dapat dihilangkan.

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD/MI/ sederajat	Susenas, BPS	%	100,33	100 (RP-JMN)	100,02 (2019)	●
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	Susenas, BPS	%	104,45	100 (RP-JMN)	101,39 (2019)	●
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat	Susenas, BPS	%	103,45	100 (RP-JMN)	105,01 (2019)	●
	Rasio APK Perempuan/ laki-laki di PT	Susenas, BPS	%	119,36	100 (RP-JMN)	109,47 (2019)	▶

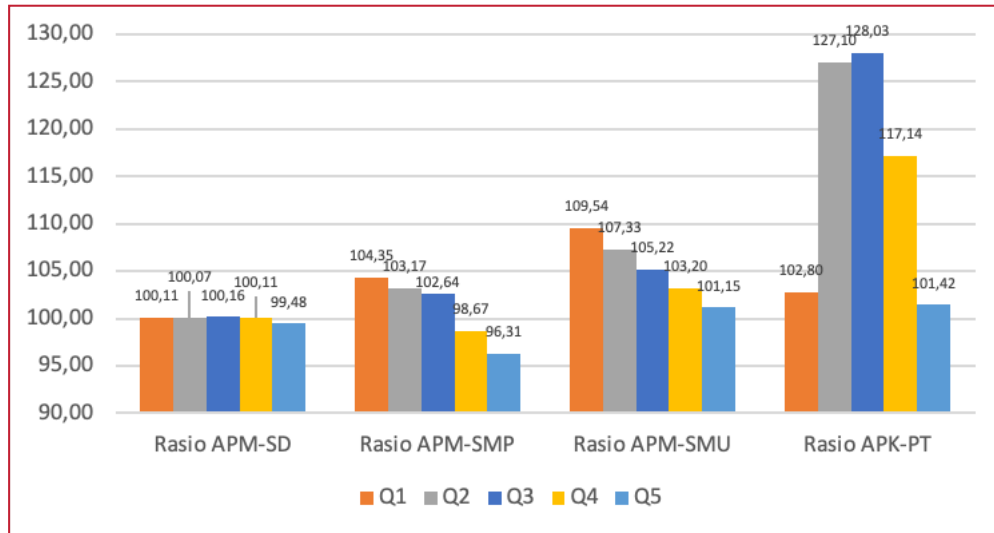
Keberhasilan upaya pemerataan kesempatan akses pendidikan juga tercermin dari Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada setiap jenjang pendidikan semakin mendekati 100% seperti halnya pada tahun 2019 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD/MI/ sederajat sebesar 100,02%, Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/ sederajat sebesar 101,39%, dan Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 105,01%. Sedangkan pada Perguruan Tinggi, APM perempuan sedikit lebih tinggi daripada APM laki-laki yaitu sebesar 109,47% artinya terdapat peserta didik laki-laki lulusan SMA/SMK/MA/ sederajat yang tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi.

Keberhasilan pemerataan akses pendidikan menurut jenis kelamin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah juga terlihat di wilayah pedesaan dan perkotaan, meskipun Rasio APM di perkotaan lebih mendekati 100% yang berarti lebih setara dibandingkan pedesaan.



Gambar 04. Indeks Paritas Pendidikan Menurut Wilayah.
Sumber : Susenas Kor, 2019

Adapun pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung telah mendekati 100% atau setara pada setiap kelompok status ekonomi, kecuali pada jenjang SMA diketahui partisipasi anak perempuan pada kelompok penduduk dengan pendapatan 20% terbawah (Q1) lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki.



Gambar 05. Indeks Paritas Pendidikan Menurut Status Ekonomi.
Sumber : Susenas Kor, 2019

Selanjutnya, pemerataan akses pendidikan antara perempuan dan laki-laki masih menjadi kendala pada kelompok disabilitas. Susenas 2019 menunjukkan Rasio APM Perempuan dan Laki-laki penyandang disabilitas pada jenjang SD sebesar 108,89%, jenjang SMA sebesar 160,27% dan Rasio APK Perempuan dan Laki-laki penyandang disabilitas pada jenjang Perguruan Tinggi sebesar 122,12%.

Kualitas fasilitas sekolah yang baik mendukung proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien.

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.							
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik, Kemdikbud	% Total	119,36	100 (RP-JMN)	113.24 (2018)	▶
		SD	90,77	94,4			
		SMP	93,60	96,85			
		SMA	97,19	98,93			
		SMK	97,83	99,56			
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik, Kemdikbud	% Total	5,98		(2018)	
		SD	29,85	34,70			
		SMP	83,17	49,23			
		SMA	86,62	69,20			
		SMK		75,99			
	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dapodik, Kemdikbud	% Total	32,05		(2018)	
		SD	43,41	40,38			
		SMP	55,02	55,0			
		SMA	60,90	72,92			
		SMK		79,0			

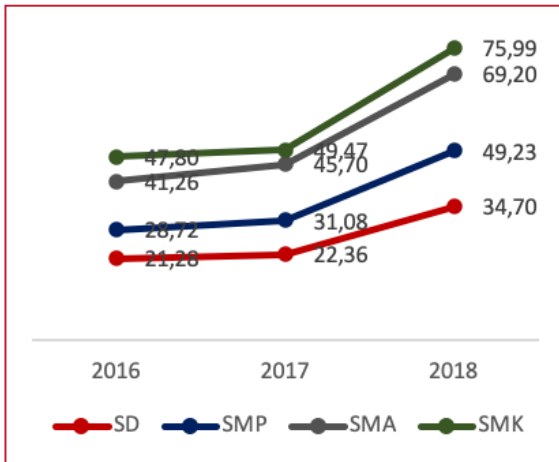


TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

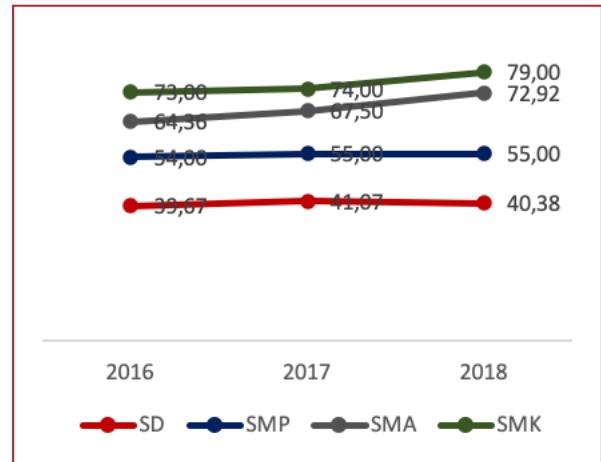
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dapodik, Kemdik-bud *tahun 2016	% Total SD SMP SMA SMK	119,36 68,15* 69,75* 73,97* 77,77*	100 (RP-JMN)	113,24 (2018) 87,11 87,04 89,85 92,21	▶
	Proporsi sekolah dengan akses ke:(f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Dapodik, Kemdik-bud *tahun 2016	% Total SD SMP SMA SMK	119,36 45,98* 60,11* 45,64* 50,73*	100 (RP-JMN)	113,24 (2018) 68,99 79,48 83,40 84,14	▶
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))	Dapodik, Kemdik-bud *tahun 2016	% Total SD SMP SMA SMK	119,36 65,10* 60,19* 68,72* 68,86*	100 (RP-JMN)	113,24 (2018) 51,14 44,67 51,65 51,63	▶

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah cukup membuahkan hasil yang baik dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir. Hal ini dicerminkan oleh peningkatan kinerja berbagai indikator SDG4 yang dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran dan pengajaran berkualitas. Hal ini mencakup antara lain pemenuhan sekolah memiliki akses listrik, internet untuk tujuan pembelajaran, komputer untuk tujuan pembelajaran, sanitasi layak sesuai gender, air minum layak, dan alat cuci tangan layak. Selain itu, indikator yang dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, seperti proporsi guru berkualifikasi S1/DIV; dan proporsi guru bersertifikasi menunjukkan perkembangan yang juga terus meningkat.





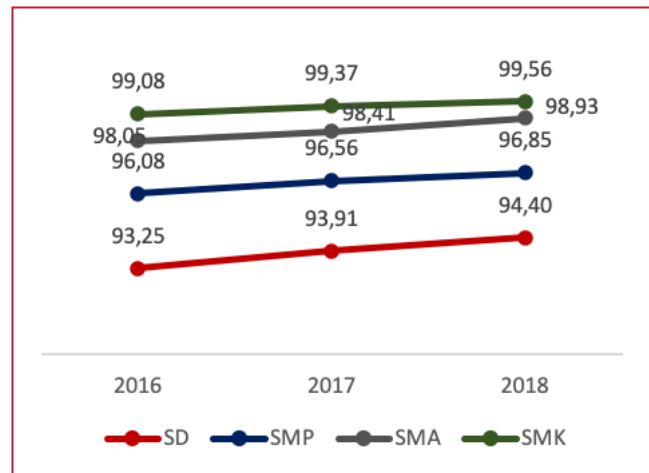
Gambar 06. Proporsi Sekolah yang Memiliki Internet untuk Pembelajaran, 2016-2018¹.
Sumber : Dapodik 2016-2018



Gambar 07. Proporsi Sekolah yang Memiliki Komputer untuk Pembelajaran, 2016-2018².
Sumber : Dapodik 2016-2018

Secara umum, kualitas sarana prasarana penunjang pendidikan di Indonesia terus membaik sepanjang periode 2015-2018. Komitmen untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran antara lain ditunjukkan dengan terus meningkatnya proporsi sekolah dengan akses ke internet dan komputer untuk pembelajaran. Khusus terkait akses internet, perkembangannya cukup pesat pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Indonesia dapat dikatakan sudah berhasil dalam memastikan pemenuhan sekolah untuk mendapatkan akses listrik. Sebagian besar sekolah, di atas 90 persen, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah telah memiliki akses ke listrik. SMK merupakan jenjang pendidikan dengan akses listrik tertinggi di antara jenjang lainnya. Bila kita amati pada Gambar 08, pada tahun 2018 proporsi SMK yang sudah memiliki akses ke listrik ialah sebesar 99,56 persen atau hampir mencapai 100 persen. Proporsi sekolah pada jenjang SD yang sudah mengakses listrik merupakan yang paling rendah dibanding jenjang lainnya, tetapi pertumbuhannya merupakan yang paling tinggi yaitu 1.15 poin presentase sepanjang 2016-2018.

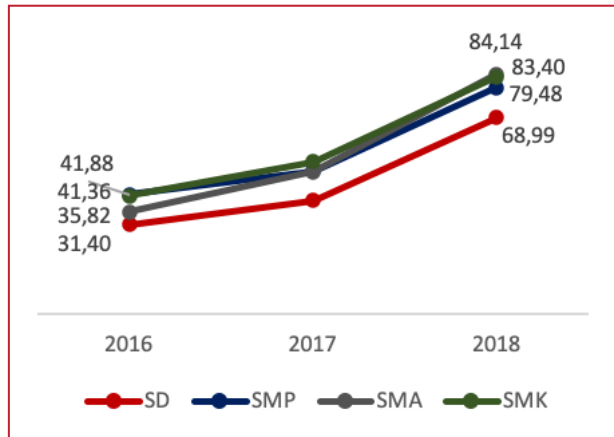


Gambar 08. Proporsi Sekolah Dengan Akses Listrik, 2016-2018.
Sumber : Dapodik 2016-2018

¹ Data proporsi sekolah yang memiliki internet diambil dari Dapodik menggunakan pendekatan sekolah seluruh jenjang yang memiliki internet, DAN komputer untuk pembelajaran, kemudian dikeluarkan ketersediaan sumber air minum layak yang sesuai standar (sumur tertutup, pdam, dll.) pada sekolah yang telah terdata.

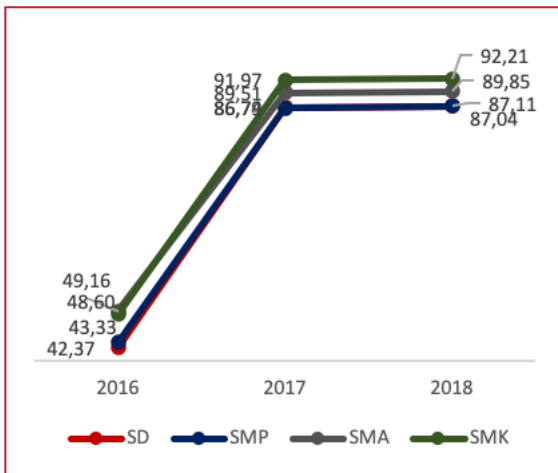
² Data proporsi sekolah yang mempunyai komputer untuk pembelajaran diambil dari Dapodik menggunakan data sekolah seluruh jenjang yang dibagi menurut jenjangnya, kemudian dikeluarkan ketersediaan komputer pada ruang-ruang pembelajaran (lab. komputer, ruang kelas, ruang guru, dll) pada sekolah yang telah terdata.

Kemajuan paling pesat terlihat pada sekolah yang memiliki toilet berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun 2018, sekolah di Indonesia sebagian besar sudah memiliki toilet dalam kondisi baik dan terpisah berdasarkan jenis kelamin. SMA mempunyai persentase tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya yakni sebesar 84,14 persen; kemudian disusul oleh SMK (83,40 persen); SMP (79,48 persen) dan terakhir SD sebesar 68,99 persen. Sekolah dengan akses terhadap air minum layak dan alat cuci tangan layak, juga terus mengalami perbaikan.



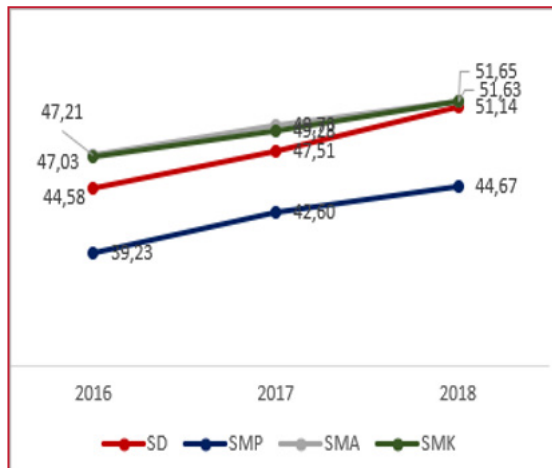
Gambar 09. Proporsi Sekolah yang Memiliki Toilet (Fasilitas Sanitasi Dasar) Sesuai Jenis Kelamin, 2016-2018

Sumber : Dapodik 2016-2018



Gambar 10. Proporsi Sekolah yang Memiliki Akses ke Air Minum Layak, 2016-2018³

Sumber : DEMIS (Data Pokok Pendidikan/Dapodik), 2016-2018



Gambar 11. Proporsi Sekolah yang Memiliki Alat Cuci Tangan Layak, 2016-2018⁴

Sumber : DEMIS (Data Pokok Pendidikan/Dapodik), 2016-2018

³Data proporsi sekolah yang memiliki air minum layak diambil dari Dapodik menggunakan data sekolah seluruh jenjang yang dibagi menurut jenjangnya, kemudian dikeluarkan ketersediaan sumber air minum layak yang sesuai standar (sumur tertutup, pdam, dll.) pada sekolah yang telah terdata.

⁴Data proporsi sekolah yang memiliki alat cuci tangan diambil dari Dapodik menggunakan data sekolah seluruh jenjang yang dibagi menurut jenjangnya, kemudian dikeluarkan ketersediaan alat cuci tangan (ada/tidak) dan kelengkapannya seperti aliran air dan sabun cuci (ada/tidak) pada sekolah yang telah terdata. Setelahnya yang masuk hitungan adalah sekolah yang mempunyai alat cuci tangan dan memiliki kelengkapannya.

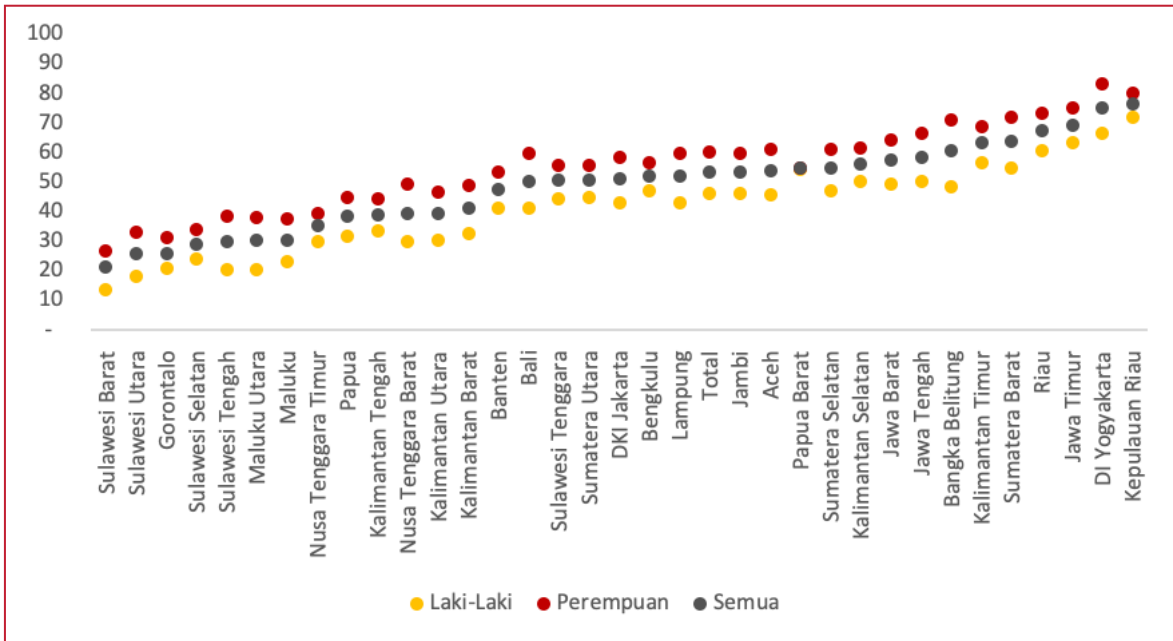


B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS.

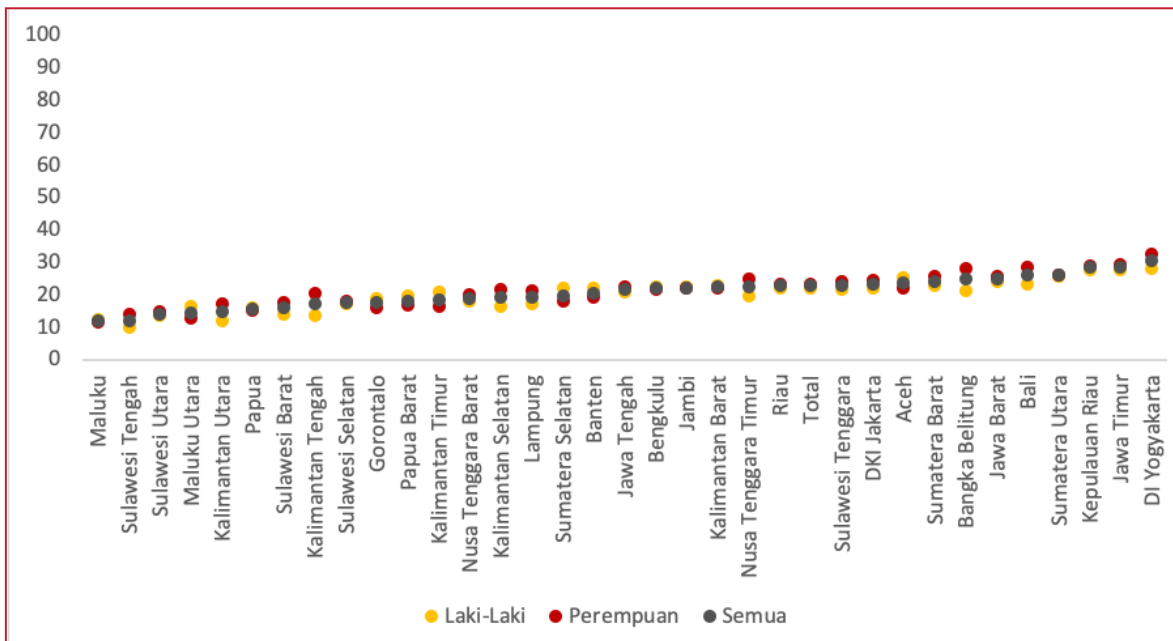
Kualitas Hasil Belajar Siswa Di Bidang Membaca Dan Matematika Menurun.

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	AKSI, Kemen-dikbud	%	53,17 (2016)	PM	53,17 (2016)	▼
	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika		%	22,87 (2016)	PM	22,87 (2016)	▼
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca		%	44,62	PM	30,10 (2018)	▼
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika		%	31,35	PM	28,10 (2018)	▼

Jika diagregasi berdasarkan jenis kelamin, hasil AKSI menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan di seluruh Provinsi yang berada di atas kemampuan minimum dalam membaca. Gap paling tinggi dijumpai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 71 persen dari perempuan mencapai paling tidak kemampuan minimum dalam membaca, sementara laki-laki hanya 49 persen. Kesulitan membaca pada tahap pendidikan awal akan menyebabkan kesulitan dalam pendidikan jenjang berikutnya. Untuk kemampuan minimum dalam matematika, seperti tampak pada gambar 13 bahwa terdapat gap yang tidak cukup signifikan terlihat antara laki-laki dan perempuan serta secara kewilayahan, masih banyak anak-anak perempuan maupun laki-laki di Indonesia yang memiliki kemampuan minimum matematika yang rendah.

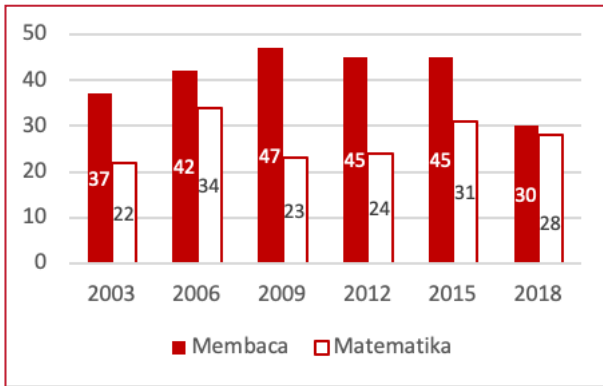


Gambar 12. Disparitas Gender dan Wilayah dalam Anak-anak Kelas 4 SD yang Mencapai Setidaknya Kemampuan Minimum Membaca, 2016
 Sumber: INAP 2016



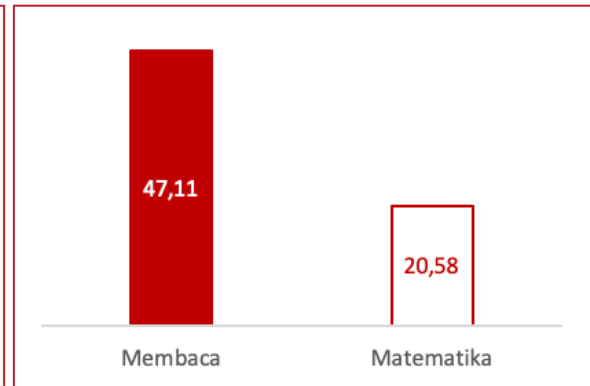
Gambar 13. Disparitas Gender dan Wilayah dalam Anak-anak Kelas 4 SD yang Mencapai Setidaknya Kemampuan Minimum Matematika, 2016
 Sumber: INAP 2016

Pengukuran berdasarkan PISA (*Programme for International Student Assessment*) dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), menunjukkan bahwa proporsi siswa yang dapat mencapai kompetensi minimal untuk matematika dan membaca masih rendah.



Gambar 14. Persentase Anak-anak dan Remaja pada Akhir Pendidikan Menengah Pertama yang Mencapai Setidaknya Tingkat Kemahiran Minimum dalam Membaca dan Matematika, 2000-2015.

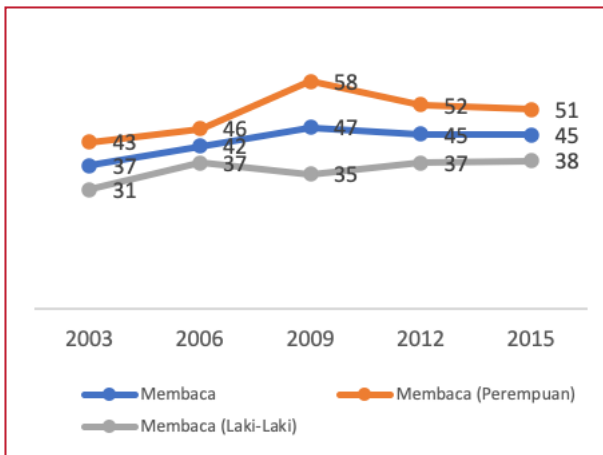
Sumber : PISA 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018
from <http://data.uis.unesco.org>



Gambar 15. Persentase Anak-anak dan Remaja pada Akhir Pendidikan Menengah Pertama yang Mencapai Setidaknya Tingkat Kemahiran Minimum dalam Membaca dan Matematika, 2016.

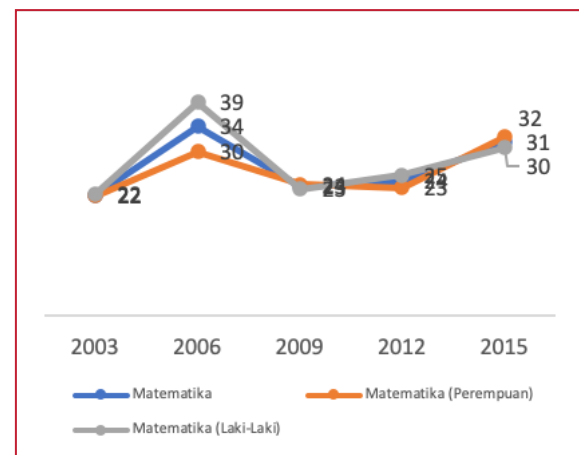
Sumber : INAP, 2016

Berdasarkan gender, anak perempuan secara umum menunjukkan kemampuan pemahaman minimum membaca yang lebih baik dibandingkan anak laki-laki (Figure 10). Antara periode 2003 sampai dengan 2015, proporsi remaja perempuan yang memiliki kemampuan minimum dalam membaca meningkat menjadi 51 persen, dibandingkan anak laki-laki yang sebesar 38 persen. Untuk matematika, baik perempuan maupun laki-laki menunjukkan kemampuan yang cukup berimbang.



Gambar 16. Persentase Anak-anak dan Remaja pada Akhir Pendidikan Menengah Pertama yang Mencapai Setidaknya Tingkat Kemahiran Minimum dalam Membaca Berdasarkan Jenis Kelamin, 2000-2015.

Sumber : PISA 2003, 2006, 2009, 2012, 2015
from <http://data.uis.unesco.org>

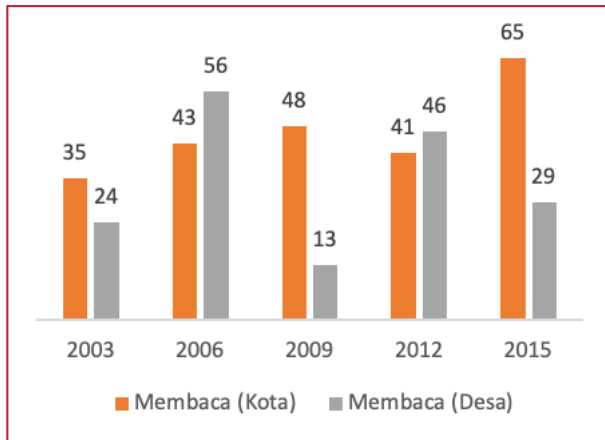


Gambar 17. Persentase Anak-anak dan Remaja pada Akhir Pendidikan Menengah Pertama yang Mencapai Setidaknya Tingkat Kemahiran Minimum dalam Matematika Berdasarkan Jenis Kelamin, 2000-2015.

Sumber : PISA 2003, 2006, 2009, 2012, 2015
from <http://data.uis.unesco.org>

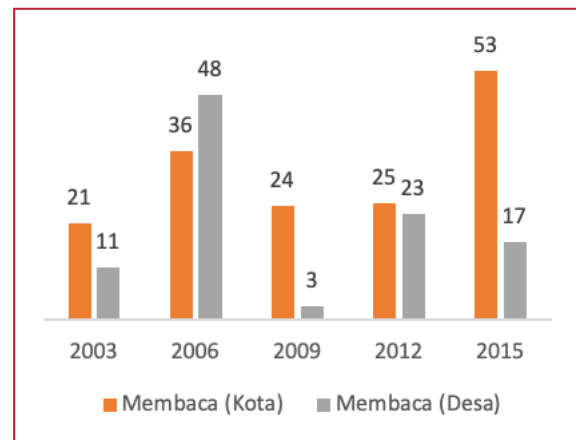
Berdasarkan lokasi desa-kota, anak-anak dan remaja pada akhir pendidikan menengah pertama yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam membaca berfluktuasi di perkotaan dan di perdesaan. Namun demikian di tahun 2015, kemampuan membaca ini jauh lebih tinggi di perkotaan yaitu sebanyak 65 persen dibandingkan di perdesaan yang hanya 29 persen. Dari gambar 23 dan 24 tampak bahwa jika ditinjau dari lokasi perkotaan dan perdesaan, anak-anak dan remaja yang memiliki tingkat kemahiran minimum dalam matematika di perkotaan secara umum lebih tinggi dari perdesaan, kecuali di tahun 2006. Bahkan di tahun 2015, terjadi peningkatan kesenjangan dalam kemampuan anak-

anak dan remaja dalam matematika antara penduduk kota dan desa.



Gambar 18. Persentase Anak-Anak dan Remaja Pada Akhir Pendidikan Menengah Pertama yang Mencapai Setidaknya Tingkat Kemahiran Minimum dalam Membaca Berdasarkan Lokasi, 2000-2015.

Sumber : PISA 2003, 2006, 2009, 2012, 2015
from <http://data.uis.unesco.org>



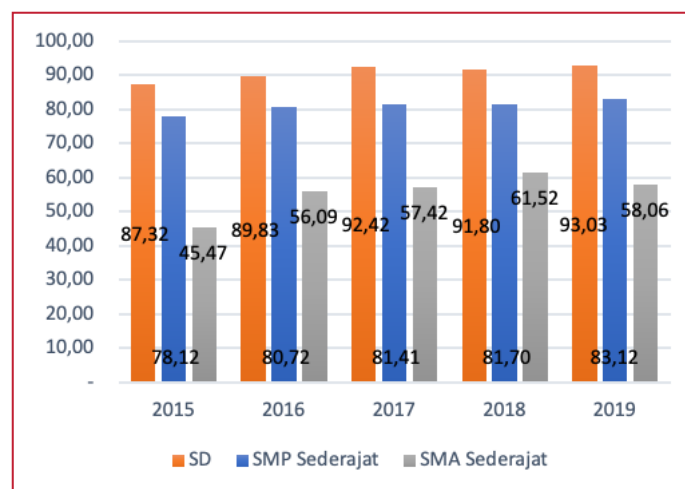
Gambar 19. Persentase Anak-Anak dan Remaja Pada Akhir Pendidikan Menengah Pertama yang Mencapai Setidaknya Tingkat Kemahiran Minimum dalam Matematika Berdasarkan Lokasi, 2000-2015.

Sumber : PISA 2003, 2006, 2009, 2012, 2015
from <http://data.uis.unesco.org>

Tingkat Penyelesaian Sekolah (*School Completion Rate*).

Untuk mengulas lebih rinci terkait akses pendidikan, perlu dilihat angka tingkat penyelesaian sekolah (*school completion rate*) untuk mengukur banyaknya anak dan remaja yang masuk sekolah tanpa penundaan yang berlebihan. Angka tingkat penyelesaian sekolah di berbagai jenjang terus mengalami peningkatan. Indonesia dapat dikatakan telah berhasil dalam upaya penyediaan pendidikan dasar, dengan tingkat penyelesaian sekolah pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat masing-masing mencapai 93 persen dan 83 persen pada tahun 2019.

Kemajuan tingkat penyelesaian sekolah terpesat terjadi pada tingkat SMA/ sederajat, di mana pada tahun 2019, sebesar 58,06 persen penduduk usia 19-21 tahun telah menamatkan pendidikan SMA/ sederajat. Angka ini meningkat sebesar 12 persen dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 45,47 persen. Namun, perlu dicermati bahwa terjadi penurunan sebesar 3,46% dari tahun 2018.



Gambar 20. Tingkat Penyelesaian Sekolah, 2015-2019

Sumber : Susenas Kor, 2015-2019

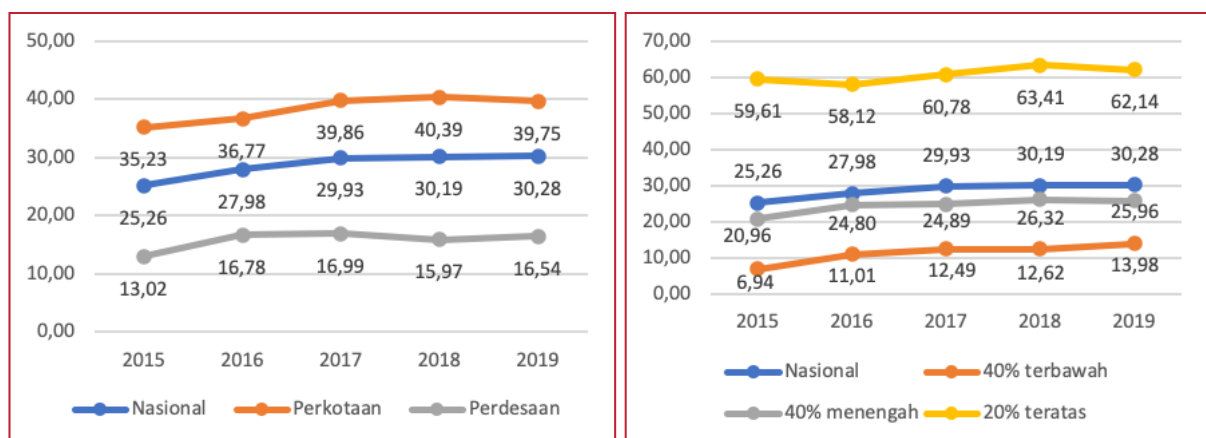
Partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi belum mampu mencapai target Tahun 2019 pada RPJMN 2019.

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
4.3.1(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Susenass, BPS	%	25,26	36,73 (RPJMN)	30,28 (2019)	▼

Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik dalam penyediaan akses pendidikan formal bagi penduduk. Secara umum, Indonesia menunjukkan perkembangan partisipasi pendidikan yang relatif terus meningkat pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah. Berbeda halnya dengan partisipasi pendidikan di jenjang pendidikan tinggi yang masih rendah sebesar 30,28% (2019) dan menunjukkan peningkatan yang lambat dari 25,26% (2015). APK PT juga belum mampu memenuhi target RPJMN 2019 sebesar 36,73%. Namun demikian, secara umum APK PT menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan APK PT juga terlihat pada kelompok penduduk baik di pedesaan maupun perkotaan serta setiap kelompok penduduk menurut status ekonomi. Meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan di perkotaan dan kelompok penduduk pendapatan 40% menengah dan 20% teratas.

Selain itu, disparitas akses terhadap pendidikan tinggi masih sangat terlihat antara perkotaan dan pedesaan dimana masing-masing 39,75% dan 16,54% (2019). Kesenjangan juga terlihat pada kelompok status ekonomi penduduk yaitu peserta didik berasal dari keluarga berpendapatan 20% teratas yang mengenyam pendidikan tinggi jauh lebih banyak (62,14%) dibandingkan peserta didik dari keluarga berpendapatan 40% terbawah (13,98%). Hal tersebut menggambarkan bahwa pada jenjang pendidikan tinggi, faktor jarak, ketersediaan transportasi, dan status ekonomi sangat mempengaruhi tingkat partisipasi peserta didik.

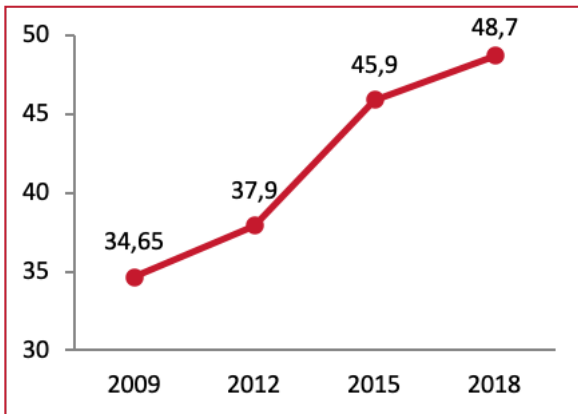


Gambar 21. APK PT menurut Wilayah dan Status Ekonomi.

Sumber: Susenas Kor, 2015-2019

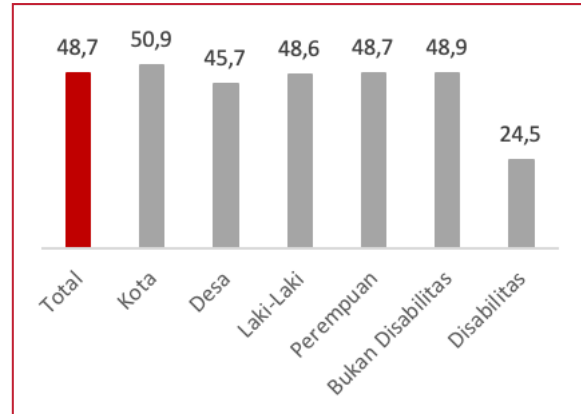
Partisipasi Remaja dan Dewasa dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non-Formal.

Tingkat partisipasi pemuda dalam Pendidikan menunjukkan tren yang positif baik pada pendidikan formal dan non-formal termasuk kursus. Selama periode 2009-2018, terjadi peningkatan yang cukup pesat yaitu sekitar 14%. Kesempatan pemuda untuk mendapatkan pendidikan formal/non-formal termasuk kursus telah setara antara perempuan dan laki-laki.



Gambar 22. Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan Formal/Nonformal/Training dalam Setahun Terakhir, 2009-2018.

Sumber : Susenas MSBP, 2009-2018



Gambar 23. Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan Formal/Nonformal/Training Dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2018.

Sumber : Susenas MSBP, 2018

Persentase partisipasi pemuda penyandang disabilitas dalam pendidikan dan kursus lebih rendah sekitar 50% dibandingkan bukan penyandang disabilitas (Gambar). Hal ini patut menjadi perhatian mengingat kelompok penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus dalam target pendidikan SDGs.

Meskipun partisipasi pemuda dalam pendidikan formal/nonformal/kursus mengalami peningkatan, tetapi proporsi pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan masih belum terbilang tinggi. Di tahun 2018, misalnya, baru sekitar 49% pemuda yang sedang berpartisipasi dalam pendidikan atau kursus. Hal tersebut ditengarai terjadi karena mereka lebih memilih untuk bekerja dibanding mengikuti pendidikan formal, pendidikan non-formal maupun kursus.

Guru yang Bersertifikasi.

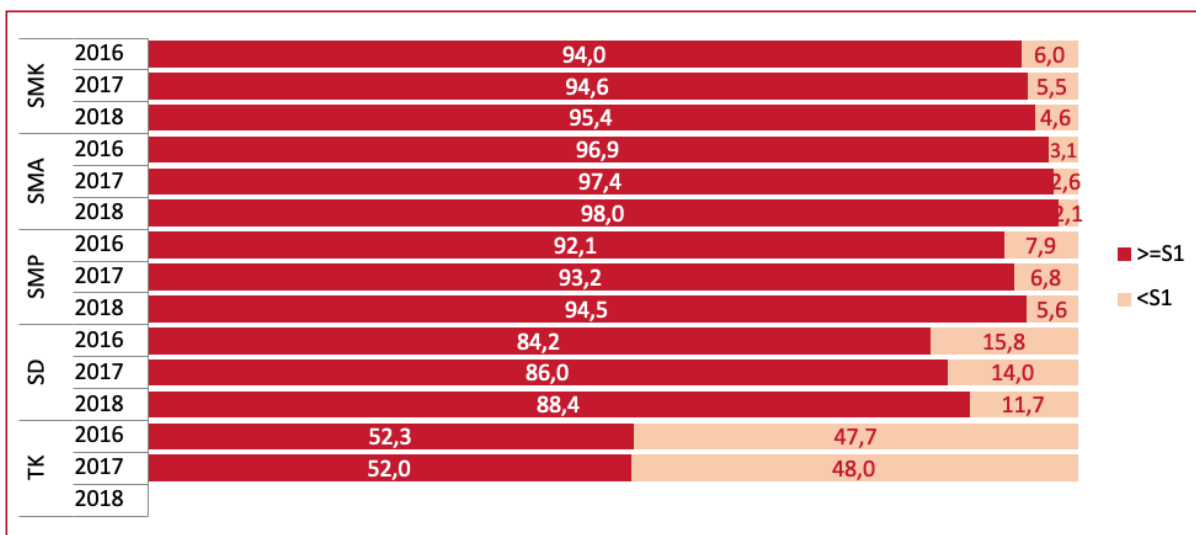
TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1*	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	Dapodik, Kemdikbud *tahun 2016 **tahun 2018	% Total PAUD SD SMP SMA SMK	53,4 68,95* 45,03* 50,07* 50,95* 37,34*	77,2	46,15 (2017) 66,67 42,81** 45,75** 46,49** 35,3**	▼

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
	Persentase guru dengan kualifikasi minimal S1/D4		% Total	75	90	80	▼
				31	(RKP)	NA	●
				62,8	52,4	88,4**	●
				81,7	70,9	94,5**	●
				96	91	98,0**	▼
				89	99	95,4**	▼

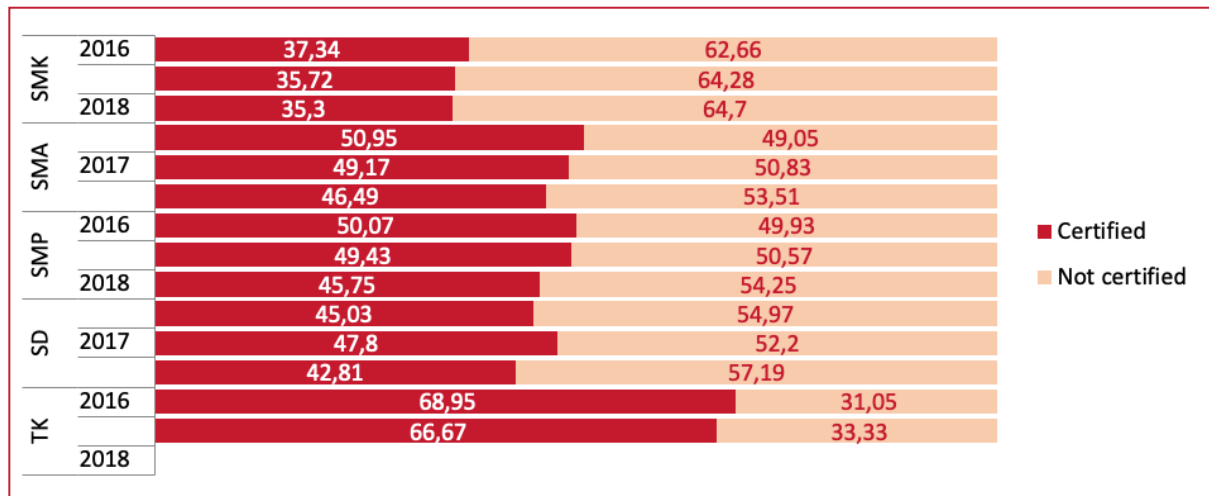
Selain sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, guru memegang peran penting dalam dalam menjamin proses pembelajaran dan pengajaran berkualitas. Penguatan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional guru ditujukan untuk mendudukan kembali peran guru sebagai fasilitator yang akan mendukung berjalannya proses pembelajaran yang lebih efektif, aktif dan berkualitas. Undang-Undang 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV), dan memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Lewat sertifikasi, para guru diharapkan mempunyai sejumlah kompetensi, baik pedagogik, kepribadian, sosial, serta kompetensi profesional.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indonesia mengalami kemajuan jika dilihat dari persentase guru yang sudah berkualifikasi S1/DIV. Persentase guru berkualifikasi di jenjang SD mengalami kenaikan 4,14 persen, dari 84,21 persen di tahun 2017 menjadi 88,35 di tahun 2018. Kenaikan juga terjadi di jenjang SMP, SMA, dan SMK.



Gambar 24. Proporsi Guru Berdasarkan Kualifikasi S1/DIV, 2016-2018.

Sumber: Dapodik, 2016-2018



Gambar 25. Perkembangan Persentase Guru Bersertifikasi, 2016-2018.
Sumber: Dapodik, 2016-2018

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

1. Pemenuhan Akses Pendidikan.

Anak-anak kurang mampu cenderung untuk tidak melanjutkan dan putus sekolah pada jenjang menengah. Intervensi, keberpihakan dan pemberian bantuan pendidikan terhadap anak dari keluarga kurang mampu, belum cukup efektif berjalan. Pada jenjang pendidikan tinggi, kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi juga masih sangat lebar. Penyediaan layanan pendidikan tinggi belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok masyarakat berstatus sosial-ekonomi rendah.

Penanganan ATS masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Masih rendahnya sinkronisasi lintas sektor menjadikan upaya untuk meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis yang menyebabkan anak usia sekolah tidak dapat menjangkau dan mendapatkan layanan pendidikan, belum berjalan secara optimal. Selain itu, upaya penanganan ATS yang dilakukan selama ini belum cukup mengakomodir dan memperhatikan kebutuhan dan berbagai isu yang dihadapi anak, seperti anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.

Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia juga masih menghadapi beberapa tantangan, misalnya, tidak semua sekolah siap menerima anak berkebutuhan khusus. Sekolah tidak memiliki guru dengan latar belakang khusus untuk menangani dan membimbing siswa penyandang cacat. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas sosial di sekolah masih sangat kurang, sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Karena keterbatasan infrastruktur pendukung, banyak anak-anak penyandang cacat terpaksa bersekolah di lokasi yang cukup jauh dari rumah mereka

Indonesia telah memiliki Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Tantangan dalam pelaksanaan Pendidikan inklusif, masih terbatas pada sekolah inklusi. Namun demikian, upaya melakukan gerakan



bersama untuk mewujudkan pendidikan inklusif terus dilakukan. Sebagai contoh Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, NTT dan Papua melakukan assessment dan advokasi penerima manfaat penyandang disabilitas usia sekolah. Hal penting yang perlu dilakukan kedepan adalah: (1) Penguatan keberpihakan pemerintah daerah melalui kebijakan afirmatif; (2) Penguatan gerakan dan partisipasi Organisasi Penyandang Disabilitas; (3) Penyiapan masyarakat umum untuk hidup berdampingan dan menghormati hak-hak kelompok berkebutuhan khusus.

2. Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran

Intervensi sarana prasarana dan guru yang diarahkan untuk mendukung meningkatnya kualitas layanan pendidikan, belum menunjukkan dampak signifikan terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari data PISA dan AKSI Tahun 2015 yang menunjukkan proporsi siswa yang dapat mencapai kompetensi minimal untuk matematika dan membaca masih rendah. Tantangan lain masih terlihat dalam hal guru bersertifikasi yang dapat dilihat dari penurunan jumlah guru yang sudah disertifikasi di setiap jenjang pendidikan. Hal ini diduga terjadi karena metode yang awalnya menggunakan model Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) selama 9 hari, sekarang menggunakan model Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilakukan selama 6 bulan lamanya.

Dalam hal pengembangan kurikulum di masa depan, proses tersebut harus lebih inklusif dan kolaboratif untuk menghasilkan kurikulum yang fleksibel dengan kemampuan dan minat anak-anak. Penilaian pembelajaran harus diarahkan untuk memberikan umpan balik dalam perumusan strategi pembelajaran masa depan.

3. Keterampilan, Vokasi dan Kebekerjaan

Meskipun kesempatan untuk mendapatkan pendidikan vokasi, termasuk kursus mengalami peningkatan, namun dilihat dari sisi ke bekerjaan lulusan, masih banyak upaya dan kerja keras yang perlu ditingkatkan dalam layanan pendidikan. Tantangan lain terkait partisipasi pemuda dalam pendidikan adalah kesenjangan yang besar antara kelompok penyandang disabilitas dan kelompok bukan penyandang disabilitas.

Mengenyam pendidikan yang lebih tinggi tidak serta merta menjamin peluang bekerja yang lebih besar. Pandangan seperti ini dapat menimbulkan keengganan pemuda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena manfaat yang didapatkan dianggap kurang sebanding dengan biaya, waktu, dan usaha yang dikeluarkan.

4. Penguatan Pendidikan 1 Tahun Pra-Sekolah

Tantangan yang masih dihadapi pembangunan jenjang pendidikan pra-sekolah, antara lain: (1) masih lemahnya koordinasi lembaga PAUD antar kementerian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan juga dengan pemerintah daerah; (2) belum ada sinkronisasi kebijakan terkait pembinaan guru; (3) kesejahteraan guru PAUD masih rendah; (4) belum adanya kepastian sertifikasi untuk guru PAUD; (5) kemitraan antara orang tua siswa PAUD dan sekolah masih lemah; (6) tingkat pendidikan, minat, dan ekonomi dari orang tua yang masih rendah; serta (7) faktor budaya di mana nilai di lingkungan tidak mendorong anak untuk bersekolah di PAUD.



III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Box 01.

Pendidikan Inklusif untuk Semua

Meskipun pendidikan inklusif terbatas dilaksanakan di sekolah-sekolah tertentu di daerah tertentu, pengalaman yang baik dapat disajikan sebagai proses pembelajaran praktik yang baik. Sebagai contoh: siswa dengan kebutuhan khusus di Sekolah Menengah Pertama Metro 2 (SMPN 2 Metro) Provinsi Lampung dapat bersosialisasi dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan teman-teman sebayanya yang tidak cacat. Mereka dapat menerima perbedaan dan membangun empati sosial, sehingga interaksi sosial yang baik dibangun, yang kondusif untuk proses pembelajaran di sekolah. Mereka saling memotivasi untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi, bahkan di antara siswa dengan gangguan autisme di sekolah ini berhasil menjadi juara di Olimpiade Sains Nasional. Hal yang baik adalah bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak memiliki hambatan, bahkan mereka mampu mengembangkan harga diri mereka - kualitas kepribadian yang menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, yang penting untuk pencapaian.

Di daerah lain, Organisasi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua juga melakukan penilaian dan advokasi untuk anak-anak usia sekolah penyandang cacat. Untuk alasan ini, hal-hal penting yang perlu dilakukan adalah: (1) meningkatkan peran pemerintah daerah dan memperkuat kebijakan afirmatif untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif; (2) memperkuat gerakan advokasi sosial dan meningkatkan peran dan partisipasi Organisasi Penyandang Disabilitas; (3) Persiapan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan dan menghormati hak-hak penyandang cacat.

Box 02.

Rumah Belajar

Rumah Belajar merupakan laman belajar daring (online) yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diakses melalui tautan <https://belajar.kemdikbud.go.id>. Rumah belajar bertujuan agar pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran secara komprehensif melalui media yang lebih menarik dan interaktif. Rumah Belajar memberikan layanan ketersediaan sumber media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar interaktif yang dilengkapi dengan media pendukung gambar, animasi, video, dan simulasi, serta dalam bentuk buku digital. Sosialisasi pemanfaatan Rumah Belajar dibantu oleh Duta Rumah Belajar di 34 Provinsi, sebagai perpanjangan tangan Kemendikbud.

Tautan Rumah Belajar terdiri dari dua fitur, yaitu fitur utama dan fitur pendukung. Pada menu Fitur Utama terdapat delapan kelompok konten, yaitu Sumber Belajar, Buku Sekolah Elektronik, Bank Soal, Laboratorium Maya, Peta Budaya, Wahana Jelajah Angkasa, Pengembangan Ke-profesionalitas Berkelanjutan, dan Kelas Maya. Sedangkan pada menu Fitur Pendukung terdapat tiga kelompok konten, yaitu Karya Guru, Karya Komunitas, serta Karya Bahasa dan Sastra. Sebagai contoh, yaitu fitur Peta Budaya, disiapkan untuk menyediakan berbagai macam materi pembelajaran budaya di Indonesia sehingga peserta didik dapat lebih mengetahui dan menghargai keragaman adat istiadat/budaya.



Cultural Maps Feature at Rumah Belajar's Link

Rumah Belajar sangat mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik PAUD, SD, hingga SMA/SMK, sesuai dengan jargonnya, yaitu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sejauh ini, Rumah Belajar telah banyak dimanfaatkan oleh pendidik sebagai sumber media pembelajaran. Bagi pendidik di daerah 3 T (terdepan, terluar, tertinggal), ketiadaan sambungan internet di kelas bukan menjadi kendala dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan materi yang diambil dari Rumah Belajar. Materi Rumah Belajar dapat diunduh, dan disimpan dalam alat penyimpanan data, yang kemudian dapat ditayangkan di kelas dengan proyektor LCD secara luring (offline). Dalam hal ini pendidik bertindak sebagai fasilitator untuk menampilkan materi dari Rumah Belajar. Dengan cara demikian itu, kelas yang tidak terakses internet pun dapat memanfaatkan konten Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan bentuk inovasi pembelajaran dg memanfaatkan teknologi informasi, yang mendukung upaya peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas - equity of quality education service.

Box 03.

Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation

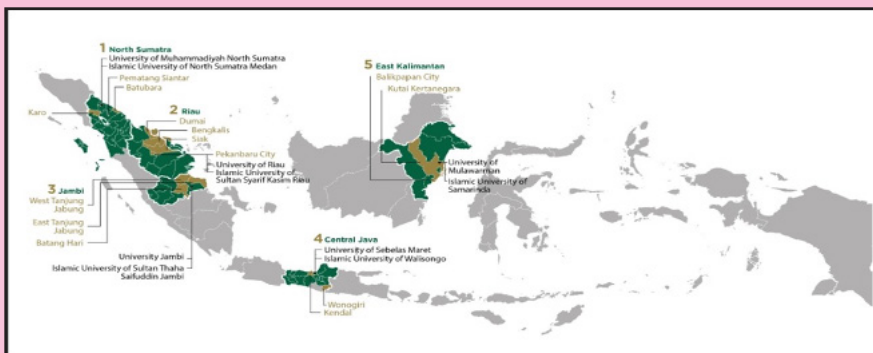
Tanoto Foundation telah melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan dasar sejak tahun 2010, yang menjangkau lebih dari 500 sekolah di tiga provinsi di Sumatera, dan berhasil meningkatkan nilai membaca siswa di sekolah-sekolah tersebut secara signifikan. Program ini bertujuan untuk mencapai peningkatan dalam hasil belajar siswa dan terbukti berhasil ketika sekolah intervensi di Riau mencapai skor 54,8% dalam membaca

kelas awal dibandingkan dengan rata-rata di seluruh provinsi sebesar 48,6% berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada 2016. Pada tahun 2018, setelah mengkaji secara komprehensif terhadap program-programnya, Tanoto Foundation meluncurkan program baru dengan nama “PINTAR” (Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran) untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Program ini dikembangkan berdasarkan keberhasilan program Tanoto Foundation sebelumnya dan mengacu pada kesuksesan program lain yang didanai oleh USAID, UNICEF dan donor lainnya. Program baru ini telah menjangkau 440 sekolah pada tahun peluncurannya dan direncanakan untuk didiseminasikan ke ribuan sekolah oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tiga tahun.



Mayla Arista Widya, siswa SDN 173 Tanjung Benanak, Jambi, showed a good practice in reading on School Literacy Festival

Program PINTAR menjalin kemitraan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), juga bermitra dengan 14 kabupaten/Kota dan 10 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur (2 LPTK di setiap provinsi). Tanoto Foundation telah menandatangani nota kesepahaman dengan semua mitra tersebut dan sedang melakukan pengembangan kapasitas pemerintah, terutama di tingkat daerah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di sekolah dasar dan menengah secara berkelanjutan. Pada tahun 2019, program ini akan dikembangkan di enam kabupaten baru untuk menjangkau lebih dari 580 sekolah secara langsung.



**Map of Pintar*

Menyadari keberhasilan Indonesia saat ini dalam meningkatkan akses siswa terhadap pendidikan, fokus Tanoto Foundation adalah peningkatan kualitas pendidikan (SDG 4.1) dan pendidikan guru pra-jabatan (SDG 4.c). Tanoto Foundation telah melakukan asesmen siswa dalam literasi, matematika, dan sains untuk mengidentifikasi bidang prioritas yang akan diintervensi. Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa hanya 60% siswa kelas 3 yang dapat membaca dengan lancar dan memahami yang dibacanya, dan hanya 18% siswa kelas 3 yang dapat menggunakan kemampuan matematika

untuk memecahkan masalah yang setara dengan usia mereka. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan literasi, program ini berfokus pada pengembangan kebiasaan membaca siswa dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami isi bacaan tersebut. Untuk matematika dan sains, fokusnya adalah memastikan bahwa siswa memahami konsep yang mereka pelajari dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Asesmen akan dilakukan setiap dua tahun untuk menilai kemajuan dalam literasi, matematika, dan sains di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Program ini meningkatkan kualitas praktik guru sehari-hari dan perubahan lingkungan belajar di kelas dapat dilihat oleh siapa pun yang mengunjungi sekolah mitra PINTAR. Sebagai contoh, sebagian besar dari 440 sekolah mitra telah membangun sudut baca di ruang kelas mereka, mengalokasikan waktu membaca 15 menit setiap hari untuk siswa, dan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam menyediakan buku-buku tambahan untuk sekolah mereka. Beberapa kabupaten menggunakan perpustakaan keliling untuk mendukung sekolah mereka. Tanoto Foundation mendokumentasikan kegiatan pembelajaran tersebut dalam satu seri buku pegangan praktik terbaik, yang dibagikan bersama-sama modul pelatihan PINTAR secara gratis kepada mitra dalam rangka menyebarkan dampak di luar kegiatannya sendiri.

Tanoto Foundation bekerja dengan pemerintah memaksimalkan jangkauan terhadap penerima manfaat dari berbagai program nasional dan daerah. Seorang siswa SDN 173 Tanjung Benanak, Jambi baru-baru ini muncul di sebuah acara peningkatan baca di Kemdikbud. Siswa tersebut dengan fasih menjelaskan bagaimana ia membaca rata-rata 2-3 buku per minggu dan kegiatan ini telah meningkatkan kemampuan menulisnya. Dia telah menulis buku cerita sendiri, dan membuat laporan percobaan sains, teknologi, dan matematika.



Sains activities in MTsN 1 Balikpapan, East Kalimantan Province.

Faktor kunci keberhasilan program PINTAR lainnya adalah menargetkan calon guru yang sedang menjalani Pendidikan. Pemerintah kabupaten-kota mitra dan Kemenag telah mengalokasikan dana dan menjalankan program untuk lebih dari 1.000 sekolah non-mitra hanya dalam waktu 7 bulan. Banyak dari sekolah-sekolah tersebut telah membiayai pelatihan dengan menggunakan dana operasional mereka sendiri.



Box 05.

Sekolah Guru Kebhinekaan

Sekolah Guru Kebhinekaan dimulai pada tahun 2016 dan masih berjalan sampai sekarang. Sekolah Guru Kebhinekaan terdiri dari 15 pertemuan yang memperkuat pemahaman filosofi pendidikan, mengembangkan pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan metodologi pembelajaran guru. Pendekatan dalam pertemuan Sekolah Guru Kebhinekaan melibatkan berbagai mitra yang memungkinkan pembukaan ruang pertemuan. Namun, keterlibatan peserta sebagai sumber belajar sama pentingnya dengan yang disampaikan oleh pembicara.

Peserta Sekolah Guru Kebhinekaan adalah guru-guru dari berbagai tingkat pendidikan, baik dari lembaga yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Guru diingatkan kembali tentang filosofi pendidikan, sejarah, dan kehidupan bangsa, hak asasi manusia, serta keragaman etnis dan agama di Indonesia, termasuk agama lokal. Secara keseluruhan, Sekolah Guru Kebhinekaan diharapkan dapat memperkuat guru untuk menjadi referensi bagi keanekaragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Alumni Sekolah Guru Kebhinekaan, Dian Misastra, memprakarsai gerakan untuk menolak pernikahan anak di SDN 01 Tegalwaru, Purwakarta. Dia memberi pemahaman kepada orang tua, terutama ayah, tentang dampak pernikahan anak pada tingginya angka kematian ibu dan anak, serta proses pemiskinan. Semua siswa di sekolahnya sekarang melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat sekolah menengah pertama. Sementara mengenai masalah keanekaragaman, Uswatun Hasanah dan Nurlela, memprakarsai simulasi kunjungan berbagai rumah ibadah di ruang kelas di SDN 06 Rawajati, Jakarta. Simulasi ini memperkenalkan siswa pada keragaman agama serta upaya untuk membuka ruang pertemuan dalam sumber belajar yang terbatas yang mereka miliki.

(Sumber: Yayasan Cahaya Guru)



IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Dalam rangka pencapaian target SDGs Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, arah dan kebijakan pada RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup:** a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem pembelajaran online; f) integrasi softskill (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas pendidikan di pesantren; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.
- 2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun,** mencakup: a) pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP Kuliah; b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama; c) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; d) Penanganan ATS untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana; e) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan f) peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.
- 3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata,** mencakup: a) peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); b) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3); c) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan; d) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan e) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.



4. **Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah**, mencakup:
 - a) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan;
 - b) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi;
 - c) penguatan Standar Nasional Pendidikan;
 - dan d) penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan.
5. **Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan**, mencakup:
 - a) peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan;
 - b) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan;
 - c) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang;
 - d) peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah;
 - e) peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan;
 - f) pengendalian izin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu;
 - g) penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan penggabungan perguruan tinggi;
 - h) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI); dan
 - i) peningkatan komitmen dan kapasitas daerah dalam pendidikan gizi untuk anak sekolah.

Selain itu, survei tenaga kependidikan diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan guru terkait dengan kurikulum baru dengan penekanan pada proses pembelajaran siswa. Pelatihan harus lebih aktif, interaktif, melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skill) dan mudah diakses oleh guru. Kepala sekolah harus menetapkan target untuk meningkatkan partisipasi dan pencapaian siswa dalam membaca dan matematika, berdasarkan diagnosis oleh guru kelas pada kompetensi inti tersebut. Target-target ini harus dimasukkan ke dalam rencana kerja pembangunan pemerintah daerah sebagai referensi untuk alokasi sumber daya. Upaya ini diperlukan untuk menyusun program di provinsi / kota / kabupaten sasaran untuk memastikan bahwa semua sekolah mencapai standar layanan minimum yang disepakati, khususnya kualitas pembelajaran.

Untuk melakukan arah pengembangan pendidikan anak usia dini kedepan, Pemerintah Republik Indonesia memuat langkah-langkah berupa program dan kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian tujuan. Arah pengembangan tersebut adalah: (1) penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan, (2) peningkatan akses PAUD dan Pendidikan Masyarakat, (3) peningkatan mutu dan yang relevansi pembelajaran PAUD berorientasi pada pembentukan karakter, (4) peningkatan sistem tata kelola PAUD yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat.



V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	AKSI, Kemen-dikbud	%	53,17 (2016)	PM	53,17 (2016)	▼
	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika	AKSI, Kemen-dikbud	%	44,62	PM	22,87	▼
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	PISA	%	31,35	PM	30,10 (2018)	▼
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika	PISA	%	40,5	PM	28,10 (2018)	▼
4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	BAN	%	63,9	84,2	85,7 (prognosa 2019)	● Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
4.1.1(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	BAN	%	61,45	81	81,04 (prognosa 2019)	● Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
4.1.1(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	BAN	%	63,87	84,6 (RKP)	84,67 (prognosa 2019)	● Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
4.1.1(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Susenas BPS	%	110,5	114,09	107,46	▼ Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi



TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
4.1.1(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Susenas BPS	%	91,17	106,94	90,57	▼ Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
4.1.1(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/ sederajat	Susenas BPS	%	78,02	91,63	83,98	▼ Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Susenas BPS	Tahun	8.32	91,63	83,98	▼ Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
<p>Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar</p>							
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Susenas BPS	%	95.8	PM	95.9 (2018)	●
4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Susenas BPS	%	35.18	39.60 (RPJMN)	36.93	▼ Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
<p>Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</p>							
4.3.1(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/sederajat.	Susenas, BPS	%	78.02	91.63 (RPJMN)	83,98	▼ Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
4.3.1(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Susenas, BPS	%	25.26	36.73 (RPJMN)	30,28	▼
<p>Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.</p>							
4.4.1*	Proporsi remaja dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas, BPS	%	51.83	PM	83.58	▶



TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</p>							
4.5.1*	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD/MI/ sederajat	Susenas, BPS	%	100,33	100 (RPJMN)	100.02	●
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	Susenas, BPS	%	104,45	100 (RPJMN)	101.39	●
	Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat	Susenas, BPS	%	103,45	100 (RPJMN)	105.01	●
	Rasio APK Perempuan/laki-laki di PT	Susenas, BPS	%	119,36	100 (RPJMN)	109.47	▶
<p>Target 4.6 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</p>							
4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Susenas, BPS	%	95,22	96,1	95,90	▶ Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
4.6.1(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	Susenas, BPS	%	99,67	PM	99,76	●
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	Susenas, BPS	%	97,71	98	98,22	●

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.							
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik, Kemdikbud	% Total SD SMP SMA SMK	119,36 90,77 93,60 97,19 97,83	100 (RPJMN)	113.24 (2018) 94,4 96,85 98,93 99,56	▶
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik, Kemdikbud	% Total SD SMP SMA SMK	5,98 29,85 83,17 86,62		(2018) 34,70 49,23 69,20 75,99	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik, Kemdikbud	% Total SD SMP SMA SMK	32,05 43,41 55,02 60,90		(2018) 40,38 55,0 72,92 79,0	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dapodik, Kemdikbud *tahun 2016	% Total SD SMP SMA SMK	119,36 68,15* 69,75* 73,97* 77,77*	100 (RPJMN)	113.24 (2018) 87,11 87,04 89,85 92,21	▶
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) sanitasi layak	Dapodik, Kemdikbud *tahun 2016	% Total SD SMP SMA SMK	119,36 45,98* 60,11* 45,64* 50,73*	100 (RPJMN)	113.24 (2018) 68,99 79,48 83,40 84,14	▶
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))	Dapodik, Kemdikbud *tahun 2016	% Total SD SMP SMA SMK	119,36 65,10* 60,19* 68,72* 68,86*	100 (RPJMN)	113.24 (2018) 51,14 44,67 51,65 51,63	▶
Target 4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.							
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Kemendikbud	Orang	522	560	549	▼

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</p>							
4.c.1*	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	Dapodik, Kemdikbud	%	53,4 68,95* 45,03* 50,07* 50,95* 37,34*	77,2	46,15 (2017) 66,67 42,81** 45,75** 46,49** 35,3**	▼
	Persentase guru dengan kualifikasi minimal S1/D4			*tahun 2016 **tahun 2018		75 31	90 (RKP) 52,4
				62,8 81,7	70,9 91	88,4** 94,5**	●
				96 89	99 9	98,0** 95,4**	▼



DAFTAR PUSTAKA

- BAN. (2019). *Data Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015-2019*. Jakarta: BAN SM.
- BAPPENAS. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2019). *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2017). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2018). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2018*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2018). *Roadmap of SDGs Indonesia Toward 2030*. Jakarta: BAPPENAS.
- BPS. (2002). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2009). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2010). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2015). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2016). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2017). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2019). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- JPPPI. (2019). *Laporan Program Penelitian Kepemimpinan-Aksi Remaja*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Laporan Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) 2016*. Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2016-2018*. Badan Penelitian Pengembangan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Laporan Program Inovasi "Rumah Belajar". Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- OECD. (2019). *Indonesia – Country Note – PISA 2018 Result. Report*.
- Tanoto Foundation. (2019). *Laporan Program Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran (PINTAR)*.
- UIS. (2016). *Data capaian SDGs berbagai negara untuk indikator 4.1.1 tahun 2003-2015*. Disadur dari <http://data.uis.unesco.org>. Unesco Institute for Statistics.
- Yayasan Cahaya Guru. (2019). *Laporan Program Sekolah Guru Kebhinekaan*.



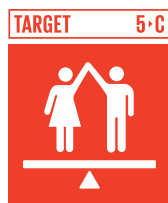


We support the Sustainable Development Goals

5 KESETARAAN GENDER



Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan



I. PENDAHULUAN

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan bukan hanya merupakan Tujuan 5 SDGs, tetapi terkait dengan hampir seluruh tujuan SDGs dengan masing-masing target spesifiknya. Adapun target yang akan dilaporkan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

TARGET	DESKRIPSI
Target 5.1	1. Kebijakan yang <i>responsif gender</i>
Target 5.2	2. Proporsi kaum perempuan mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan 3. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan 4. Proporsi kaum perempuan mengalami kekerasan oleh orang lain selain pasangan 5. Persentase korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif



TARGET	DESKRIPSI
Target 5.3	6. Proporsi perempuan yang kawin sebelum usia 15 tahun dan sebelum 18 tahun 7. Median usia kawin pertama 8. Angka kelahiran remaja (ASFR) 9. APK SMA/SMK/MA/ sederajat
Target 5.4	10. Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga
Target 5.5	11. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen 12. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial
Target 5.6	13. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi 14. Unmet need KB 15. Pengetahuan dan pemahaman PUS tentang kontrasepsi modern 16. UU atau PP yang menjamin akses terhadap layanan kesehatan reproduksi
Target 5.A	17. Proporsi (i) penduduk dan (ii) perempuan yang memiliki lahan pertanian 18. Proporsi negara dengan kerangka hukum yang menjamin persamaan hak untuk kepemilikan tanah
Target 5.B	19. Proporsi individu yang menguasai telepon genggam
Target 5.C	20. Ketersediaan system melacak dan membuat alokasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

II. STATUS CAPAIAN

- Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus meningkat dengan spektrum yang semakin beragam. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15-64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.
- Upaya pencegahan perkawinan anak belum mencapai target Roadmap SDGs tahun 2019 sebesar 10,59%. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun baru mencapai 10,82% (2019).
- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional masih belum memenuhi target 30%, meskipun menunjukkan tren yang meningkat dari Pemilu periode sebelumnya.
- Di Indonesia, kebebasan akses pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi telah dijamin dalam Undang-undang No. 36/2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Target teknologi untuk pemberdayaan perempuan yang diukur melalui proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam terus mengalami



peningkatan dari tahun ke tahun. Namun proporsi perempuan yang memiliki telepon genggam lebih kecil daripada laki-laki.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Di Indonesia, kebebasan akses pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi telah dijamin dalam peraturan perundangan.

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 5.6 Menjamin akses <i>universal</i> terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.							
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Kemen-kum-ham	Doku-men	1	1	1	

Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana kepada setiap individu, termasuk remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Ruang lingkup pengaturan kesehatan reproduksi dalam PP ini meliputi pelayanan kesehatan ibu, indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, dan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah. Pengaturan ini bermaksud untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta menurunkan resiko Kematian Ibu.

Target teknologi untuk pemberdayaan perempuan yang diukur melalui proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							

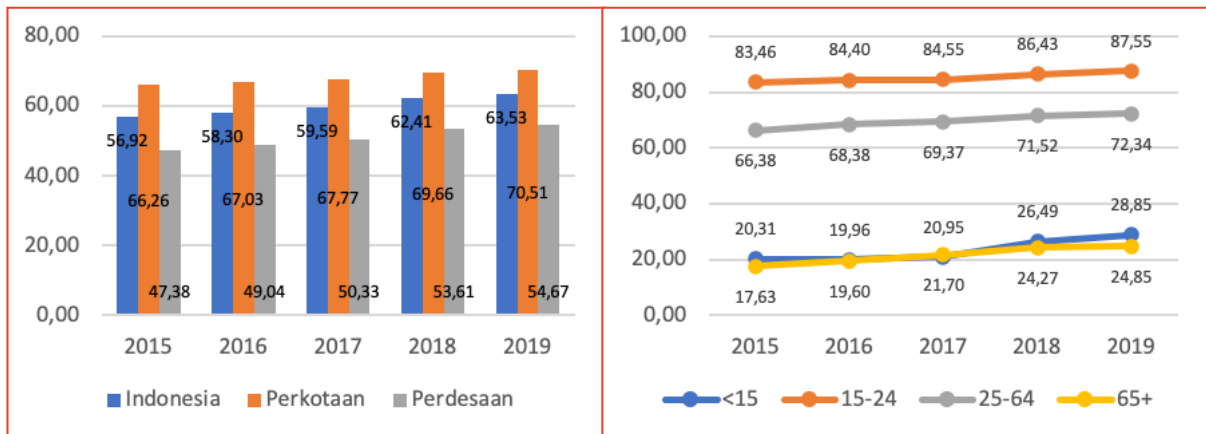
TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Susenas BPS	%	56.92 (2015)	PM	63.53 (2019)	

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan berbagai kemudahan dan membuka peluang bagi seluruh manusia, termasuk untuk para perempuan, agar lebih berdaya dengan membuka akses bagi perempuan terhadap ilmu pengetahuan untuk kepentingan pendidikan maupun pengembangan karir, memberi peluang untuk menjadi pengusaha sambil tetap menjalankan peran domestikny, serta memungkinkan perempuan untuk berinteraksi dengan komunitas yang lebih luas.

Susenas berbagai tahun menunjukkan bahwa proporsi perempuan yang memiliki telepon genggam lebih kecil daripada laki-laki. Namun, ada peningkatan proporsi individu (perempuan dan laki-laki) yang memiliki telepon genggam selama periode 2015-2019 yaitu dari 56,92% menjadi 63,53%. Pada 2015 persentase perempuan yang memiliki telepon genggam adalah 50,38% dan jumlah ini meningkat menjadi 58,35% pada tahun 2019. Pada periode yang sama, proporsi laki-laki yang memiliki telepon genggam meningkat dari 63,41% menjadi 68,68%.

Selanjutnya, Susenas juga mengungkapkan proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam di perkotaan dan pedesaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun di sisi lain proporsi di pedesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Kelompok penduduk usia 15-24 tahun merupakan pengguna telepon genggam tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya yaitu 87,55% pada tahun 2019 dan kelompok usia >65 tahun merupakan pengguna terendah sebesar 24,85%. Tujuan pemanfaatan telepon genggam/teknologi untuk pemberdayaan telah sejalan dengan kelompok usia yang menggunakan yaitu pada kelompok usia produktif dan usia belajar.



Gambar 01. Tren Kepemilikan Telepon Genggam Menurut Wilayah dan Usia.
Sumber: Susenas, BPS

B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS.

Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	SPHPN	%	10.4 (2016)	Menu-run	NA	NA
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	SPHPN	%	4.66 (2016)	Menu-run	NA	NA

Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus meningkat dengan spektrum yang semakin beragam. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan, sebagai berikut:

1. Kekerasan oleh pasangan:

- Sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/sedang menikah mendapat kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangannya selama hidup mereka (18,3%) dan sekitar 1 dari 20 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan



terakhir (4,9%); serta

- b. Sekitar 28,3% perempuan yang pernah/sedang menikah mendapat minimal 1 dari 3 jenis kekerasan (fisik, seksual dan emosional) dari pasangannya selama hidupnya dan sekitar 10,4% dalam 12 bulan terakhir.

2. Kekerasan oleh selain pasangan:

- a. Sekitar 1 dari 4 perempuan yang pernah, sedang atau belum menikah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari selain pasangan selama hidup mereka (23,7%), dan
- b. Sekitar 1 dari 18 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (5,6%). Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak (14,4%).

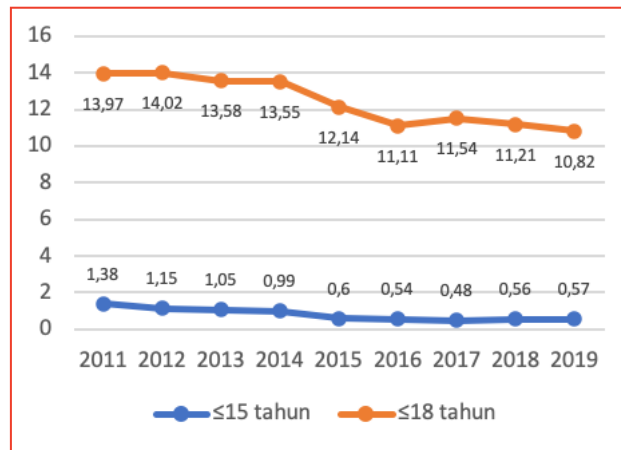
Jumlah KTP yang dilaporkan pada tahun 2018 meningkat 6% dibandingkan tahun 2017 yaitu dari 406.178 kasus menjadi 431.471 kasus. Dari jumlah tersebut, 75% adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 24% persen adalah kekerasan di komunitas seperti perkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2020).

Upaya pencegahan perkawinan anak belum dapat memenuhi target SDGs 2019.

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum 15 tahun	Susenas BPS	% (sebelum umur 15 tahun)	0.6 (2015)	Menurun	0.57 (2019)	▼
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum 18 tahun	Susenas BPS	% (sebelum umur 18 tahun)	12.14 (2015)	Menurun 10.59 (Roadmap)	10.82 (2019)	▼

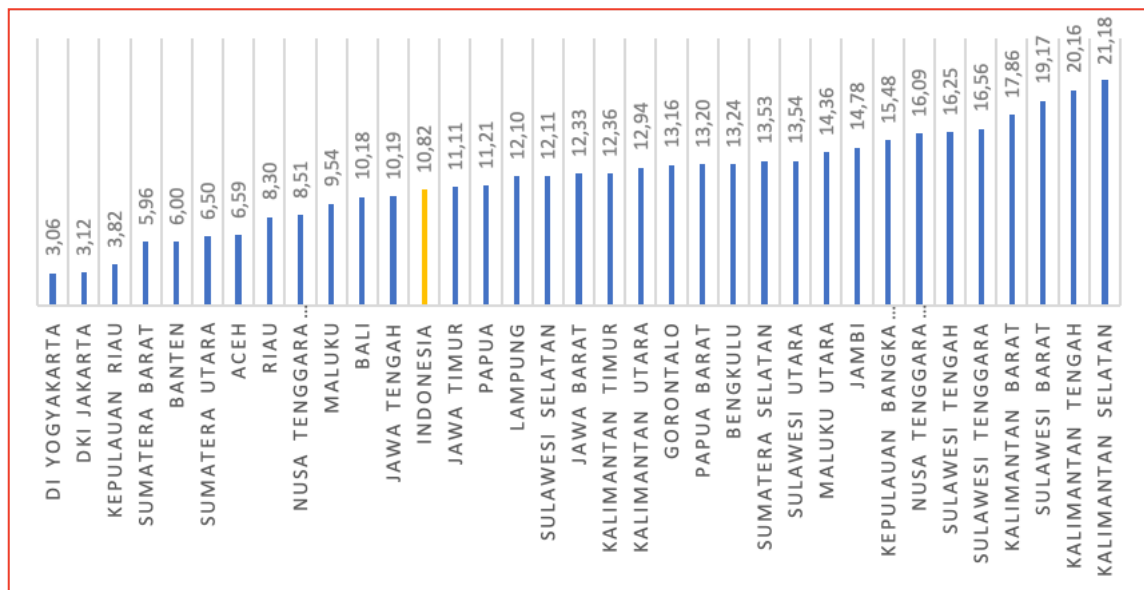
Praktik perkawinan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Namun, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 15 dan sebelum 18 tahun menunjukkan tren yang terus menurun antara 2011-2016 dan pergerakan fluktuatif antara 2017- 2019.

Pada tahun 2019, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 15 tahun adalah sebesar 0,57% menurun 1% dalam kurun waktu 10 tahun dibandingkan tahun 2008 sebesar 1,6%. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun juga turun hingga 10,82% pada tahun 2019. Namun demikian, angka ini belum dapat mencapai target RPJMN dan Roadmap SDGs sebesar 10,59%.



Gambar 02. Persentase wanita umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum berusia 15 tahun dan sebelum berusia 18 tahun.
Sumber : BPS

Sebagian besar provinsi masih memiliki praktik perkawinan anak yang tinggi di atas rata-rata nasional. Kalimantan Selatan memiliki persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah untuk pertama kalinya pada atau sebelum 18 tahun tertinggi pada tahun 2019 yaitu 21,18%. Kemudian disusul oleh Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat sebesar 20,16% dan 19,17%. Sedangkan provinsi dengan persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah untuk pertama kalinya pada atau sebelum 18 tahun terendah pada tahun 2019 yaitu DI Yogyakarta sebesar 3,06%, lalu DKI Jakarta 3,12% dan Kepulauan Riau 3,82%.

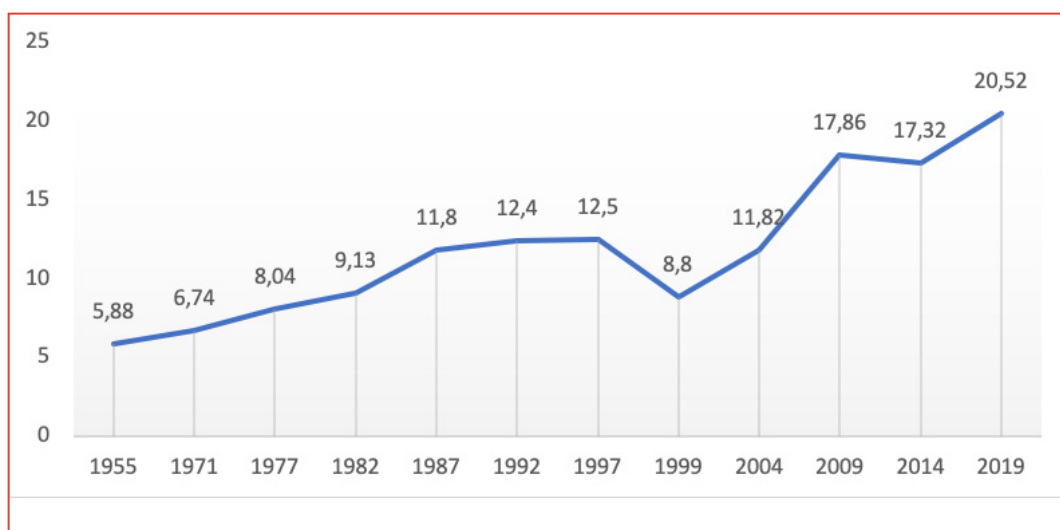


Gambar 03. Persentase wanita umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum berusia 18 tahun Menurut Provinsi, Tahun 2019.
Sumber : Susenas, BPS

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif masih belum memenuhi target.

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	KPU	% DPR	17.32 (2014)	Meningkat (30)	20,52	▼
			% DPRD Provinsi	15.89 (2014)	Meningkat	30.88	▼
			% DPRD Kab/ Kota	14,24 (2014)	Meningkat	17.53	▼
			% DPD	25.76 (2014)	Meningkat	15.27	▼
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Pemerintahan)	BKN	% Eselon I	20.66 (2014)	Meningkat	18.08	▼
		BKN	% Eselon II	16.39 (2014)	Meningkat	13.48	▼
	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Swasta)	Saker-nas BPS	% Manajer	24.17 (2016)	PM	30.63 (2019)	▶

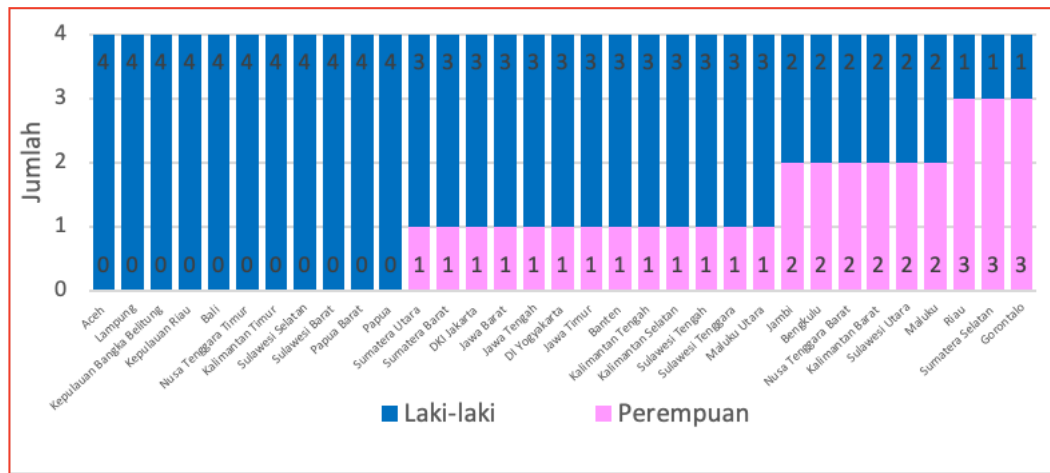
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional masih belum memenuhi target 30%, meskipun menunjukkan tren yang meningkat dari Pemilu periode sebelumnya. Pada pemilu tahun 2004 keterwakilan perempuan di DPR sebesar 11,84% dan meningkat menjadi sebesar 17,86% pada tahun 2009. Namun pada tahun 2014 sedikit menurun menjadi 17,3% dan meningkat kembali menjadi 20,52% pada tahun 2019.



Gambar 04. Persentase Anggota DPR Perempuan Hasil Pemilu Tahun 1950-2019.

Sumber : BPS, 2015

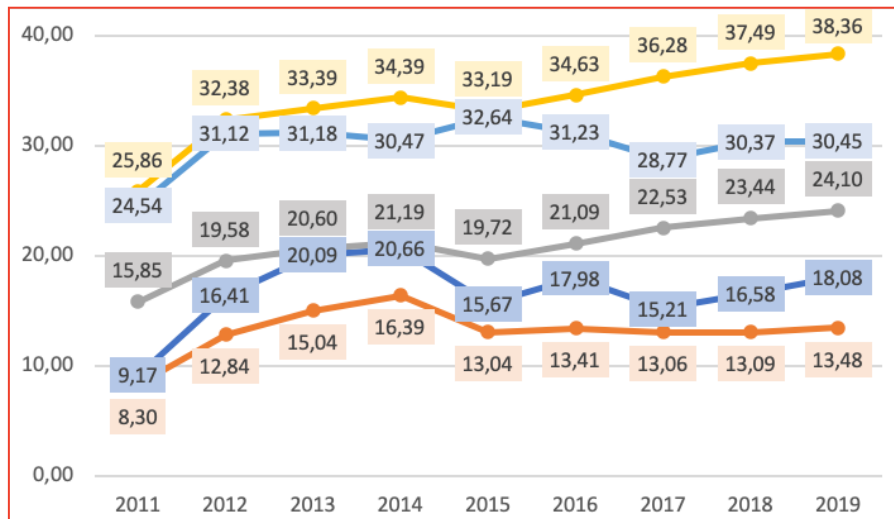
Selain itu, setiap provinsi mempunyai empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada periode 2014-2019 sudah terdapat 22 Provinsi yang diwakili oleh anggota DPD perempuan; 6 provinsi diantaranya sudah seimbang antara wakil perempuan dan laki-laki, sementara terdapat 3 provinsi yang mempunyai anggota DPD perempuan lebih banyak dari laki-laki (3 banding 1). 11 provinsi lainnya belum memiliki anggota DPD perempuan.



Gambar 05. Jumlah Anggota DPD Perempuan Periode 2014-2019 menurut Provinsi, 2014-2019.
Sumber : BPS, 2015

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintah/eksekutif mengalami penurunan. Sedangkan di lembaga swasta menunjukkan peningkatan.

Proporsi perempuan di posisi managerial (Eselon 1-II) di lembaga eksekutif cenderung meningkat dalam periode 2011-2019, meskipun mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2014. Jabatan Direktur (Eselon II) meningkat pada tahun 2019 menjadi 13,48% dari 13,09% di tahun 2018. Begitu juga jabatan Direktur Jenderal/Sekjen/Deputi (Eselon I) meningkat dari 16,58% (2018) menjadi 18,08% (2019). Adapun proporsi perempuan yang berada di posisi managerial terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 24,17% pada tahun 2015 menjadi 30,63% pada tahun 2019. Berbeda halnya dengan proporsi laki-laki yang berada di posisi managerial menunjukkan pergerakan yang menurun. Namun, proporsi laki-laki di manajerial sebesar 69,37% (2019) masih jauh lebih tinggi daripada perempuan yaitu 2-3 kali lipat.



Gambar 06. Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon I-IV.
 Sumber : BPS RI, Statistik Indonesia 2018/Badan Kepegawaian Negara

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

a. Perlindungan Perempuan dan Anak Perempuan dari Kekerasan

Upaya menurunkan prevalensi kekerasan pada perempuan dan anak perempuan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) masih adanya nilai budaya/tradisi yang melanggengkan praktik kekerasan; (2) kurangnya pemahaman individu baik laki-laki maupun perempuan, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan mengenai kekerasan, termasuk perdagangan orang dan perkawinan anak; (3) belum optimalnya sistem layanan terpadu yang komprehensif dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan; (4) perlunya meningkatkan cakupan dan kualitas data kekerasan; (5) lemahnya kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan di pusat dan daerah, termasuk pemantauan, evaluasi, dan pengawasannya; (6) kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dan pemerintah dalam isu perlindungan perempuan; serta (7) belum optimalnya koordinasi dan kerja sama multipihak antara pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.

b. Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Tantangan dalam meningkatkan peran dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan antara lain: (1) masih kuatnya budaya patriarki yang mengidentikkan sektor publik sebagai ranah laki-laki dan sektor domestik/rumah tangga sebagai ranah perempuan; (2) kurangnya pemahaman individu baik laki-laki maupun perempuan itu sendiri mengenai hak-hak perempuan, termasuk hak dalam bidang politik beserta implikasi yang terkandung dalam hak tersebut; (3) masih lemahnya kebijakan dan regulasi; (4) lemahnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender serta belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; (5) serta belum optimalnya koordinasi dan kerja sama multipihak antara pemerintah (pusat-daerah), masyarakat, media massa, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.



c. Teknologi untuk Pemberdayaan Perempuan

Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan penggunaan teknologi adalah meningkatkan cakupan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan.



III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Box 09.

Pos Pengaduan Sekolah Perempuan di Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Utara, NTB

Pos Pengaduan dikembangkan oleh Sekolah Perempuan di 6 wilayah di Indonesia telah berfungsi menjadi pusat informasi, pengaduan dan advokasi mengenai isu-isu perempuan, program perlindungan sosial dan administrasi kependudukan. Pengaduan dikategori menjadi pengaduan yang berkaitan dengan (a) Program Perlindungan Sosial (b) Layanan Administrasi Kependudukan (c) Layanan Kesehatan Umum dan Kesehatan Reproduksi Perempuan (d) Kekerasan Terhadap Perempuan (e) Kebencanaan (f) Dan Lain-Lain yang belum masuk dalam kategori. Jumlah pengaduan yang masuk pada periode laporan ini sebanyak 7.293. Pengaduan ini dilaporkan oleh 2.761 perempuan pelapor/korban, 2.605 laki-laki pelapor/korban dan 1.927 keluarga pelapor/korban. Jumlah ini meningkat dari periode-periode sebelumnya.

Pos Pengaduan di Desa Sukadana, NTB menerima pengaduan kasus KDRT pada tanggal 16 Maret 2019 Korban atas nama Ni Komang Sri, 42 tahun dusun kebon Patu Desa Sukadana mendatangi sekretariat Sekolah Perempuan Sukadana sekaligus sabagai sekretariat pos pengaduan. Pengurus Pos Pengaduan memproses dengan konseling awal menanyakan apa penyebab lukanya. Kemudian merujuk ke Puskesmas terdekat untuk pengobatan luka pendarahan badan korban. Setelah berangsur pulih, korban dibawa ke sekretariat untuk diamankan dan dilakukan konseling lengkap krokologi kejadiannya. korban mendapatkan penjelasan tentang Undang-Undang PKDRT yang dapat melindungi perempuan ketika mengalami kekerasan dan mempunyai hak untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Selain itu, korban diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan atas proses kasusnya seperti apakah memilih untuk penyelesaian secara kekeluargaan atau proses hukum. Sekolah perempuan juga menjelaskan konsekuensi yang diambil dari keputusan tersebut. Jika korban memutuskan untuk lapor kepada polisi, Sekolah Perempuan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau Lembaga Perlindungan Anak untuk mendapat pendampingan.

Korban mengambil keputusan untuk melaporkan suaminya ke Polsek Bayan. Pelaku yang masih pengaruh minuman keras mengamuk mencari istrinya dan ia mendapatkan informasi kalau istrinya diamankan di salah satu anggota Sekolah Perempuan. Mendengar pelaku mau menjemput istrinya, Sekolah Perempuan menghubungi Babinsa setempat untuk pengamanan pelaku dan membawanya ke Polsek Bayan. Pelaku sempat ditahan beberapa hari di Polsek Bayan. Dalam prosesnya, pelaku meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, sehingga korban menyepakati untuk melakukan perdamaian namun dengan syarat pelaku harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya dan jika melakukan lagi, maka akan diproses secara hukum. Surat pernyataan ini dibuat di Polsek dan disaksikan oleh anggota Polsek Bayan.



Foto: Korban melapor ke Pos Pengaduan dan lapor Polisi didampingi Sekolah Perempuan dan Dinsos

Box 10.

Advokasi Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 12 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan data BPS 2018, Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah tertinggi tingkat perkawinan anak yaitu 19,4% menikah dibawah 18 tahun yang terjadi pada penduduk usia 20-24 tahun. Indonesia menduduki peringkat ketujuh tertinggi di dunia dan peringkat kedua di ASEAN, oleh karenanya masalah perkawinan anak membutuhkan perhatian khusus semua pihak. Mengatasi perkawinan anak akan memberikan sumbangan pada pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan terutama pengurangan resiko kematian ibu dan stunting, memutus rantai kemiskinan karena terbukanya akses terhadap kerja layak serta memperkecil resiko kekerasan dalam rumah tangga.

Sulawesi Barat adalah provinsi yang masuk urutan 5 tertinggi kasus perkawinan anak di Indonesia. Institut KAPAL Perempuan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan organisasi Kartini Manakarra serta didukung oleh Equal Measures 2030 (EM2030) untuk mendorong pemerintah provinsi mengeluarkan Surat Edaran Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak di Sulawesi Barat. Dorongan penerbitan Surat Edaran ini diawali sebelumnya dengan pertemuan Forum Grup Diskusi Multipihak yang diadakan pada tanggal 1 Oktober 2019 di Mamuju, Sulawesi Barat. Pertemuan FGD ini dihadiri oleh 35 orang yang diwakili dari unsur pemerintah, parlemen, NGO, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan universitas. Dalam diskusi di FGD ini menghasilkan beberapa rekomendasi termasuk deklarasi bersama yang akan dibawa pada pertemuan khusus bersama dengan pemerintah provinsi pada tanggal 2 Oktober 2019. Dalam deklarasi ini perwakilan multipihak dan jaringan yang memiliki kepedulian untuk penghapusan perkaw-

inan anak di Sulawesi Barat dari berbagai elemen masyarakat, organisasi perempuan, kaum muda, mahasiswa, pemerintah daerah, legislatif, jurnalis, penyintas perkawinan anak /keluarga, dan semua pihak yang mendukung pembangunan menyatakan komitmen untuk menjadi bagian dari “Gerakan Stop Perkawinan Anak” dan mengawal penegakan hukum hasil keputusan paripurna revisi Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 mengenai perubahan usia pernikahan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun beserta aturan dispensasinya.

Hasil dan deklarasi bersama dari Forum Multipihak ini kemudian disampaikan pada pertemuan khusus pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Asisten 1 dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Barat, BKKBN, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bappeda, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim KAPAL Perempuan dan Kartini Manakarra. Selain itu Tim juga menyiapkan draft usulan Surat Edaran untuk dibahas bersama dalam pertemuan khusus ini. Dalam diskusinya kemudian dihasilkan adanya persetujuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menerbitkan surat edaran ini dan kemudian Asisten 1 Provinsi memberikan mandat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bappeda dan BKKBN untuk meneruskan proses penyusunan surat edaran ini.



Foto: Audiensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Kapal Perempuan pada 2 Oktober 2019

Setelah pertemuan ini proses berlanjut melalui diskusi perbaikan draft surat edaran. Proses perbaikan dan diskusi berjalan kurang lebih 1 bulan dan kemudian draft final disetujui dan ditandatangani oleh Gubernur pada tanggal 30 November 2019 dan pada awal tahun 2020 akan disosialisasikan ke tingkat OPD-OPD Provinsi Sulawesi Barat dan publik.



IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Dalam rangka pencapaian target SDGs Tujuan 5 Kesetaraan Gender, arah dan kebijakan pada RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

- 1. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya**, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- 2. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan**, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.
- 3. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO**, mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO.



V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER





Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kemenkumham	Dokumen	19 (2015)	16	NA	NA
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	SPHPN	%	10.4 (2016)	Menurun	NA	NA
5.2.1(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	SKtA BPS	%	20,48 (2013)	Menurun	(2018)* 61,70 (laki-laki) 62 (perempuan)	▼ Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	SPHPN	%	4.66 (2016)	Menurun	NA	NA
5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	SPHPN	%	50	70	NA	NA Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum 15 tahun	Susenas BPS	% (sebelum umur 15 tahun)	0.6 (2015)	Menurun	0.57 (2019)	▼
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum 18 tahun	Susenas BPS	% (sebelum umur 18 tahun)	12.14 (2015)	Menurun 10.59 (Roadmap)	10.82 (2019)	▼

TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 2549 tahun	SDKI	Tahun	20,1 (2012)	21	21,8 (2017)	● Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	SDKI	Kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	48 (2012)	38 (2019)	36 (2017)	● Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Susenas, BPS	%	78.02 (2015)	91.63 (RPJMN)	83,98 (2019)	▼ Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
<p>Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p>							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	KPU	% DPR	17,32 (2014)	Meningkat (30)	20,52	▼
			% DPRD Provinsi	15,89 (2014)	Meningkat (30)	30,88	▼
			% DPRD Kab/ Kota	14,24 (2014)	Meningkat (30)	17,53	▼
			% DPR	25,76 (2014)	Meningkat (30)	15,27	▼
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Pemerintahan)	BKN	% Eselon I	20,66 (2014)	Meningkat	18,08	▼
		BKN	% Eselon II	16,39 (2014)	Meningkat	13,48	▼
	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Swasta)	Saker-nas BPS	% Manajer	24,17 (2016)	PM	30,63 (2019)	▶



TUJUAN 5. KESETERAAN GENDER

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 5.6 Menjamin akses <i>universal</i> terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.							
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	SDKI	%	NA	NA	NA	NA
5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	SDKI	%	11,4 (2012)	9,91	10,6 (2017)	 Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	SDKI	%	98,9 (2012)	70	99,6 (2017)	 Selanjutnya tidak akan dilaporkan lagi
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Kemenkumham	Dokumen	1	1	1	
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Susenas BPS	%	56.92 (2015)	PM	63.53 (2019)	



DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2019). *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2017). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2018). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2018*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2018). *Roadmap of SDGs Indonesia Toward 2030*. Jakarta: BAPPENAS.
- BKN. (2019). *Statistik ASN 2019*. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
- BPS. (2002). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2009). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2010). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2011). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2012). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2012). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2013). *Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2013). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2014). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2015). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2015). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2016). *Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2016). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2017). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2017). *Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2017). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018). *Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018). *Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018). *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2019). *Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2019). *Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS)*. Jakarta: BPS.
- KPPPA. (2017). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KPU. (2019). *Laporan Hasil Pemilihan Umum 2019*.
- Kapal Perempuan. (2019). *Laporan Program Sekolah Perempuan di NTB*.
- Kapal Perempuan. (2019). *Laporan Praktik Baik Advokasi SE Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak*.



We support the Sustainable Development Goals

6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK



Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua



I. PENDAHULUAN

Pembahasan Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak difokuskan pada isu air minum serta sanitasi layak dan aman. Namun demikian, indikator yang dipantau dalam laporan ini juga meliputi indikator di dalam target Tujuan 6 yaitu: (1) Mencapai akses universal terhadap layanan air minum yang aman dan terjangkau; (2) Mencapai akses universal terhadap sanitasi dan kebersihan, serta menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka; (3) Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi dan mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah; (4) Meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor; (5) Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan; serta (6) Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air.

II. STATUS CAPAIAN

- Pada tahun 2019, sebanyak 89,27 persen rumah tangga di Indonesia memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (Susenas BPS, 2019). Sementara itu,



untuk katagori akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan belum memiliki *baseline* data pengukuran kualitas air minum. Perhitungan akses air minum aman dilakukan menggunakan estimasi perhitungan akses nasional sehingga didapatkan angka capaian akses aman sebesar 6,7 persen (Kualitas biologi Survei Kualitas Air/SKA 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kualitas fisik air minum berdasarkan Susenas BPS 2018)

- Akses terhadap layanan sanitasi layak (termasuk sanitasi aman) mengalami peningkatan dari 62,95 persen pada tahun 2015 menjadi 77,44 persen di tahun 2019, namun belum mencapai target sebesar 90 persen. Adapun untuk jumlah desa/kelurahan yang masih melaksanakan praktik-praktik *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah sebanyak 24.857 desa/kelurahan (Kementerian Kesehatan, 2019).
- Dalam upaya meningkatkan kualitas air, pemerintah Indonesia telah berupaya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang telah terlaksana di 157 kab/kota (Kementerian PUPR, 2019). Pembangunan IPLT telah mendorong capaian Indonesia untuk memiliki akses sanitasi aman melalui layanan sistem pengelolaan lumpur tinja menjadi 6,8% pada tahun 2019 (Susenas KOR 2019, diolah Bappenas).
- Penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah di antaranya penyusunan 108 Dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) hingga tahun 2018, termasuk penetapan 10 (sepuluh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki *Memorandum of Understanding (MoU)* lintas negara (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).
- Dalam upaya melindungi dan resotasi ekosistem terkait sumber daya air terdapat 15 danau yang telah ditingkatkan kualitas airnya, 1,8 juta Ha luas lahan kritis yang telah direhabilitasi serta 15 DAS prioritas yang dilidungi mata air dan dipulihkan kesehatannya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Sanitasi

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Susenas Kor, BPS (diolah Bappenas)	%	-	PM	48,4 (2018)	●
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Kementerian Kesehatan	desa/kelurahan	26,417	45.000	57.935 (TW IV 2019)	●
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Kementerian Kesehatan	desa/kelurahan	2.361	PM	24.857 (2019)	●

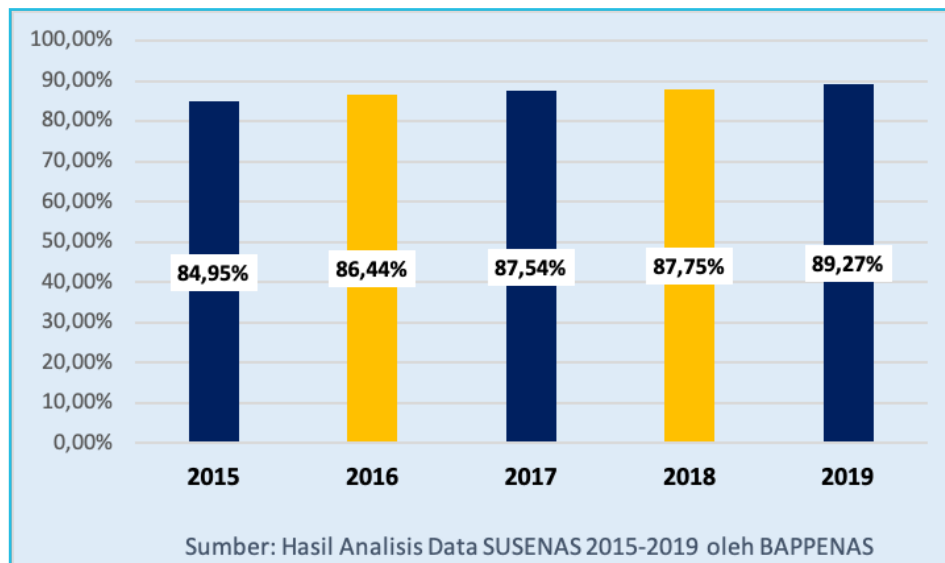
Meskipun rumah tangga dengan akses sanitasi layak masih belum mencapai target, akan tetapi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan.

Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap akses sanitasi layak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2019, terdapat 24.857 desa/kelurahan yang telah berhasil menerapkan praktik-praktik *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Adapun jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada tahun 2019 adalah sebanyak 57.935 desa/kelurahan.

B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

Air Minum Layak.

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	BPS	%	84,95 (revisi baseline RAN) (2015)	100 (RPJMN 2015-2019)	89,27 (2019)	▼



Gambar 01. Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2015-2019.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak sudah cukup tinggi secara nasional. Persentase pada 2015 telah mencapai 84,95 persen dan secara konsisten terus meningkat hingga pada 2019 mencapai 89,27 persen. Walaupun dari sisi persentase capaian sudah cukup tinggi, namun jika dilihat dari laju pertumbuhan hanya 0.9 persen selama periode 2015-2018. Sumber air minum tidak layak paling besar dipengaruhi oleh penggunaan sumur tak terlindungi yang mencapai 4,69 persen. Di sisi lain, juga perlu diperhatikan sumber



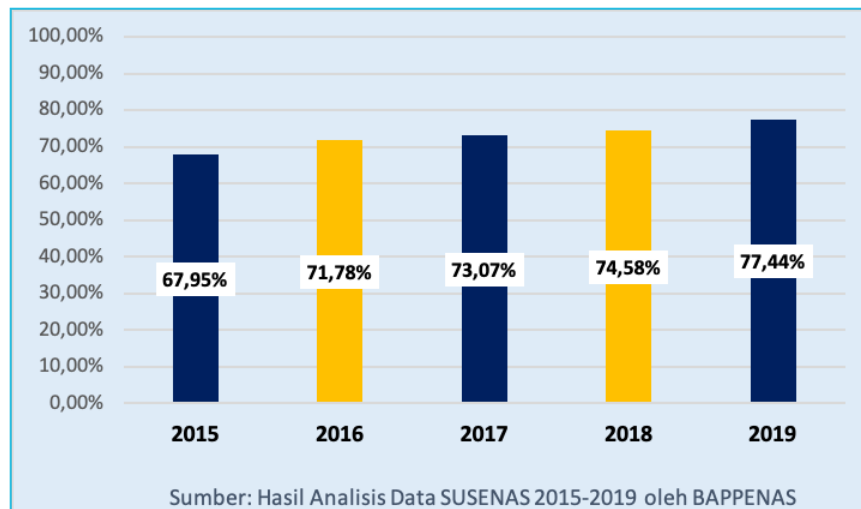
air minum yang paling banyak digunakan rumah tangga adalah air isi ulang yang termasuk pada kategori sumber air minum tidak berkelanjutan.

Dalam meningkatkan akses air minum layak, pemerintah melaksanakan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi serta meningkatkan DAK Air Minum dan Sanitasi. Pemerintah juga membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan memberikan layanan air minum layak kepada masyarakat dalam rangka peningkatan akses air minum layak.

Kategori akses air minum aman harus memenuhi kriteria, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Di tahun 2018, diperkirakan baru 6,7 persen rumah tangga yang memenuhi keempat kriteria tersebut. Hingga tahun 2018 akses air minum perpipaan guna mendukung akses air minum aman baru menjangkau 20,14 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia.

Akses Rumah Tangga terhadap Fasilitas Sanitasi Layak.

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Susenas Kor, BPS	%	67,95 (revisi baseline RAN sesuai metode terupdate)	90	77,44 (2019)	▼



Gambar 02. Rumah Tangga dengan Fasilitas Sanitasi Layak Tahun 2015-2019.

Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak (termasuk sanitasi aman) secara konsisten meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, sebanyak 77,44 persen rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak atau meningkat sebesar 9,49 persen dari tahun 2015.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI.

Tantangan yang dihadapi terkait Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak antara lain:

- a. Upaya penyediaan air minum masih memiliki tantangan antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- b. Terkait dengan penyediaan akses sanitasi layak, masih terdapat tantangan terkait belum optimalnya operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), serta Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).
- c. Dalam pengelolaan air tanah dan air baku, tantangan yang dihadapi antara lain tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (*3T: Too much, Too little, Too dirty*), dan permasalahan pemantauan dan pengawasan kualitas air serta pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.

III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Kabupaten Bangka Mengajak Ibu-ibu Arisan dalam Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan

Kabupaten Bangka berada di Provinsi Bangka Belitung di mana terdapat Desa Kapuk yang merupakan desa endemis diare dan mengalami kejadian luar biasa (KLB). Dalam mengatasi masalah tersebut, Dinas Kesehatan setempat menyusun strategi dengan menerapkan metode *Community Lead Total Sanitation (CLTS)*. Dalam pendekatan ini dilakukan bersama dengan dinas kesehatan, puskesmas, dan masyarakat sehingga muncul inovasi “Arisan Jamban Sederhana”.





Kegiatan yang dilakukan tidak hanya pendekatan dan advokasi kebijakan kepada pemerintah dalam menyusun peraturan dan instruksi terkait Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), tetapi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Program Nyaman Stop BABS di Balik Kocokan Arisan “Ibu”. Keberhasilan program ini ditandai dengan menurunnya angka kejadian diare di Kabupaten Bangka dari 3.552 kasus pada tahun 2011 menjadi 1.373 kasus di tahun 2014 (Kemenkes, 2019)

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Berdasarkan Dokumen RPJMN, arah kebijakan antara lain:

1. Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman dilaksanakan dengan kebijakan: (1) Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman; (2) Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum; (3) Pengembangan dan pengelolaan SPAM; serta (4) Edukasi kepada masyarakat.
2. Untuk sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) melalui arah kebijakan: (1) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; (2) Peningkatan komitmen kepala daerah; (3) Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman; (4) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat; dan (5) Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan.
3. Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah (1) percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi; (2) peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum, (3) dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.





V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	BPS	%	84,9 (revisi baseline RAN)	100 (target RPJMN 2015-2019)	89,27 (2019)	▼
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	m ³ /detik	58,41/6,97	118,6/21,52	81,36 (2019) (domestik dan industri)	▼
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	BPS	%	PM	PM	6,7 (2018) dalam satuan rumah tangga	●
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Susenas Kor, BPS (diolah Bappenas)	%	-	PM	48,4 (2018)	●
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Susenas Kor, BPS	%	67,95	90	77,44 (2019)	▼
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Kementerian Kesehatan	desa/kelurahan	26,417	45.000	57.935 (TW IV 2019)	●
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Kementerian Kesehatan	desa/kelurahan	2.361	PM	24.857 (2019)	●



TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten/Kota (Skala Kota)	-	9 (skala kota) 17 (skala Kawasan) 89 (skala komunal)	7 (skala regional) 6 (skala kota) 101 (skala Kawasan / permukiman) 321 (skala komunal)	
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Susenas KOR, BPS	%	N/A	12,5	0,62 (2019)	

Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten/Kota	-	41	157	
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Susenas KOR, BPS	%	-	72,5	6,87 (2019)	
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	Danau Prioritas	0 (2014)	15	15	
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	Sungai	15 (2015)	15	15	

Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.



TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Kementerian ESDM	PM	PM	PM	NA	
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	-	PM	PM	PM	NA	
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.							
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	RPDAST	0 (2014)	108	108	●
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	stasiun	PM	PM	NA	
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	wilayah Sungai	2 (2014)	8	NA	
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	DAS Lintas Negara (dengan MoU)	0 (2014)	19	10	▼
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	Ha	500,000 (2014)	12.700.000	2.031 (2019)	▼



TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	wilayah Sungai	3 (2014)	10	NA	
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	Lemba-ga	PM	PM	NA	
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	DAS	0 (2014)	15	13 (2018)	
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	DAS	0 (2014)	15	15	
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	Danau	0 (2014)	15	15	
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	Danau	0 (2014)	15	NA	
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	Danau	0 (2014)	15	15	



TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	Ha	0,5 juta (2014)	5.500.000	1.183.581	▼
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	DAS Prioritas	0 (2014)	15	15	●





DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan. 2019. *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2018*. Kemenkes: Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2019. *Best Practices Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Direktorat Promosi Kesehatan Kemenkes: Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2018*. KLHK: Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2018. *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2019. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2018*. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR: Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. *Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Kementerian PUPR: Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2019. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya 2018*. Kementerian PUPR: Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2019. *Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berbasis Hasil (Outcome): Upaya Integrasi Sustainable Development Goals dalam Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah*. Kementerian PPN/Bappenas: Jakarta.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018. *Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Lampiran II Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) 2017-2019*. Kementerian PPN/Bappenas, 2018. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024*. 2020. Jakarta.





We support the Sustainable Development Goals

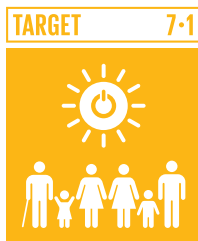


We support the Sustainable Development Goals

7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua



I. PENDAHULUAN

Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor yang strategis dan masih tetap menjadi andalan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor riil. Selain itu sektor energi dan sumber daya mineral juga memiliki peranan penting, yaitu sebagai penjamin sumber pasokan energi yang bersih dan juga terjangkau, pendorong aktifitas ekonomi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam energi dan mineral.

Untuk memastikan terwujudnya energi bersih dan terjangkau, perlu dipastikan pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan:

TARGET	DESKRIPSI
Target 7.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Elektrifikasi; 2. Konsumsi Listrik Perkapita; 3. Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga.
Target 7.2	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bauran Energi Terbarukan.
Target 7.3	<ol style="list-style-type: none"> 5. Intensitas Energi Primer

II. STATUS CAPAIAN

- Konsumsi listrik nasional terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 konsumsi listrik nasional baru sebesar 910 kilowatt jam (kWh) per kapita dan pada tahun 2019 menjadi 1.084 kWh/kapita. Peningkatan konsumsi listrik nasional ini selaras dengan kemajuan perekonomian nasional.
- Sejalan dengan peningkatan konsumsi listrik per kapita, rasio elektrifikasi juga menunjukkan peningkatan. Rasio elektrifikasi pada tahun 2014 sebesar 84,35% meningkat menjadi 98,89% pada tahun 2019. Capaian tersebut telah melampaui target RPJMN 2015-2019 sebesar 96,60%.

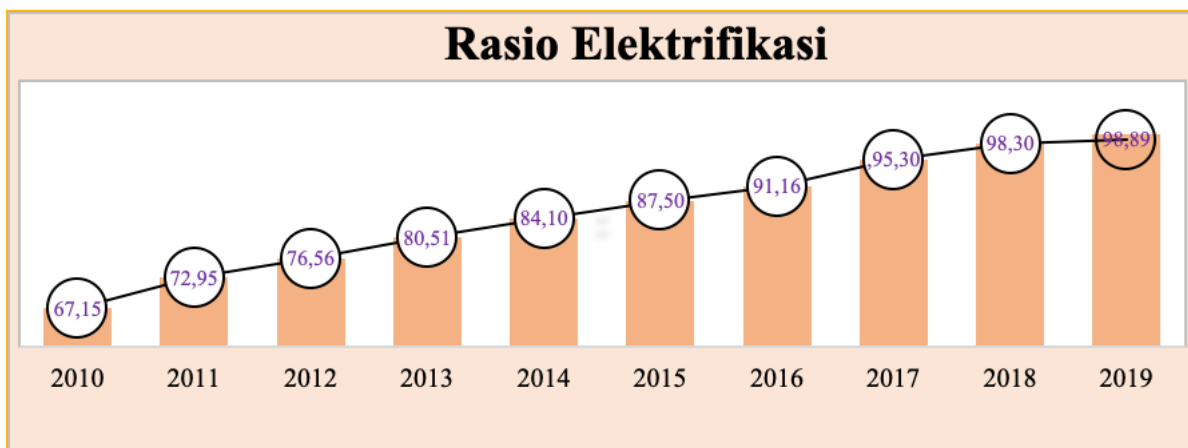
A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Rasio Elektrifikasi.

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Kementerian ESDM	%	88.3 (2015)	96,60	98,89	●
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Kementerian ESDM	SR	20.363 (2015)	374.000	537.936*	●

Keterangan: * merupakan capaian kumulatif dengan pendanaan APBN dan non-APBN

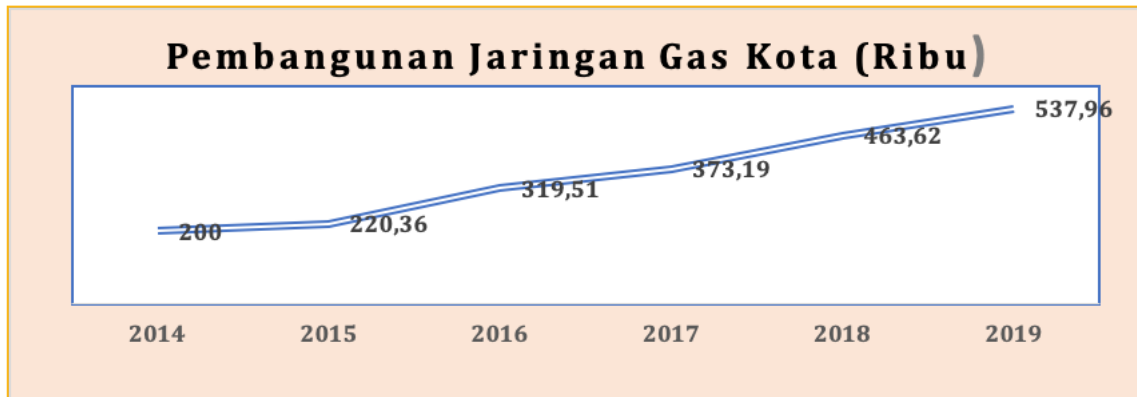
Pada periode 2015-2019 rasio elektrifikasi mengalami peningkatan dan pencapaian pada tahun 2019 melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 rasio elektrifikasi mencapai 98,89% . Tantangan perluasan akses listrik masih cukup besar di beberapa daerah antara lain Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua terutama di wilayah terpencil dan secara geografis sulit dijangkau. Upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dilakukan melalui penambahan jaringan melalui listrik pedesaan; pendistribusian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE); serta pengalokasian anggaran pasang baru listrik 450 VA bagi rumah tangga miskin.



Gambar 01. Rasio Elektrifikasi.

Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jaringan Gas Kota).

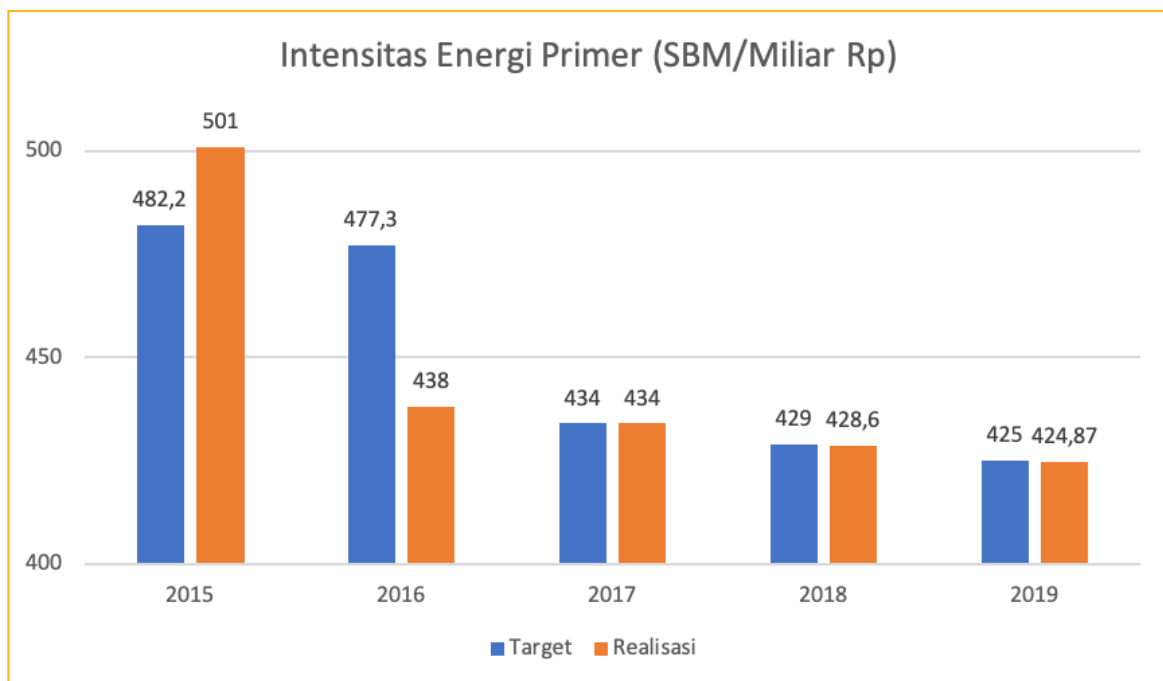
Dalam mendukung pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih, akses ke sumber energi, gas bumi semakin diperluas. Sampai dengan tahun 2018, pembangunan jaringan gas rumah tangga telah mencapai 463.643 sambungan (kumulatif) meningkat menjadi 537.963 (kumulatif) pada tahun 2019 dan berhasil melampaui target sebesar 374.000. Perluasan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri juga dilakukan melalui pembangunan pipa transmisi dan/atau wilayah jaringan gas bumi yang mencapai 14.763,6 km dan realisasi *Domestic Market Obligation* (DMO) 65,88 persen pada tahun 2019.



Gambar 02. Pembangunan jaringan gas kota (Ribu).

Intensitas Energi Primer.

Intensitas energi primer merupakan tolak ukur dalam melakukan pengukuran seberapa efisien tingkat penggunaan energi. Semakin rendah nilai intensitas energi primer maka semakin tinggi efisiensi dari energi yang telah dikonsumsi. Capaian intensitas energi primer pada tahun 2019 adalah sebesar 424,87 SBM/Miliar Rp dengan target sebesar 425 SBM/Miliar Rp.



Gambar 03. Intensitas Energi Primer (SBM/Miliar Rp)



B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

Konsumsi Listrik Per Kapita.

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan Modern							
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Kementerian ESDM	kWh	918	1200	1.084	▼
7.2 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Kementerian ESDM	%	5,8	16	9,15	▼

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang berproses menjadi negara maju. Salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah penyediaan energi yang memadai dan andal untuk seluruh masyarakat yang ditunjukkan dengan tingkat konsumsi listrik. Pada periode 2015-2019 konsumsi listrik perkapita mengalami peningkatan dan mencapai 1.084 kWh/kapita pada tahun 2019. Perkembangan ini menjadi sinyal positif bagi tumbuhnya perekonomian nasional. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMN 2015-2019 sehingga masih perlu diakselerasi.

Bauran Energi Terbarukan.

Pemanfaatan energi terbarukan terus meningkat di Indonesia. Sampai dengan tahun 2019, porsi bauran EBT di Indonesia baru mencapai 9,15 persen. Capaian ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan di RPJMN 2015-2019. Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya energi setempat mengingat tingkat pemanfaatannya yang baru sekitar 2,5 persen (9,8 GW) dari potensi yang ada (441,7 GW). Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan sebagai bahan bakar juga semakin digalakkan dengan meningkatkan mandatori blending biodiesel menjadi B-30. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong penyediaan energi yang keberlanjutan.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI.

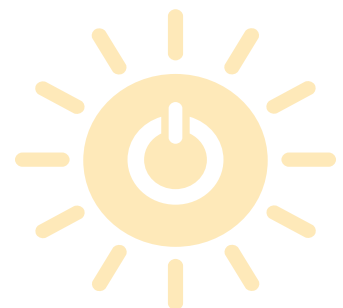
Akses listrik cukup tinggi namun masih mengalami ketimpangan di beberapa daerah di wilayah tengah dan timur Indonesia. Tingkat keandalan pelayanan ketenagalistrikan juga masih perlu ditingkatkan. Gangguan terhadap pelayanan yang menyebabkan padamnya listrik di konsumen masih sering terjadi. Sepanjang tahun 2019, terjadi gangguan sebanyak 11,51 kali per pelanggan dengan durasi mencapai 18,95 jam per pelanggan. Artinya dalam satu tahun setiap pelanggan rata-rata masih mengalami gangguan pemadaman selama 19 jam. Gangguan ini meningkat cukup tajam dibandingkan tahun 2018 yang terjadi sebanyak 9,90 kali per pelanggan dengan durasi 15,97 jam per pelanggan. Peningkatan ini



disebabkan terjadinya pemadaman massal (*black out*) akibat gangguan yang terjadi di sebagian wilayah Pulau Jawa pada awal Agustus 2019.

Penyediaan infrastruktur gas bumi untuk rumah tangga, industri dan transportasi juga, relatif masih belum merata. Di lain pihak penduduk yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak yaitu sebesar 21,57 persen di tahun 2017. Kebijakan konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) juga berkontribusi pada meningkatnya impor LPG akibat ketidakcukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi peningkatan konsumsi. Konsumsi LPG yang sejatinya merupakan produk turunan minyak bumi mencapai 7,67 juta metrik ton pada tahun 2019 dan sekitar 74% dari konsumsi tersebut dipenuhi dari impor. Untuk itu, pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi gas bumi perlu mendapat perhatian.

Secara garis besar, masih terdapat beberapa tantangan atau isu dalam kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan, antara lain (1) adanya pengelolaan dan pemanfaatan energi yang kurang efisien, (2) kecukupan pasokan energi terutama gas, dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil; (3) pemanfaatan sumber daya energi secara maksimal untuk bahan baku industri; (4) kualitas dan kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa; (5) pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas; (6) konsumsi energi yang belum efisien, penghematan energi di sektor industri, transportasi, bangunan dan sarana komersial perlu terus ditingkatkan dengan potensi penghematan sekitar 30 persen dari penggunaan energi saat ini; dan (7) belum adanya fasilitas cadangan penyangga energi nasional untuk mengantisipasi kondisi krisis dan darurat energi.



III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Program BIRU adalah inisiatif dari Hivos dan SNV dan dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Energi (YRE) dengan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dengan dukungan dari Kedutaan Besar Norwegia. Program EnDev (*Energizing Development*) GIZ, serta para mitra untuk mempromosikan bentuk energi terbarukan yang modern dan lestari bagi masyarakat Indonesia.

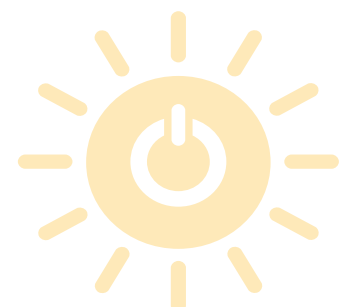
Program BIRU mempromosikan penggunaan reaktor biogas sebagai sumber energi lokal yang berkelanjutan dengan mengembangkan pasar. Program ini untuk diarahkan pengembangan sektor biogas komersial berorientasi pasar yang mengarah pada terciptanya lapangan pekerjaan.

Dimulai pada Mei 2009 dengan dukungan dana dari Kedutaan Belanda, dan hingga bulan Juli 2019 Program BIRU telah membangun sebanyak 23.934 reaktor biogas di sepuluh provinsi di Indonesia. Dengan banyaknya penduduk di Indonesia yang bergerak di sektor pertanian dengan luasnya lahan yang diolah, mengindikasikan besarnya potensi pengembangan biogas yang berkelanjutan.

Pada awal inisiasi pelaksanaan program, Pulau Jawa, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bali menjadi focus. Program BIRU mengingat tingginya populasi ternak di lokasi-lokasi ini dengan sebagian besar hewan ternak yang dikandangkan. Meski demikian, keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan potensi pasar teknis semata, namun juga keberadaan dan kemampuan pelaksana terlibat di dalam beberapa fungsi dari program tersebut, antara lain konstruksi servis pasca penjualan, dan pemberian kredit. Pemilihan provinsi-provinsi target diawali dengan pelaksanaan studi pasar. Pada saat ini, Program BIRU beroperasi di sepuluh provinsi di Indonesia yaitu: Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Sumba).



Gambar 03. Peta sebaran lokasi di 10 provinsi.
sumber: www.biru.or.id





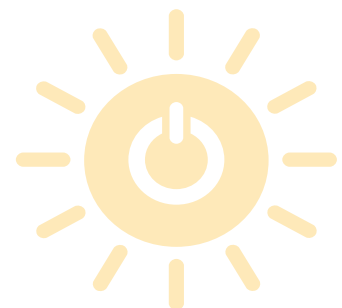
IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Lima arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, handal, efisien, dan berkelanjutan, dalam rangka pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah:

- 1. Melakukan diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, ditempuh melalui:**
 - a. Meningkatkan pemanfaatan EBT antara lain panas bumi, air, surya, dan bioenergi;
 - b. Mengembangkan *mini/micro grid* berbasis energi bersih;
 - c. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi penyimpanan energi (*energy storage system*) termasuk baterai; serta
 - d. Memanfaatkan energi surya atap (*solar rooftop*) dan PLTS terapung (*floating solar power plant*) beserta pengembangan industri sel surya dalam negeri;
- 2. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui:**
 - a. Mengembangkan *Energy Service Company* (ESCO);
 - b. Memperluas, merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas sistem transmisi dan distribusi;
 - c. Mengembangkan sistem manajemen informasi dan kontrol data;
 - d. Mengembangkan dan pemanfaatan teknologi jaringan cerdas (*smart grid*) dan
 - e. Memanfaatkan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi (*high efficiency and low emission/HELE*).
- 3. Melakukan penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, ditempuh melalui:**
 - a. Melakukan pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas;
 - b. Menyediakan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu;
 - c. Memberikan dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara) untuk listrik;
 - d. Meningkatkan infrastruktur gas bumi, khususnya seperti jaringan pipa transmisi gas dan distribusi non-pipa khususnya LNG receiving terminal;
 - e. Membangun jaringan gas perkotaan, LPG, dan kompor bersih berbasis listrik;
 - f. Meningkatkan kemampuan rekayasa nasional untuk energi dan ketenagalistrikan yang didukung industri dalam negeri, dan;
 - g. Melakukan pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan bermotor listrik.
- 4. Meningkatkan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, ditempuh melalui:**
 - a. Meningkatkan tugas dan fungsi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan;
 - b. Melakukan penguatan independensi operator sistem transmisi; serta
 - c. Mendorong kebijakan harga/tarif energi dan penerapannya sehingga mencapai harga keekonomian secara bertahap.
- 5. Mengembangkan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, ditempuh melalui:**
 - a. Mengembangkan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja;
 - b. Menerapkan penyesuaian tarif listrik dan harga energi;
 - c. Memanfaatkan pembiayaan dengan persyaratan yang ringan dan wajar, alternatif instrumen dan leverage asset; serta
 - d. Mengembangkan skema pendanaan yang sesuai dan berkesinambungan.



RPJMN 2020-2024 telah menetapkan beberapa Proyek Prioritas (*Major Project*) yang secara langsung akan mendukung pencapaian tujuan ke-7 dari TPB yaitu: i) Pembangunan energi terbarukan *green fuel* berbasis kelapa sawit ; ii) Infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta Sambungan Rumah; iii) Pipa gas bumi Trans-Kalimantan (2.219 KM); iv) Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA; dan v) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak.



V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Kementerian ESDM	%	88.3	96,60	98,89	●
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Kementerian ESDM	kWh	918	1200	1.084	▼
7.2.1.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Kementerian ESDM	SR	20.363 (2015)	374.000	537.936	●
7.2.1.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS	-	68,59 (Gas LPG) 0,19 (Jaringan Gas)	PM	79,38 (Gas LPG) 0,52 ((Jaringan Gas)	●
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Kementerian ESDM	%	5,8	16	9,15	▼
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.							
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Kementerian ESDM	SBM (Setara Barrel Minyak)	501	424	424,87	●



DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. (2020). *Lampiran 1 Narasi RPJMN 2020-2024: Bab 6 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jakarta:Bappenas.

Biogas Rumah. *Program Biru*. Diakses dari <http://www.biru.or.id/biru-program>

Kementerian ESDM. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2019 #Energi Berkeadilan*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta: Kementerian ESDM.

Kementerian ESDM. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2014-2019*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta: Kementerian ESDM.

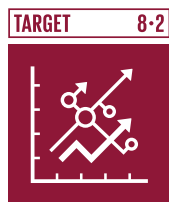


We support the Sustainable Development Goals

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua



I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas merupakan sarana untuk mendorong Indonesia lebih mandiri dan sejahtera. Kondisi ini perlu disertai dengan tersedianya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak sehingga tercapai pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Berbagai langkah strategis telah diupayakan untuk memastikan peningkatan nilai tambah berbagai sektor, akselerasi penyerapan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, kondisi kerja layak, perlindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengembangan sektor pariwisata, serta akses terhadap layanan keuangan.

Untuk memastikan hal tersebut tercapai, perlu dipastikan pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan:

TARGET	DESKRIPSI
Target 8.1	<ol style="list-style-type: none"> Laju Pertumbuhan PDB perkapita; PDB Perkapita.



TARGET	DESKRIPSI
Target 8.3	3. Proporsi lapangan kerja informal di sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin; 4. Persentase tenaga kerja formal; 5. Persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian.
Target 8.5	6. Tingkat pengangguran terbuka Berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur; 7. Persentase setengah pengangguran.
Target 8.9	8. Proporsi kontribusi Pariwisata terhadap PDB; 9. Jumlah wisatawan mancanegara; 10. Jumlah devisa sektor pariwisata.

II. STATUS CAPAIAN

- Pertumbuhan ekonomi telah berhasil menciptakan lapangan kerja yang cukup tinggi. Selama periode 2015-2019, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi rata-rata dapat menciptakan sekitar 470.000 lapangan kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa secara total, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta mencapai sekitar 11,88 juta, melebihi target 10 juta lapangan kerja selama lima tahun. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun dari 6,18 persen (2015) menjadi 5,28 persen (2019).
- Sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong perekonomian Indonesia, mengalami kemajuan yang baik. Menurut Laporan *The Travel & Tourism Competitiveness Report* yang dirilis WEF (*World Economic Forum*), peringkat indeks daya saing pariwisata Indonesia di dunia naik menjadi peringkat 40 di tahun 2019 dari peringkat 42 di tahun 2017. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya minat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia Desember 2019 sebesar 1,88 persen dibandingkan pada Desember 2018..

A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia.

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal di sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS	%	43,37	PM	43,77	▶
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS	%	42,2	51	44,28	▼

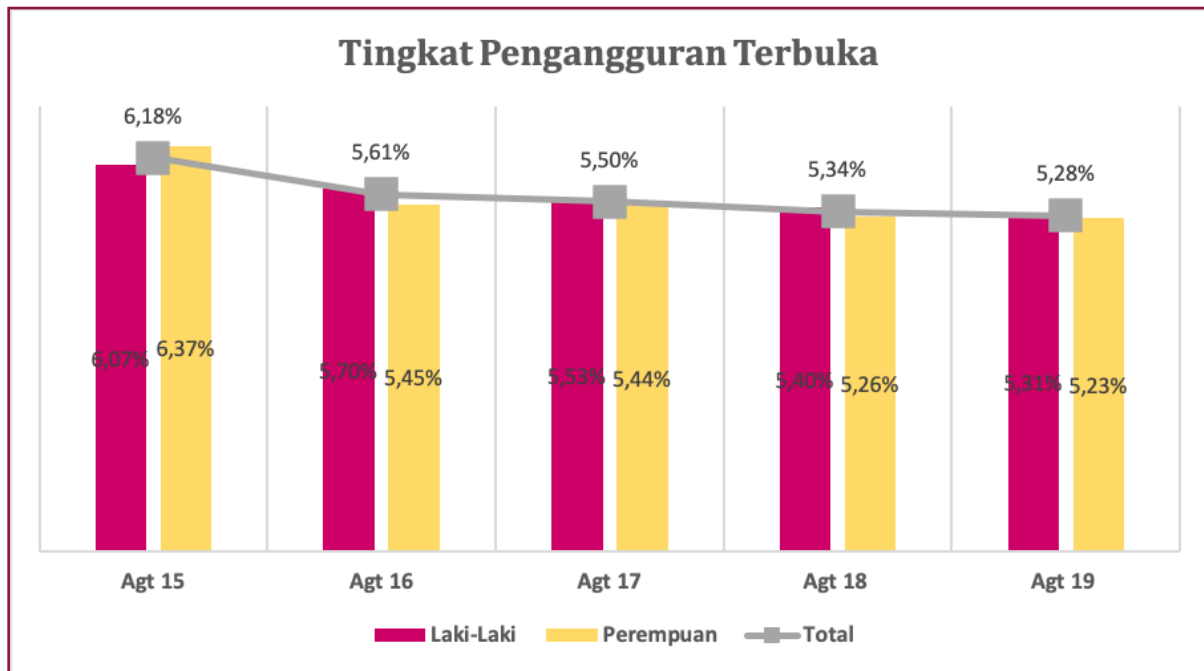


TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal di Sektor pertanian	BPS	%	87,12	PM	87,50	
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	6,18 Laki-laki: 6,07 Perempuan: 6,37 Usia 15-24: 22,59 Usia 25+: 2,91	4,0 – 5,0 (RPJMN)	5,28 Laki-laki : 5,31 Perempuan : 5,23 Usia 15-24: 18,62 Usia 25+: 3,01	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS	%	8,48	PM	6,43	
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi Pariwisata terhadap PDB.	BPS	%	4,25	8	4,8 (2019)	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	BPS	Juta Orang	10,4	20	16,11 (2019)	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	BPS	USD Miliar	12,23 (2015)	20	19,70 (2019)	

Pada tahun 2019, kondisi ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan tren yang positif dengan menurunnya TPT hingga 5,28 persen, sedikit di atas target yang ditetapkan sebesar 4,8-5,2 persen. Penurunan ini sejalan dengan penciptaan lapangan kerja baru sebesar 2,51 juta. Kontribusi kelompok perempuan dalam kegiatan perekonomian juga semakin besar. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pengangguran perempuan yang terus menurun, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki pada tahun 2019. Sementara itu, proporsi pekerja formal meningkat dari 43,16 persen pada tahun 2018 menjadi 44,28 persen pada tahun 2019. Sektor jasa menjadi penyumbang lapangan kerja terbesar, diikuti sektor pertanian dan industri.

Kondisi di atas mampu tercipta dengan semakin intensifnya upaya meningkatkan iklim usaha dan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan, yang pada akhirnya memperluas kesempatan kerja. Reformasi ketenagakerjaan ditempuh terutama melalui penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri untuk peningkatan keahlian (skill) tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.



Gambar 01. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sektor Pariwisata Sebagai Lokomotif Pembangunan.

Sektor pariwisata dalam beberapa tahun terakhir merupakan salah satu sektor penyumbang devisa terbesar di Indonesia sehingga pariwisata menjadi salah satu dari lima sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian. Pengakuan global terhadap kemajuan sektor pariwisata Indonesia ditandai dengan kenaikan peringkat daya saing Indonesia menjadi peringkat ke 40 dari 140 negara pada tahun 2019, dan peringkat keempat untuk kawasan Asia Tenggara. Hal ini salah satunya didukung dengan adanya kebijakan terkait percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas 2020-2024 berubah menjadi Danau Toba, Borobudur dskt, Lombok, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung dan Morotai.

Penciptaan devisa pariwisata meningkat dari USD 10,26 miliar pada tahun 2014 menjadi USD 19,7 miliar pada tahun 2019. Kenaikan devisa ini dihasilkan dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) untuk menikmati wisata alam, budaya dan buatan di Indonesia dari 9,4 juta pada tahun 2014 menjadi 16,1 juta pada tahun 2019. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara juga meningkat dari 251 juta pada tahun 2014 menjadi sekitar 290 juta pada tahun 2019.

Secara kumulatif Januari-Desember 2019, jumlah wisman ke Indonesia mencapai 16,11 juta kunjungan, atau naik 1,88 persen dibandingkan tahun 2018. Kontribusi sektor pariwisata dalam penciptaan nilai tambah nasional diperkirakan mencapai 4,8 persen.



B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita.	BPS	%	3,52 (2015)	PM	3,94	●
8.1.1(a)	PDB per kapita	BPS	%	45,2 (2015)	72,2	59,1	▼

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan nasional. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan tahun 2019 juga lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar 5,2-5,6 persen. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia terus mengalami peningkatan, tahun 2019 PDB per kapita mencapai Rp 59,1 juta atau naik dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp 56,0 juta, namun masih cukup jauh dari target, yaitu Rp 72,2 juta. Secara riil, laju pertumbuhan PDB perkapita naik menjadi 3,94 persen. Kenaikan tersebut berhasil membuat Indonesia naik peringkat dari *lower-middle income country* menjadi *upper-middle income country*. Capaian ini memperkuat landasan Indonesia serta memberikan peluang untuk keluar dari *middle income trap* di masa yang akan datang.

Meskipun demikian, masih cukup banyak tantangan yang dihadapi, antara lain pertumbuhan ekonomi dan realisasi PDB perkapita yang tidak mencapai target. Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional serta kontribusi ekonomi terbesar lebih banyak ditopang Pulau Jawa, sehingga peningkatan perekonomian Indonesia belum tersebar secara merata. Diperlukan upaya luar biasa dari pemerintah untuk melakukan pemerataan dan inklusivitas ekonomi agar tidak hanya bertumpu dan mengandalkan Pulau Jawa sebagai basis pertumbuhan nasional.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

1. Di tingkat global, pertumbuhan ekonomi dunia yang relatif rendah masih akan menjadi pemicu pertumbuhan volume perdagangan yang melambat. Selain itu, harga komoditas internasional yang cenderung stagnan juga berdampak pada kinerja ekspor komoditas Indonesia. Selanjutnya, sentimen di pasar keuangan global dan ketidakpastian akhir perang dagang Amerika Serikat-China semakin menekan kinerja eksternal perekonomian Indonesia, terutama dari sisi investasi dan perdagangan.
2. Di tingkat domestik, pertumbuhan ekonomi yang stagnan disebabkan oleh tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial yang dipicu oleh masih rendahnya tingkat produktivitas, sejalan dengan tidak berjalannya transformasi struktural dalam perekonomian. Selanjutnya, defisit transaksi berjalan yang cenderung meningkat mengindikasikan tidak berkembangnya industri pengolahan yang berdampak pada kinerja perdagangan internasional. Selain itu, ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh komoditas relatif tidak banyak berubah dibandingkan dengan periode 40 tahun yang lalu.



3. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan belum mampu merespon perkembangan pasar kerja menyebabkan produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal dan lambatnya penciptaan lapangan kerja formal.
4. Masih tingginya konflik hubungan industrial, terutama penolakan terhadap perubahan aturan ketenagakerjaan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan pekerja.

III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

1. Gojek dan Implikasinya terhadap Ekonomi dan Lapangan Pekerjaan.

Transportasi online telah menjadi salah satu moda transportasi yang paling sering digunakan dalam beberapa tahun terakhir karena layanan mudah dan murah yang ditawarkan. Gojek, sebagai salah satu penyedia layanan transportasi online, telah berkembang secara signifikan, saat ini menjadi decacorn pertama di Indonesia. Berdasarkan hasil studi Dampak Gojek terhadap Perekonomian Indonesia oleh Gojek dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia pada tahun 2018, kontribusi Gojek terhadap perekonomian Indonesia mencapai Rp 44,2 triliun yang berasal dari kontribusi mitra Gojek dari empat layanan, masing-masing terdiri dari Rp 16,5 triliun dari Go-Ride, Rp 8,5 triliun dari Go-Car, Rp 18 triliun dari Go-Food, dan Rp 1,2 triliun dari Go-Life (Go-Massage dan Go-Clean).

Selama beroperasi sejak tahun 2010, Gojek telah berpartisipasi dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jam kerja yang fleksibel tanpa mempengaruhi produktivitas kerja menjadi alasan banyak masyarakat yang tertarik bergabung sebagai mitra Gojek. Temuan menarik yang menjadi perhatian yaitu lebih dari 70% mitra Go-Massage dan Go-Clean adalah wanita dan hampir 50% dari mereka adalah pencari nafkah utama dalam keluarga mereka. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam pekerjaan dan terutama ekonomi digital sejalan dengan Tujuan 8 SDGs.

Selain itu, Gojek juga turut membantu mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi dalam operasional bisnisnya untuk memperluas akses pasar. Hal ini berdampak pada peningkatan volume transaksi dan aset bisnis UMKM. Sejak bergabung dengan Gojek, mitra UMKM juga mampu meningkatkan upah pekerjanya lebih dari upah minimum. Hal ini berlaku juga untuk mitra Go-Ride, Go-Car, dan Go-Life di Jabodetabek dan di luar Jabodetabek. Penghasilan rata-rata adalah Rp 4,9 juta untuk mitra Go-Ride, Rp 6 juta untuk mitra Go-Car, dan Rp 4,8 juta untuk mitra Go-Life di Jabodetabek. Mitra Gojek juga menjadi lebih makmur dan mengalami peningkatan mobilitas ekonomi. Untuk Go-Ride, mitra mengalami peningkatan pendapatan 45% dan peningkatan belanja 25% sejak bergabung dengan Gojek. Untuk Go-Car, mitra mengalami peningkatan pendapatan 42% dan peningkatan belanja 32% sejak bergabung dengan Gojek. Untuk Go-Life, mitra mengalami kenaikan pendapatan 72% dan pengeluaran sebesar 19% sejak bergabung dengan Gojek. Gojek membantu menciptakan pekerjaan yang layak dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan UMKM.

Masyarakat juga menunjukkan pandangan positif optimisme dalam bermitra dengan Gojek. Mereka percaya bahwa dengan menjadi mitra Gojek penghasilan untuk keluarga dapat terpenuhi. Selain itu, adanya perjanjian kemitraan dan peluang untuk bernegosiasi dan diskusi dengan manajemen Gojek menjadi alasan Gojek masih menjadi pilihan masyarakat hingga saat ini.



2. Desa Peduli Buruh Migran.

Dalam mengimplementasikan SDGs Goal 8 dari Pekerjaan Layak, Migrant CARE dan jaringannya yang didukung oleh Program MAMPU (Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), mengembangkan inisiatif berbasis desa/local untuk meningkatkan perlindungan dan akses buruh/pekerja migran ke berbagai layanan sebelum, selama dan sesudah bermigrasi melalui Desa Peduli Buruh/Pekerja Migran (DESBUMI). DESBUMI memastikan bahwa para migran dan keluarganya memiliki akses ke berbagai layanan mulai dari panduan tentang pilihan bermigrasi, informasi tentang hak buruh migran, penanganan kasus dan rujukan ketika menghadapi persoalan di luar negeri, hingga pelatihan keterampilan pascamigrasi. Sejak tahun 2013, Desbumi telah dilaksanakan di 43 desa, dengan desa yang aktif sampai saat ini berjumlah 37 dan 5 provinsi (13 Jawa Tengah, 12 Jawa Timur, 1 Jawa Barat, 5 Nusa Tenggara Barat, 6 Nusa Tenggara Timur).

Sejalan dengan SDGs Goal 8, DESBUMI melaksanakan program pemberdayaan ekonomi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan; pekerjaan penuh dan produktif; dan pekerjaan yang layak untuk semua. DESBUMI memfasilitasi kelompokkelompok purna migran untuk mengembangkan usaha dan menghubungkannya dengan pihak desa, kabupaten, maupun pihak swasta untuk mengakses pelatihan, modal atau dukungan lainnya. Pemberdayaan ekonomi ini diharapkan dapat membantu purna migran mempertahankan kondisi ekonomi mereka selama tidak bekerja sebagai pekerja migran, khususnya perempuan dimana 60% pekerja migran adalah perempuan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan DESBUMi juga menysasar keluarga pekerja migran, kaum muda dan disabel agar kesetaraan gender dapat dicapai di sektor pekerjaan layak dimana perempuan dan laki-laki dari seluruh kelompok tersebut mendapatkan penghasilan atau upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama. DESBUMI telah menghasilkan beberapa dampak positif antara lain: 1) seluruh desa di mana DESBUMI diimplementasikan telah menerbitkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Buruh Migran serta alokasi anggaran untuk pelaksanaan DESBUMI; 2) 8 kabupaten/kota telah mengembangkan pusat layanan terintegrasi dengan SOP penanganan kasus, alokasi anggaran dana desa dan mekanisme rujukan rumah sakit, rumah aman, P2TP2A, polisi, Disnakertrans, BP3TKI dan BNP2TKI; 3) Aspek kunci dari model DESBUMI direfleksikan di dalam UU Perlindungan Buruh Migran Indonesia (No. 18/2017), yang telah disahkan oleh DPR RI pada tahun 2017; dan 4) DESBUMI telah dengan kuat menginspirasi Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk membuat inisiatif Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang diluncurkan pada Mei 2017.



VI. KEBIJAKAN KE DEPAN

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan layak, selama lima tahun ke depan, arah kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2020-2024 yang mencakup antara lain:

- 1. Melakukan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:**
 - a. meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar;
 - b. meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - c. meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
 - d. meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta
 - e. meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
- 2. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi:**
 - a. meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - b. meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - c. meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata;
 - d. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - e. memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta
 - f. mengembangkan industri halal.
- 3. Melakukan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi:**
 - a. meningkatkan pendalaman sektor keuangan;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
 - c. meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - d. meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata;
 - e. melakukan reformasi fiskal; serta
 - f. meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
- 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kerja sama industri, yang diarahkan pada:**
 - a. meningkatkan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - b. reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui



pembelajaran inovatif;

- c. meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi;
- d. melakukan penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
- e. meningkatkan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi.



VII. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk sector bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	%	3,52 (2015)	PM	3,94	●
8.1.1.(a)	PDB Perkapita.	BPS	Juta Rupiah	45,2 (2015)	72.2	59,1	▼
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui sektor pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat Pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	4,70 (2015)	4,0 – 5,0	2,94	▼
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal di sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS	%	43,37	PM	43,77	▶
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS	%	42,2	51	44,28	▼
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal di Sektor pertanian	BPS	%	87,12	PM	87,50	▶
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Bank Indonesia ,BPS, Kemen-KUKM	%	20.12	PM	24,82	●
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	%	11.388,56	PM	15.857	●
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka Berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	Laki-laki: 6,18 Perempuan: 6,07 Usia 15-24: 22,59 Usia 25+: 2,91	4,0 – 5,0 (RPJMN)	Laki-laki : 5,28 Perempuan : 5,31% Usia 15-24: 18,62 Usia 25+: 3,01	▼



TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS	%	8,48	PM	6,43	●
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS	%	24,77	PM	21,72	●
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Kementerian Ketenagakerjaan	Perusahaan	700	PM	NA	NA
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi Pariwisata terhadap PDB	BPS	%	4,25	8	4,8	▼
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	Juta Orang	10,4	20	16,11	▼
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	BPS	Juta Orang	255	275	290	●
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	BPS	USD Miliar	12,23	20	19,7	▼
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri Pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	BPS	%	9,03	PM	11,83	●
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.10.1*	Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia	Unit	53,5	PM	54	●
8.10.1*	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia	Unit	16	PM	16	▶
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	BPS	Km	Rata-rata Daerah Tertinggal : 45,02(2011) Rata-rata Nasional : 24,92(2011)	PM	NA	NA
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Bank Indonesia	%	19,32	PM	19,55 (Des 2019)	●



DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). *Lampiran 1 Narasi RPJMN 2020-2024: Bab 2 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jakarta: Bappenas.Dokumen.
- BPS. Berita Resmi Statistik 5 November 2019. Diakses dari https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20191105114507.pdf
- BPS. *Laporan Perekonomian Indonesia 2019*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2019/09/16/7cc68afc43aa0d8b9e8eaf47/laporan-perekonomian-indonesia-2019.html>
- Lembaga Demografi UI. Dampak GO-JEK terhadap Perekonomian Indonesia. Diakses dari <https://ldfebui.org/wp-content/uploads/2018/03/Dampak-Gojek-Bagi-Perekonomian-Indonesia.pdf>





We support the Sustainable Development Goals



We support the Sustainable Development Goals

9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR



Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi



I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif perlu ditunjang dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas nasional, pertumbuhan dan perluasan industri untuk mendukung pertumbuhan sektor padat tenaga kerja, dan pengembangan inovasi dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Untuk memastikan pembangunan yang inklusif, maka perlu dipastikan pencapaian target dan indikator:

TARGET	DESKRIPSI
Target 9.1	<ol style="list-style-type: none"> kondisi mantap jalan nasional; panjang pembangunan jalan tol; panjang jalur kereta api; jumlah bandara; jumlah dermaga penyeberangan; jumlah pelabuhan strategis.



Target 9.2	7. proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan per kapita; 8. laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas; 9. proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas.
Target 9.3	10. proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri; 11. proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
Target 9.4	12. rasio emisi CO ₂ /emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur; 13. persentase perubahan emisi CO ₂ /emisi gas rumah kaca.
Target 9.5	14. proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
Target 9.C	15. proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> ; 16. proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam; 17. proporsi individu yang menggunakan internet.

Kebijakan untuk mendukung pencapaian Tujuan 9 diarahkan untuk membangun infrastruktur ekonomi, meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi riil dan industrialisasi, memanfaatkan infrastruktur TIK, melaksanakan pembangunan rendah karbon dan meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi.

II. STATUS CAPAIAN

- Industri pengolahan non migas menyerap tenaga kerja yang cukup banyak yaitu 14,9 persen pada tahun 2019, walaupun nilai tambahnya tumbuh masih di bawah pertumbuhan PDB nasional.
- Capaian pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas dalam pemerataan pembangunan di darat, air dan laut terus meningkat, dengan kondisi mantap jalan nasional hampir mencapai 100 persen, dan pembangunan bandara serta pelabuhan strategis sesuai dengan target RPJMN 2015-2019.
- Konektivitas juga didukung oleh capaian perkembangan TIK dalam upaya menurunkan kesenjangan digital, dengan terus meningkatnya pengguna internet menjadi 39,90 persen pada tahun 2018 dan jumlah pelanggan layanan seluler (*mobile broadband*) yang telah mencapai 127,31 persen jumlah penduduk pada tahun 2019..
- Namun seluruh capaian baik dalam pertumbuhan industri dan pembangunan infrastruktur masih perlu memperhatikan dampak pada lingkungan. Rasio emisi GRK masih belum mencapai target, namun upaya yang lebih kuat lagi akan dilakukan karena Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sampai dengan 29 persen pada tahun 2030.

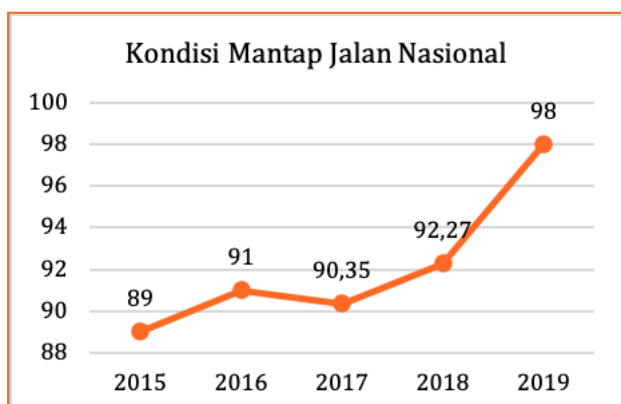
A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Percepatan pembangunan infrastruktur diperlukan untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di kawasan timur. Untuk itu, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasi dan komunikasi, sehingga tercipta konektivitas nasional yang bersinergi. Konektivitas ini dapat turut mendukung pertumbuhan industri sebagai salah satu penyumbang PDB terbesar, dan penyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Peningkatan infrastruktur dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah di Indonesia.

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kementerian PUPR	%	89	98	98	●
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	Kementerian Perhubungan	Km	132	1.000 (kumulatif)	1.461	●
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Kementerian Perhubungan	Unit	2	15 (kumulatif)	15	●
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Kementerian Perhubungan	Lokasi	24	24 (kumulatif)	24	●

Adapun infrastruktur transportasi, pencapaian bervariasi untuk transportasi darat, udara dan laut. Kondisi mantap jalan nasional mencapai target 98 persen pada tahun 2019 dari 89 persen di tahun 2015. Pencapaian tahunannya cukup signifikan karena adanya faktor penambahan jalan baru. Pembangunan jalan tol juga mencapai target, bahkan melebihi target yang direncanakan. Penambahan panjang jalan tol dari tahun 2015 adalah sepanjang 132 km



Gambar 01. Kondisi Mantap Jalan Nasional (2015-2019).



sehingga pada tahun 2019 panjang jalan toll menjadi 1.461 km.

Penambahan bandar udara upaya mendukung transportasi udara bisa dilihat melalui 15 unit kumulatif bandar udara di tahun 2019 yang semula hanya 2 unit di tahun 2015. Kinerja ini sesuai dengan target yang telah direncanakan pada RPJMN 2015-2019.

Dalam mendukung pemanfaatan tol laut, beberapa indikator terkait infrastruktur transportasi laut menjadi penting. Jumlah pelabuhan strategis sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 24 lokasi pada tahun 2019.

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas	Kementerian Perindustrian	%	13,5	13,9	14,9	

Industri pengolahan non-migas merupakan industri yang menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, dan diharapkan dapat terus menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Pada tahun 2015 sekitar 13,5 persen tenaga kerja bekerja di sektor industri pengolahan non-migas, dan terus meningkat menjadi 14,9 persen pada tahun 2019.

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 9.C Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>	Kementerian Komunikasi dan Informatika	%	93	100	127,31	

Peningkatan inovasi juga diarahkan untuk mendorong pemanfaatan kemajuan teknologi digital melalui penguatan ekosistem digital. Salah satu komponen ekosistem digital yang terus diperkuat adalah melalui perluasan layanan pita lebar (*broadband*), dengan target 100 persen penduduk dapat terlayani *mobile broadband*. Pada tahun 2015, jumlah pelanggan layanan seluler (*mobile broadband*) telah mencapai 93 persen jumlah penduduk. Pada tahun 2019, layanan *mobile broadband* telah melampaui target dan mencapai 127,31 persen jumlah penduduk.



B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, dan momentum ini perlu diperkuat dengan mengejar ketertinggalan dalam penyediaan infrastruktur konektivitas, untuk mendukung efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah. Infrastruktur yang memadai secara kuantitas dan kualitas, serta terintegrasi dengan baik diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, merata, inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan, termasuk infrastruktur dan pertumbuhan industri, tetap perlu memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Salah satu komitmen yang dijalankan Indonesia adalah untuk menurunkan emisi GRK sampai dengan 29 persen pada tahun 2030. Upaya ini tidak mudah dan membutuhkan partisipasi dan kontribusi seluruh sektor dalam penurunan emisi GRK.

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Kementerian Perhubungan	Km	5.532	8.692 (kumulatif)	6.213	▼
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Kementerian Perhubungan	Unit	226 (kumulatif)	275 (kumulatif)	256 (kumulatif)	▼

Beberapa tantangan pencapaian pembangunan yang membutuhkan perhatian ke depan antara lain terkait pembangunan perkeretaapian. Panjang jalur kereta api terus bertambah dari 5.532 km pada tahun 2015 menjadi 6.213 km pada tahun 2019, namun penambahan ini belum mencapai target yang direncanakan, yaitu 8.692 km. Untuk menunjang tol laut, jumlah dermaga penyeberangan juga perlu terus ditingkatkan sesuai target yang telah ditetapkan.

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan per kapita	BPS	%	18,20	18,9 – 19,1	17,58	▼

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas	BPS	%	5,05	5,7 – 6,2	4,34	▼

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 5 persen, juga belum disertai dengan perkembangan sektor industri pengolahan non-migas yang tumbuh masih di bawah pertumbuhan nasional. Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB turun dari 18,2 persen pada tahun 2015 menjadi 17,6 persen pada tahun 2019. Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas juga tidak dapat dipertahankan pada level 5,1 persen seperti pencapaian pada tahun 2015, dan menurun menjadi 4,3 persen pada tahun 2019.

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1.(a)	Persentase perubahan emisi CO2/emisi gas rumah kaca	Aksara Kementerian PPN/Bappenas	%	15,5	Mendekati 26 (kumulatif)	23,46 (kumulatif)	▼

Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pertumbuhan industri dan pembangunan infrastruktur juga masih perlu ditingkatkan dari sisi keberlanjutannya. Untuk hal ini, perlu dilakukan upaya yang lebih keras untuk memastikan bahwa emisi GRK yang dihasilkan, khususnya di sektor industri manufaktur, dapat terus diturunkan.

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelajaran publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Kementerian Riset dan Teknologi	%	0,20	0,25	0,23	▼



Inovasi terus didorong untuk mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan serta peningkatan produktivitas yang didukung infrastruktur yang integratif, proporsi anggaran riset (litbang) pemerintah terhadap PDB yaitu dari 0,20 persen pada tahun 2015 menjadi 0,25 persen pada tahun 2019.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

1. Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas dalam pemerataan pembangunan dan meningkatkan efisiensi ekonomi perlu terus ditingkatkan, yang diperkuat dengan integrasi dari seluruh infrastruktur yang sudah ada.
2. Nilai tambah pertumbuhan industri pengolahan non migas perlu ditingkatkan yang didukung produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, aglomerasi industri, peningkatan investasi dan perluasan akses pasar, peningkatan inovasi dan pengurangan ketergantungan impor.
3. Peningkatan peran industri kecil perlu terus diperkuat dalam satu kesatuan rantai pasok dengan industri menengah dan besar, yang didukung dengan kemudahan akses pembiayaan, teknologi tepat guna dan pasar.
4. Perlunya alokasi anggaran yang lebih besar untuk litbang (riset), dan tidak hanya bergantung pada pendanaan pemerintah, namun diperluas untuk mendorong kerja sama pendanaan dengan pihak non-pemerintah seperti sektor swasta.
5. Peningkatan kapasitas inovasi yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai

III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Industri Berkelanjutan.

PT. Re>Pal Internasional Indonesia yang berlokasi di Jawa Timur, telah menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam membuat palet yang dapat digunakan di rantai pasok berbagai bisnis untuk keperluan ekspor di wilayah Asia Tenggara dan Australia.

Re>Pal menggunakan proses teknologi ThermoFusion™ yang membuat palet dari 100 persen sampah plastik, dengan menggunakan lebih sedikit energi untuk pembuatannya dibandingkan jenis palet lainnya. Dalam proses produksi hingga transportasi dan pembuangan akhirnya, palet hampir tidak mengandung limbah, sehingga jejak karbonnya menjadi lebih rendah daripada palet kayu ataupun palet kayu lunak.

Hal ini menjadikan palet Re>Pal termasuk salah satu perusahaan dengan inovasi canggih untuk sektor industri, sekaligus efisiensi penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan dalam proses industri. Palet ini juga telah digunakan oleh perusahaan ternama seperti Unilever, IndoFood, Nestle dan IFF, yang merupakan perusahaan yang tertarik dalam *offsetting* jejak karbonnya tanpa mengurangi kualitas produk dan profit.



IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Untuk menyelesaikan tantangan tantangan yang dihadapi dalam RPJMN 2020-2024 serangkaian kebijakan akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat:

- a. Meningkatkan kualitas jalan dan peningkatan ketersediaan jaringan jalan;
- b. Membangun konektivitas kereta api pada wilayah prioritas, pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian prasarana serta fasilitas perkeretaapian, dan penyediaan layanan perkeretaapian dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat;
- c. Membangun konektivitas transportasi laut untuk mendukung kinerja logistik nasional;
- d. Membangun transportasi udara difokuskan pada peningkatan bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas daerah 3T; serta
- e. Membangun transportasi darat diprioritaskan untuk mengurangi praktik pembebanan berlebih di jalan.

2. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi:

- a. Meningkatkan industrialisasi, antara lain melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan penguatan *circular economy* sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah;
- b. Mengakselerasi industrialisasi, antara lain melalui fokus pada industri pengolahan yang memiliki kontribusi nilai tambah dan daya saing tinggi, dan didukung investasi dan penerapan teknologi, termasuk *industry 4.0*, serta perluasan ekspor;
- c. Meningkatkan sinergi rantai pasok/nilai yang diperkuat dengan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan dengan UMKM dan koperasi; serta
- d. Meningkatkan peran ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

3. Memperkuat pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi:

- a. Meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan, dengan fokus pada penerapan Standar Industri Hijau/SNI/ISO 14001 oleh industri pengolahan untuk pengelolaan risiko lingkungan.

4. Menuntaskan dan memanfaatkan infrastruktur TIK:

- a. Mengoptimalkan dana *Universal Service Obligation* (USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet;
- b. Menyediakan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat;
- c. Menata alokasi spektrum frekuensi untuk mendorong kegiatan ekonomi, penyediaan layanan dasar dan jaringan intra pemerintah yang aman;
- d. Mengembangkan jaringan intra pemerintah didorong melalui pemanfaatan industri dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing nasional; serta



- e. Memperluas pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan menciptakan permintaan, melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi dengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor ekonomi).

5. Melaksanakan pembangunan rendah karbon:

- a. Mengembangkan industri hijau yang dilaksanakan melalui konservasi dan audit penggunaan energi pada industri, penerapan modifikasi proses dan teknologi, serta manajemen limbah industri.

6. Meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi:

- a. Memanfaatkan Iptek dan inovasi di bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Mengembangkan *research power-house* yang mencakup peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM Iptek, mengembangkan dan menguatkan infrastruktur litbang strategis, menguatkan Pusat Unggulan Iptek, mengelola data kekayaan hayati dan kekayaan intelektual, serta mengembangkan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri;
- c. Menciptakan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerja sama *triple-helix*, perbaikan tata kelola paten/KI, penguatan *Science Techno Park* utama, perintisan fungsi *Technology Commercialization Office* dalam kerangka Manajemen Inovasi di perguruan tinggi, perintisan *Technology Transfer Office* di STP atau LPNK Iptek, dan pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PBBT); serta
- d. Meningkatkan kualitas belanja litbang.



V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kementerian PUPR	%	89	98	98	●
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	Kementerian Perhubungan	Km	132	1.000 (kumulatif)	1.461	●
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	Kementerian Perhubungan	Km	5.532	8.692 (kumulatif)	6.213	▼
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Kementerian Perhubungan	Unit	2	15 (kumulatif)	15	●
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Kementerian Perhubungan	Unit	226 (kumulatif)	275 (kumulatif)	256 (kumulatif)	▼
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Kementerian Perhubungan	Lokasi	24	24 (kumulatif)	24	●
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan per kapita	BPS	%	18,2	18,9 – 19,1	17,6	▼
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas	BPS	%	5,1	5,7 – 6,2	4,3	▼
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas	Kementerian Perindustrian	%	13,5	13,9	14,9	●



TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	BPS	%	11,8	-	18,5	NA
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	BPS	Rp (Juta)	567.000	-	- ^{a)}	NA
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1*	Rasio emisi CO ₂ /emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	17,3	12,2	- ^{b)}	NA
9.4.1.(a)	Persentase perubahan emisi CO ₂ /emisi gas rumah kaca	Aksara Kementerian PPN/Bappenas	%	15,5	Mendekati 26 (kumulatif)	23,46 akumulatif	▼
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelajaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Kementerian Riset dan Teknologi	%	0,20	0,25	0,23	▼
Target 9.C Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>	Kementerian Komunikasi dan Informatika	%	93	100	127,31	●
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	BPS	%	56,92	-	63,53	NA
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS	%	21,98	-	39,90 (2018)	NA

Keterangan:

a Data tidak dikumpulkan untuk tahun 2018-2019

b Data masih dalam proses perhitungan



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018*. Badan Pusat Statistik.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals 2017-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Perencanaan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2017). *Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045*. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.



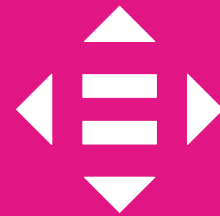


We support the Sustainable Development Goals



We support the Sustainable Development Goals

10 BERKURANGNYA KESENJANGAN



Mengurangi Kesenjangan Intra- dan AntarNegara

TARGET 10-1



TARGET 10-2



TARGET 10-3



TARGET 10-4



TARGET 10-5



TARGET 10-6



TARGET 10-7



TARGET 10-A



TARGET 10-B



TARGET 10-C



I. PENDAHULUAN

Penurunan kesenjangan menjadi salah satu fokus pembangunan pada RPJMN 2015-2019, untuk memastikan pembangunan dapat dinikmati oleh semua, khususnya kelompok rentan. Pemerataan pembangunan perlu terus diupayakan agar terjadi inklusi sosial, ekonomi dan politik, serta kesempatan yang sama untuk semua.

Untuk memastikan pembangunan yang inklusif, perlu dipastikan pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan:

TARGET	DESKRIPSI
Target 10.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. rasio gini; 2. angka kemiskinan; 3. jumlah daerah tertinggal; 4. jumlah desa mandiri; 5. jumlah desa tertinggal; 6. rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal; 7. persentase penduduk miskin di daerah tertinggal;



TARGET	DESKRIPSI
Target 10.2	8. proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.
Target 10.3	9. indeks kebebasan sipil; 10. jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM; 11. jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan, terutama kekerasan terhadap perempuan; 12. jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional.
Target 10.4	13. persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat; 14. proporsi peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan;
Target 10.7	15. jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antar negara RI dengan negara tujuan penempatan, dan; 16. jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.

Pembangunan yang inklusif telah diupayakan dengan menurunkan kesenjangan antarkelompok pendapatan, melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, serta menurunkan kesenjangan antarwilayah, melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

II. STATUS CAPAIAN

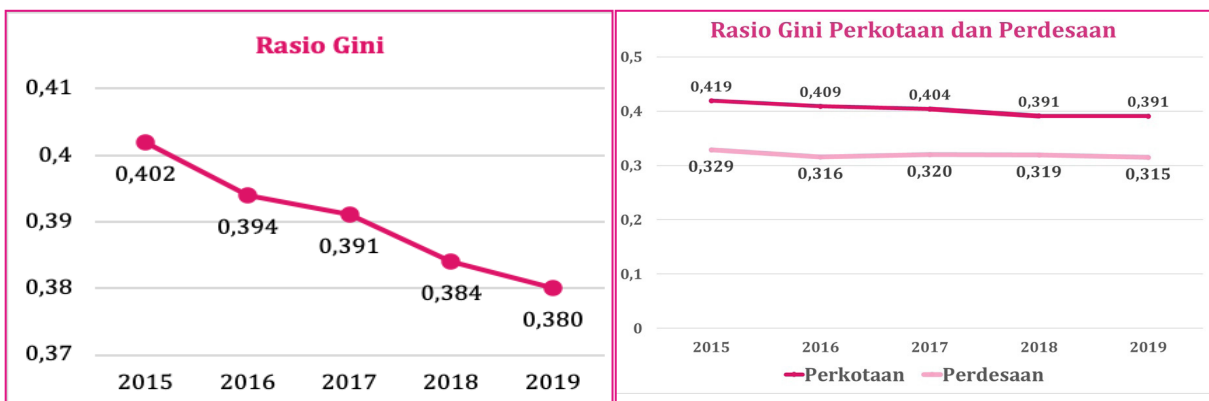
- Kesenjangan terus menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio Gini dari 0,402 pada tahun 2015 menjadi 0,380 pada tahun 2019. Hal ini juga terjadi pada angka kemiskinan, yang terus menurun dari 11,13 pada tahun 2015 menjadi 9,22 pada tahun 2019.
- Percepatan pembangunan desa menunjukkan hasil baik, dengan bertambahnya lebih dari 2.000 desa yang masuk kategori Desa Mandiri, serta lebih dari 5.000 Desa Tertinggal yang terentaskan.
- Namun, pembangunan di daerah tertinggal masih memerlukan upaya yang lebih besar lagi, masih ada 62 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal juga belum mencapai target yaitu dari 6,53 persen pada tahun 2015 menjadi 5,01 persen pada tahun 2018. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menurun dari 18,80 pada tahun 2015 menjadi 17,06 pada tahun 2019, namun laju penurunan ini masih relatif lambat.
- Pengurangan kesenjangan terus diupayakan dengan meningkatkan persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat dan peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Anggaran belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat terus meningkat dari 1,7 persen (proporsi terhadap Belanja Pemerintah Pusat) di tahun 2015 menjadi 12,3 pada tahun 2019, dan anggaran tersebut perlu terus ditingkatkan. Peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan meningkat dari 6 persen pada tahun 2015 menjadi 41,43 persen pada tahun 2019 untuk pekerja formal dan meningkat dari 1 persen pada tahun 2015 menjadi 3,57 persen pada tahun 2019 untuk pekerja informal, namun angka pencapaian ini masih elum mencapai target.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

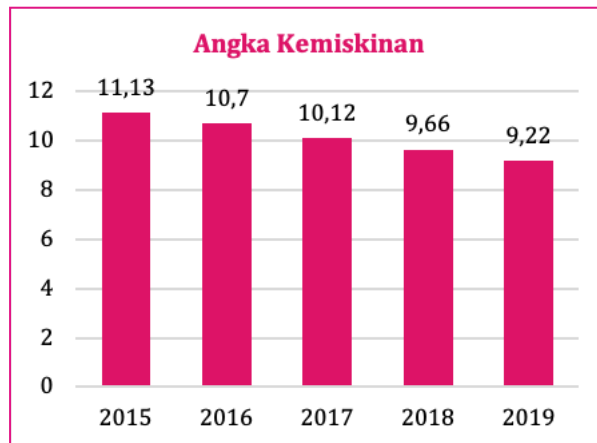
Penurunan kesenjangan menjadi salah satu fokus pembangunan, sesuai dengan Nawacita 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Upaya penurunan kesenjangan antarwilayah juga perlu dilakukan bersama dengan upaya penurunan kesenjangan antarkelompok pendapatan. Hal ini juga perlu memperhatikan kesetaraan hak dan perlindungan seluruh penduduk, khususnya kaum rentan.

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Rasio Gini	BPS	Indeks	0.402	0.389 – 0.390	0.380	●
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	11.13	8.5 – 9.5	9.22	●
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Bappenas dan BPS	Desa	19.750	5.000 Desa Terentaskan	13.232 (2018)	●
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Bappenas dan BPS	Desa	2.894	2.000 Penambahan Desa Mandiri	5.559 (2018)	●

Dalam pencapaian dan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi, terlihat bahwa rasio Gini telah menurun dari 0,402 pada tahun 2015 menjadi 0,380 di tahun 2019, yang disertai penurunan angka kemiskinan dari 11,13% pada tahun 2015 menjadi 9,22% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antarkelompok pendapatan dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sudah semakin menurun. Kesenjangan antarkelompok pendapatan juga memiliki tren menurun di daerah perkotaan dan perdesaan, dengan nilai rasio gini di perkotaan yang lebih tinggi daripada di perdesaan.

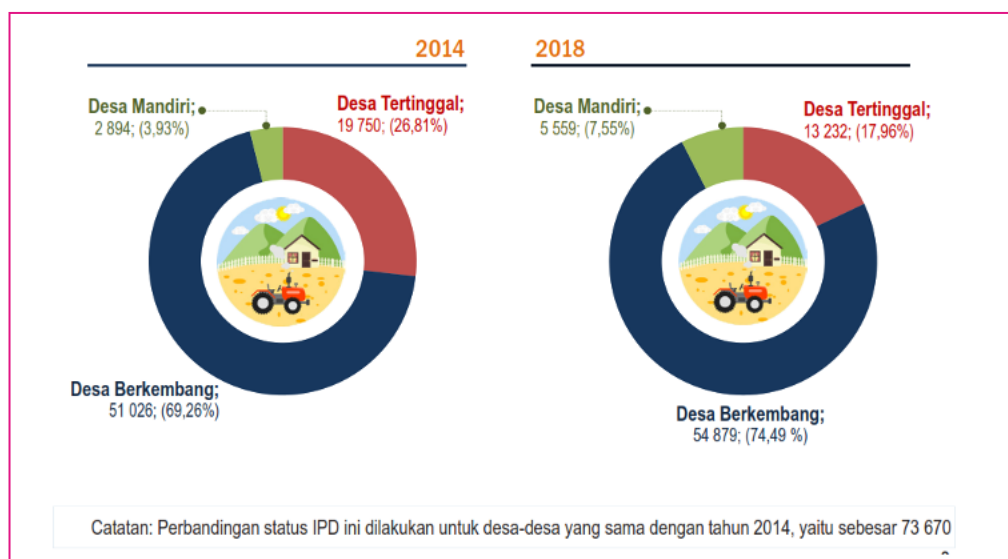


Gambar 01. Rasio Gini



Gambar 02. Angka Kemiskinan

Hal ini terus didukung dengan kebijakan Dana Desa yang terlihat dari pencapaian percepatan pembangunan desa, yaitu sebanyak 2.665 desa sudah menjadi Desa Mandiri, melampaui target 2.000 Desa Mandiri. Sebanyak 6.518 Desa Tertinggal sudah terentaskan, juga melampaui target 5.000 Desa Tertinggal terentaskan.



Gambar 03. Perbandingan status IPD

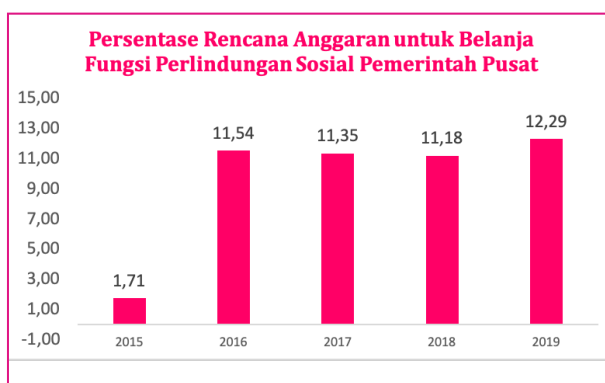
TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.</p>							
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Komnas Perempuan	%	90,78	90	89,99 (2019)	▶

Dalam menjamin kesempatan yang sama dan menurangi kesenjangan hasil dalam hukum merupakan salah satu bentuk penurunan kesenjangan. Penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan juga mengalami kemajuan dengan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yakni 89,99% pada tahun 2019. Penanganan pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rujukan ke lembaga layanan dan penerbitan surat dukungan.

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Kementerian Keuangan : nota keuangan sesuai tahun berjalan	%	1,7 (2015)	NA	12,3 (2019)	▶

Kebijakan fiskal khususnya dalam perlindungan sosial terus disempurnakan. Hal tersebut ditunjang dengan rencana anggaran belanja pemerintah pusat untuk fungsi perlindungan sosial (proporsi terhadap Belanja Pemerintah Pusat) yang terus meningkat, dari 1,7 persen pada tahun 2015 menjadi 12,3 persen pada tahun 2019. Hal ini diharapkan dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak penduduk yang dapat terlindungi.



Gambar 04. Perentase rencana anggaran belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	Penambahan dokumen	98	15	15	●



TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Kementerian Ketenagakerjaan	Lokasi	100	150	150	●

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan tenaga kerja luar negeri (TKLN) berkontribusi dalam menyumbang devisa dalam bentuk remitansi sampai dengan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Indonesia, tahun 2019 nilai remitansi PMI mencapai USD11.435 juta atau lebih dari Rp160 triliun. Oleh karena itu, kebijakan migrasi perlu terus memastikan perlindungan hak serta pelayanan penempatan mereka, baik di dalam negeri sebelum keberangkatan dan setelah kembali ke tanah air maupun saat bekerja di luar negeri. Dalam menjamin perlindungan hak pekerja migran, target penambahan dokumen kerja sama tahun 2019 telah tercapai, yaitu sebanyak 15 penambahan dokumen kerja sama.

B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

Penurunan kesenjangan merupakan dampak atau resultan dari berbagai intervensi yang dilakukan pada berbagai dimensi dan bersifat multi sektor. Seperti yang terlihat di atas, capaian pengukuran kesenjangan antarkelompok pendapatan sudah baik, namun masih perlu dilihat kembali apakah inklusi sosial, ekonomi dan politik sudah terwujud sepenuhnya. Dimensi kesenjangan antarwilayah juga perlu dianalisis lebih mendalam, khususnya pada daerah tertinggal.

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

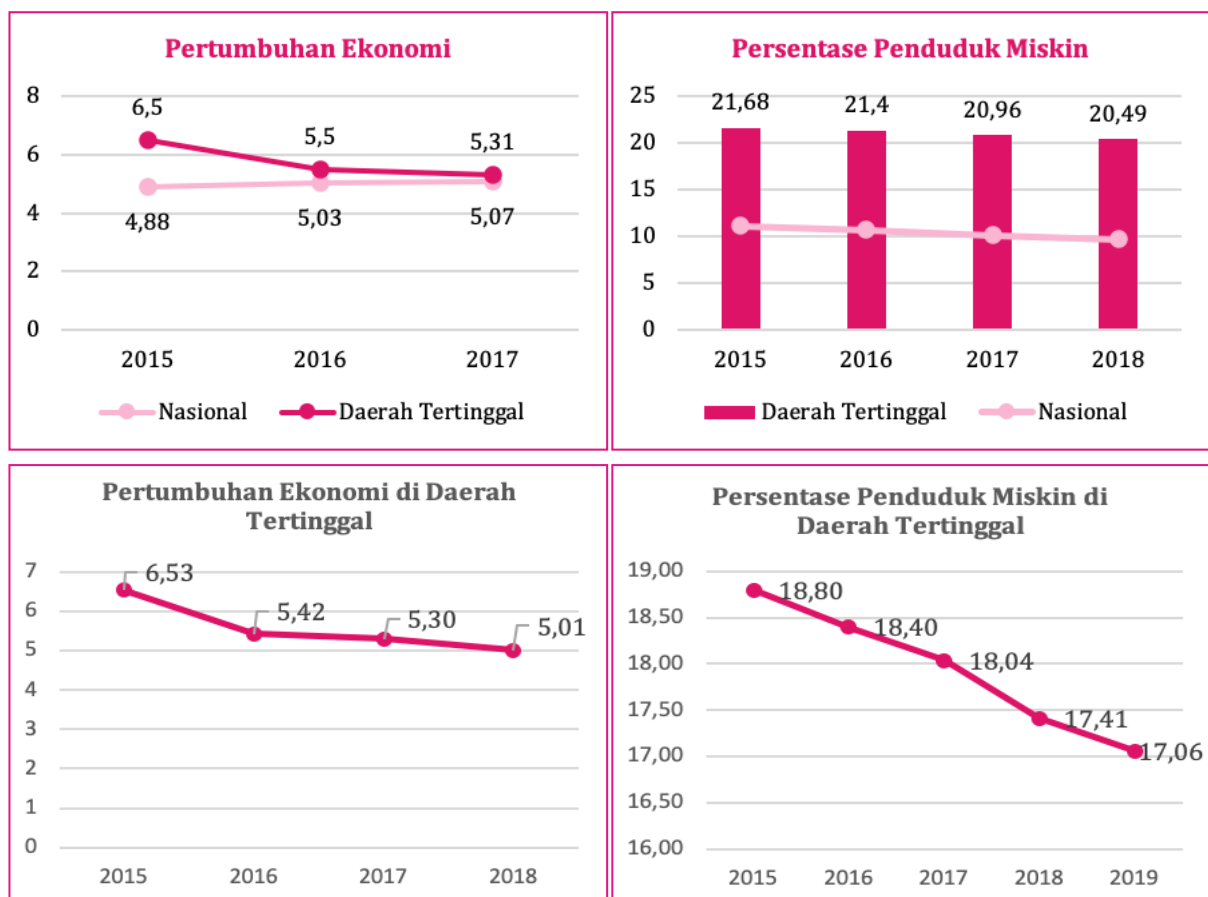
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal	Bappe-nas dan BPS	Kabu-paten	122	42	60 DT (62 DT terentaskan) + 2 DT baru (2019)	▼
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Bappe-nas dan BPS	%	6.53	6.9 – 7.1	5.01 (2018)	▼
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Bappe-nas dan BPS	%	18,80	15 – 15.5	17.06 (2019)	▼

Kebijakan untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, yang menetapkan sebanyak 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal. Pada akhir RPJMN 2015-2019, jumlah daerah tertinggal

ditargetkan berkurang dari 122 menjadi 42 kabupaten (terentaskan 80 kabupaten). Namun sampai dengan tahun 2019, terdapat 60 kabupaten yang terentaskan dan penambahan 2 kabupaten baru sehingga jumlah daerah tertinggal pada tahun 2019 sebanyak 62 kabupaten.

Lebih lanjut, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal ditargetkan di atas pertumbuhan ekonomi nasional untuk percepatan pembangunan, namun target ini belum tercapai, bahkan mengalami penurunan. Pada tahun 2015, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,53 persen, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 5,01 persen.

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal terus menurun, serupa dengan pola angka kemiskinan nasional, dari 18,80 persen di tahun 2015 menjadi 17,06 persen di tahun 2019. Walaupun terjadi penurunan, angka ini masih cukup jauh dari target 15 persen sampai dengan 15,5 persen di tahun 2019.

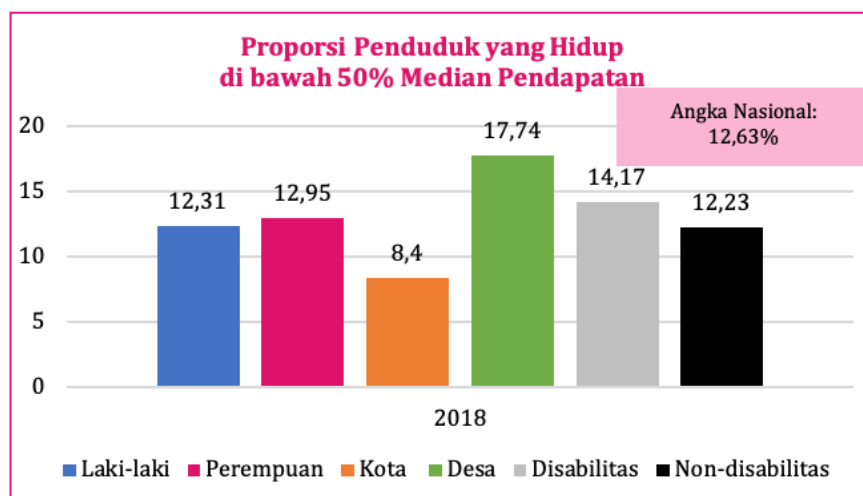


Gambar 05. Pertumbuhan ekonomi dan Persentase penduduk miskin.

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.							
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	BPS Susenas	%	10,17	NA	12,63 (2018)	▼

Indikator proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas, biasa dipakai di negara maju sebagai ukuran kemiskinan relatif. Ini merupakan indikator yang masih dikembangkan namun sudah dapat dihitung dari data BPS yang menggunakan pendekatan pengeluaran. Berdasarkan data yang ada, proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan naik dari 10,17 pada tahun 2015 menjadi 12,63 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 masih ada peningkatan penduduk yang termasuk dalam kelompok rentan miskin atau relatif miskin. Disagregasi dari indikator ini menjadi sangat penting agar intervensi yang dilakukan untuk pencapaian indikator ini menjadi lebih tepat sasaran.



Gambar 06. Proporsi Penduduk yang hidup di bawah 50% Median Pendapatan

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.3.1.(a)	Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Kementerian Polhukam dan BPS	Indeks	80,3	87	77,20 (2019)	▼

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM, Ditjen HAM (Kemenkumham)	Komnas HAM, Kemenkumham	Berkas Pengaduan	Komnas Ham: 4.295 Kemenkumham: 658	Komnas HAM: 7.000 Kemenkumham: 220	Komnas HAM: 3350 (2019) Kemenkumham: 574	▼
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut HAM Internasional	Komnas Perempuan	Kebijakan/Dokumen	421 (2010-2016)	Menurun	438 (2019)	▼

Kesenjangan juga dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan hukum dan tidak memiliki kesempatan yang sama. Salah satu upaya dalam menjamin kesetaraan hukum adalah dengan adanya kebebasan sipil dalam kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi, yang diukur oleh Indeks Kebebasan Sipil. Capaian indeks ini menurun dari 80,3 pada tahun 2015 menjadi 78,46 pada tahun 2018.

Kesetaraan hukum juga perlu dicapai dengan pelayanan hukum yang sama untuk semua. Dalam pelayanan penanganan pelanggaran HAM, Komnas HAM menindaklanjuti sebanyak 3.084 berkas pengaduan, yang sebagian terdiri atas kasus lanjutan. Di antara jumlah tersebut, terdapat kasus pelanggaran HAM pada masyarakat marginal dan rentan. Dalam proses penanganan kasus tersebut, Komnas HAM mengidentifikasi beberapa hambatan antara lain pengaduan yang tidak memberikan informasi perkembangan kasus yang diadukan, minimnya respon atau tindak lanjut atas rekomendasi Komnas HAM, serta kurangnya keterbukaan informasi dan data terkait pemeriksaan kasus oleh pihak-pihak terkait.

Memastikan kesempatan yang sama dan kesetaraan hukum juga merupakan salah satu bentuk penurunan kesenjangan, khususnya diskriminasi terhadap kaum rentan. Salah satu upaya dalam kesetaraan hukum adalah dengan memastikan kebijakan yang tidak memihak dan diskriminatif.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, sampai dengan tahun 2017, terdapat 421 kebijakan diskriminatif yang terdiri dari peraturan daerah, surat edaran, dan keputusan kepala daerah dari tingkat kelurahan sampai desa. Kemudian, pada tahun 2019 terdapat penambahan jumlah kebijakan diskriminatif menjadi 438 kebijakan dibandingkan dari tahun 2018 sebanyak 434 kebijakan. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penanganan dan pencegahan kebijakan diskriminatif melalui forum koordinasi antar Kementerian/Lembaga. Koordinasi tersebut mencakup pembahasan rekomendasi Komnas Perempuan terhadap kebijakan yang masih diskriminatif untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kemendagri dan Kemenkumham melalui klarifikasi dan pembinaan produk hukum daerah



TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan, Sakernas BPS	Formal %	6	100	41,43	▼
		BPJS Ketenagakerjaan, Sakernas BPS	Informal %	1	10	3,57	▼

Perlindungan sosial merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan kesenjangan dapat berkurang. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diamanatkan perlu adanya sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk memberikan jaminan pada pekerja sehingga mereka terlindungi. Dalam skema jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, proporsi peserta yang terjamin terus meningkat, untuk pekerja formal dari 6 persen di tahun 2015 menjadi 41,43 persen di tahun 2019, dan untuk pekerja informal dari 1 persen di tahun 2015 menjadi 3,57 persen di tahun 2019.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan dalam pemerataan pembangunan untuk penurunan kesenjangan:

1. Rasio Gini terus menurun baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, namun kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan masih jauh. Selain itu, laju penurunan rasio Gini juga masih lambat.
2. Walaupun indikator untuk percepatan pembangunan pada kawasan perdesaan sudah baik, beberapa indikator daerah tertinggal masih belum mencapai target.
3. Masih banyak data indikator yang perlu diperbaharui, serta disagregasinya.
4. Perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama kepesertaan pekerja informal melambat. Selain itu, masih terdapat peserta tidak aktif (berhenti membayar iuran) terutama pekerja informal dan belum seluruh pemberi kerja patuh mendaftarkan dan membayar iuran pekerjanya.
5. Masih kurangnya pemahaman perspektif gender dan prinsip non-diskriminasi oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan.

III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Sinergi (Strengthening Coordination For Inclusive Workforce Development In Indonesia).

Didukung oleh USAID, Rajawali Foundation, Transformasi (*Center for Public Policy Transformation*) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi proyek SINERGI dengan melibatkan pemangku kepentingan kunci (pemerintah dan pihak swasta,



serta kaum pemuda) untuk mengintegrasikan perempuan dan kaum muda yang memiliki disabilitas ke dalam pasar kerja di Jawa Tengah menggunakan kebijakan berbasis bukti. Provinsi Jawa Tengah terpilih sebagai lokasi pelaksanaan proyek ini karena (1) beberapa kabupatennya masih berada di bawah persentase penduduk miskin nasional, (2) UMR di provinsi Jawa Tengah merupakan kedua terendah di tingkat nasional, dan (3) hanya setengah dari seluruh penduduk perempuan bekerja. Proyek ini bertujuan untuk menurunkan kesenjangan dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan memberikan perhatian khusus pada kaum miskin dan rentan.

SINERGI telah memberikan akses terhadap informasi kepada lebih dari 5.000 pemuda, mengintervensi 445 pemuda miskin dan rentan, membangun 21 institusi/asosiasi yang memberikan akses terhadap pelatihan kepada pemuda miskin dan rentan dan dipimpin oleh pemuda, mengundang 18 perusahaan setempat untuk menyediakan program magang, mengundang 15 pelatih untuk menyediakan pelatihan tentang *soft skill* dan teknis, serta menguatkan komitmen dari 106 pemerintah daerah lainnya untuk mendukung implementasi proyek sampai akhir pelaksanaan proyek. Pengumpulan dan pemutakhiran data masih menjadi tantangan yang akan memerlukan upaya yang lebih keras lagi. Tantangan lainnya yaitu pembiayaan berkelanjutan masih dalam tahap pengembangan.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Pemerintah terus mengupayakan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan bersifat inklusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi inklusif berpusat pada perluasan skala dan akses ekonomi sehingga mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan melalui kesempatan kerja yang berkualitas sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan ke depan untuk mengurangi kesenjangan antara lain:

1. Mengentaskan kemiskinan:

- a. Mengakselerasi penguatan ekonomi keluarga, antara lain melalui pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan, fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan, dan pemberian stimulan usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga; serta
- b. Melakukan reformasi agraria, antara lain melalui pelaksanaan redistribusi tanah dan pemberian sertifikat tanah.

2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan:

- a. Mempercepat cakupan administrasi kependudukan;
- b. Mengintegrasikan sistem administrasi kependudukan; serta
- c. Memadukan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

3. Menguatkan pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi:

- a. Meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan, dengan fokus pada penerapan Standar Industri Hijau/SNI/ISO 14001 oleh industri pengolahan untuk pengelolaan risiko lingkungan.



4. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial:

- a. Memperkuat pelaksanaan jaminan sosial, antara lain melalui pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN, peningkatan efektivitas JKN dan penguatan kelembagaan SJSN;
- b. Memperkuat pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran, antara lain melalui integrasi penyaluran bantuan sosial pangan dan subsidi energi tepat sasaran untuk meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan sebagai upaya meredam penambahan penduduk miskin akibat dampak COVID-19, integrasi penyaluran bantuan tunai bersyarat untuk kesehatan dan pendidikan, peningkatan sinergi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data dasar kependudukan serta basis data program bantuan sosial lainnya, perluasan dan penguatan penyaluran bantuan sosial secara non-tunai, pengembangan variasi bantuan pangan, penguatan fungsi pendampingan, dan peningkatan peran Pemda dalam pendampingan dan penyaluran bantuan;
- c. Menyediakan perlindungan sosial adaptif, antara lain melalui pengembangan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan risiko ekonomi dan sosial terhadap perubahan iklim dan bencana alam, penguatan sistem kelembagaan perlindungan sosial yang responsif terhadap risiko sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana alam, dan mengembangkan sistem pembiayaan perlindungan sosial untuk mengatasi risiko perubahan iklim dan bencana alam;
- d. Meningkatkan kesejahteraan sosial, antara lain melalui pengembangan sistem perawatan jangka panjang (*long term care*) terintegrasi dan holistik, penguatan implementasi standar pelayanan minimal bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, dan pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, implementasi Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019, tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan, pemberdayaan kelanjutusiaan bagi lanjut usia, pengembangan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi lanjut usia, dan penguatan pelayanan sosial bagi kelompok rentan; serta
- e. Memperkuat pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu, antara lain melalui penataan manajemen pengelolaan sumber daya manusia kesejahteraan sosial, perluasan sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial, peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat, peningkatan pengetahuan, pemahaman mengenai pendidikan anak, kesehatan dan gizi serta pengelolaan keuangan bagi keluarga, dan penguatan mekanisme pengaduan, pendataan, rujukan dan layanan terpadu.

5. Melakukan pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan:

- a. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, antara lain melalui pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, percepatan pembangunan desa, dan penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, kawasan transmigrasi dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional perbatasan negara;
- b. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, antara lain melalui optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas ssebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, antara lain melalui pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru, dan penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis; serta
- d. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, antara lain dengan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

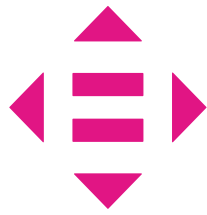
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Rasio Gini	BPS	Indeks	0.402	0.389 – 0.390	0.380	●
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	11.13	8.5 – 9.5	9.22	●
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal	Bappe-nas dan BPS	Kabu-paten	122	42	60 DT (62 DT terentaskan) + 2 DT baru (2019)	▼
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Bappe-nas dan BPS	Desa	19.750	5.000 Desa Terentaskan	13.232 (2018)	●
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Bappe-nas dan BPS	Desa	2.894	2.000 Penambahan Desa Mandiri	5.559 (2018)	●

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Bappe-nas dan BPS	%	6.53	6.9 – 7.1	5.01 (2018)	▼
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Bappe-nas dan BPS	%	18.80	15 – 15.5	17.06 (2019)	▼
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.							
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	BPS Susenas	%	10.17	NA	12.63 (2018)	▼
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.3.1.(a)	Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Kemen-terian Polhu-kam dan BPS	Indeks	80.3	87	77,20 (2019)	▼
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM	Komnas HAM, Kemen-kum-ham	Berkas Pengaduan	Komnas Ham: 4.295 Kemen-kumham: 658	7.000	Komnas HAM: 3.084 (2019)	▼
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Komnas Perempuan	%	NA	90	89,99 (2019)	▶
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut HAM Internasional	Komnas Perempuan	Kebi-jakan/ Doku-men	421 (2010-2016)	Menurun	94 (2019)	▼
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Kemen-terian Keuan-gan: nota keuan-gan sesuai tahun berjalan	%	1,7 (2015)	NA	12,3 (2019)	▶

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESEJANGAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan, Sakernas BPS	Formal %	6	100	41,43	▼
		BPJS Ketenagakerjaan, Sakernas BPS	Informal %	1	10	3,57	▼
<p>Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.</p>							
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	Penambahan dokumen	98	15	15	●
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan oenempatan TKLN berdasarkan okupasi	Kementerian Ketenagakerjaan	Lokasi	100	150	150	●



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2018). *Indeks Pembangunan Desa 2018*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia 2019*. Badan Pusat Statistik.

Kementerian Keuangan. (2018). *Informasi APBN 2018: Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan*. Kementerian Keuangan.

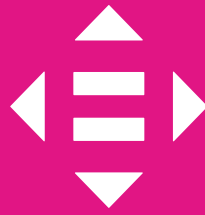
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals 2017-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.





We support the Sustainable Development Goals



We support the Sustainable Development Goals

11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN



Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif,
Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

TARGET 11-1



TARGET 11-2



TARGET 11-3



TARGET 11-4



TARGET 11-5



TARGET 11-6



TARGET 11-7



TARGET 11-A



TARGET 11-B



TARGET 11-C



I. PENDAHULUAN

Pembahasan Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan dalam laporan ini difokuskan pada akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau; sistem transportasi; kebencanaan; dan sampah perkotaan; yang diukur melalui indikator: (1) Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau; dan (2) Persentase sampah perkotaan yang tertangani; (3) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Laporan ini juga memuat tantangan dan kebijakan tahun 2020-2024 sektor yang terkait dengan Tujuan 11.

II. STATUS CAPAIAN

- Presentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau baru mencapai 56,51 persen pada tahun 2019 yang dihitung berdasarkan empat aspek minimal kelayakan hunian, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan serta akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak. Sementara itu, aspek yang berkontribusi tertinggi terhadap rumah tangga yang menempati

rumah tidak layak huni adalah tidak adanya akses sanitasi layak sebesar 11,64 persen.

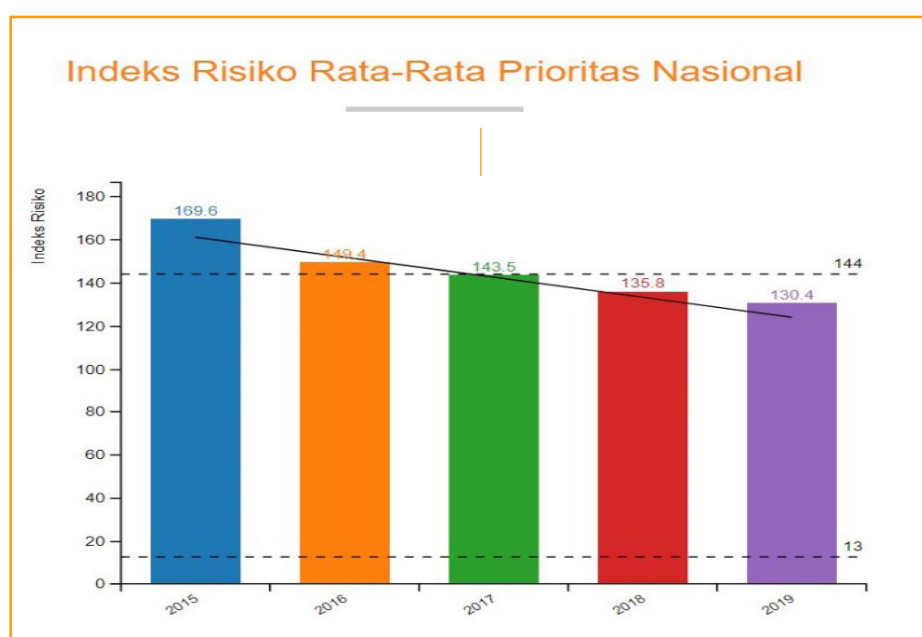
- Sampah perkotaan yang tertangani sebesar 67,40 persen (KLHK, 2019). Sisa dari sampah tersebut tidak tertangani dan dibuang langsung ke lingkungan sehingga sangat berpotensi menimbulkan pencemaran.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

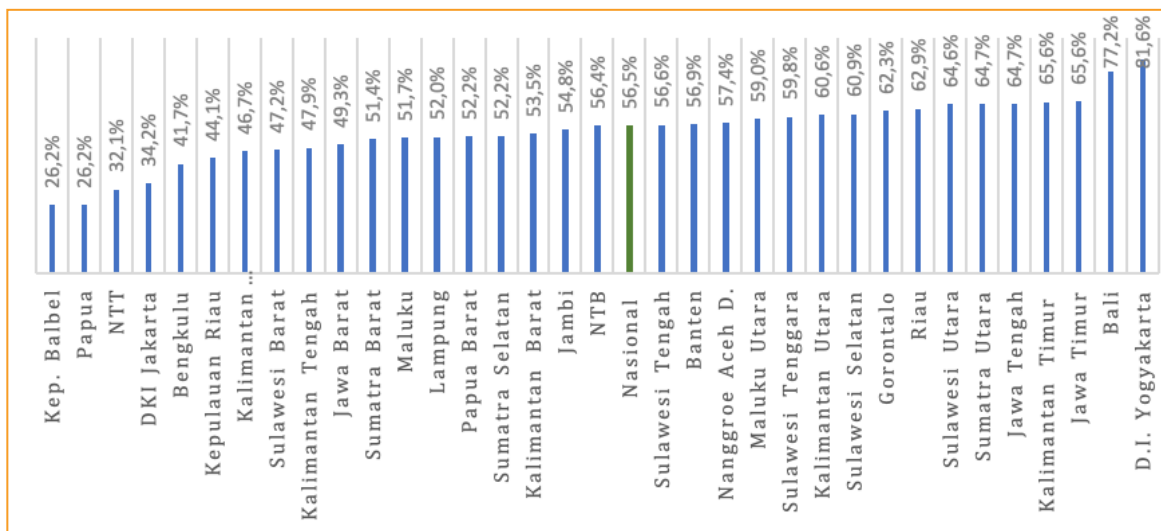
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	indeks	169,6	130,4	130,4 (2019)	●

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) terus mengalami penurunan dari 169,6 di tahun 2015, menjadi 130,4 di tahun 2019 (Gambar 1). Upaya pencapaian sasaran RPJMN bidang penanggulangan bencana tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan prioritas diantaranya penguatan kapasitas penanggulangan bencana, peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan, penanganan darurat dan pemulihan pascabencana, serta penguatan manajemen kebencanaan. Dari sisi geografis, risiko bencana tersebar merata dari wilayah Indonesia Barat hingga Timur seperti tercermin dalam Gambar 2.



Gambar 01. Indeks Risiko Rata-rata Prioritas Nasional.
Sumber : <http://inarisk.bnppb.go.id/irbi>

bangunan, ketahanan bangunan (bahan atap, lantai dan dinding sebagai proksi), akses air minum layak dan akses sanitasi layak sudah cukup tinggi yaitu lebih dari 77 persen. Namun terdapat 29,41 persen rumah tangga yang menghuni rumah tidak layak karena tidak memenuhi salah satu aspek kelayakan, dimana 11,64 persen disebabkan oleh sanitasi yang tidak layak. Aspek keterjangkauan belum dapat dihitung karena belum tersedianya data.



Gambar 04.

Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni (RLH) 2019 Berdasarkan Provinsi.

Sumber : Hasil analisis data Susenas BPS 2015-2019 oleh Kementerian PPN/Bappenas

Disparitas akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau terjadi antar provinsi. Provinsi dengan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta yaitu mencapai 81,61 persen pada tahun 2019. Sementara itu, provinsi dengan akses terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 26,16 persen pada tahun 2019.

Penanganan Sampah.

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	62,96 (2015)	80 (2019)	67,40 (2019)	▼

Berdasarkan data Adipura (KLHK, 2019), tingkat keberhasilan penanganan sampah nasional baru mencapai 67,4 persen. Selain data penanganan sampah, akses rumah tangga di perkotaan dalam memperoleh layanan pengelolaan persampahan baru mencapai 59,08 persen penanganan dan 1,55 pengurangan (Susenas MKP 2016, diolah Bappenas).



C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI.

Tantangan yang masih dihadapi terkait pencapaian Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, yaitu:

- a. Perumahan yang layak dan terjangkau: (1) terbatasnya akses terhadap pembiayaan perumahan terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta berpenghasilan tidak tetap; (2) tumbuhnya wilayah perkotaan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*); (3) belum optimalnya pembinaan dan pengawasan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- b. Pengelolaan Sampah Perkotaan: (1) masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah, seperti contohnya: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R); (2) kurangnya armada pengangkutan sampah dan adanya tantangan geografis dan aksesibilitas yang menghambat proses pengangkutan sampah; (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang telah terbangun, sebagian besar masih dioperasikan dengan sistem *open dumping*, sedangkan desain dari sistem TPA yang disiapkan adalah sistem *sanitary landfill*; dan (4) komitmen pemerintah daerah masih harus terus ditingkatkan dalam pengelolaan sampah di daerah, salah satu bentuk komitmen yang harus diperhatikan adalah pembiayaan infrastruktur persampahan untuk operasional dan pemeliharaan (O&M).
- c. Kesesuaian dan ketersediaan data indikator Tujuan 11: (1) sebagian besar data indikator tujuan 11 hanya tersedia di tingkat nasional dan kurang bisa menggambarkan pelaksanaan SDGs pada level kabupaten/kota; (2) reformulasi indikator tujuan 11 dengan indikator global.

III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Upaya Pemda Kabupaten Kendal dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR.

Kabupaten Kendal, dengan jumlah penduduk 288.027 KK pada tahun 2018 menghadapi persoalan dalam penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan pertumbuhan penduduk di kabupaten tersebut, kebutuhan rumah mencapai 1.000 sampai 1.200 unit per tahun.

Salah satu upaya dalam meningkatkan akses terhadap rumah layak huni bagi MBR dilakukan melalui pemanfaatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Salah satu skema BSPS bagi pembangunan rumah baru mensyaratkan penerima bantuan memiliki sertifikat kepemilikan tanah, yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah daerah bekerjasama dengan Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Bank Tabungan Negara (BTN) membangun kolaborasi dalam penyediaan tanah dan peningkatan kapasitas MBR. Kolaborasi tersebut dinamakan Kolaborasi ABCG (*Academic, Business, Community, Government*).

UNDIP yang bertindak sebagai integrator melihat persoalan akses bagi masyarakat kalangan bawah. Hal ini dipengaruhi oleh penyediaan perumahan yang didominasi oleh *developer* dengan masih mementingkan keuntungan. Melalui kolaborasi ABCG, masyarakat ditempatkan sebagai subjek dan *entepreuneur* dalam penyediaan



perumahan melalui pembangunan komunitas serta pendekatan partisipatif. Pendekatan ini diterapkan dalam *pilot project* penyediaan perumahan bagi pekerja MBR yang berpenghasilan di bawah UMK. Sebanyak 63 kepala keluarga calon penerima manfaat bergabung membentuk paguyuban dan mendapatkan kemudahan untuk menjangkau skema kredit mikro perumahan, dimana BTN berperan dalam pengadaan tanah dan bantuan program BSPS untuk pembangunan rumah. Paguyuban menetapkan lokasi baru untuk membangun permukiman di daerah Curug Sewu Kecamatan Patean, kurang lebih 40 km dari Ibukota Kabupaten Kendal. Hasilnya terbangun 63 unit rumah tipe 36 dengan luas kavling 84 m² pada lahan seluas 1 (satu) hektar. Kawasan pemukiman baru tersebut dilengkapi dengan sertifikat untuk masing-masing kavling, serta utilitas air, listrik dan fasilitas umum/fasilitas sosial.

Dengan keberhasilan ini pemerintah daerah Kabupaten Kendal berencana untuk melakukan perluasan di beberapa kawasan yaitu di Kawileri, Penyangkringan, Ngampel, Kalikumuh, Sukodadi. Kerjasama pembiayaan sedang dibicarakan dengan pihak Bank Jateng. Pendekatan ini juga dilirik oleh Kementerian PUPR yang berencana mengembangkan *pilot project* pada 16 kota/kabupaten di Indonesia.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Berdasarkan Dokumen RPJMN 2020-2024, arah kebijakan terkait Goal 11 Kota dan Pemukiman, antara lain:

1. Dalam rangka Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau, kebijakan yang disusun yaitu meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*) terkait sistem pembiayaan, dari sisi pasokan (*supply side*) terkait pemanfaatan lahan dan penyediaan perumahan, dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
2. Selain itu, pada RPJMN 2020-2024 juga telah direncanakan dan dianggarkan *Major Project* Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) sebagai langkah konkret pencapaian sasaran pembangunan terkait perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan. *Major Project* ini direncanakan terintegrasi antara beberapa sumber pendanaan seperti APBN, APBD, dan Badan Usaha. Salah satu manfaat yang diharapkan dari *Major Project* tersebut adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh.
3. Kebijakan pembangunan perkotaan, di antaranya: (1) Perencanaan Wilayah Metropolitan di Luar Jawa; (2) Pengembangan Wilayah Metropolitan di Luar Jawa; (3) Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jawa; (4) Pengembangan Kota Besar, Sedang, Kecil; (5) Pembangunan Kota Baru; (6) Pembangunan Ibu Kota Negara.
4. Kebijakan dalam penanganan sampah antara lain: (1) Pengelolaan sampah sejak dari hulu hingga ke hilir dengan prinsip pengurangan dan penggunaan kembali; (2) Penguatan kampanye pengurangan sampah; (3) Penguatan kapasitas pemerintah daerah, regulasi dan lembaga pengelola sampah; (4) Pemantauan, evaluasi dan penegakan hukum
5. Kebijakan dalam ketahanan kebencanaan infrastruktur mencakup (1) Pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, (2) Pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana; serta (3) Restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.



V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.</p>							
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%	47.99	56,75 (2019)	56,51 (2019)	▶
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kawasan Perkotaan Metropolitan	PM	2	N/A	
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota Sedang & Kota Baru	PM	8 (Kota Sedang) 5 (Kota Baru)	6 (Kota Besar/Sedang) 2 (Kota Baru) (2018)	▶
<p>Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.</p>							
11.2.1.(a)	Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan (%) (sebagai proksi indikator Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan)	Kementerian Perhubungan	%	23	32	32	●
11.2.1.(b)	Panjang Jalur Kereta Api (Km) (sebagai proksi indikator Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar)	Kementerian Perhubungan	km	5434	3258	853,47	▼



TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.							
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota Sedang	43 kota belum optimal perannya (2014)	20 Kota dioptimalkan perannya	NA	
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Metropolitan baru	2 (2014)	3	2 (2018)	▶
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Kementerian PPN/Bappenas	PM	PM	PM	NA	
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Kementerian Keuangan	PM	PM	PM	NA	
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota Pusaka	PM	PM	NA	
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	DIBI BNPB	Orang	PM	PM	Meninggal & Hilang : 648 (jumlah) Terdampak dan menungsi: 5.365.951 (jumlah) (2019)	●

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	indeks	169,6	130,4	130,4 (2019)	●
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Kota Tangguh	PM	PM	4 (2018)	●
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Sistem Peringatan Dini	PM	PM	19 (2018)	●
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Rupiah	2.647.333 dalam juta rupiah	PM	20.037.324.307.140	●
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	62,96 ¹ (2015)	80	67,40	▶
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kota Hijau	PM	PM	NA	

¹ 11.6.1.(a) Sumber data baseline dan capaian SDGs Tahun Berjalan adalah Direktorat Persampahan KLHK, Ditjen PSLB3 (data Adipura)



TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.</p>							
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kawasan Perkotaan Metropolitan/ Kota Sedang	PM	20	NA	
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Susenas(BPS)	%	43,58	PM	46.41 (2018)	●
<p>Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.</p>							
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Bappenas	%	PM	PM	32,1 (2018)	●
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Dokumen	69 (2015)	69 (2019)	26 (2018)	▼



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2018. *Laporan Kinerja Tahun 2018*. BNPB: Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2019. *Indeks Risiko Bencana Indonesia*. BNPB: Jakarta.
- Humas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 25 Maret 2019. *BTTP Hadirkan Inovasi PLTSa Merah Putih Bantargebang, Solusi Atasi Timbunan Sampah di Kota Besar*. <https://www.bppt.go.id/teknologi-sumberdaya-alam-dan-kebencanaan/3518-bppt-hadirkan-inovasi-pltsa-merah-putih-bantargebang-solusi-atasi-timbunan-sampah-di-kota-besar>
- Mawardi, Isal. 25 Maret 2019. *PLTSa Bantargebang Resmi Beroperasi Mulai Hari ini*. <https://news.detik.com/berita/d-4482127/pltsa-bantargebang-resmi-beroperasi-mulai-hari-ini>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. *Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Kementerian PUPR: Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2019. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya 2018*. Kementerian PUPR: Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2019. *Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berbasis Hasil (Outcome): Upaya Integrasi Sustainable Development Goals dalam Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah*. Kementerian PPN/Bappenas: Jakarta.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018. *Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Lampiran II Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) 2017-2019*. Kementerian PPN/Bappenas, 2018. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024*. 2020. Jakarta.

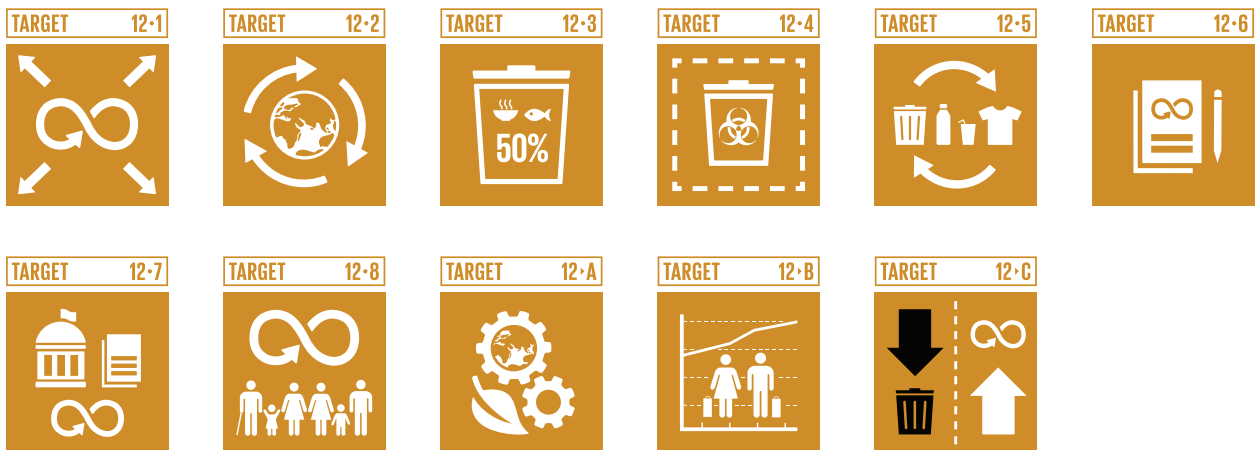


We support the Sustainable Development Goals

12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB



Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan



I. PENDAHULUAN

Pembahasan Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab difokuskan pada (1) pelaksanaan *the 10-Years Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns* (10 YFP SCP) di Indonesia; (2) Penerapan SNI ISO 14001, serta (3) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. Selain itu diuraikan pula tentang tantangan dan kebijakan untuk menerapkan pola konsumsi dan produk yang berkelanjutan.

II. STATUS CAPAIAN

- Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan *the 10-Years Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns* di Indonesia. Sampai tahun 2020 telah terdapat 11 sektor kolaborasi tematik quickwins program SCP di Indonesia yaitu sektor industri, kehutanan, energi, pariwisata, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, komunikasi dan informasi, inovasi teknologi, keuangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

- Penerapan SNI ISO 14001 bagi perusahaan di Indonesia terus mengalami peningkatan. SNI ISO 14001 merupakan standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Selama kurun waktu 2009-2018 jumlah perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan SNI ISO 14001 cenderung meningkat dari 794 perusahaan (2009) menjadi 1.944 perusahaan (2018).
- Produk ramah lingkungan yang teregister mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019. Tercatat pada tahun 2019 sebanyak 23 produk yang telah diregister sebagai produk yang memenuhi ekolabel tipe I. Angka ini naik signifikan dari tahun 2016 hanya 4 produk. Demikian pula dengan ekolabel tipe II dari 18 produk tahun 2016 menjadi 27 produk di tahun 2019.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Pelaksanaan *the 10-Years Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns* di Indonesia.

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 12.1 Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i>, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.							
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik <i>quickwins program</i> .	KLHK	Kolaborasi Tematik	4	8	11*	
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	KLHK	Peserta proper	1.406	1.500	1.639* (2018)	
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.							
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	KLHK	Perusahaan	PM	25	1.944* (2018)	
Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.							
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	KLHK	Produk Ramah Lingkungan	-	4	Ekolabel tipe I = 23** Ekolabel tipe II = 27**	

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</p>							
12.7.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	KLHK	Fasilitas Publik	-	4	3**	

Catatan: (*) kumulatif, (**) tahunan

Indonesia telah menyusun dokumen *the 10-Years Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns* (10 YFP SCP) sebagai bagian dari komitmen dalam melaksanakan *Sustainable Consumption and Production* (SCP). Dokumen 10Y SCP Indonesia memuat peta jalan Indonesia dalam mengarusutamakan penerapan SCP dalam agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan kebijakan/program nasional prioritas dengan program tematik “*Quick Wins*” secara bertahap pada periode waktu 2013 – 2023.

Visi kerangka kerja *the 10-Years Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns* (10YFP SCP) adalah mewujudkan penerapan SCP dalam agenda pembangunan nasional Indonesia dengan perubahan perilaku konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun misi 10 YFP SCP Indonesia 2013-2023 integrasi penerapan SCP dalam beberapa program nasional “*Quick Wins*” dan menyediakan model bagi integrasi penerapan SCP dalam program nasional lainnya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan “*National Focal Point SCP*” di Indonesia telah mengembangkan perangkat kebijakan dan perangkat teknis SCP untuk diterapkan pada setiap sektor dan bidang yang mencakup:

1. Produksi Bersih (*Eko-efisiensi*), Verifikasi Kinerja Teknologi Ramah Lingkungan dan Sistem Manajemen Lingkungan untuk penerapan produksi berkelanjutan;
2. Kriteria *Ekolabel* untuk sertifikasi produk ramah lingkungan dan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan untuk penerapan konsumsi berkelanjutan;
3. Sistem Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa untuk penyediaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang kompeten;
4. Pembinaan dan peningkatan kapasitas produsen dan konsumen, termasuk pihak pendukung, a.l. sektor pembiayaan (“*green banking*”).

Capaian 10YFP SCP sampai tahun 2020 dari berbagai sektor dan bidang sebagai berikut:

1. Sektor industri mencakup:

- **Standar Industri Hijau.** Menteri Perindustrian telah menerbitkan pedoman penyusunan standar industri hijau (SIH) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015. SIH ini dapat digunakan

sebagai acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Sejak tahun 2014, telah dicapai konsensus atas SIH untuk 17 jenis industri yaitu industri semen portland, ubin keramik, pulp dan kertas, susu bubuk, pupuk buatan tunggal hara makro primer, pengasapan karet, karet remah, serta tekstil pencelupan, pencapan dan penyempurnaan. Selanjutnya, gula kristal putih, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman diperkeras, barang lainnya dari kaca, kaca lembaran, penyamakan kulit, pengawetan kulit, baja flat product, dan baja long produk. Untuk memacu penerapan SIH di Indonesia, pemerintah telah menetapkan SIH sebagai salah satu program prioritas RPJMN 2020-2024 dengan target 71 perusahaan yang telah tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) di tahun 2024.

- **Low Cost Green Car (LCGC).** Kementerian Perindustrian menerbitkan kebijakan mengenai mobil murah dan ramah lingkungan atau *low cost green car* (LCGC) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau.

2. Sektor Kehutanan mencakup:

- **Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu.** Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Terdapat 3 prinsip SVLK yaitu (1) Tata kelola kehutanan yang baik (*governance*); (2) Keterwakilan (*representative*), (3) Transparansi/keterbukaan (*credibility*).
- **Teknik Silvikultur Intensif (SILIN).** Sebagai bentuk komitmen kuat Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas hutan alam, dan pengelolaan sumber daya alam hutan yang berkelanjutan, KLHK mencanangkan penerapan *Silvikultur Intensif* (SILIN) melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.12 Tahun 2018 Jo. P.4 Tahun 2019, yang mewajibkan para pemegang izin konsensi pemanfaatan hutan alam untuk menerapkan teknik SILIN seluas 20% dari luas areal produktifnya.
- **Hutan Tanaman Energi.** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tengah mengkaji program hutan tanaman energi yang bisa dijadikan sumber energi baru dan terbarukan di masa mendatang. Selain itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan juga bisa menopang kehidupan dan menjadi benteng dari bencana perubahan iklim.
- **Jasa Lingkungan Kehutanan.** Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) memiliki tugas untuk “Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.”

3. Sektor Energi mencakup:

- **Energi Baru dan Terbarukan.** Kementerian ESDM mendorong pengembangan pembangkit listrik EBT oleh sektor swasta melalui sistem *on-grid* dan *off-grid komunal* yang didukung dengan revisi Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 untuk mendorong pemanfaatan EBT lebih masif. Selain itu, Kebijakan Mandatori Biodiesel, penggunaan B20 telah dimulai



sejak Januari 2016, dan telah berjalan dengan baik pada sektor PSO. Sejak 1 September 2018, Pemerintah memperluas mandatori B20 ke sektor Non PSO, seperti kelistrikan, pertambangan, perkeretaapian, industri, dan angkutan laut. Mandatori B20 tersebut akan ditingkatkan menjadi mandatori B30 pada Januari 2020.

4. Sektor Pariwisata mencakup:

- **Indonesia Sustainable Tourism (ISTA).** ISTA merupakan penghargaan yang diberikan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk membangun kesadaran pengelola destinasi pariwisata akan pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pada tahun 2018, terdapat 176 peserta yang merupakan pengelola destinasi pariwisata dari berbagai wilayah Indonesia. Jumlah peserta ISTA meningkat sebanyak 96 peserta sejak ISTA pertama kali diadakan tahun 2017.

5. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mencakup:

- **Sustainable Construction and Building.** Pada tahun 2015 telah diterbitkan Permen PU No 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya bangunan gedung hijau yang berkelanjutan dengan memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, yang memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air, serta sumber daya lainnya.

6. Sektor Transportasi, mencakup:

- **Sustainable transport.** Sustainable *transport* secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena adanya efisiensi biaya, waktu dan konsumsi energi. Proyek percontohan seperti Dukuh Atas *Interchange Station* Terintegrasi dengan lima mode transportasi seperti MRT, LRT, *Commuterline* Jabodetabek, Transjakarta, dan Kereta Bandara Soekarno – Hatta diharapkan dapat memfasilitasi akses terhadap pergeseran angkutan umum, sehingga mendorong perpindahan kendaraan pribadi untuk menggunakan transportasi massal
- **ICAO Corsia.** Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengimplementasikan skema *International Civil Aviation Organization (ICAO) Carbon Offsetting and Reduction Scheme For International Aviation (CORSA)* untuk kurangi polusi dengan menjamin keakuratan proses monitoring konsumsi bahan bakar *Monitoring-Reporting-Verification (MRV)* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

7. Sektor Komunikasi dan Informasi. Mencakup:

- **Green ICT.** Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menajaki pengembangan regulasi untuk mendorong penggunaan teknologi komunikasi informasi yang ramah lingkungan (Green ICT). Saat ini di Indonesia ada sekitar 850 stasiun pemancar TV, ribuan pemancar radio, 80 juta pesawat TV dan 50-juta pesawat radio, 90.000 BTS jaringan ponsel GSM dan CDMA, 25 ribu SSL Desa Berdering, 131 SSL Desa Pinter, dan 5.748 Pusat Layanan Internet Kecamatan.

8. Sektor Inovasi dan Teknologi, mencakup:

- **Teknologi hijau.** Program teknologi hijau yang dikembangkan diantaranya (i) Inisiatif Kemitraan Teknologi Hijau di Indonesia (GTPI), (ii) Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), (iii) Micro Grid (iv) Pembangkit Listrik Biogas POME.

9. Sektor Keuangan mencakup:

- **Sustainability Finance.** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menuangkan aturan sustainable finance dalam Peraturan OJK (POJK) nomor 51 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan POJK nomor 60 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan. Hal ini merupakan implemementasi dari Komitmen IMF/World Bank Meeting mengenai pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

10. Sektor Pertanian, mencakup:

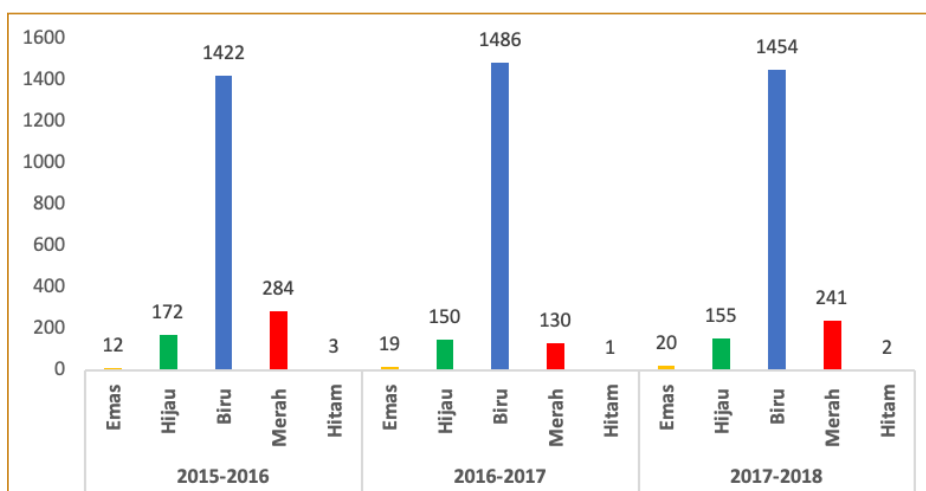
- **ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)** adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Perkembangan ISPO 2020 telah 40 perusahaan kelapa sawit yang mendapat sertifikat ISPO, 19 Perusahaan kelapa sawit dalam proses pengakuan dari 145 perusahaan yang mengajukan sertifikasi.

11. Sektor Kelautan dan Perikanan, mencakup:

- **Sustainable Fisheries.** Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam mengupayakan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) dan pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberlakukan penghentian pemberian izin baru atau moratorium terhadap kapal-kapal penangkap ikan berukuran diatas 30 *gross tonnage* (GT) untuk mengevaluasi, dan menata ulang izin-izin kapal yang beroperasi di Indonesia.

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) terhadap Pengelolaan Lingkungan.

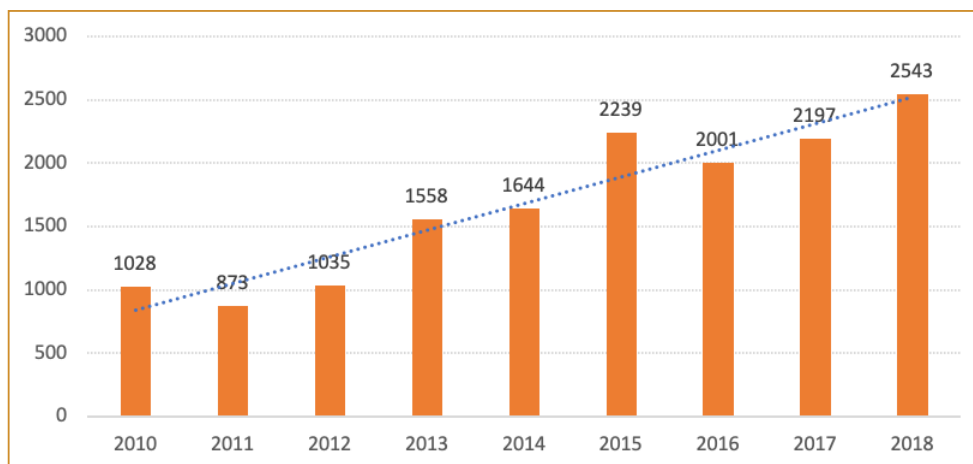
Program penilaian peringkat kinerja perusahaan (*Proper*) merupakan salah satu program untuk menilai tingkat ketaatan perusahaan dalam mengelola lingkungan. Terdapat lima kategori penilaian *Proper*, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam. Kategori penilaian merupakan urutan capaian kinerja perusahaan dari yang terbaik/konsisten sampai dengan terendah. Selama tahun 2017-2018 telah terdapat 20 perusahaan dengan predikat Emas, 155 Hijau, 1.454 Biru, 241 Merah, dan 2 perusahaan mendapat kategori Hitam.



Gambar 01. Jumlah perusahaan yang mengikuti Proper tahun 2015-2018.

Penerapan SNI ISO 14001.

Penerapan SNI ISO 14001 berawal dari SNI 19-14001:1996 mengenai sistem manajemen lingkungan (SML) yang memuat persyaratan dan panduan penggunaannya. SNI ISO 14001 mengalami beberapa revisi diantaranya SNI 19-14001:2005 dan terakhir adalah SNI ISO 14001: 2015. ISO 14001 merupakan standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 di Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang positif. Selama kurun waktu tahun 2009-2018 jumlah perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan SNI ISO 14001 cenderung meningkat dari 794 perusahaan (2009) menjadi 1.944 perusahaan (2018).



Gambar 02. Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001.

Produk Ramah Lingkungan yang Teregister

Indonesia telah mengeluarkan logo ecolabel untuk produk ramah lingkungan yang teregister yaitu:



Ekolabel Tipe I, Label ini diberikan kepada produk yang telah memenuhi SNI kriteria ecolabel. Sampai bulan Oktober tahun 2019 terdapat 23 produk¹ telah memenuhi ecolabel ini.



Ekolabel Tipe II. Label ini diberikan kepada produk yang memiliki swadeklarasi lingkungan yang terverifikasi. Sampai tahun 2019 sebanyak 27 produk² telah memenuhi ecolabel ini.

Di samping itu, Indonesia juga telah mengembangkan peraturan terkait penerapan ecolabel untuk pengadaan barang dan jasa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 Tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.

² http://standardisasi.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2016/04/Daftar-Produk-Tipe-I_Ed-Oktober-2019.pdf

³ http://standardisasi.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2016/04/DAFTAR-EKOLABEL-TIPE-II_Ed-up-date-Januari-2020-1.pdf

Penerapan Standar Pelayanan Masyarakat di Fasilitas Publik (SPM-FP).

Standar Pelayanan Masyarakat di Fasilitas Publik (SPM-FP) merupakan pelaksanaan pemenuhan kriteria generik SPM-FP. Penerapan kriteria generik SPM-FP merupakan pelaksanaan pelayanan masyarakat (berupa sarana, informasi dan edukasi) serta sistem manajemen di fasilitas publik. Penerapan SPM-FP juga merupakan aksi peningkatan kualitas lingkungan di fasilitas publik. Selama tahun 2015-2020 telah tersedia 11 dokumen SPM-FP diberbagai fasilitas publik seperti rumah ibadah, tempat rekreasi, pelabuhan, dan pendidikan tinggi serta pesantren/ boarding school (dalam proses penyusunan). Selama tahun 2019 telah diterapkan 3 SPM-FP pada Pasar Cihapit, Sadang Serang dan Kosambi Bandung, Paris VanJava Mall Bandung dan Gereja Jatipon Bekasi. Selain itu, terdapat 4 fasilitas publik yang telah berkomitmen untuk menerapkan SPM-FP yaitu Gereja Santa Odelia Bandung, Masjid Salman ITB, Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda Bandung dan Stasiun Sudirman Jakarta, Jurang Mangu Tangerang dan Klender Jakarta.

B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

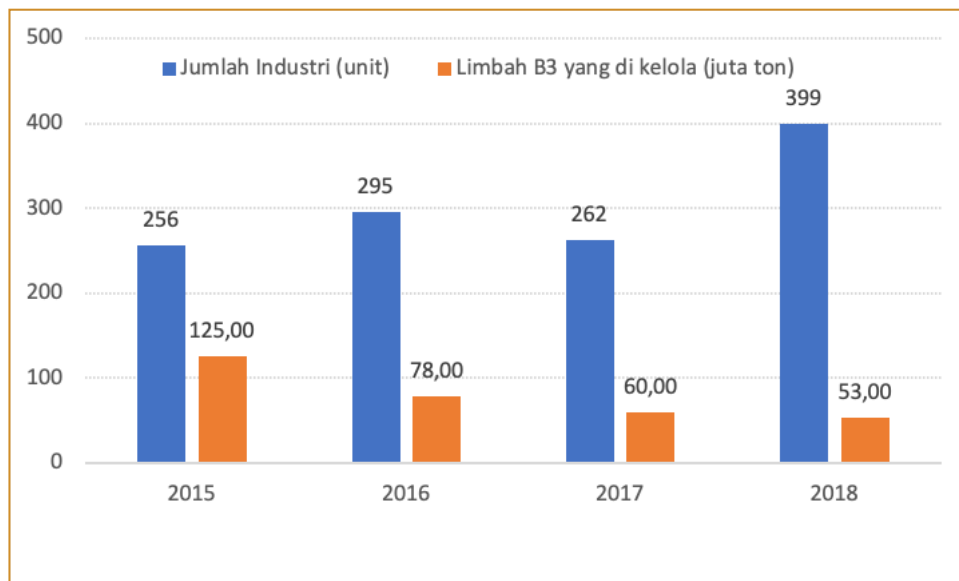
Pengurangan Jumlah Timbulan Sampah dan Limbah.

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	KLHK	Juta ton	100	150	53,53* (2018)	▼
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	KLHK	Juta ton	13,5	61,5	8,02*	▼

Catatan: (*) kumulatif, (**) tahunan

Pada tahun 2015 telah dimulai dilakukan pengelolaan sampah terpadu Reduce, Reuse and Recycle (3R) melalui beroperasinya Pusat Daur Ulang (PDU) skala kota dan Tempat Pengelolaan Sampah 3R dengan kapasitas 5 – 20 ton/hari. Sampai tahun 2018, telah berhasil dilakukan penanganan sampah rumah tangga sebesar 68,83% atau setara dengan 45,28 ton. Pada tahun 2019, KLHK telah mendorong kebijakan EPR di Indonesia yang ditandai dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Selain itu, upaya pengurangan produksi limbah industri di

Indonesia, salah satunya dilakukan melalui pengelolaan limbah bahan, berbahaya dan beracun (B3). Sampai tahun 2018 terdapat 399 industri yang telah berhasil mengelola sekitar 53 juta ton limbah B3 dari baseline sebesar 100 juta ton B3 yang terkelola. Capaian pengelolaan limbah B3 yang terkelola dapat pula dipengaruhi oleh perusahaan yang telah menerapkan teknologi bersih sehingga mengurangi penggunaan bahan berbahaya dan beracun, walaupun demikian pencapaian ini masih berada dibawah target yang telah ditetapkan oleh SDGs yaitu sebesar 150 juta ton pada tahun 2019.



Gambar 03. Pertumbuhan ekonomi dan Persentase penduduk miskin.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

1. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SCP di Indonesia antara lain: (i) perlu intervensi kebijakan operasional mengenai penerapan prinsip-prinsip SCP dalam “business cycle” dan “business process” di pihak pemerintah, swasta dan masyarakat secara menyeluruh termasuk dalam hal pendanaan; (ii) perlu menghilangkan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi yang menurunkan kualitas lingkungan dan cadangan sumberdaya alam; (iii) perlu menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan untuk (konsep “decoupling”) menjadi pembangunan yang berkelanjutan; (iv) perlunya pengembangan insentif dan disinsentif untuk mendorong implementasi SCP.
2. Ketersediaan data dan informasi mengenai pelaksanaan SCP di Indonesia belum tersedia secara lengkap. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan SCP belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik pada rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah. Pada level masyarakat, pelaksanaan SCP dapat merubah perilaku atau gaya hidup untuk senantiasa berperilaku hidup sehat dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar seperti membuang sampah pada tempat yang tersedia, hemat dalam penggunaan air, listrik dan lain-lain. Pada level perusahaan dan negara penerapan SCP dapat mengefesienkan penggunaan sumberdaya seperti lahan, makanan dan energi. Selain itu pelaksanaan SCP dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi untuk menciptakan produk ramah lingkungan.

III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Laporan Keberlanjutan/Sustainability Reporting merupakan salah satu instrumen penting untuk menilai kinerja perusahaan/industri dalam mempraktekan efisiensi, penggunaan sumber daya terbarukan, dan penggunaan teknologi rendah karbon. Instrumen lain yang dapat digunakan pula adalah PROPER dan Standar Industri Hijau (SIH). Ketiga instrument tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan peraturan/kebijakan yang mendorong setiap pelaku usaha untuk memenuhi instrument-instrument tersebut.

Salah satu contoh laporan keberlanjutan dalam penerapan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dalam “business cycle” dan “business process” perusahaan telah dilaksanakan oleh PT. Astra International Tbk. Dalam laporan keberlanjutannya (Sustainability Reporting) tahun 2019 kinerja penggunaan sumber daya alam dan energi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan diantaranya penurunan intensitas konsumsi energi sebesar 4,23 %, penurunan intensitas limbah cair B3 sebesar 7.25%, penurunan intensitas limbah padat B3 sebesar 7.91% dan penurunan intensitas Emisi GRK sebesar 4,49%. Pencapaian tersebut ditopang dengan berbagai inovasi yang dilakukan. Tercatat selama tahun 2019 PT. Astra International Tbk telah mengerjakan 836,992 proyek inovasi.

Upaya untuk mendorong pelaku usaha untuk melaporkan laporan keberlanjutan perusahaan terus dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk penyiapan regulasi dan kebijakan. Saat ini, telah tersedia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/ POJK. 03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Berdasarkan peraturan ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah bekerja sama dengan OJK untuk memasukan matriks lampiran POJK yang sesuai dengan indikator TPB/SDGs ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs periode 2020-2024. Harapannya, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dapat secara langsung berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs khususnya Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Pemerintah terus mengupayakan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan bersifat inklusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi inklusif berpusat pada perluasan skala dan akses ekonomi sehingga mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan melalui kesempatan kerja yang berkualitas sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui (i) mengurangi timbulan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta mendorong upaya pengelolaan sampah dan limbah B3 yang terintegrasi menuju ekonomi sirkular; (ii) mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari
2. Penanganan Limbah yang dilaksanakan dengan (1) Pengelolaan sampah rumah tangga, sejenis rumah tangga dan sampah spesifik; (2) Pengelolaan limbah cair.

3. Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan dengan (1) Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri; (2) Penerapan modifikasi proses dan teknologi; (3) Manajemen limbah industri; serta (4) mendorong pengembangan skema insentif dan disinsentif.
4. Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk sampah plastik melalui: (i) Penyusunan NSPK dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (ii) Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; (iii) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta pelaku usaha dalam pengurangan sampah; (iv) Pembentukan sistem informasi; (v) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; (vi) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.							
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.	KLHK	Kolaborasi Tematik	4	8	11*	●
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	KLHK	Peserta proper	1.406	1.500	1.639* (2018)	●
12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	KLHK	Juta ton	100	150	53,53* (2018)	▼
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	KLHK	Juta ton	13,5	61,5	8,02*	NA

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.							
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	KLHK	Perusahaan	1.644 (2015)	25	1.944* (2018)	
Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.							
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	KLHK	Produk Ramah Lingkungan	-	4	Ekolabel tipe I = 23** Ekolabel tipe II = 27**	
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	KLHK	Fasilitas Publik	-	4	3**	

Catatan: (*) kumulatif, (**) tahunan



DAFTAR PUSTAKA

- Internasional Organization for Standardization. *ISO Survey of Certification to Management System Standards*. <https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. *Draf Kerangka Kerja Sustainable Consumption and Production Indonesia 2013-2030*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oktober 2019. *Daftar Produk Ekolabel Indonesia (Tipe I)*. http://standardisasi.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2016/04/Daftar-Produk-Tipe-I_Ed-Oktober-2019.pdf
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Januari 2020. *Daftar Produk Ekolabel Swadeklarasi (Tipe II)*. http://standardisasi.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2016/04/DAFTAR-EKOLABEL-TIPE-II_Ed-update-Januari-2020-1.pdf
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 18 Desember 2017. *Anugerah PROPER Tahun 2017*. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/254/anugerah-proper-tahun-2017
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 23 Oktober 2018. *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan*. <https://www.menlhk.go.id/site/post/119>
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024*. 2020. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018. *Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Lampiran II Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) 2017-2019*. Kementerian PPN/Bappenas, 2018. Jakarta.
- Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2017-2019. Kementerian PPN/Bappenas, 2018. Jakarta.
- PT. ASTRA International Tbk. 2019. *Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2019*.
- Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. 2020. *Capaian Dukungan Standardisasi SDGs 12 Konsumsi dan Produksi yang berkelanjutan (PPT file)*.





We support the Sustainable Development Goals

13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya



I. PENDAHULUAN

Pembahasan Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim difokuskan pada isu ketahanan bencana alam serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang mencakup indikator SDGs seperti: (1) Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah; (2) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana; (3) Dokumen *Biennial Update Report* (BUR) Indonesia; (4) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

II. STATUS CAPAIAN

- Sampai dengan tahun 2019, capaian potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) adalah sebesar 23,46 persen dari baseline akumulatif atau sebesar 3.974.513 ribu Ton CO₂e. Adapun untuk capaian penurunan emisi GRK tahunan pada tahun 2019 adalah sebesar 20,51 persen atau 401.822,53 ribu ton CO₂e. Sementara itu, penurunan intensitas emisi GRK pada tahun 2019 adalah sebesar 20,77 persen dari baseline 420 ton CO₂e/miliar rupiah yang berasal dari implementasi seluruh sektor pembangunan rendah karbon.
- Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI mengalami penurunan dari 169,6 di tahun 2015 menjadi 130,4 pada tahun 2019. Sementara itu, nilai kerugian ekonomi akibat bencana cenderung mengalami penurunan meskipun fluktuatif. Pada tahun 2019, kerugian ekonomi akibat bencana sebesar 6,26 triliun rupiah (0,06% PDB). Adapun untuk jumlah korban yang meninggal dan hilang akibat bencana



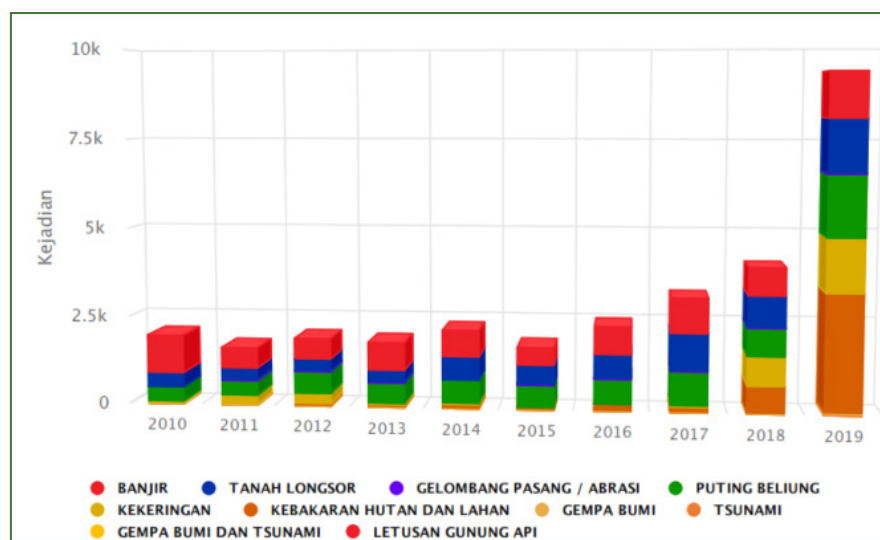
sebanyak 684 jiwa dan untuk korban yang terdampak dan mengungsi sebanyak 5.365.951 jiwa (2019).

A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	DIBI BNPB	Orang	PM (2015)	PM (2019)	Meninggal & Hilang : 648 (jumlah) Terdampak dan mengungsi: 5.365.951 (jumlah) (2019)	
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia. (kumulatif)	Kementerian LH dan Kehutanan	Dokumen BUR ke-	1 (2015)	- (2019)	2 (2018)	●
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Kementerian LH dan Kehutanan	Dokumen	1 (2015)	1 (2019)	1 (2018)	●

Ketahanan dan Adaptasi terhadap Bencana Alam.

Kejadian bencana di Indonesia termasuk ke dalam katagori yang tinggi dengan sekitar lebih dari 75 persen yang tercatat merupakan bencana hidrometeorologis yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya. Bencana hidrometeorologis tersebut antara lain berupa banjir, puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang pasang (abrasi).

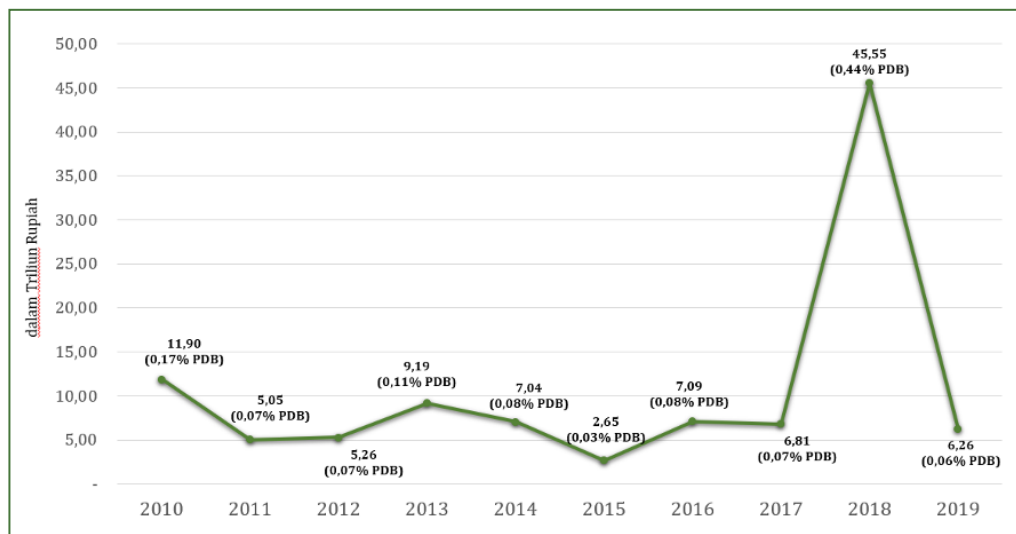


Gambar 01. Tren Kejadian Bencana Tahun 2010-2019

Tahun	Jumlah Korban (dalam jiwa)	
	Meninggal dan hilang	Terdampak dan Mengungsi
2015	276	1.215.828
2016	569	3.163.818
2017	460	3.182.136
2018	8,439	1.365.956
2019	684	5.365.951

Tabel 01. Jumlah Korban Bencana
Sumber: BNPB

Berdasarkan data dari DIBI BNPB, pada tahun 2019, terdapat sebanyak 684 jiwa yang meninggal dan hilang serta sebanyak 5.365.951 jiwa yang terdampak dan mengungsi akibat bencana. Dalam rentang waktu 2015-2018, Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI mengalami penurunan dari 169,6 (2015) menjadi 130,4 (2018).



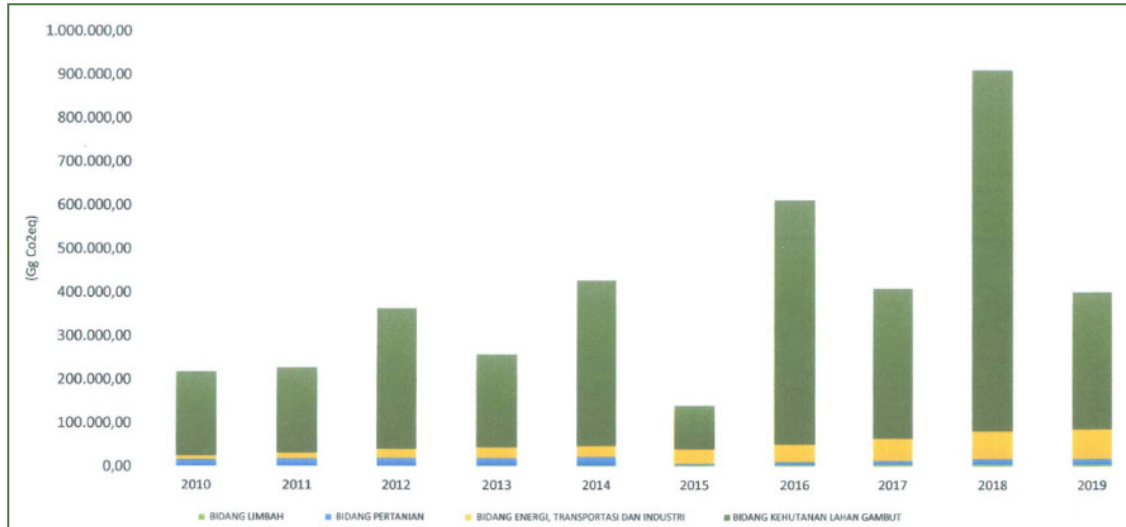
Gambar 02. Kerugian Ekonomi Akibat Bencana Tahun 2010-2019 (dalam Triliun Rupiah)
Sumber: BNPB

Dari sisi ketahanan ekonomi, selama rentang waktu 2010-2019, nilai kerugian ekonomi akibat bencana cenderung mengalami penurunan meskipun fluktuatif di mana rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana adalah sebesar 10,68 Triliun. Pada tahun 2018, kerugian ekonomi mencapai 45,55 triliun rupiah (0,44% PDB) akibat terjadi bencana masif yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah. Di tahun 2019, kerugian sebesar 6,26 triliun rupiah (0,06% PDB).

Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Capaian potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sampai dengan tahun 2019, adalah sebesar 23,46 persen dari baseline akumulatif atau sebesar 3.974.513 ribu Ton CO₂e. Pada tahun yang sama pula, capaian penurunan emisi GRK tahunan sebesar 20,51 persen atau 401.822,53 ribu ton CO₂e. Adapun untuk penurunan intensitas emisi GRK adalah sebesar 20,77 persen (2019) dari baseline 420 ton CO₂e/miliar rupiah yang merupakan kontribusi dari seluruh sektor pembangunan rendah karbon.

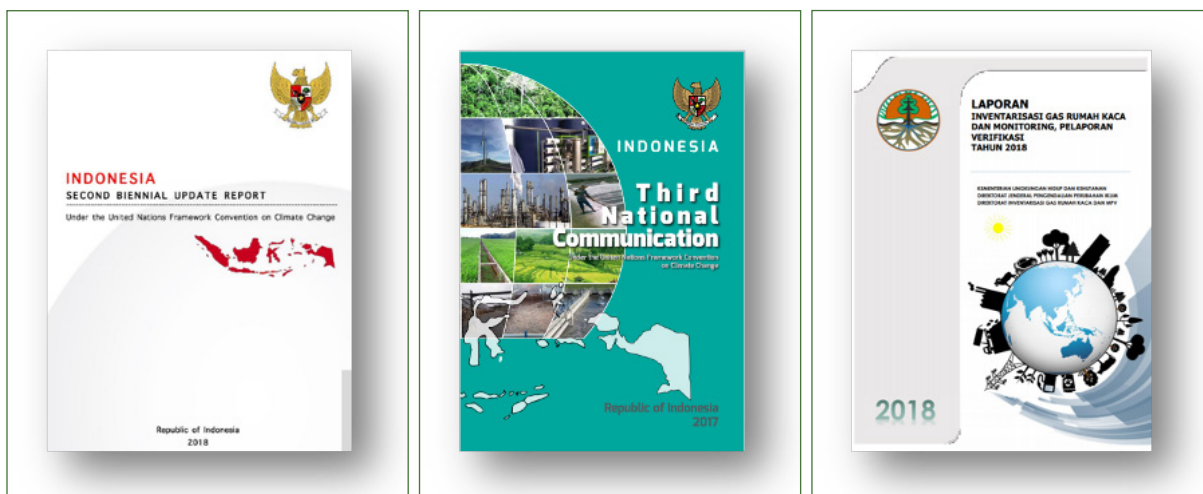
Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca atau RAN-GRK, terdapat dua bidang yang menunjukkan pencapaian potensi emisi GRK yang signifikan, yaitu (a) bidang berbasis lahan dan gambut; serta (b) bidang energi, transportasi, dan industri. Adapun kontribusi penurunan emisi GRK dari kedua bidang tersebut secara rata-rata selama periode 2010-2019 secara berturut-turut sebesar 87 persen dan 9 persen.



Gambar 03. Capaian Penurunan Emisi GRK Sektoral 2010-2019.

Terkait dengan pelaporan dan dokumen upaya perkembangan penanganan perubahan iklim, Indonesia telah menyampaikan dokumen *Biennial Update Report* (BUR). Dokumen ini berisi tentang update pelaksanaan kegiatan aksi mitigasi yang disampaikan kepada UNFCCC untuk sektor kehutanan, pertanian, energi, industri dan limbah yang disampaikan setiap 2 (dua) tahun.

Indonesia telah menyampaikan sebanyak tiga kali laporan Dokumen National Communication, yakni: (1) pada tahun 1999 dengan *Initial National Communication*; (2) pada November 2010 dengan *Second National Communication* (SNC); dan (3) pada tahun 2017, di mana isi laporan termasuk diantaranya mencakup perkembangan penanganan perubahan iklim di tingkat nasional.



Gambar 04. Dokumen BUR, TNC, dan Pelaporan GRK.



B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

Strategi Pengurangan Risiko Bencana.

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Dokumen	69 (2015)	69 (2019)	26 (2018)	▼

Peningkatan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana dilakukan melalui beberapa perbaikan kerangka peraturan perundangan dan kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah, salah satunya adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB). Selain itu, juga dilakukan penyusunan rencana kontingensi, pembentukan desa tangguh bencana (destana) dan inisiasi program keluarga tangguh bencana (katana), penguatan sumber daya penanggulangan bencana, yang diantaranya melalui pemberian bantuan peralatan pusat pengendalian dan operasi (PUSDALOP), pelatihan relawan kebencanaan, dan penyediaan peringatan dini gelombang tinggi saat terjadinya siklon tropis dan cuaca ekstrem lainnya. Salah satu pencapaian adalah peningkatan akurasi layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari 5 menit, serta instalasi system peringatan dini multiancamn bencana.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan dihadapi terkait isu bencana alam dan perubahan iklim antara lain:

1. Sebagian besar wilayah di Indonesia masih termasuk ke dalam katagori risiko tinggi dengan kondisi jumlah kejadian bencana memiliki tren terus meningkat. Pada tahun 2019, tercatat dari total 3.768 kejadian bencana, 3.731 kejadian (99%) merupakan bencana hidrometeorologi dan 37 kejadian (1%) merupakan bencana geologi.
2. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik ancaman multi bencana. Sekitar 75 persen infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan/bahaya.
3. Tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana masih lemah. Berdasarkan survei (BNPB, 2018), dari seluruh daerah yang telah menyusun dokumen RPB, tercatat hanya 45 persen yang telah menggunakannya sebagai masukan RPJM Daerah. Sementara itu, investasi pemerintah terhadap upaya penanggulangan bencana masih rendah pada beberapa sektor seperti konstruksi, belanja pemerintah, dan sektor lainnya. Persentase total investasi terhadap PDB nasional baru sekitar 0,08 persen.

III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

1. Mobilisasi pendanaan melalui *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim.

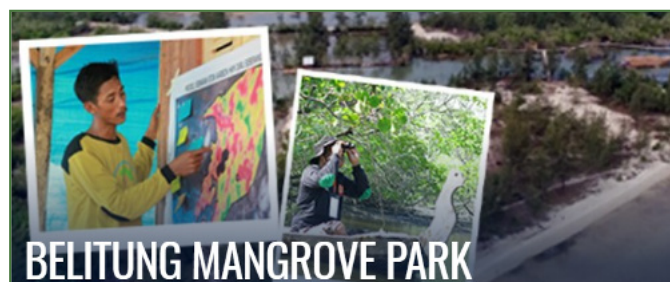
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) memanfaatkan dan menyalurkan sumber daya domestik dan dana internasional ke dalam proyek-proyek yang selaras dengan rencana implementasi RAN/RAD-GRK Indonesia. Selama kurun waktu 2010-2018, ICCTF berhasil mencatatkan keberhasilan dan best practices dalam mengelola proyek yang kompleks dan inovatif. Dari total 76 proyek yang telah dilaksanakan tersebar di 99 lokasi di seluruh Indonesia (46 proyek mitigasi berbasis lahan, 22 proyek adaptasi dan 8 proyek energi), potensi penurunan emisi GRK yang diperoleh adalah sebesar 9,5 juta Ton CO₂e atau sekitar 5% dari target penurunan emisi nasional tahun 2017. Selain itu, proyek-proyek ICCTF juga berdampak langsung dalam peningkatan perekonomian dan pola sosial masyarakat.

2. Desa Binaan dalam Rangka Mengurangi Risiko Bencana.

Desa Oelbetino di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa binaan dari bantuan *CARE International Indonesia (CII)* pada program *Partners for Resilience (PfR)*. Dari hasil analisis awal program, teridentifikasi jenis bencana di desa ini adalah angin puting beliung, kekeringan, penyakit ternak, diare dan malaria, serta tanah longsor. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, warga desa membuat rencana aksi bersama untuk mengurangi resiko bencana terhadap sumber kehidupan dan pekerjaan mereka. Hal ini ditindaklanjuti dalam rencana dan aksi mitigasi skala kecil (small scale mitigation plan) seperti 1) perlindungan mata air dan pengendalian erosi, 2) suplai air dan irigasi, 3) pertanian menetap, dan 4) paronisasi dan hijauan makanan ternak-HMT. Dampak yang dirasakan antara lain perubahan system pertanian dari berpindah-pindah dengan cara membuka lahan dengan membakar hutan menjadi system pertanian menetap (permaculture) dan penambahan pendapatan. Program di Desa Oelbetino ini sudah terintegrasikan dengan Dana Desa. Hal ini artinya ada kontribusi dari dana publik terhadap keberlanjutan program ini.

3. Aksi Mitigasi Berbasis Komunitas.

Belitung Mangrove Park merupakan Proyek yang dijalankan oleh yayasan TERANGI dengan dukungan dari ICCTF. Pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai taman wisata mangrove dalam upaya rehabilitasi ekosistem dan sekuestrasi karbon.



Terdapat enam hal yang menjadi keluaran dari proyek yaitu: (1) Penanaman 330 ha kawasan hutan mangrove dan hutan pantai dan pembangunan 1 menara pengamatan dan pemantauan; (2) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memantau kondisi ekosistem pesisir; (3) Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan KKPD Belitung dan BMP; (4) Tersedianya sarana pengamatan dan pemantauan, ekowisata, dan pendidikan mangrove dan hutan pantai; (5) Tersedianya SDM dalam pengembangan ekowisata bahari; (6) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekowisata. Dampak dari proyek antara lain keterlibatan pihak lain seperti instansi pusat dan daerah untuk



membangun fasilitas seperti toilet, jaringan air PDAM, jalan, bumi perkemahan, dll; menyediakan lapangan kerja baru dan menghentikan penambangan liar di hutan lindung; peningkatan pendapatan.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, arah kebijakan terkait Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim adalah (1) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (2) Pembangunan Rendah Karbon. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, melalui strategi penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim. Adapun untuk Pembangunan Rendah Karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, meliputi pembangunan energi berkelanjutan. Pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembangan industri hijau, serta rendah karbon pesisir dan laut.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Dokumen	69 (2015)	69 (2019)	26 (2018)	▼
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	DIBI BNPB	Orang	PM (2015)	PM (2019)	Meninggal & Hilang : 648 (jumlah) Ter-dampak dan menungsi: 5.365.951 (jumlah) (2019)	●
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.							
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia. (komulatif)	Kementerian LH dan Kehutanan	Dokumen BUR ke-	1 (2015)	- (2019)	2 (2018)	●
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Bapenas, Kementerian LH dan Kehutanan	Dokumen	1 (2015)	1 (2019)	1 (2018)	●



DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2018. *Laporan Kinerja Tahun 2018*. BNPB: Jakarta.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2019. *Indeks Risiko Bencana Indonesia*. BNPB: Jakarta.

Kementerian PPN/Bappenas, 2019. *Voluntary National Review Sustainable Development Goals*. Kementerian PPN/Bappenas: Jakarta.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018. *Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Lampiran II Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) 2017-2019*. Kementerian PPN/Bappenas, 2018. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024*. 2020. Jakarta.



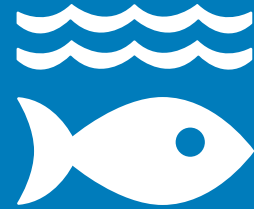


We support the Sustainable Development Goals



We support the Sustainable Development Goals

14 EKOSISTEM LAUTAN



Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

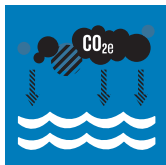
TARGET 14-1



TARGET 14-2



TARGET 14-3



TARGET 14-4



TARGET 14-5



TARGET 14-6



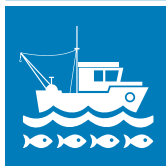
TARGET 14-7



TARGET 14-A



TARGET 14-B



TARGET 14-C



I. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat berkepentingan untuk mencapai target Tujuan 14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya Tujuan 14 diarahkan untuk mengelola dan melestarikan ekosistem laut secara berkelanjutan diantaranya melalui: (1) Tersedianya kerangka kebijakan dan instrument terkait penataan ruang laut nasional; (2) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) secara berkelanjutan (3) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman; dan (4) Jumlah kawasan konservasi perairan; serta (5) Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*).

II. STATUS CAPAIAN

- Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan



Perikanan (WPP), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/2014. Dengan penetapan ini, maka pemantauan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai wilayah untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia dapat dilakukan secara seimbang.

- Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun dengan nilai tidak melebihi 80% dari total tangkapan lestari (*Maximum Sustainable Yield-MSY*). Pada tahun 2019 proporsi tangkapan jenis ikan masih berada pada kisaran nilai 55,6%, artinya tangkapan jenis ikan masih pada batas biologis yang aman.
- Selama kurun waktu 2015-2019 Indonesia telah berhasil meningkatkan jumlah luas kawasan perairan dari 17,30 juta ha dari target sebesar 16,5 juta ha di tahun 2015 menjadi 23,14 juta ha (2019). Capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 20 juta Ha di tahun 2019. Luas kawasan konservasi perairan akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dalam rangka pemenuhan komitmen global dan didukung dengan komitmen pemerintah daerah menetapkan kawasan konservasi dalam rencana zonasi provinsi.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.							
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	KKP	Dokumen (PP)	-	-	1	●
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	KKP	WPP	5	11	11	●
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.							
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	KKP	% (Target dibagi dengan MSY)	80	≤80	56,11	●
Target 14.5, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia							

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	KKP	Juta Ha	16,5	20	23,1	●
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.							
14.6.1(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	KKP	%	66	87	93,57	●
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar							
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	KKP	Regulasi/ Kebijakan	-	3	3	●
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	KKP	lokasi	34	34	34	●
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	KKP	Orang	409.498 (2016)	150.000	150.000	●
Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin							
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (<i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i>).	KKP	Dokumen Ratifikasi	1	1	1	●

Landasan Penataan Ruang Laut Indonesia.

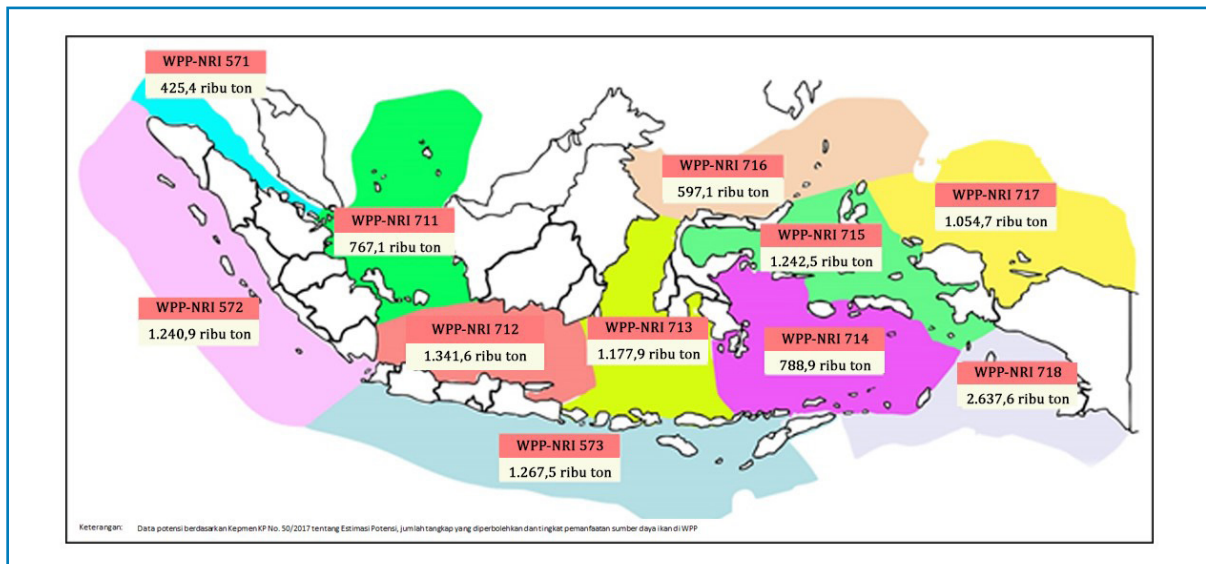
Indonesia telah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Salah satu tujuan dari UU ini adalah melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, yang secara umum mengatur tentang penyelenggaraan kelautan yang mencakup wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut dan tata kelola dan kelembagaan.

Upaya penataan ruang laut terus diupayakan melalui proses yang sistematis termasuk partisipatif, transparansi dan dengan pendekatan berbasis *science*. Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) telah disusun dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di tingkat Provinsi juga telah

ditetapkan melalui Peraturan Daerah pada 27 provinsi. Penyusunan RTRLN dan RZWP3K dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan yang dilakukan melalui: (1) peningkatan perlindungan terhadap lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya maritim, masyarakat adat, dan nelayan tradisional; (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan kemaritiman, serta (4) memberi kepastian hukum untuk mendorong investasi.

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia

Untuk mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Rencana Pengelolaan Perikanan untuk semua WPP telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan¹. Dengan adanya RPP WPP maka pengaturan pembagian wilayah penangkapan melalui mekanisme perizinan dapat dilakukan, sehingga nelayan secara pasti dapat memanfaatkan sumber daya perikanan secara lestari dan tidak melampaui batasan biologis yang aman.



Gambar 01. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

sumber: Diolah dari Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Tangkapan Jenis Ikan yang Berada Dalam Biologis yang Aman.

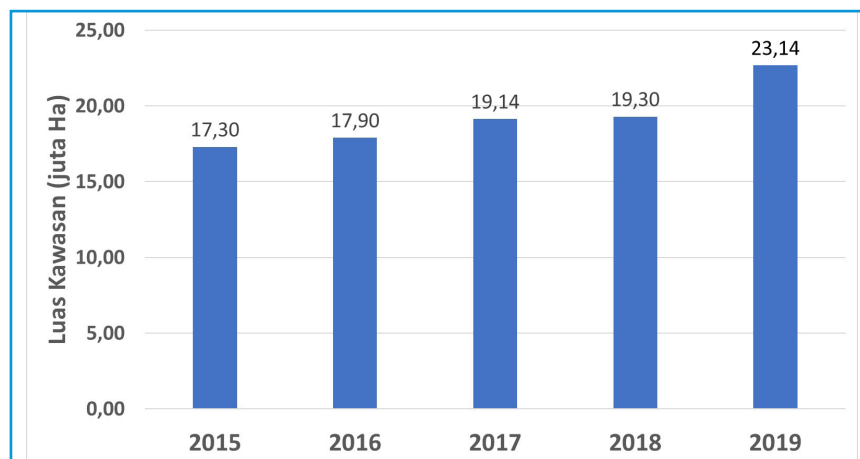
Selama lebih dari dua dekade, Indonesia menetapkan data tangkapan ikan sesuai MSY dengan tingkat tetap sebesar 6,4 juta ton ikan. Dengan telah ditetapkannya WPP, sejak tahun 2011, MSY dapat ditetapkan untuk setiap WPP dan terus diperbaharui dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, MSY ditetapkan sebesar 6,5 juta ton, dan pada tahun 2014 MSY meningkat menjadi 7,3 juta ton. Peningkatan ini diiringi dengan pembaruan pencatatan data khususnya tentang ketertiban pengumpulan data di seluruh tempat pendaratan ikan, kapal, dan penghitungan spesies baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Berdasarkan data baru tersebut dan didukung penertiban penangkapan perikanan liar, maka estimasi MSY pada tahun 2016 sebesar 9,93 juta ton (Permen KP No. 47/2016). Pada tahun

¹ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan: No. 75/2016 (WPP 571), No. 76/2016 (WPP 572), No. 77/2016 (WPP 573), No. 78/2016 (WPP 711), No. 79/2016 (WPP 712), No. 80/2016 (WPP 713), No. 81/2016 (WPP 714), No. 82/2016 (WPP 715), No. 83/2016 (WPP 716), No. 84/2016 (WPP 717), dan No. 54/2014 (WPP 718).

2017 MSY ditetapkan sebesar 12,54 juta ton (Kepmen KP No 50/2017) yang berasal dari 9 kelompok spesies utama yaitu ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang penaeid, ikan karang, lobster, cumi-cumi, kepiting lumpur dan kepiting biru. Dengan data produksi ikan yang ditangkap, diperkirakan capaian produksi 2019 adalah 55,6 persen dari MSY atau masih di bawah jumlah tangkapan yang lestari yaitu 80 persen.

Kawasan Konservasi Perairan (Marine Protected Areas-MPA) Indonesia

Selama tahun 2015-2019 terjadi peningkatan luas kawasan konservasi perairan setiap tahunnya. Luas kawasan konservasi perairan meningkat dari 17,30 juta ha pada tahun 2015 (melebihi target 16,5 juta ha) menjadi 23,14 juta ha (2019). Capaian tersebut melebihi dari target RPJMN 2015-2019 yaitu luasan kawasan konservasi perairan 20 juta ha pada tahun 2019 (Gambar 2).



Gambar 01. Luas kawasan konservasi perairan tahun 2015-2019

Peningkatan luas dan efektivitas kawasan konservasi perairan dilakukan agar wilayah konservasi tersebut terjaga sebagai tempat pemijahan (*nursery ground*) dan tempat ruaya (*spawning ground*) sehingga ikan-ikan yang bernilai ekonomis dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Peningkatan nilai manfaat area konservasi perairan juga dilakukan melalui kegiatan budidaya, pariwisata bahari, dan penelitian serta pendidikan. Izin pemanfaatan tersebut diberikan kepada masyarakat lokal, adat, dan swasta sesuai dengan daya dukung dan aspek kelestarian lingkungan. Pengelolaan area konservasi yang seimbang dengan pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan Pedoman Pemanfaatan Zonasi Perikanan Berkelanjutan di Kawasan Konservasi. Selain upaya untuk meningkatkan luas MPA, juga dilakukan kualitas pengelolaan MPA dengan mengembangkan alat untuk mengukur efektivitas manajemen MPA yang disebut dengan e-KKP3K. E-KKP3K telah digunakan secara rutin, termasuk untuk memberikan penghargaan kepada pengelola MPA lokal.

Penanganan IUU Fishing

Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya penanganan *Illegal, Unreported, dan unregulated (IUU Fishing)* dan kegiatan perikanan yang merusak baik yang dilakukan kapal perikanan yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini diukur melalui kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan perijinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Pada tahun



2019, angka kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan mencapai 93,57% atau 107,55% dari target 87%. Upaya tersebut didukung dengan operasional kapal pengawas perikanan, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan.

Kebijakan dan Instrumen Terkait Pelaksanaan UNCLOS

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui UU No. 17/1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PPB tentang Hukum Laut). Selanjutnya Indonesia juga telah menetapkan UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS.

Indonesia juga telah menetapkan UU No. 1/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang ini berisi antara lain tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan suatu pengorganisasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Nelayan yang terlindungi dengan Program Asuransi Nelayan.

Capaian asuransi nelayan tahun 2016 asuransi nelayan mencapai 409.498 orang dengan premi Rp. 175.000 per orang. Pada tahun 2019 capaian asuransi nelayan mencapai 150.000 orang nelayan atau 100% dari target 150.000 nelayan dan total premi mencapai Rp. 21.000,00 juta. Secara total, selama periode 2015-2019, jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan asuransi adalah sebanyak 1.198.177 nelayan.

Indonesia perlu terus melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil.

Seiring dengan penetapan tata ruang dan kawasan, zonasi pesisir dan penetapan MSY dan pemanfaatan ekonomi area konservasi secara berkelanjutan, telah dilakukan pula landasan hukum untuk melindungi nelayan kecil. UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mengatur beberapa dukungan untuk nelayan kecil, antara lain: (a) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (b) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (d) menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (e) menumbuhkan kembangkan sistem, serta kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (f) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan (g) memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta

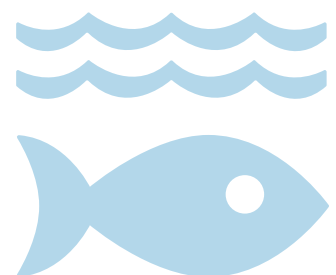


bantuan hukum. Secara operasional, diterbitkan Instruksi Presiden No. 15/2011 tentang Perlindungan Nelayan, yang menugaskan pada instansi pemerintah terkait untuk membuat program-program yang mengangkat kesejahteraan nelayan kecil, berupa bantuan asuransi, sertifikasi hak atas tanah nelayan, pembentukan koperasi, dan sistem informasi untuk nelayan. Pemberian asuransi nelayan telah mencapai target yang ditetapkan per tahun, namun masih perlu dilakukan peningkatan upaya perlindungan atau pemberian asuransi nelayan sehingga dapat mencakup seluruh nelayan, serta mendorong keberlanjutan upaya perlindungan tersebut secara mandiri.

B. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Berbagai tantangan yang muncul dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan, serta upaya mengatasinya antara lain sebagai berikut:

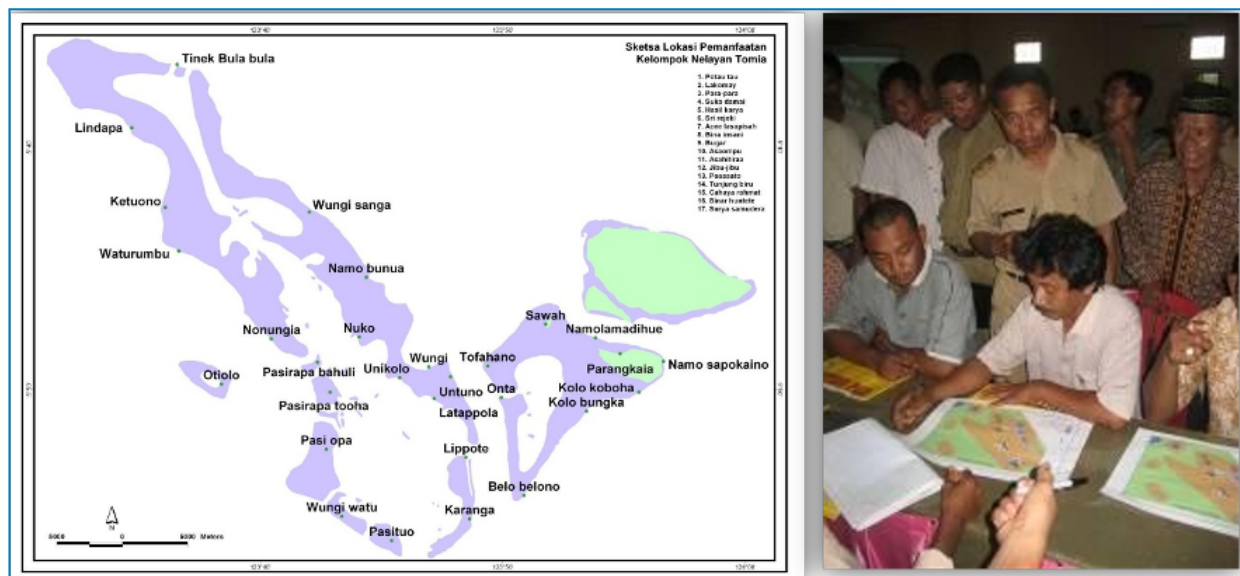
1. 11 WPP yang telah ditetapkan masih memerlukan peningkatan pengelolaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan perlu dikelola secara lebih efektif. Hal ini membutuhkan upaya peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.
3. Belum termanfaatkannya potensi produksi perikanan dengan masih adanya peningkatan pemberantasan *IUU fishing*. Untuk itu diperlukan dukungan ketersediaan sarana prasarana dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam memanfaatkan potensi perikanan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing secara illegal.
4. Dalam memberikan bantuan kepada nelayan kecil perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya ikan sehingga tidak berdampak terjadinya *over fishing*. Penyusunan regulasi yang tepat dalam mengatur pemanfaatan bantuan pendanaan bagi nelayan skala kecil yang tetap dapat menjaga pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan merupakan hal yang perlu diwujudkan.
5. Pengoptimalan kapasitas perikanan baik dalam hal produktivitas dan kualitas hasil tangkapan, mempromosikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, memperkuat rantai pasokan dan mekanisme penelusurannya, meningkatkan keandalan data untuk penilaian stok dan langkah-langkah manajemen terkait, melakukan inklusif tata kelola perikanan baik di tingkat WPP, nasional dan regional.



III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat.

Berbagai upaya yang patut di apresiasi dari kalangan organisasi masyarakat sipil dalam melestarikan dan mengelola perikanan yang berkelanjutan seperti yang dilakukan oleh KOMUNTO (Komunitasi Nelayan Tomia). KOMUNTO merupakan perkumpulan nelayan kecil di Pulau Tomia (salah satu pulau di Taman Nasional WAKATOBI) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya perikanan berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal setempat. Melalui organisasi ini masyarakat nelayan kecil telah mampu menetapkan zonasi perikanan berkelanjutan sebagai “Bank Ikan”, terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan Taman Nasional Wakatobi, pelestarian mangrove serta mendorong kelompok nelayan perempuan untuk membuat olahan ikan sebagai produk makanan. Saat ini telah terbentuk 28 kelompok nelayan dan dua stasiun radio serta KOMUNTO sedang mempersiapkan Rumah Belajar bagi masyarakat dan nelayan kecil untuk mengembangkan kapasitas anggota dalam berorganisasi dan tempat untuk saling berbagi informasi mengenai pelestarian Taman Nasional WAKATOBI.



Gambar 03. Penetapan lokasi pemanfaatan pesisir dan laut untuk kelompok nelayan KOMUNTO.

Startup untuk nelayan kecil yang lebih baik.

Upaya lain datang dari anak muda, kaum millennial yang menciptakan suatu aplikasi “startup” ARUNA yang bertujuan untuk mendekatkan rantai pasok antara nelayan dan konsumen sehingga nelayan mendapat kepastian pasar dan harga yang lebih baik dan pembeli mendapat produk dengan kualitas yang sesuai. Dengan mengusung visi “Making the Sea a Better livelihood for all” ARUNA telah berhasil menghubungkan lebih dari 2 ribu mitra nelayan dengan konsumen di 16 provinsi. Angka ini akan terus bertambah seiring dengan perluasan jaringan ARUNA di seluruh Indonesia.

Integrated Fisheries Commerce

Online Trading Apps For Fisherman And Customer

We believe with technology and innovation, we can help to create a fair fish trading, improve the livelihood of local fisherman, also bring an affordable and high-quality seafood for customers

Nelayan Aruna

Mobile App for Fisherman Group Partners to sell their seafood products to Customer directly.

[Download Now](#)

Aruna E-Commerce

Mobile App for Customer and Buyer to Find High-Quality Seafood Supply from Fisherman.

[Request for Access.](#)

Gambar 03. Startup Aruna.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Sejalan dengan tantangan yang dihadapi serangkaian arah kebijakan telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai berikut :

1. Menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir. Hal ini didukung dengan melakukan penilaian stok perikanan komprehensif secara teratur di 11 lokasi WPP, mengembangkan Platform Perikanan Berkelanjutan untuk semua pemangku kepentingan, dan penataan perizinan.
2. Mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan serta perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya.
4. Meningkatkan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
5. Mencegah dan memulihkan kerusakan sumber daya laut melalui konservasi dan merehabilitasi kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan pencegahan pencemaran laut.
6. Memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, dan merusak (*IUU Fishing dan Destructive Fishing*).

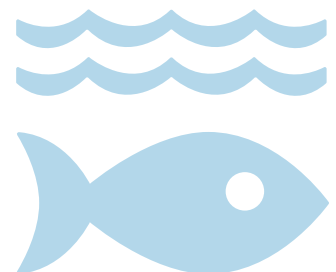
V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

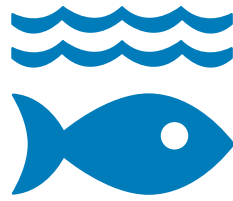
TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.</p>							
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	KKP	Dokumen (PP)	-	-	1	●
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	KKP	WPP	5	11	11	●
<p>Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.</p>							
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	KKP	% (Target dibagi dengan MSY)	80	≤80	56,11	●
<p>Target 14.5, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.</p>							
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	KKP	Juta Ha	17,3 (capaian 2015)	20	23,14	●
<p>Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i>.</p>							
14.6.1(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	KKP	%	66	87	93,57	
<p>Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.</p>							
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	KKP	Regulasi/ Kebijakan	3	-	3	●
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	KKP	lokasi	34	34	34	●

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	KKP	orang	409.498 (2016)	150.000	150.000	●
Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin							
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (<i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i>).	KKP	Dokumen Ratifikasi	1	-	-	●





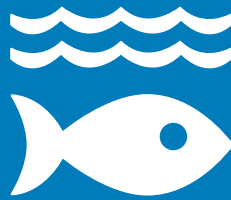
DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas (2020) Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024
- Bappenas (2018) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia
- Permen Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.47/MEN/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Komunitas Nelayan Tomia (KAMUNTO), Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Pulau Wakatobi, Indonesia. Dipaparkan pada *Breakout Session SDGs Annual Conference 2019*. 8 Oktober 2019, Hotel Fairmont, Jakarta.
- Farid Naufal Aslam (Cofounder/CEO Aruna). *Improving the livelihood of small-scale Fisherman using Integrated- Innovation Technology*. Dipaparkan pada *Breakout Session SDGs Annual Conference 2019*. 8 Oktober 2019, Hotel Fairmont, Jakarta.
- KKP (2020) *Indonesia's Contribution on sustainable fisheries and conserve of coastal and marine areas for A better sustainable world*. Dalam Better World Vol 6. SDGs Goal 14.
- OJK (2020) Asuransi Sektor Kelautan dan Perikanan, Dipaparkan pada *Webinar* dengan tema "membangun Kembali Industri & Masyarakat Perikanan yang lebih Tangguh Pasca Pandemi". 15 Mei 2020.





We support the Sustainable Development Goals

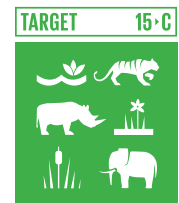
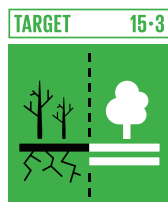


We support the Sustainable Development Goals

15 EKOSISTEM DARATAN



Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati



I. PENDAHULUAN

Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 15 yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam pelaksanaannya Tujuan 15 di arahkan untuk mengelola dan melestarikan ekosistem daratan secara berkelanjutan diantaranya: (1) Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya; (2) Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan (3) Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis; dan (4) Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi..



II. STATUS CAPAIAN

- Perubahan tutupan hutan dapat menyebabkan laju deforestasi semakin meningkat. Perubahan ini dipicu oleh kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga menyebabkan hilangnya tutupan hutan. Sampai tahun 2018 proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan mencapai 49,8%. Dengan capaian ini diprediksi target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 50,6 % akan tercapai.
- Selama kurun waktu 2015-2019, luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan capaian selama tahun 2019 sebesar 84.067,08 Ha. Walaupun angka yang diperoleh masih berada di bawah target sebesar 100.000 Ha, namun kawasan yang dipulihkan kondisi ekosistemnya terus diupayakan mengalami kemajuan.
- Pada tahun 2018, luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem mencapai 622.861,59 Ha. Nilai yang dicapai telah memenuhi target capaian 2019 sebesar 500.000 Ha. Angka luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem diperoleh dari ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi (IUPHHK-RE).
- Selama kurun waktu 2015-2019, jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks Management effectiveness Tracking Tool (METT) minimal 70% terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mendapat nilai METT minimal 70% telah mencapai 255 KPA. Nilai METT merupakan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan penilaian elemen-elemen utama yang mencakup konteks, perencanaan, alokasi sumberdaya (input), kegiatan pengelolaan (proses), produk dan jasa (output) dan dampaknya (outcome).
- Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terbagi dalam tiga kategori yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Selama tahun 2019 seluruh target telah dicapai yang dicerminkan dari capaian jumlah KPHK dan KPHL serta KPHP yaitu sebanyak 106 KPHK dari target yang direncanakan sebesar 100 KPHK, dan KPHL sebesar 190 KPHL dari target yang direncanakan sebesar 182 KPHL serta KPHP tercatat sebesar 347 dari target yang direncanakan sebesar 347 KPHP.
- Selama kurun waktu 2015-2019, jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, penambahan spesies mencapai 24 spesies. Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2019 sebanyak 10 spesies.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

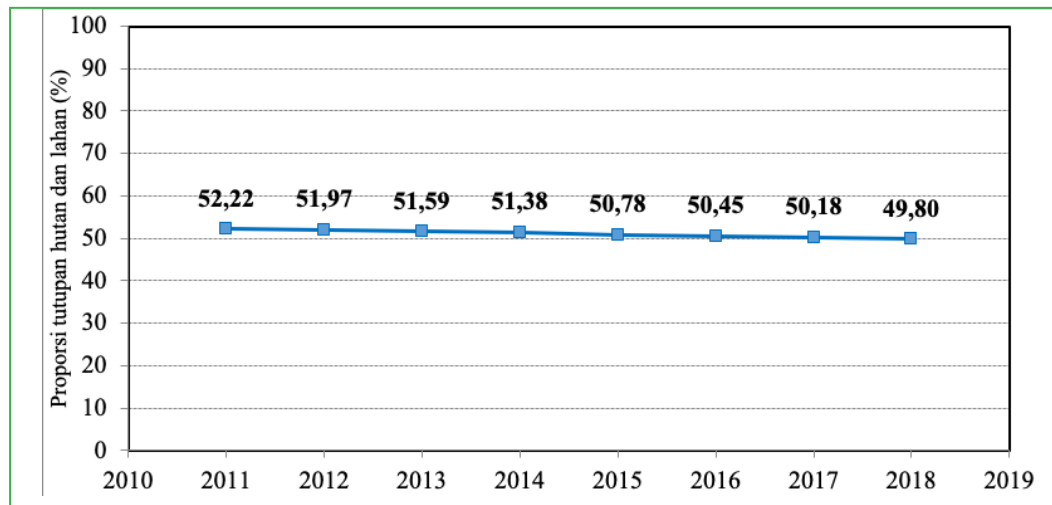
TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</p>							
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan.	KLHK	%	50,6	50,6	48,7 (2018)	
<p>Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.</p>							
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.	KLHK	Ha	10.000	100.000	84.067,08	
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	KLHK	Ha	100.000	500.000	622.067 (2018)	
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	KLHK	KPA	20	260	255	
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	KLHK	KPHK	20	100	106	
			KPHL	40	182	190	
			KPHP	40	347	347	
<p>Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.</p>							
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	KLHK	%	2	10	12,48	
<p>Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.</p>							
15.6.1*.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	KLHK	PIC	1	10	63	
			Unit	1	1	1	

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidup liar secara ilegal.							
15.7.1.(a).	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	KLHK	%	75	75	a. Operasi peredaran TSL=104 kasus P-21 b. Operasi pemulihan Kawasan hutan = 11 kasus P-21 c. Operasi pembalakan liar = 65 kasus P-21	▶
15.7.1.(b).	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	KLHK	spesies	2	10	24 (2018)	●
Target 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.							
15.8.1.(a).	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Kementan	Doku- men Karan- tina Hewan	3	3	4	●
			Doku- men Karan- tina Tum- buhan	3	3	29	●
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.							
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	KLHK	Doku- men	3	2	38 (2018)	●
Target 15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.							
15.c.1.(a).	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	KLHK	%	75	75	a. Operasi peredaran TSL=104 kasus P-21 b. Operasi pemulihan Kawasan hutan = 11 kasus P-21 c. Operasi pembalakan liar = 65 kasus P-21	▶

Tutupan Hutan dan Lahan.

Tutupan hutan dan lahan merupakan indikator utama dalam menentukan tingkat kerusakan hutan dan lahan di Indonesia. Penurunan tutupan hutan dan lahan diantaranya dapat memicu terjadi kelangkaan air dan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh berkurangnya luas habitat spesies. Dalam kurun waktu 2011-2018, luas tutupan hutan dan lahan Indonesia terus mengalami penurunan. Secara nasional proporsi tutupan hutan dan lahan menurun dari 52,22% (2011) menjadi 49,80% (2018) (Gambar 1). Hal ini disebabkan berbagai faktor baik akibat kegiatan manusia maupun kejadian bencana yang semakin menekan luas tutupan hutan dan lahan di Indonesia.



Gambar 01. Proporsi tutupan hutan dan lahan tahun 2011-2018.

Pengelolaan Hutan Lestari.

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan memberikan banyak nilai manfaat yang tidak ternilai bagi keberlangsungan kehidupan. Nilai manfaat yang paling optimal akan diperoleh jika hutan dikelola secara lestari. Pengelolaan hutan secara lestari dapat dilakukan melalui pemulihan ekosistem hutan yang terdegradasi dalam kawasan konservasi, pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem, peningkatan kawasan konservasi yang mendapat nilai indeks METT minimal 70% dan peningkatan jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 84.067,08 Ha. Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem mencapai 622.861,59 Ha (2018) dan kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70% mencapai 255 kawasan. Sementara jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tahun 2018 mengalami peningkatan pada masing-masing jenis KPH, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) sebanyak 106, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 190 dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 347.



Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan aset negara yang menjadi tanggungjawab bersama untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Untuk menjaga keanekaragaman hayati pemerintah berupaya melakukan penyelamatan terhadap tumbuhan dan satwa liar melalui sistem penangkaran baik dalam Lembaga Konservasi.

Lembaga Konservasi merupakan lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*) baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya serta berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi *in-situ*. Selama 2018 tercatat jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 24 spesies dari 10 target selama tahun 2019.

Peningkatan Persentase 25 Jenis Satwa Terancam Punah

Upaya peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati bertujuan untuk meningkatkan persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah sebesar 10% pada tahun 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen KSDAE No. 180/IV-KKH/2015 dua puluh lima spesies tersebut adalah Harimau Sumatra, Gajah Sumatra, Badak *Rhinoceros Sondaicus*, Banteng Jawa, Owa Jawa, Orangutan, Bekantan, Komodo, Jalak Bali, Maleo, Babi Rusa, Anoa, Elang, Kakatua, Macan Tutul, Rusa Bawean, Cendrawasih, Surili, Tarsius, Monyet hitam Sulawesi, Julang Sumba, Nuri Kepala Hitam, Penyu, Kanguru Pohon, dan Celepuk Rinjani. Selama tahun 2019 Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas hanya mencapai 24% dari target sebesar 10%.

Peningkatan Persentase 25 Jenis Satwa Terancam Punah

Ancaman dan gangguan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan berasal dari kegiatan perambahan, penebangan liar, perburuan/perdagangan fauna dan atau flora secara illegal, kebakaran hutan, pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat illegal lainnya. Guna menahan laju tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup telah dilakukan berbagai upaya premitif, preventif, represif dan yustisi melalui penanganan pengaduan, pengawasan izin, pencegahan dan pengamanan hutan (PPH), penyelesaian sengketa lingkungan hidup (PSLH) dan penegakan hukum pidana (PHP). Selama tahun 2018 jumlah penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi dibagi dalam tiga operasi dengan penegakan hukum lingkungan yaitu operasi peredaran tanaman dan satwa liar dengan 104 kasus P21, operasi pemulihan kawasan hutan dengan 11 kasus P21 dan operasi pembalakan liar dengan 65 kasus. Dengan demikian total kasus yang tertangani sampai dengan dengan P21 sebanyak 180 kasus.

B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	KLHK	Ha	1.250.000	5.500.000	1.183.581	▼

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Kerusakan lingkungan terutama pada ekosistem daratan disebabkan masih terdapatnya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin, serta penguasaan hutan non-prosedural. Selain itu, terjadinya penyusutan luas habitat ideal satwa langka terancam punah di empat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi) yang didorong oleh peningkatan luas perkebunan monokultur yang semakin menekan tutupan hutan dan dapat mengakibatkan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati apabila tidak segera dilakukan penanganan. Kendala lain yang dihadapi dalam pemulihan ekosistem penyelesaian status penguasaan lahan (*clear and clean*) sehingga konflik lahan dapat dihindari.

III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Pengendalian Kebakaran Hutan Berbasis Komunitas.



Dalam 3 tahun periode awal SDGs, luas kebakaran hutan lahan di seluruh wilayah Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan penghitungan dengan citra satelit landsat, pada tahun 2015 luas total kebakaran mencapai 2.611.411 ha, yang terdiri dari 891.275 ha berupa lahan gambut dan 1.720.136 berupa lahan mineral. Selanjutnya pada tahun 2018 luas total kebakaran hutan dan lahan mencapai 510.564 ha yang terdiri dari 125.340 ha berupa lahan gambut dan 385.224 ha berupa lahan mineral.

Jumlah hotspot di Indonesia juga mengalami penurunan. Berdasarkan pantauan satelit Terra/Aqua (NASA) Tahun 2015 total hotspot mencapai 70.971 titik sedangkan tahun 2018 berjumlah 9.245 titik. Jumlah desa jangkauan terus ditingkatkan untuk memperluas deteksi dini, respon cepat dan peningkatan kepedulian. Tahun 2018, sebaran patroli terpadu menjangkau 72 kabupaten, 349 kecamatan, 1255 desa pada 8 provinsi rawan kebakaran hutan di Indonesia. Sebaran desa disesuaikan dengan tingkat kerawan yang datanya dipantau citra satelit. Waktu pelaksanaan patroli disesuaikan dengan analisis bersama Badan Meteorologi dan Geofisika.

Secara parallel kapasitas masyarakat juga ditingkatkan dengan mendorong pengolahan lahan tanpa bakar serta upaya preventif dengan mempertahankan water level melalui restorasi gambut.



Pengendalian kebakaran hutan.



Pengecekan koordinat titik api



Keterlibatan perempuan dalam pemadam kebakaran hutan

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Serangkaian kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 untuk pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan meliputi :

1. **Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (1) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (3) Memulihkan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (4) Memulihkan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut; (5) Memulihkan habitat spesies terancam punah; serta (6) Meningkatkan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah.
2. **Pengurangan laju deforestasi di Indonesia**, melalui: (1) Menata ulang alokasi kawasan hutan Indonesia; (2) Menggunakan teknologi dan informasi dalam penggunaan lahan dan kawasan hutan menuju *Forestry 4.0*; (3) Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif pengelolaan hutan; (4) Meningkatkan hak akses kelola masyarakat dalam mengelola hutan
3. **Pengurangan laju degradasi hutan** dengan (1) Melanjutkan kebijakan moratorium penundaan izin atau konsesi penggunaan hutan primer; (2) Mengoptimalkan pemanfaatan hutan tanaman; dan (3) Melanjutkan kebijakan perlindungan gambut.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</p>							
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan.	KLHK	%	50,6	50,6	48,7 (2018)	▶
<p>Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.</p>							
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	KLHK	Ha	10.000	100.000	84.067,08	▶
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	KLHK	Ha	100.000	500.000	622.067 (2018)	●
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	KLHK	KPA	20	260	255	▶
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	KLHK	KPHK	20	100	106	●
			KPHL	40	182	190	●
			KPHP	40	347	347	▶
<p>Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.</p>							
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	KLHK	Ha	1.250.000	5.500.000	1.183.581	▼
<p>Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.</p>							
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	KLHK	%	2	10	12,48	●
<p>Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.</p>							
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	KLHK	PIC	1	10	63	●
			Unit	1	1	1	●

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.</p>							
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	KLHK	%	75	75	a. Operasi peredaran TSL=104 kasus P-21 b. Operasi pemulihan Kawasan hutan = 11 P-21 c. Operasi pembalakan liar = 65 kasus P-21	
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	KLHK	spesies	2	10	24 (2018)	
<p>Target 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.</p>							
15.8.1.(a).	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Kemen-tan	Doku- men Karanti- na Hewan	3	3	4	
			Doku- men Karanti- na Tum- bunan	3	3	29	
<p>Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.</p>							
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keane- karagaman hayati	KLHK	Doku- men	3	2	38 (2018)	
<p>Target 15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.</p>							
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	KLHK	%	75	75	a. Operasi peredaran TSL=104 kasus P-21 b. Operasi pemulihan Kawasan hutan = 11 kasus P-21 c. Operasi pembalakan liar = 65 kasus P-21	



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Statistik Kementerian Lingkungan dan Kehutanan*. KLHK: Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Laporan Kinerja Direktorat Kawasan Konservasi*. KLHK: Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Data dan Informasi Galeri KPH*. <http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/pencarianfoto>
- Kementerian PPN/Bappenas, 2019. *Voluntary National Review Sustainable Development Goals*. Kementerian PPN/Bappenas: Jakarta.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018. *Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Lampiran II Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) 2017-2019*. Kementerian PPN/Bappenas, 2018. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024*. 2020. Jakarta.

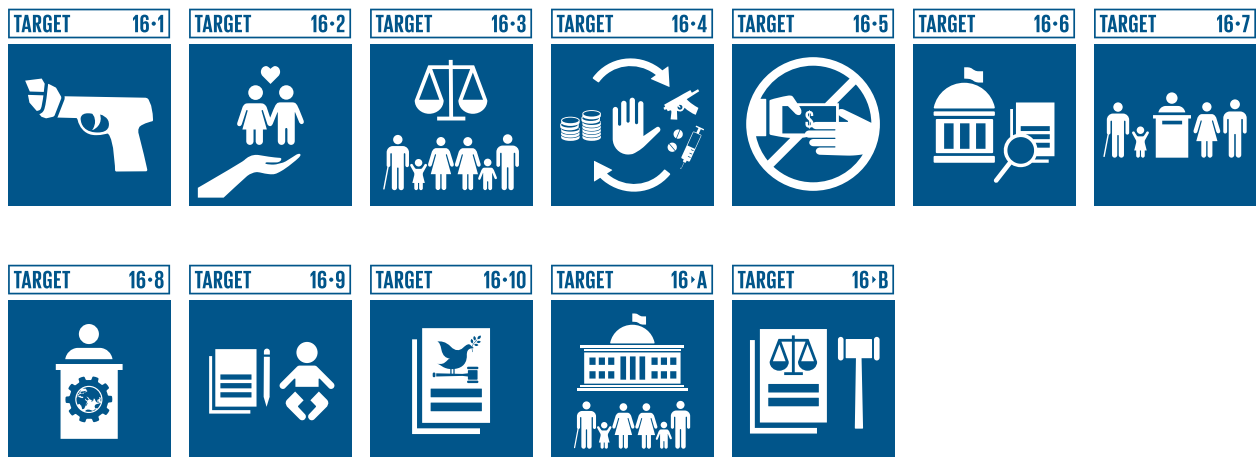


We support the Sustainable Development Goals

16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH



Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan



I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) untuk Tujuan 16 pada dasarnya merupakan sebuah sudut pandang dalam membangun perdamaian, menciptakan keadilan yang merata untuk seluruh pihak, serta mengembangkan kelembagaan yang tangguh. Hal tersebut merupakan sebuah dasar upaya untuk mempercepat kemajuan dari Tujuan TPB/SDGs lainnya serta untuk meningkatkan pencapaian keseluruhan Tujuan dari prinsip utama TPB/SDGs yaitu *“no one left behind”*. Tanpa adanya perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh maka akan sulit mencapai Tujuan lainnya dalam TPB/SDGs, sehingga Tujuan 16 seringkali disebut dengan istilah tujuan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tujuan lainnya dalam TPB/SDGs (*enabler goals*).

Tujuan 16 dapat memberikan sebuah kerangka agar pembangunan menjadi perhatian seluruh sektor dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan dan mengatasi ketimpangan. Setidaknya terdapat lima landasan utama dalam menjalankan Tujuan 16 yaitu (i) penyusunan kebijakan dan tata kelola pemerintahan serta penegakan hukum yang berbasis pada bukti dan data yang bebas dari korupsi dan diskriminasi; (ii) pencatatan sipil yang merangkul seluruh peristiwa lahir, mati, migrasi, kawin



dan cerai, tanpa diskriminasi; (iii) mekanisme untuk mencegah, mendeteksi serta menangani kekerasan di dalam masyarakat dan khususnya terhadap anak dan kelompok rentan; (iv) pengadilan yang inklusif dan bantuan hukum yang tersedia hingga di tingkat lokal; dan (v) keterbukaan informasi publik yang mudah diakses seluruh pihak. Hal tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan ke dalam 10 target dan 34 indikator dalam TPB/SDGs di Indonesia, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

TARGET	DESKRIPSI
Target 16.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir 2. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk 3. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir 4. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
Target 16.2	<ol style="list-style-type: none"> 5. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir 6. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan 7. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
Target 16.3	<ol style="list-style-type: none"> 8. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi 9. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi 10. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum 11. Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.
Target 16.5	12. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Target 16.6	<ol style="list-style-type: none"> 13. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; 14. Persentase peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); 15. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota); 16. Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan; 17. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota); 18. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Target 16.7	<ol style="list-style-type: none"> 19. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 20. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II); 21. Indeks Lembaga Demokrasi; 22. Indeks Kebebasan Sipil; 23. Indeks Hak-Hak Politik.

Target 16.9	24. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur; 25. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah; 26. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
Target 16.10	27. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); 28. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan; 29. Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi; 30. Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 31. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi; 32. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Target 16.A	33. Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.
Target 16.B	34. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

II. STATUS CAPAIAN

Tujuan 16 merupakan salah satu tujuan dalam TPB/SDGs yang cukup menantang dalam hal implementasi dan pengukuran data. Dalam konteks Indonesia, Tujuan 16 terdiri dari 10 target dan 34 indikator, yang terdiri dari 5 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, 20 indikator nasional sebagai proksi indikator global, dan 9 indikator nasional sebagai tambahan indikator global, sedangkan 2 target yang terdiri dari satu indikator yang tidak relevan untuk Indonesia serta 2 indikator yang masih perlu dicermati ketersediaan datanya.

Capaian pada Tujuan 16 yang sudah cukup baik ditunjukkan oleh akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan. Capaian lainnya yang cukup baik adalah persentase kepemilikan akta kelahiran untuk anak yang menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Selain itu, capaian yang cukup baik dari Tujuan 16 ini adalah pada bagian tata kelola pemerintahan, yaitu terkait peningkatan capaian indikator proporsi pengeluaran pemerintah terhadap anggaran yang disetujui serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain pencapaian yang sudah cukup baik pada Tujuan 16, masih terdapat beberapa indikator yang membutuhkan perhatian yang serius dalam usaha pencapaian keberhasilan Tujuan 16 di antaranya seperti proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian yang menunjukkan kecenderungan menurun. Indikator yang juga harus mendapatkan perhatian yang serius adalah kekerasan terhadap anak dimana ketersediaan data yang dimiliki saat ini masih perlu lebih konsisten agar progres intervensi serta upaya pencegahan dapat dinilai. Indikator lainnya yang juga perlu

untuk lebih memperhatikan mengenai keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif yang menduduki posisi sebagai Eselon I maupun Eselon II yang masih sangat rendah bahkan menunjukkan kecenderungan menurun”.

Di antara berbagai capaian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Tujuan 16, yaitu pemberantasan korupsi yang belum optimal, serta pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif. Keterwakilan perempuan yang menduduki posisi atau jabatan sebagai pengambil keputusan di lembaga legislatif masih perlu ditingkatkan. Dalam hal keterbukaan informasi publik, masih banyak Badan Publik yang belum mencapai kategori informatif. Bahkan, lebih dari 50% Badan Publik yang dievaluasi, masuk ke dalam kategori tidak informatif.

Berikut pembahasan mendalam untuk beberapa capaian indikator (*highlight*) yang telah mengalami kemajuan, yang masih memerlukan perhatian khusus serta beberapa indikator yang datanya masih belum tersedia.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

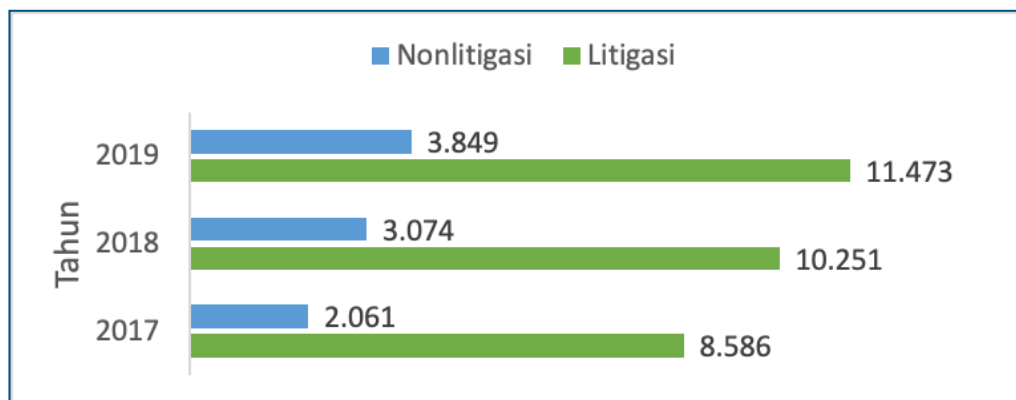
Akses Bantuan Hukum di Indonesia Menunjukkan Kecenderungan Meningkat.

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.							
16.3.1 (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non-litigasi	BPHN	Orang	litigasi 3.450; nonlitigasi 259 (2015)	litigasi 5.425; nonlitigasi 722 kegiatan ¹	litigasi 11.473 orang; non litigasi 3.849 kegiatan (2019)	
16.3.1 (c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Badilag, Badilum dan Badimiltun Mahkamah Agung	Perkara	Sidang di luar gedung pengadilan dan Pos layanan hukum: 119.175; Pembebasan biaya perkara 114.122 (2015)	Sidang di luar gedung pengadilan: 55.665; Pembebasan biaya perkara: 3.200; Pos layanan hukum 96.500	Sidang di luar pengadilan: 48.628 Pembebasan biaya perkara: 19.377 Pos Layanan Hukum: 312.436 jam layanan (2019)	

¹ RKP KemenkumHAM 2019

Menerjemahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ke dalam penyelenggaraan yang efektif adalah proses transformasional dengan sejumlah pencapaian selama delapan tahun terakhir. Melalui UU ini, pemerintah telah melibatkan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk memberikan pelayanan bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menjadi pelaksana kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh mekanisme kerjasama kelembagaan bantuan hukum.

Setidaknya hingga tahun 2019, anggaran bantuan hukum secara nasional telah membantu ribuan pendampingan hukum bagi orang miskin dan rentan. Kurang lebih terdapat 524 organisasi bantuan hukum yang telah menerima anggaran dan telah membantu mendampingi setidaknya 11.473 orang miskin dalam proses litigasi dan 3.849 orang miskin dalam proses nonlitigasi.



Gambar 01. Jumlah Penerima Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi, 2017-2019.

Sumber: BPHN

Dalam bidang peradilan, sepanjang tahun 2017 dan 2019, jumlah pelayanan peradilan yang telah diberikan negara bagi masyarakat tidak mampu melalui sidang di luar pengadilan sebanyak 150.490 orang, pos bantuan hukum telah melayani sebanyak 690.429 orang, dan pembebasan biaya perkara sebanyak 35.771 orang. Hingga saat ini, berbagai layanan tersebut tetap menjadi prioritas dalam kebijakan Mahkamah Agung.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Yang Semakin Efektif dan Transparan.

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Kementerian Keuangan	%	91.05% (2015)	PM	93,83 (2019)	●

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
16.6.1 (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	%	K/L: 65 Provinsi: 85 Kabupaten: 54 Kota: 65 (2015)	K/L: 95 Provinsi: 85 Kabupaten: 60 Kota: 65	K/L: 94 Provinsi: 94 Kabupaten: 79 Kota: 90 (2018)	

Praktek tata kelola yang baik di pemerintahan salah satunya dinilai melalui tingkat akuntabilitas laporan keuangan lembaga serta aspek perencanaan dan penganggaran. Pada pelaksanaannya, pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan tingkat realisasi anggaran yang tinggi yaitu sebesar 93,83% pada tahun 2019 dan opini Wajar Tanpa Pengencualian (WTP) atas laporan keuangan.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
94,69%	91,05%	89,50%	94,10%	99,66%	93,83%

Tabel 01. Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran yang Disetujui.

Sumber: Kementerian Keuangan

Jumlah Instansi Pemerintahan yang menerima opini WTP dari audit keuangan negara terjadi peningkatan dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018 pada berbagai tingkatan administrasi pemerintahan. Namun yang menjadi catatan adalah capaian tingkat Pemerintahan Kabupaten menempati persentase terendah pada penilaian WTP jika dibandingkan dengan pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota pada tahun 2018.

Tingkat Administrasi	2014	2015	2016	2017	2018
Tingkat Nasional	58%	65%	84%	91%	94%
Tingkat Provinsi	76%	85%	91%	97%	94%
Tingkat Kota	60%	65%	77%	86%	90%
Tingkat Kabupaten	41%	54%	66%	72%	79%

Tabel 02. Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Sumber: BPK

Pemenuhan Akta Kelahiran Bagi Seluruh Masyarakat Menunjukkan Kecenderungan Meningkat.

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

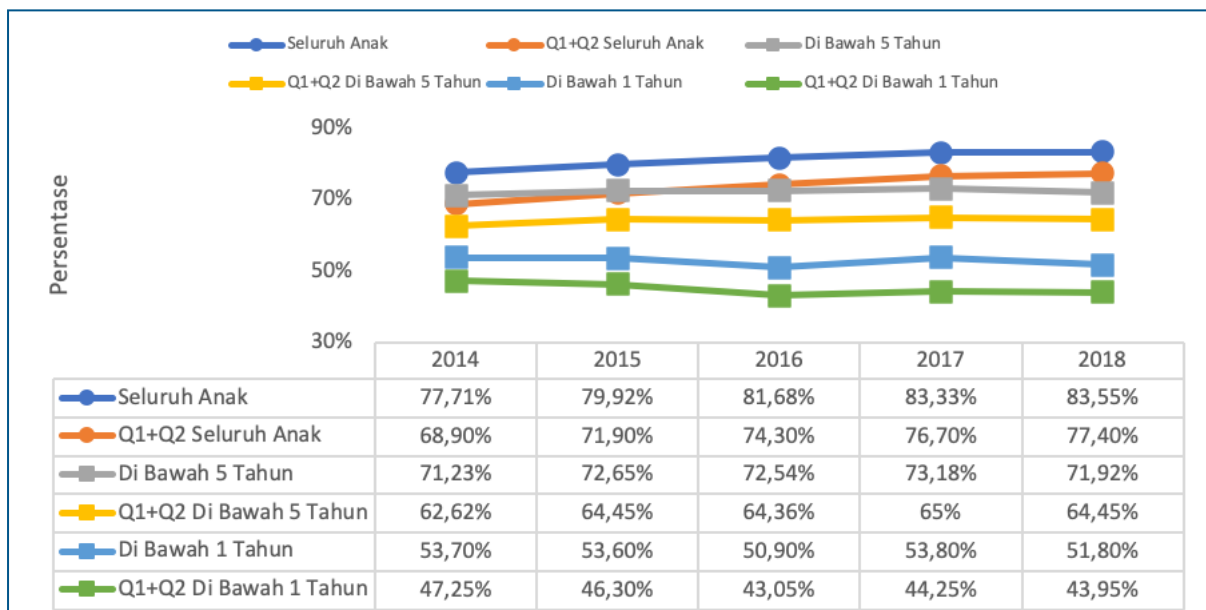
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Susenas BPS	%	72,65 (2015, Susenas BPS)	NA	76,65 (2019, Susenas BPS)	●
16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Susenas (BPS)	%	71,59 (2015 Susenas BPS)	77,4 (RPJMN)	80,44 (Susenas BPS, 2019)	●
16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Susenas (BPS)	%	79,92 (2015)	85	86,01 (2019, BPS)	●

Identitas hukum menandai pengakuan dan perlindungan paling mendasar negara atas keberadaan seseorang, yang dimulai dengan dicatatnya kelahiran seseorang secara resmi. Dalam hal ini, anak-anak yang kelahirannya tercatat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengakses layanan dasar yang berperan penting menentukan kualitas hidup mereka ke depan, seperti pendidikan, pekerjaan, mendapat akses kesehatan dan bantuan sosial pemerintah lainnya untuk peningkatan kesejahteraan.

Pada tahun 2019, tercatat 86.01% anak usia 0-17 telah memiliki akta kelahiran atau terjadi peningkatan cakupan akta kelahiran dalam lima tahun terakhir dari 79.92% (2015) menjadi 86.01% (2019, BPS). Bagi anak-anak yang lahir di rumah tangga dua kuintil terbawah (40% termiskin), cakupan akta kelahiran meningkat dari 71.59% (2015) menjadi 80.44% (2019, BPS) yang berarti telah memenuhi target RPJMN 2015-2019 pada tahun 2018 yaitu 77%. Pencatatan setelah kelahiran juga meningkat untuk anak di bawah umur lima tahun dari 72.65% di 2015 menjadi 76.65% di 2019 (BPS).



Gambar 02. Proporsi Kepemilikan Akta Kelahiran berdasarkan Kelompok Umur dan Status Sosial Ekonomi, 2014-2018.

Sumber: BPS

Peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun seperti yang ditunjukkan oleh gambar diatas menunjukkan bahwa adanya komitmen serta keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam mengejar ketertinggalan agar dapat mencatat semua kelahiran dan memberikan dokumen identitas hukum bagi semua individu melalui kegiatan prioritas Penguatan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan E-Procurement Yang Sudah Mencapai Target

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat							
16.6.1 (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	LKPP	%	27,20 (2015)	80	81,46 (2018)	

Salah satu upaya untuk memperkuat tata kelola dan pencegahan tindakan korupsi, pemerintah Indonesia telah menerapkan penggunaan teknologi untuk proses pengadaan barang atau *e-procurement*. Persentase penggunaan *e-procurement* pada Kementerian/Lembaga telah mencapai 81,46% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa target 2019 telah tercapai.

Indeks Hak-Hak Politik Yang Memenuhi Target Capaian 2019.

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.2 (c)	Indeks Hak-Hak Politik	BPS dan Kemenko Polhukam	Indeks	70,63 (2015)	68	70,71	

Capaian Aspek Hak-Hak Politik dipengaruhi oleh indikator terkait demonstrasi dengan kekerasan dan indikator terkait kepemiluan. Dari tiga indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), hanya Aspek Hak-Hak Politik yang memenuhi target capaian pada tahun 2019 yaitu menjadi 70,71 dari target yang ditetapkan sebesar 68.

Meski beberapa indikator telah mengalami kemajuan, namun terdapat beberapa indikator di Tujuan 16 yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2019, di antaranya sebagai berikut

Mengurangi Tindakan Korupsi dan Penyuaan Dalam Segala Bentuknya.

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuaan dalam segala bentuknya.							
16.5.1 (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS	Indeks	3,59 (2015)	4	3,70 (2019)	

Saat ini Indonesia masih berjuang melawan praktik-praktik korupsi dan diskriminasi yang terus merugikan kelompok rentan. Korupsi masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia telah mengembangkan alat ukur penilaian anti korupsi yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang mengukur tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi, yang datanya mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuaan, pemerasan dan nepotisme. Pada skala tertinggi 5, jika semakin tinggi skornya maka semakin tidak permisif seseorang atas perilaku korupsi atau semakin anti korupsi. Meskipun skor IPAK mengalami kenaikan berdasar survei tahun 2019 yaitu menjadi 3,70 dari baseline sebesar 3.59 pada 2015, namun skor indeks sempat mengalami penurunan menjadi 3,66 pada tahun 2018.

Indeks Persepsi Korupsi tahunan yang diterbitkan oleh *Transparency International* menempatkan Indonesia di peringkat ke-85 (skor 40) pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 di mana Indonesia menduduki peringkat ke 89 dari 180 negara (skor 38), menunjukkan peningkatan nyata persepsi publik tentang apakah korupsi terjadi di antara pejabat publik dan politisi. Selain itu, Indonesia berada di peringkat ke-109 dari 189 ekonomi pada indikator korupsi dalam laporan Doing Business Bank Dunia 2016, pada peringkat yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dalam Laporan Daya Saing *Global World Economic Forum 2015-2016*, korupsi digolongkan sebagai faktor utama yang menghambat kemudahan untuk terlibat dalam bisnis di Indonesia (*Asialink Business*).

Pelaksanaan Kepatuhan UU Pelayanan Publik masih jauh dari target.

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.2 (a)	Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Ombudsman RI	%	Kementerian: 27.27 Lembaga: 20 Provinsi: 9 Kab/Kota: 5.26 (2015)	Kementerian: 100 Lembaga: 100 Provinsi: 100 Kab/Kota: 60	Kementerian: 50 Lembaga: 25 Provinsi: 100 Kabupaten: 33,33 Kota: 33.02 (2019)	

Selain itu, yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Persentase Instansi Pemerintah dengan *pride* Persentase Instansi Pemerintah dengan predikat kepatuhan tinggi (zona hijau) pada berbagai tingkatan administrasi pemerintahan belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2019, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tingkat Administrasi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Nasional (Kementerian)	n/a	27.27% (6 dari 22 Kementerian)	44% (11 dari 25 Kementerian)	35.17% (5 dari 14 Kementerian)	55.56% (5 dari 9 Kementerian)	50% (2 dari 4 Kementerian)
Tingkat Nasional (Lembaga/Badan)	n/a	20% (3 dari 15 Lembaga)	67% (10 dari 15 Lembaga)	33.33% (2 dari 6 Lembaga)	25% (1 dari 4 Kementerian)	100% (3 dari 3 Lembaga)
Tingkat Provinsi	n/a	9.09% (3 dari 33 Provinsi)	39.39% (13 dari 33 Provinsi)	27.27% (6 dari 22 Provinsi)	62.5% (10 dari 16 Provinsi)	33.33% (2 dari 6 Provinsi)
Tingkat Kota	n/a	5,26% (3 dari 50 Kota)	29.09% (16 dari 55 Kota)	33.33% (15 dari 45 Kota)	36.73% (18 dari 49 Kota)	33.33% (12 dari 36 Kota)
Tingkat Kabupaten	n/a	4.69% (3 dari 64 Kabupaten)	17.65% (15 dari 85 Kabupaten)	12.15% (13 dari 107 Kabupaten)	31.66% (63 dari 199 Kabupaten)	33.02% (71 dari 215 Kabupaten)

Tabel 03. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah².

Sumber: Ombudsman RI

B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS.

Lingkungan Yang Aman Dari Kekerasan Mengalami Kecenderungan Menurun

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Susenas Modul Hansos	Persen	73,57 (2014)	PM	53,32% (2017)	▼

²Pelaksanaan penilaian kepatuhan atas UU Pelayanan Publik menggunakan metode survei dengan jumlah sampel instansi pemerintah yang berubah setiap tahunnya

Data tahun 2017, menunjukkan terjadi penurunan sebesar 20% poin dalam proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian di sekitar area mereka tinggal. Angka tersebut menurun dari 73,57% pada 2014 menjadi 53,32% pada 2017 (BPS, SUSENAS). Hal ini tentu saja membutuhkan perhatian yang serius dari seluruh pihak karena salah satu pencapaian dari Tujuan 16 adalah menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat, karena rasa aman pada diri seseorang dapat berpengaruh pada kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Tindak Kekerasan Terhadap Anak Yang Masih Harus Mendapatkan Perhatian Serius.

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak							
16.2.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	BPS	Persen	54,98 (2014) (Anak umur 1-14 tahun)	PM	N/A	N/A
16.2.1 (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	Anak laki-laki: 38,62; Anak perempuan: 20,48 (2013)	Menurun	Anak laki-laki: 61,7% Anak perempuan: 62% (SN-PHAR, 2018)	▼
16.2.3 (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Kementerian Sosial, KPPPA, BPS, BAPPENAS	Persen	Perempuan: 6,28 dan Laki-Laki: 6,37 (2015)	Menurun	Perempuan: 10,4% Laki-laki: 3,1% (SN-PHAR, 2018)	▼

Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan ada sekitar 55% rumah tangga yang memiliki anak berusia 1-14 tahun mengalami hukuman fisik dan/atau serangan psikologis oleh pengasuh mereka selama 12 bulan terakhir (Susenas, Modul Hansos, BPS). Prevalensi kekerasan terhadap anak diperkirakan mencapai 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan pada 2013 (Survei Kekerasan terhadap Anak/SKtA).

Pada 2015, data dari Kementerian Sosial, KPPPA, BPS, dan BAPPENAS mengestimasi 6,28% perempuan dan 6,37% laki-laki berusia 18–24 pernah mengalami kekerasan seksual sebelum berusia 18 tahun (SKtA). Data mengenai proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual

sebelum umur 18 tahun kembali diperbaharui metodologinya melalui Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan remaja (SNPHAR) tahun 2018. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 dan SNPHAR tahun 2018, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang memengaruhi 62% anak perempuan dan 61,2% anak laki-laki berusia 13 hingga 17 tahun dan juga 1 dari 3 (33,4%) anak perempuan berusia 15 hingga 64 tahun.

Masih belum terintegrasinya data dan informasi mengenai kekerasan terhadap anak membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh pihak. Salah satu indikator terkait pengurangan kekerasan terhadap anak yang masih perlu mendapat perhatian serius karena ketidaktersediaan datanya adalah indikator terkait proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. Pemuktahiran data mengenai kasus kekerasan terhadap anak melalui SNPHAR tahun 2018 dilakukan untuk lebih meningkatkan serta menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh anak Indonesia, sehingga dengan demikian kesejahteraan anak akan lebih terjamin.

Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif Mengalami Kecenderungan Menurun.

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKN; Saker-nas BPS	%	Eselon I = 20,66 dan Eselon II = 16,39 (2014)	Meningkat	Eselon I = 18,08 Eselon II = 13,48 (2018)	▼

Pembangunan berkelanjutan yang inklusif juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan wakil dari kelompok rentan yang salah satunya ditunjukkan dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi perempuan secara bermakna di dalam pengambilan keputusan di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk menyuarakan kepentingan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Data BKN menunjukkan bahwa persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintahan pada jenjang Eselon I dan II masih relatif rendah dengan tren yang fluktuatif. Meskipun keterwakilan proporsi Eselon I dan II meningkat, masing-masing dari 16,58% (2018) menjadi 18,08% (2019) dan dari 13,09% (2018) menjadi 13,48% (2019), angka tersebut masih jauh dari capaian yang pernah diraih pada tahun 2014, yaitu masing-masing sebesar 20,66% dan 16,39%.

Tingkat Eselon	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eselon I	20.66%	15,67%	17,98%	15,21%	16,58%	18,08%
Eselon II	16.39%	13,04%	13,41%	13,06%	13.09 %	13,48%

Tabel 04. Persentase keterwakilan perempuan yang mengambil posisi pengambil keputusan di lembaga pemerintah..

Sumber: Badan Kepegawaian Nasional (BKN)

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Demokrasi di Indonesia.

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.1 (a)	Persentase keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD	KPU	Persentase	16,6 DPR RI (2014) 16 DPRD Provinsi (2014) 14 DPRD Kab/Kota (2014)	NA	20,52 DPR RI, 17,53 DPRD Provinsi, 15,27 DPRD Kabupaten/Kota	▶
16.7.2 (a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS dan Kemenko Polhukam	Indeks	66,87 (2015)	79	78,73	▶
16.7.2 (b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS dan Kemenko Polhukam	Indeks	80,30 (2015)	87	77,20	▼

Sejak 2009 Indonesia telah membangun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan pada tahun 2010 Indonesia telah mengembangkan demokrasi berbasis provinsi. Angka IDI dipengaruhi tiga aspek, yaitu Aspek Lembaga Demokrasi, Aspek Kebebasan Sipil, dan Aspek Hak-Hak Politik. Setiap aspek terdiri atas variabel-variabel dan setiap variabel disusun oleh indikator. Peningkatan IDI menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Skor Aspek Kebebasan Sipil dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti indikator kebebasan ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang mempengaruhi kebebasan berkumpul dan berserikat dan tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dan ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat dalam hal gender, etnis, kelompok. Capaian Aspek Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh makin membaiknya peran DPRD, partai politik, dan birokrasi pemerintah daerah. Capaian IDI 2019 merupakan capaian tertinggi dalam sejarah pengukuran IDI. Angka tersebut menunjukkan kinerja demokrasi Indonesia cenderung terus membaik. Secara lebih detail, hal tersebut ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Indeks	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Demokrasi Indonesia	73,04	72,82	70,09	72,11	72,39	74,92
Indeks Lembaga Demokrasi	75,81	66,87	62,05	72,49	75,25	78,73
Indeks Kebebasan Sipil	82,62	80,3	76,45	78,75	78,46	77,20
Indeks Hak-hak Politik	63,72	70,63	70,11	66,63	65,79	70,71

Tabel 05. Nilai dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Sumber: BPS

Selain itu, yang juga mempengaruhi kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia adalah keterwakilan perempuan di parlemen. Tingkat partisipasi politisi perempuan sebagai legislator pada tingkat DPR RI tahun 2019-2024 sebesar 20,5%, pada tingkat DPRD Provinsi rata-rata 18,6%, dan tingkat DPRD Kabupaten/Kota rata-rata 15,2%

Dibandingkan Pemilu 2014, capaian keterwakilan perempuan di Pemilu 2019 mengalami peningkatan, meskipun belum cukup signifikan. Upaya percepatan

peningkatan keterwakilan perempuan perlu menjadi agenda penguatan partai politik, terutama dalam kebijakan afirmasi perempuan.

Hal ini menjadi salah satu instrumen yang dapat mendorong pencapaian kuota representatif perempuan di parlemen sebesar 30%. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencatat hampir 50% peningkatan representatif perempuan dari 2014 hingga 2019 (2.467 perempuan menjadi 3.194). Dari 14 partai politik (parpol), ada 4 parpol yang mencalonkan representatif perempuan terbanyak. Selain itu, partai politik masih perlu menerapkan program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas legislator termasuk legislator perempuan.

Meningkatkan Kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
16.10.2 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	NA	*target akan disesuaikan dengan hasil perumusan skema sertifikasi tahun 2018	N/A	N/A

Terdapat sejumlah kendala dalam pengukuran indikator tersebut. Komisi Informasi Pusat (KIP) belum melakukan sertifikasi bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) karena sebuah lembaga tidak dapat secara langsung mengeluarkan sertifikasi tersebut, melainkan harus melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Hingga saat ini, belum ada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk PPID/Keterbukaan Informasi Publik yang terdaftar di BNSP. Dengan demikian, indikator tersebut disepakati untuk dihapus dalam Tujuan 16.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, pada Februari 2019 seluruh kementerian di Indonesia telah memiliki PPID, namun baru 48,18% Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP yang memiliki PPID. Seluruh provinsi sudah memiliki PPID, namun untuk Komisi Informasi Provinsi hanya Maluku Utara yang belum terbentuk dan masih menunggu penetapan hasil *fit and proper test* oleh DPRD. Sementara itu, sebanyak 77,88% Kabupaten dan 92,86% Kota telah memiliki PPID.

Kebijakan Yang Nondiskriminatif.

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan							

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
16.b.1 (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komnas Perempuan	Kebijakan/Dokumen	421 ³ (2010-2015)	Menurun	438 (2019)	▼

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Beberapa upaya yang dilakukan adalah penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia serta melakukan harmonisasi kebijakan yang diskriminatif baik di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, sampai dengan tahun 2017, terdapat 421 kebijakan diskriminatif yang terdiri dari peraturan daerah, surat edaran, dan keputusan kepala daerah dari tingkat kelurahan sampai desa. Kemudian, pada tahun 2019 terdapat penambahan jumlah kebijakan diskriminatif menjadi 438 kebijakan dibandingkan dari tahun 2018 sebanyak 434 kebijakan. Di sisi lain, di samping adanya kebijakan yang belum memenuhi standar kebijakan non-diskriminatif, terdapat 356 kebijakan yang progresif dan mendukung Pemenuhan HAM Perempuan. Adapun terhadap kebijakan yang masih diskriminatif tersebut, Komnas Perempuan kemudian mengeluarkan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Kemendagri dan Kemenkumham melalui klarifikasi dan pembinaan produk hukum daerah.

Tantangan yang dihadapi yakni masih kurangnya pemahaman perspektif gender dan prinsip nondiskriminasi oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Komnas Perempuan melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam meninjau kebijakan daerah untuk meningkatkan penanganan dan pencegahan kebijakan diskriminatif melalui forum koordinasi Kementerian/Lembaga.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Kualitas dan kapasitas layanan publik dalam merespon kebutuhan kelompok rentan masih menjadi tantangan, sehingga akses pada sistem yang responsif pun tidak merata. Tantangan dalam peningkatan pelayanan publik selain kualitas dan kapasitas juga termasuk biaya dan keterbatasan jangkauan pada sarana prasarana menjadi kendala utama khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan, contohnya untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak. Upaya mengatasi tantangan cakupan akta lahir khususnya untuk anak-anak dilakukan dengan dukungan nota kesepahaman antara 8 (delapan) Kementerian/Lembaga tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak pada tahun 2015 dan

³Pemutakhiran dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan



Permendagri No.9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang memfasilitasi kemudahan dalam pencatatan akta kelahiran serta pengembangan berbagai model pendekatan untuk mengakselerasi cakupan pencatatan kelahiran. Selain itu, kontribusi lembaga peradilan dilakukan melalui pelayanan terpadu bersama-sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Dukcapil. Pelayanan ini dalam bentuk pelaksanaan sidang itsbat nikah/penetapan perkawinan bagi pasangan dari masyarakat yang kurang mampu dan belum memiliki akta nikah melalui pengadilan agama maupun pengadilan umum. Proses ini dilanjutkan dengan pemberian Buku Nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemberian Akta Kelahiran bagi keturunan pasangan tersebut.

Tantangan dalam meningkatkan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di setiap tingkatan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya seperti masih cukup tingginya permisifitas terhadap praktik korupsi, kepatuhan lembaga pemerintah terhadap undang-undang pelayanan publik masih belum optimal sehingga pencegahan potensi maladministrasi dan perilaku koruptif masih belum sepenuhnya terjadi. Selain itu, belum seragamnya produk layanan, lambannya penyesuaian SOP, hak pengguna berkebutuhan khusus dan belum terpublikasikannya tata cara dan mekanisme pengaduan untuk masyarakat atas pelayanan publik, serta belum adanya sarana pengukuran kepuasan pelayanan juga masih menjadi tantangan.

Permasalahan yang dihadapi untuk peningkatan bantuan hukum bagi orang dan kelompok miskin adalah masih belum memadainya kapasitas Organisasi Bantuan Hukum (OBH) ditambah dengan jumlah sebaran OBH yang terakreditasi masih belum merata mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas. Selain itu masih diperlukan optimalisasi peran advokat dan paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada orang dan kelompok miskin. Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain melalui pembinaan hukum nasional dan peningkatan standar pemberian bantuan hukum.

Kendala lainnya adalah terkait pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan yang masih belum optimal, contohnya IDI yang dirancang untuk memotret kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia berdasarkan realitas yang terjadi (*evidence based*). Namun pemanfaatan IDI belum menjadi dasar pertimbangan perencanaan pembangunan politik di daerah dan masih perlu ditingkatkan. IDI juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun sebuah kebijakan mendatang. Salah satu upaya peningkatan IDI adalah memperkuat kelompok kerja IDI di daerah.

Secara umum Tujuan 16 masih menghadapi tantangan yang cukup besar yaitu ketersediaan data dan informasi yang memadai sebagai dasar perencanaan pembangunan yang inklusif. Indonesia telah menginternalisasi credo “apa yang bisa diukur bisa dilakukan.” Artinya, pembangunan hanya bisa akuntabel ketika dirancang dan dievaluasi menggunakan data. Di saat yang sama, apa yang sulit diukur sesungguhnya adalah permasalahan tersembunyi, sehingga, ketimpangan sering tidak terdeteksi. Pembangunan yang inklusif dan adil, dapat tercapai apabila pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola yang berbasis bukti. Pemerintah juga perlu memperbaiki cara mengidentifikasi permasalahan yang selama ini sulit diukur. Permasalahan yang berdampak pada lapisan masyarakat rentan harus mendapat dukungan kebijakan yang optimal dari pemerintah. Selain itu, layanan informasi publik juga perlu ditingkatkan kualitasnya.

III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Pengembangan Indeks Akses Terhadap Keadilan.

Indeks Akses Terhadap Keadilan (*Access to Justice Index*) telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Desember 2019. Keberhasilan peluncuran Indeks Akses Terhadap Keadilan, yang juga merupakan pertama dan satu-satunya di Asia, adalah hasil kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik, bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap situasi peradilan dan hukum di Indonesia. Adapun organisasi masyarakat sipil yang turut terlibat dalam pengembangan Indeks Akses Terhadap Keadilan diantaranya seperti *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, *Indonesian Legal Roundtable (ILR)* dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Adapun dari hasil kajian yang telah dilakukan, skor Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia adalah sebesar 69.6% atau masuk dalam kategori cukup.

Pengembangan Pelayanan Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA).

Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Sosial RI. TePSA memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan telekonseling bagi anak yang mengalami permasalahan, pengaduan, termasuk layanan kedaruratan/*emergency response* dan rujukan jika dibutuhkan. Selain itu program TePSA juga memberikan ruang kepada anak untuk mengungkapkan apa yang mereka alami, dan rasakan mengenai suatu tindak pelanggaran terhadap hak-hak anak. Program TePSA merupakan implementasi nyata dari prinsip dan hak penghormatan terhadap pendapat maupun pandangan anak dalam Konvensi Hak Anak yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Citizen Voice and Action.

'*Citizen Voice and Action*' (CVA) *World Vision* adalah inisiatif Akuntabilitas Sosial oleh Wahana Visi Indonesia sebagai salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di isu perlindungan anak. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan layanan publik. Pendekatan ini melibatkan fasilitator pelatihan di tingkat desa, yang kemudian, dengan dukungan dari staf proyek, memfasilitasi serangkaian proses di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Proses-proses tersebut memungkinkan penduduk desa dan staf lokal untuk menilai layanan terhadap standar resmi dan standar yang ditentukan oleh penduduk desa, untuk mengembangkan rencana lokal dalam upaya peningkatan layanan, dan untuk mengadvokasi ke tingkat yang lebih tinggi dari sistem pemberian layanan untuk perbaikan. Proyek ini mendukung pencapaian Target SDGs 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Pengembangan Program Peduli.

Peduli merupakan sebuah program pengentasan kemiskinan yang memiliki sasaran kepada kelompok yang terpinggirkan, dan bekerja dengan masyarakat sipil sebagai aktor kunci untuk inklusi sosial. Strategi yang dilakukan selama 4 (empat) tahun perjalanan program Peduli adalah melakukan engagement dengan pihak pemerintah lokal, baik pemerintah desa hingga ke kabupaten/kota, serta kerja kolaboratif dengan komunitas korban dan jaringan masyarakat sipil di tingkat nasional melalui Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) dan jaringan masyarakat sipil di tingkat lokal khususnya pada upaya advokasi perubahan kebijakan. Dalam hal penerimaan sosial, strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan ruang budaya untuk menjadi titik pertemuan antara korban penyintas dan publik, serta menjadi ruang untuk peningkatan kesadaran tentang inklusi sosial.

IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Untuk menanggapi berbagai tantangan dan untuk mencapai target 2024, serangkaian arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 meliputi hal-hal sebagai berikut: :

1. Konsolidasi Demokrasi

Arah kebijakan untuk konsolidasi demokrasi terdiri atas penguatan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan, serta peningkatan kualitas komunikasi publik.

2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Arah kebijakan terkait Reformasi Kelembagaan Birokrasi mencakup penguatan implementasi manajemen ASN, penataan kelembagaan dan proses bisnis, reformasi sistem akuntabilitas kinerja dan transformasi pelayanan publik.

3. Penegakan Hukum Nasional

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan bidang hukum mencakup penataan regulasi, perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, penguatan sistem anti korupsi, dan peningkatan akses terhadap keadilan.

4. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arah kebijakan untuk penguatan keamanan dalam negeri, mencakup penguatan kemampuan pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures (CBM)* dan reformasi anggaran, penguatan keamanan laut, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, penguatan keamanan dan ketahanan siber.



V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Susenas BPS (Statistik kriminal); Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri	Kasus	1.491 (2015)	PM	1024 (2018 – Statistik Kriminal 2019)	●
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Biro Pengendalian Operasi, SOPS Mabes Polri	Kematian/ 100.000 Penduduk	18	PM	13 (Jumlah korban meninggal akibat konflik sosial)	●
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Susenas Kor BPS (Statistik Kriminal)	Persentase	0,06 (2015, Susenas Kor, BPS)	PM	0,08 (Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan (pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya)) (2018) (Susenas Kor, BPS)	▼
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Susenas Modul Hansos	Persentase	73,57 (2014, Susenas Modul Hansos, BPS)	PM	53,32% (2017) (Susenas Modul Hansos, BPS)	▼

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.							
16.2.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Susenas Modul Hansos BPS	Persentase	54,98 (2014) (Anak umur 1-14 tahun)	PM	N/A	N/A
16.2.1 (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	Anak laki-laki: 38,62; Anak perempuan: 20,48 (2013)	Menurun	Anak laki-laki: 61,7 Anak perempuan: 62 (SN-PHAR, 2018)	▼
16.2.3 (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Kementerian Sosial, KPPPA, BPS, BAPPE-NAS	Persen	Perempuan: 6,28 dan Laki-Laki: 6,37 (2015)	Menurun	Perempuan: 10,4 Laki-laki: 3,1 (SN-PHAR, 2018)	▼
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.							
16.3.1 (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Susenas Kor BPS	Persentase	43,58 (2015)	PM	46,40 (2018, Susenas Kor) BPS	●
16.3.1 (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non-litigasi	BPHN	Orang	litigasi 3.450 orang; nonlitigasi 259 kegiatan (2015)	litigasi 5.425 orang; nonlitigasi: 722 kegiatan	litigasi 11.473 orang; non litigasi 3.849 kegiatan (2019)	●

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
16.3.1. (c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum	Mahkamah Agung (Badilag, Badilum dan Badimil-tun)	Perkara	sidang di luar gedung pengadilan dan Pos layanan hukum 119.175; pembebasan biaya perkara 114.122 (2015)	Sidang di luar gedung pengadilan: 55.665; Pembebasan biaya perkara: 3.200; Pos layanan hukum 96.500	Sidang di luar pengadilan: 48.628 perkara Pembebasan biaya perkara: 19.377 perkara Pos Bantuan Hukum: 312.436 jam layanan (2019)	
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Pemas-yarakan)	Persen-tase	2,6	Menurun	0,19 (2019)	
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.							
16.5.1 (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS	Indeks	3,59 (2015)	4	3,70 (2019)	
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran)	Persen-tase	91,05% (2015)	PM	93,83 (2019)	
16.6.1 (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	%	K/L: 65 Provinsi: 85 Kabupaten: 54 Kota: 65 (2015)	K/L: 95 Provinsi: 85 Kabupaten: 60 Kota: 65	K/L: 94 Provinsi: 94 Kabupaten: 79 Kota: 90 (2018)	
16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Kememp-an RB	Persen-tase	K/L: 76.62 Provinsi: 50 Kab/Kota: 8.60 (2015)	K/L: 85 Provinsi: 75 Kab/ Kota: 50	K/L: 92,77 Prov: 94.12 Kab/ Kota: 46.85 (2018)	

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
16.6.1 (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	LKPP	Persentase	27,20 (2015)	80	81,46 (2018)	●
16.6.1. (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Kemen-PAN RB	Persentase	K/L: 86.84 Provinsi: 8.82 Kab/Kota: 9.60 (2015)	K/L: 75 Provinsi: 60 Kab/ Kota: 45	K/L: 57,31 Prov: 29.91 Kab/ Kota: 12,54 (2018)	▶
16.6.2 (a)	Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota)	Om-buds-man RI	Persentase	Kemen-terian: 27.27 Lemba-ga: 20 Provin-si: 9 Kab/Kota: 5.26 (2015)	Kemen-terian: 100 Lemba-ga: 100 Provin-si: 100 Kab/ Kota: 60	Kement-erian: 50 Lemba-ga: 25 Provin-si: 100 Kabupat-en: 33,33 Kota: 33.02 (2019)	▶
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.1 (a)	Persentase keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD	KPU dan BPS	Persentase	17,32 DPR RI, 34 DPRD Provinsi (2014, BPS) 14 DPRD Kab/Kota (2014, KPU)	NA	20,52 DPR RI, 17,53 DPRD Provinsi, 15,27 DPRD Kabupaten/Kota	▶
16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKN; Sa-kernas BPS	Persentase	Eselon I = 20,66 dan Eselon II = 16,39 (2014)	Meningkat	Eselon I = 18,08 Eselon II = 13,48 (2018)	▼
16.7.2 (a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS dan Kemen-ko Pol-hukam	Indeks	66,87 (2015)	79	78,73	▶
16.7.2 (b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS dan Kemen-ko Pol-hukam	Indeks	80,30 (2015)	87	77,20	▼
16.7.2 (c)	Indeks Hak-Hak Politik	BPS dan Kemen-ko Pol-hukam	Indeks	70,63 (2015)	68	70,71	▼

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Susenas (BPS)	%	72,65 (2015, Susenas BPS)	N/A	76,65 (2019, Susenas BPS)	
16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Susenas BPS	%	71,59 (2015 Susenas BPS)	77,4 (RPJMN)	80,44 (Susenas BPS, 2019)	
16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Susenas (BPS)	%	79,92 (2015)	85	86,01 (2019, BPS)	
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
16.10.1. (a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Komnas HAM; Ditjen HAM (Kemenkum HAM)	Berkas Pengaduan	Komnas HAM: 4.295 Kemenkumham: 658 (2015)	Komnas HAM: 7.000	Komnas HAM: 3350 (2019) Kemenkumham: 574	
16.10.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komnas Perempuan	Persentase	90,78 (2015)	90	89,99 (2019)	
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	World Bank, UNESCO, UNDP, Akademi dan Institusi Riset, Komisi Informasi Pusat	Negara	1 (2015)	1	1 (UU Keterbukaan Informasi)	
16.10.2. (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	Persentase	47 (2015)	80	35,21	
16.10.2. (b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	Persentase	56,63 (2015)	70 ⁴	88,18	

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
16.10.2 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	N/A	-	N/A	N/A
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.							
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Komnas HAM	Lemba- ga	1 (2015)	1	Tersedia (2019)	
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan							
16.b.1 (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komnas Perempuan	Kebija- kan/Do- kumen	421 (2010 - 2016)	Menurun	438 (2019)	



DAFTAR PUSTAKA

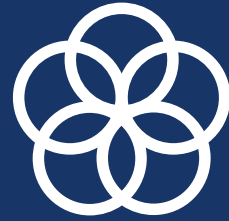
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2017. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2018. *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) 2017-2019*. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA). 2018. *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2019. *Voluntary National Reviews (VNR) 2019: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta



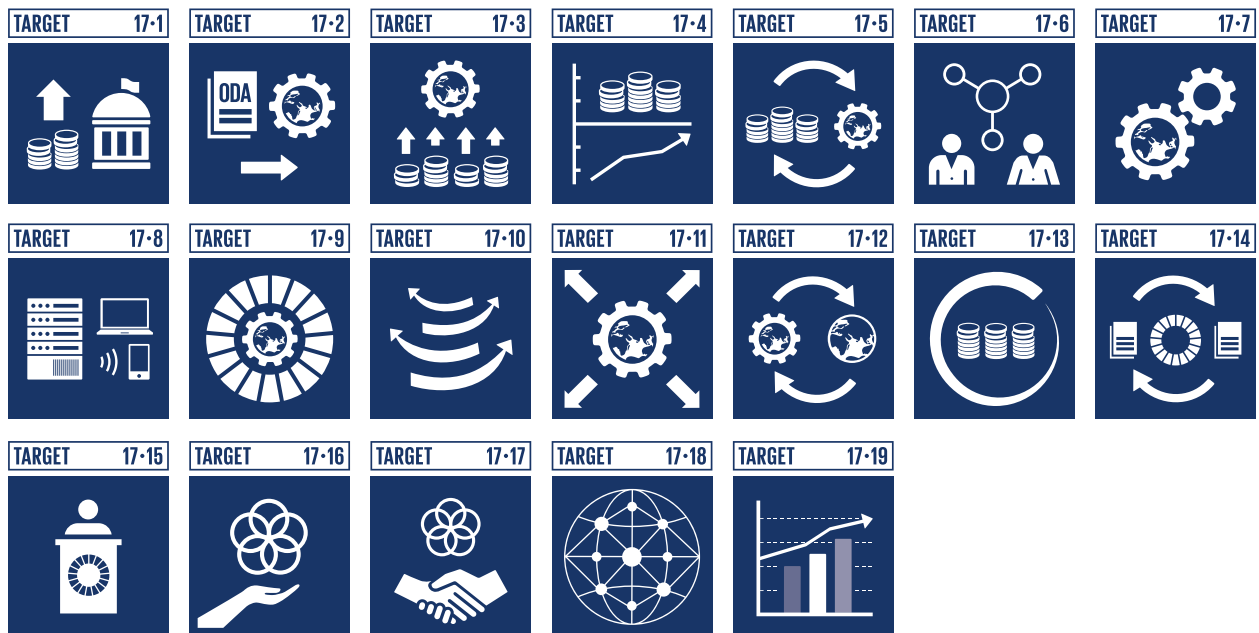


We support the Sustainable Development Goals

17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN



Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan



I. PENDAHULUAN

Pembahasan Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan difokuskan pada capaian lima (5) isu penting yang mendukung pencapaian ke-16 Tujuan lainnya yakni (i) mobilisasi sumber daya domestik; (ii) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; (iii) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (iv) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi; dan (v) monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data.

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of implementation*) dan upaya merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini tercermin dari target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 19 target, 25 indikator global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 12 Target dan 32 indikator TPB/SDGs Indonesia sebagai berikut:

TARGET	DESKRIPSI
Target 17.1	<ol style="list-style-type: none"> Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya; Rasio penerimaan pajak terhadap PDB; Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
Target 17.3	<ol style="list-style-type: none"> Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.
Target 17.4	<ol style="list-style-type: none"> Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.
Target 17.6	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular; Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK); Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Pedesaan; Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>.
Target 17.8	<ol style="list-style-type: none"> Proporsi individu yang menggunakan internet; Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.
Target 17.9	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.
Target 17.10	<ol style="list-style-type: none"> Rata-rata tarif terbobot di negara mitra <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) (6 negara). Rata-rata tarif terbobot di negara mitra <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) (6 negara).
Target 17.11	<ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan ekspor produk non migas.
Target 17.13	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya Dashboard Makroekonomi.
Target 17.17	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Target 17.18	<ol style="list-style-type: none"> Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik; Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama; Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa); Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target; Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi; Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics</i> (NSDS).

TARGET	DESKRIPSI
<p>Target 17.19</p>	<p>25. Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga;</p> <p>26. Persentase Kementerian/ Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/ atau pranata komputer;</p> <p>27. Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga;</p> <p>28. Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.</p> <p>29. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>);</p> <p>30. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website;</p> <p>31. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS);</p> <p>32. Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.</p>

II. STATUS CAPAIAN

- Salah satu modal utama dalam melaksanakan SDGs adalah dukungan pendanaan diantaranya mobilisasi sumber daya domestik. Pencapaian Indonesia terkait indikator pajak belum begitu signifikan, jika dilihat dari capaian selama 5 tahun terakhir. Target lainnya untuk mendukung penerimaan negara adalah perdagangan internasional melalui *Free Trade Agreement* dan pertumbuhan ekspor nonmigas. Capaian ekspor nonmigas memiliki kecenderungan fluktuasi yang menurun sedangkan pencapaian target *Free Trade Agreement* lebih baik dalam beberapa tahun terakhir.
- Indonesia juga berkomitmen untuk membangun suatu jaringan konektivitas besar untuk menghubungkan seluruh penjuru negeri. Beberapa capaian indikator penting yang mendukung target tersebut adalah tercapainya 100% pembangunan jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional, serta meningkatnya pengguna internet secara signifikan selama 10 tahun terakhir.
- Teknologi informasi juga telah membuka kesempatan yang luas bagi komunikasi data. Kebutuhan ketersediaan data yang dapat diandalkan dan dipercaya merupakan basis penting untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Target terkait data statistik di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang positif antara lain indikator terkait jumlah pengguna data untuk perencanaan pembangunan yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir serta terjadinya perbaikan manajemen dan pelayanan data oleh BPS juga telah berkontribusi pada kepuasan pengguna data.
- Dengan menggunakan seluruh pengalaman mobilisasi sumber daya, pembangunan infrastruktur komunikasi, serta pengembangan sistem data dan statistik, Indonesia mengakumulasi aset yang cukup untuk berinteraksi lebih jauh lagi dengan negara-negara lain dalam kerja sama pembangunan internasional. Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerja Sama Triangular (KST) yang merupakan dua langkah terkombinasi Indonesia untuk lebih aktif dalam kerja

sama pembangunan internasional. Melalui KSST komitmen Indonesia diwujudkan dengan dukungan kepada negara-negara berkembang lain dalam menerapkan SDGs dan memastikan tidak ada seorangpun tertinggal di negara-negara mitra.

- Berikut pembahasan mendalam untuk beberapa capaian indikator (*highlight*) yang telah mengalami kemajuan dan beberapa yang masih memerlukan perhatian khusus dari Tujuan 17.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.							
15.3.2.(a)	Proporsi volume re-mitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2TKI dan Bank Indonesia	%	1,13	0,79	1.1	●
Target 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.							
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Bank Indonesia	%	30,57	-	26,86	●
Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17.6.1. (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular.	Bappenas/ KL Pelaksana KSS	Kegiatan	45	-	76*	●
17.6.2. (a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	BPS Susenas	%	77,8	100	100	●
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	APJII	%	43,1	-	64,8 (2018)	●

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.							
17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) (6 negara).	Kementrian Perdagangan	%	9,31	-	4,34	●
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17.18.1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data dan Survei Kepuasan Konsumen.	%	93,7 (2016)	85	98,78	●
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.1. (a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga.	%	3.728 (2016)	6.000	6.783	●
17.19.2. (e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data.	%	20,46	48	72,25	●

(*) Indikasi 2019 dalam RPJMN 2020-2024

Mobilisasi Tambahan Sumber Daya Keuangan.

Volume aliran remitansi pekerja-pekerja Indonesia antara 2010 dan 2019 tidak bergerak secara progresif—berfluktuasi sekitar 0,8 hingga 1,1%. Aliran remitansi relatif ini mencapai puncak tertinggi pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2017.



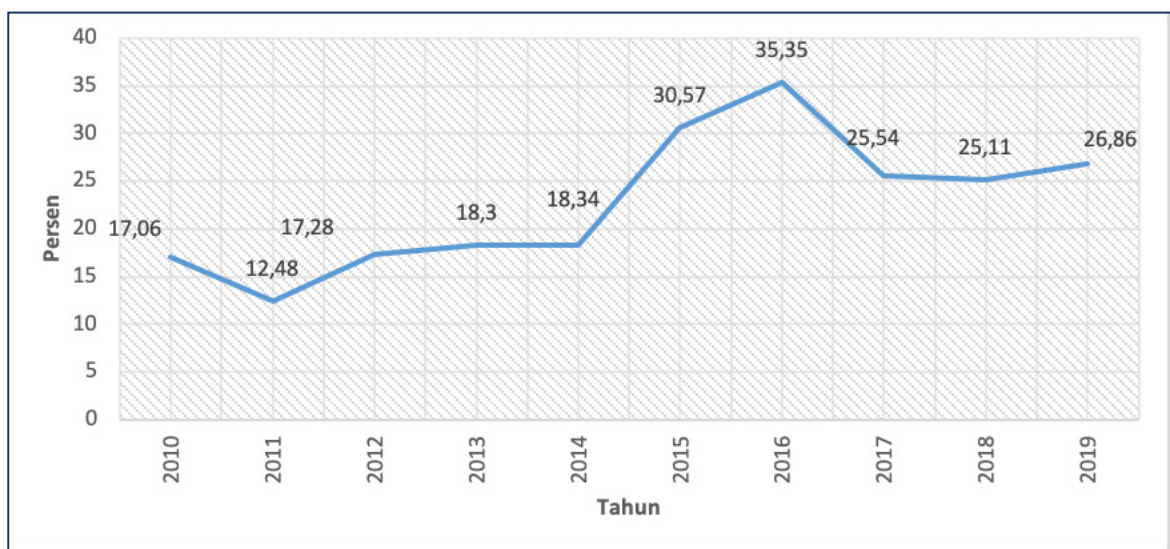
Gambar 01. Nisbah Remitansi-PDB.

Sumber: Bank Indonesia

Pengembangan ekosistem remitansi berbasis bank masih merupakan tantangan mengingat Indonesia merupakan negeri dengan pekerja migran besar. Tidak semua remitansi disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan formal, sehingga diduga ada sejumlah besar remitansi yang tidak tercatat dengan baik. Arus remitansi seperti ini terjadi dalam bentuk tunai dan ada pula yang dititipkan melalui orang. Hal ini semakin rumit karena terbatasnya outlets untuk mengirim dan menerima remitansi di mana pekerja migran bekerja dan keluarga bertempat tinggal di daerah asal.

Utang Luar Negeri Indonesia Mengalami Penurunan.

Kemampuan Indonesia untuk mengelola utang luar negeri mengalami penurunan antara tahun 2011 hingga 2016. Dimulai dari nisbah 12,48 (2011), besaran *Debt Service Ratio* (DSR) meningkat menuju puncak grafik pada nisbah 35,5 (2016). Namun demikian, setelah masa itu, pada tiga tahun berikutnya pemulihan terjadi. Tahun 2019 DSR menyentuh besaran di angka yang tidak berbeda jauh di tahun sebelumnya, yakni berkisar di angka 26. Fakta ini menunjukkan bahwa, meskipun nilai nominal utang luar negeri meningkat, utang ini dikelola dengan cara-cara produktif atau dapat dikatakan bahwa, utang luar negeri masih berada dalam rentang kendali pemerintah Indonesia.

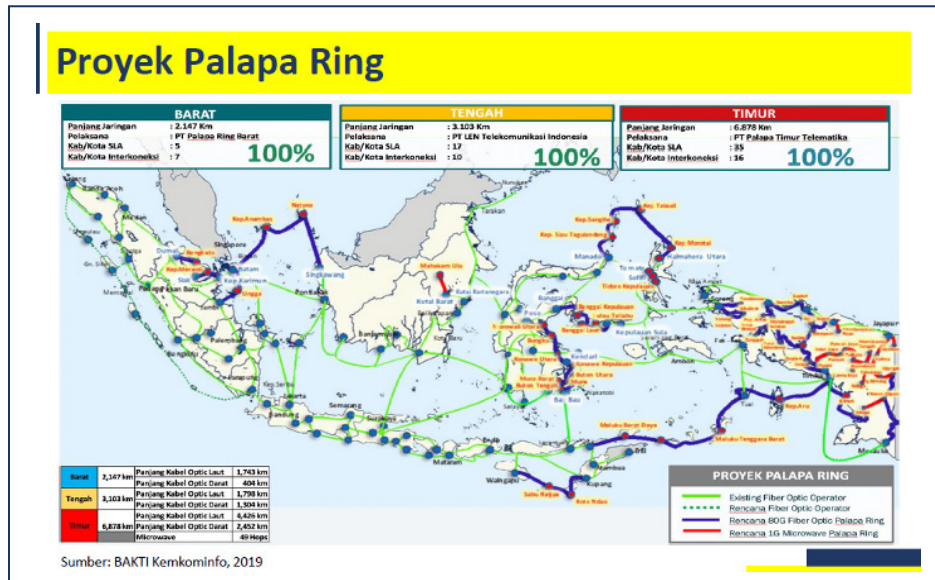


Gambar 02. Debt Service Ratio.

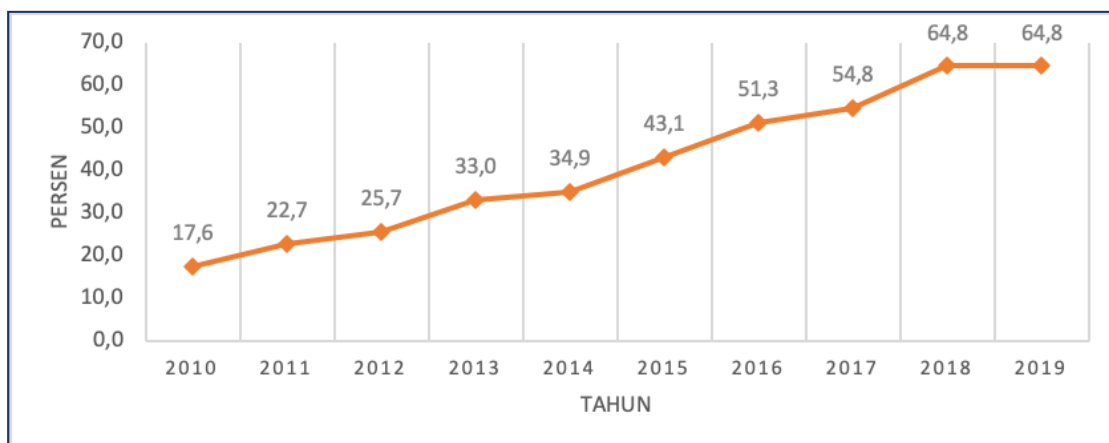
Sumber: Bank Indonesia

Meningkatnya Penggunaan Teknologi, Khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tulang Punggung Serat Optik Nasional (TPSON) adalah infrastruktur fisik yang dibangun untuk mendukung sistem komunikasi proyek 'Palapa Ring' dengan target 36.000 km serat optik. Secara keseluruhan pembangunan TPSON bergerak memenuhi targetnya dan telah mencapai 100%.



Pembangunan infrastruktur komunikasi secara langsung berdampak pada tingkat penggunaannya. Hal ini jelas ditunjukkan oleh lompatan tingkat pengguna internet. Pada tahun 2010 baru sekitar 17,6% penduduk menggunakan internet untuk beragam keperluan. Delapan tahun kemudian, persentase penduduk yang menggunakan internet melonjak hampir empat (4) kali hingga mencapai 65% di tahun 2019.



Gambar 03. Proporsi Pengguna Internet.
 Sumber: Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII)

Menggalakkan Sistem Perdagangan Multilateral yang Universal.

Tarif telah menjadi salah satu isu penting dalam perdagangan internasional karena perannya dalam pembentukan harga dan transmisinya ke dalam pasar domestik. Negosiasi tarif umumnya menjadi salah satu bagian dalam negosiasi perdagangan internasional. Dalam dua tahun terakhir ini, rataan tarif terbobot dalam enam negara mitra anggota 'Free Trade Agreement' (FTA)—Australia, India,

Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Tiongkok—telah turun secara signifikan dari 9,31 (2015) menjadi 4,34 (2019).



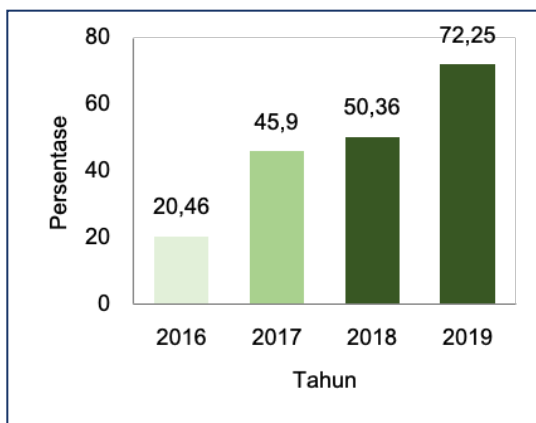
Gambar 04. Rataan Tarif Terbobot dalam Enam Negara Mitra Dagang FTA
Sumber: Kementerian Perdagangan

Meningkatnya ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya.

1. Pengguna Data

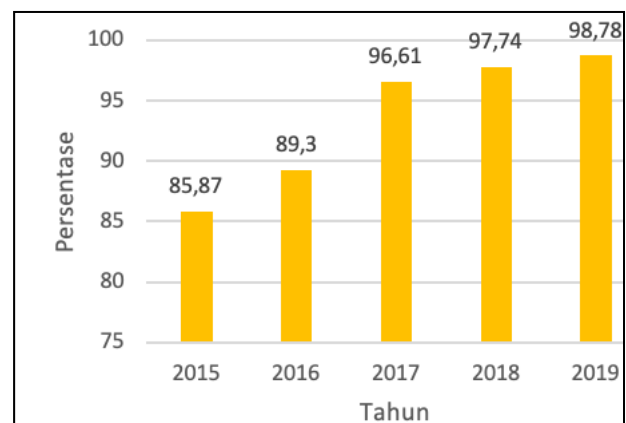
Dalam empat tahun terakhir sejak 2016 jumlah pengguna data untuk perencanaan pembangunan telah meningkat secara signifikan. Pengguna data untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan telah meningkat lebih dari tiga kali sejak 2016, yakni dari 20,46% menjadi 72,25% di tahun 2019.

Perbaikan dalam manajemen dan pelayanan data oleh BPS juga telah mendorong kepuasan pengguna data. Secara umum, masyarakat pengguna data merasa puas dengan mutu data yang disajikan oleh BPS dengan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2015 sekitar 85,87% pengguna puas dengan kualitas data statistik. Setahun kemudian, kepuasan itu meningkat menjadi 89,3%. Kemajuan ini tidak berhenti sampai di sini, karena pada tahun 2019 angka kepuasan meningkat tajam hampir mencapai 99%.



Gambar 04. Pengguna Data untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan.

Sumber: BPS

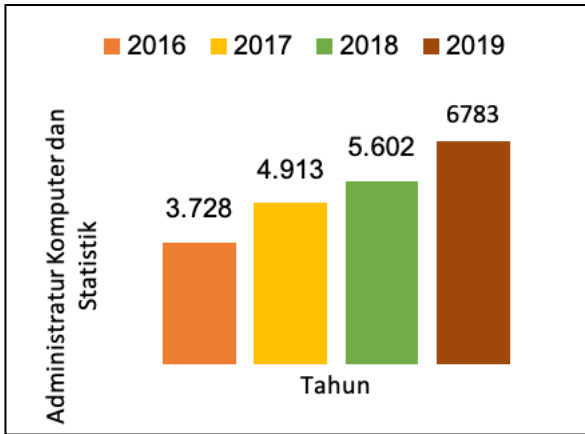


Gambar 05. Persentase Kepuasan Pengguna Data.

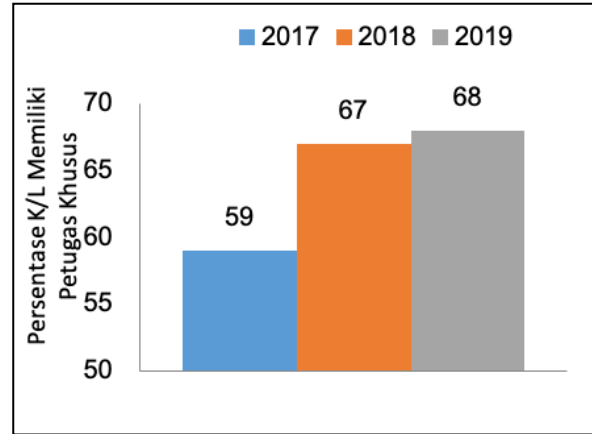
Sumber: BPS

Salah satu sumber produksi data dan yang juga dijadikan rujukan oleh pengguna adalah kementerian dan lembaga (K/L). Saat ini tak kurang dari 6783 petugas statistik bekerja untuk K/L dalam pengelolaan data. Jumlah ini meningkat lebih dari 3000 orang dari jumlah di tahun 2016 sebanyak 3728 orang. Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan jumlah K/L yang mempekerjakan petugas khusus

dalam produksi dan publikasi data, yang sudah barang tentu didukung oleh perbaikan organisasi dan infrastruktur penopangnya. Pada tahun 2017 baru sekitar 59% K/L yang mempekerjakan tenaga khusus untuk pengelolaan data. Dua tahun kemudian, jumlah ini sudah meningkat menjadi 68%.



Gambar 06. Jumlah Administratur Komputer dan Statistik dalam K/L.
Sumber: BPS

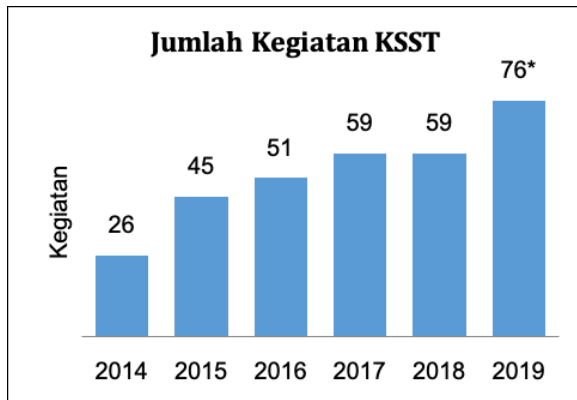


Gambar 07. Persentase K/L Memiliki Petugas Administratur Komputer dan Statistik.
Sumber: BPS

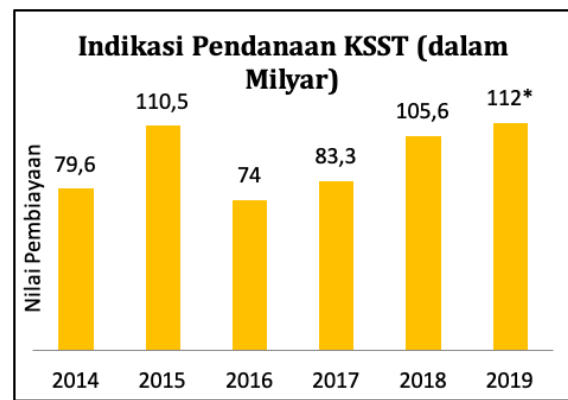
Meningkatnya Dukungan untuk Internasional dalam Melaksanakan Pembangunan Kapasitas yang Efektif melalui Kerjasama Selatan-Selatan Triangular

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dilihat sebagai strategi diplomasi terkombinasi negara-negara berkembang tanpa mengabaikan esensi solidaritas antarsesama anggota. Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan peran KSST dalam kerja sama global sebagaimana ditunjukkan dalam RPJMN 2015-2019. Ini setara dengan penerapan Tujuan 17 SDGs, yakni revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sepanjang 2014-2019, Indonesia telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan KSST dengan intensitas yang meningkat. Dimulai dari 26 kegiatan pada tahun 2014, lima tahun kemudian jumlah kegiatan KSST diindikasikan berlipat lebih tiga kali lipat menjadi 76 kegiatan dengan alokasi sebesar 112 miliar rupiah di tahun 2019. Gambaran ini menunjukkan komitmen Indonesia kepada negara-negara KSST, seperti Afghanistan, Bangladesh, Ethiopia, Fiji, Filipina, Ghana, Nepal, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Solomon Island, and Timor Leste—termasuk beberapa negara maju, yakni AS, Inggris, Jerman, dan Jepang— untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan beragam program pembangunan. Komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2014 hingga 2019 untuk indikasi pendanaan untuk KSST.



Gambar 08. Jumlah Kegiatan KSST.
Sumber: Tim Koordinasi KSST



Gambar 09. Pembiayaan KSST (miliar rupiah).
Sumber: Tim Koordinasi KSST

Dari total 32 indikator SDGs Indonesia Tujuan 17 dengan 20 indikator mengalami kemajuan, masih terdapat beberapa indikator yang tingkat kemajuan atau pencapaian targetnya masih lambat dan bahkan perlu mendapatkan perhatian khusus karena mengalami penurunan dari baseline dan tidak mencapai target, diantaranya adalah sebagai berikut:

B. PENCAPAIAN INDIKATOR SDGs YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

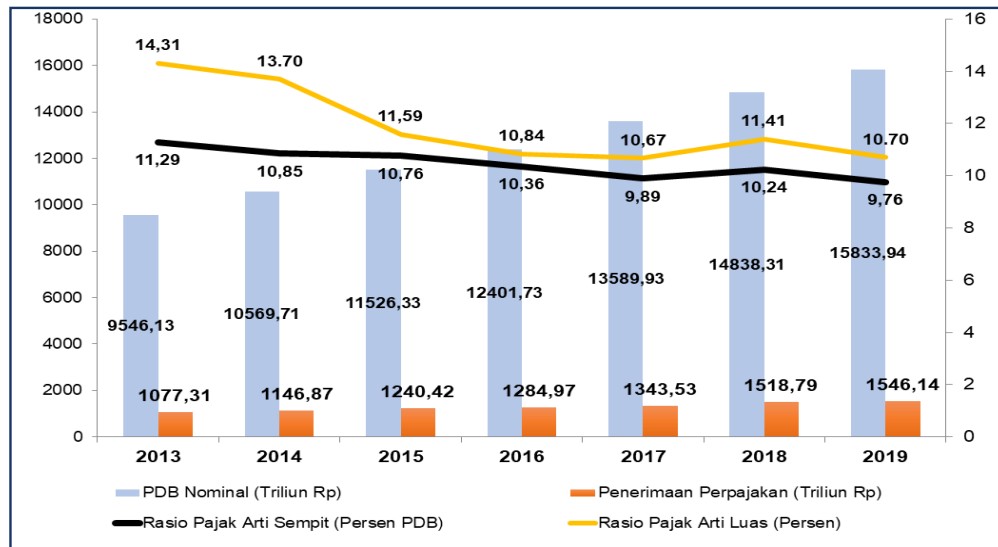
TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Kementerian Keuangan	%	10,76	>12	9,76	▶
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.							
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	%	-9,8	5	-4,82	▼

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
<p>Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p>							
17.18.1. (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data.	%	91,35 (2016)	90	89,83	▶
17.19.1. (b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	BPS: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga.	%	59 (2017)	70	68	▶

Memperkuat Mobilisasi Sumber Daya Domestik.

Pajak adalah salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah untuk melaksanakan SDGs. Namun sayangnya, peningkatan penerimaan pajak tidak bergerak harmonis sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB)— Peningkatan PDB tidak secara proporsional diikuti oleh peningkatan rasio penerimaan pajak. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB cenderung menurun yaitu sebesar 11,29% (2013), 10,76% (2015), 9,89% (2017), 10,24% (2018), dan 9,76% (2019).



Gambar 10. Penerimaan Pajak terhadap PDB.
 Sumber: Kementerian Keuangan

Upaya-upaya untuk mengurangi pengelakan pajak masih diperlukan termasuk pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian dari upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak. Teknologi digital membawa kesempatan-kesempatan baru untuk menurunkan pengelakan pajak di satu sisi dan meningkatkan kepatuhan pajak di sisi lain. Modernisasi perpajakan yang bertumpu pada tekonologi memainkan peran penting dalam proses penerapan *core tax administration system*. Ditopang oleh Perpres No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, *core tax administration system* dirancang sedemikian rupa untuk menggantikan sistem lama yang telah digunakan lebih dari satu dekade.

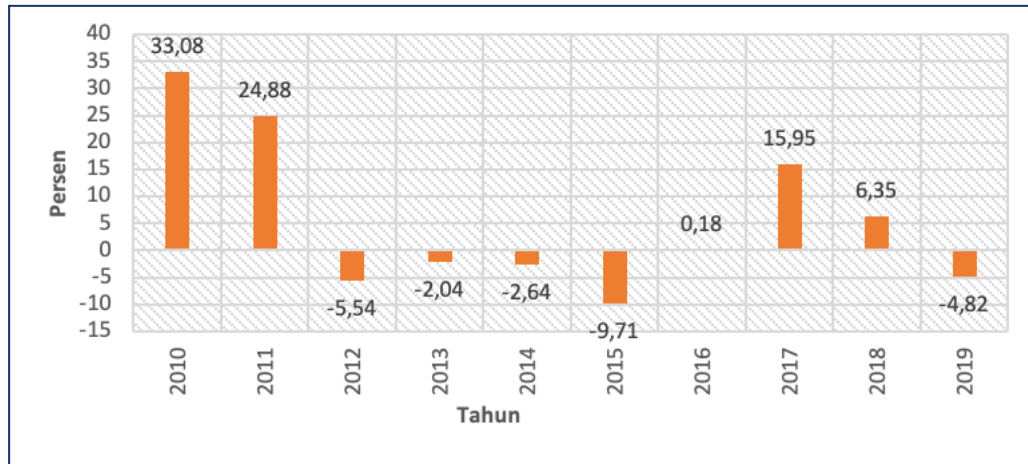
Sumber-sumber pajak baru penting untuk dieksplorasi. Hingga saat ini Indonesia masih relatif tergantung pada komoditas primer. Sektor-sektor lain masih mungkin untuk dijelajahi lebih jauh, utamanya manufaktur dan jasa. Kombinasi harmonis antara pinalti dan insentif pajak bagi sektor-sektor ini terasa diperlukan, termasuk kebijakan detail bagi penyumbang ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Semua ini jelas menyaratkan perbaikan administrasi dan pelayanan perpajakan.

Meningkatkan Ekspor Nonmigas.

Selama kurun waktu 2012-2015 pertumbuhan ekspor barang-barang nonmigas tidak menunjukkan kinerja yang mengesankan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan negatif antara 2% hingga 10%. Tingkat pertumbuhan ini berada jauh di bawah tingkat yang pernah dicapai pada tahun 2010 dengan pertumbuhan 33,1% dan tahun 2011 dengan 24,9%. Gabungan dari relatif rendahnya produktivitas dan efisiensi di sisi internal serta tekanan harga komoditas di sisi eksternal dapat menjelaskan kinerja ekspor barang-barang non-minyak dan gas tersebut.

Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya tanda-tanda pemulihan mulai terlihat. Kendati tidak seperti di tahun 2010-2011, pertumbuhan positif ekspor barang-barang non-minyak dan gas telah ditunjukkan dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2016 - 2018. Walau begitu, catatan khusus perlu diberikan di sini mengingat pertumbuhan yang bersifat fluktuatif, yakni 0,2% (2016), 15,9% (2017),

6,3% (2018) dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi -4,82% yang menunjukkan ketidakpastian eksternal belum sepenuhnya pulih; bahkan bukan tak mungkin keadaan ini akan berlanjut di tahun-tahun mendatang.



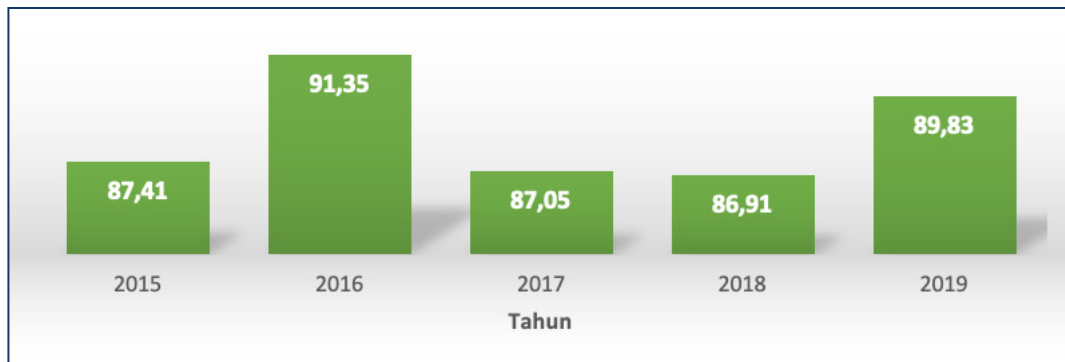
Gambar 11. Pertumbuhan Ekspor Bukan Minyak dan Gas.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Disamping itu, ekonomi global cenderung bergerak stagnan dan saat ini dibayangi oleh peningkatan ketegangan geopolitik. Berlarut-larutnya hubungan ekonomi-politik tak kondusif antara AS dan Tiongkok menandai ketegangan ini. Rangkaian dampaknya telah terasa di sejumlah negara dan kawasan.

Meningkatkan penggunaan data berkualitas, tepat waktu dan dapat dipercaya

Perkembangan TIK telah membuat data dapat diproduksi oleh sumber-sumber lain di luar BPS, dengan spesifikasi tujuan dan variasi data tertentu, yang dimungkinkan dalam tiga tahun terakhir ini terjadi kecenderungan penurunan pengguna data yang menjadikan data BPS sebagai rujukan utama, dari 87,4% (2015) menjadi 89,8% (2019). Namun demikian perlu dipahami bahwa berdasarkan mandatnya BPS merupakan penyedia data statistik dasar yang tetap menjadi rujukan utama pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan.



Gambar 12. Persentase Pengguna Data yang Menjadikan BPS sebagai Rujukan Utama.

Sumber: Badan Pusat Statistik

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

1. Pembayaran Utang

Sejalan dengan pergerakan kemajuan yang dicapai, pembiayaan pembangunan selalu menjadi tantangan bagi Indonesia yang harus dijawab. Sumber-sumber domestik sudah barang tentu harus dimobilisasi di luar pajak antara lain dengan pendanaan yang inovatif tetapi sumber-sumber eksternal juga perlu dioptimisasi. Pada saat yang sama, kombinasi utang dalam dan luar negeri juga tetap dan akan menjadi tantangan besar Indonesia dalam mengelola defisit anggaran belanja negara.

Berbeda dengan utang domestik yang tidak banyak mempengaruhi neraca pembayaran, utang luar negeri membutuhkan manajemen eksternal yang hati-hati, karena hubungannya dengan kemampuan negara untuk mendorong ekspor barang dan jasa. Pada saat yang sama, pemanfaatan produktif utang luar negeri tidak hanya meningkatkan kemampuan negara untuk membayar utang, tetapi juga membuka saluran yang luas untuk menciptakan kegiatan ekonomi dan ekspor. Sebagaimana kemampuan membayar utang adalah penting, perluasan ekspor juga penting dalam manajemen pembayaran utang.

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam era digital saat ini dan di masa depan, pembangunan infrastruktur fisik senantiasa merupakan tantangan besar. Tantangan ini ditandai dari dua sisi. Dari sisi permintaan, permintaan akan data dengan *volume* besar dan komunikasi berkecepatan tinggi tidak akan terhindarkan. Sementara itu, dari sisi penawaran, ketersediaan jaringan komunikasi pita lebar tetap dan bergerak juga amat penting untuk dikembangkan.

Proyek 'Palapa Ring' telah dirancang dan dikonstruksi untuk menjawab tantangan itu. Proyek ini menargetkan cakupan seluruh titik di seantero negeri, termasuk daerah-daerah dalam kategori 3T. Sejumlah capaian telah dibuat. Sisi barat dan tengah wilayah Indosia telah 100% terhubung melalui kabel bawah laut dan serat optik, sedangkan sisi timur akan segera menyusul. Tantangan saat ini adalah bagaimana mengkapitalisasi dan mentransformasi infrastruktur ini menjadi kegiatan-kegiatan ekonomi-sosial yang produktif dan inovatif. Tantangan ini bahkan semakin serius mengingat demografi Indonesia saat ini diwarnai oleh kelompok muda milenial. Dalam hubungan ini, 'keamanan berinternet' juga membutuhkan perhatian tersendiri dalam era digital.

3. Tarif

Secara umum, kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara FTA (*free trade area*) berlangsung baik. Namun demikian, beberapa isu masih belum terpecahkan di dalam negosiasi-negosiasi perdagangan bilateral, multilateral, regional, dan internasional. Di antara isu-isu yang ada, tarif merupakan isu yang tersulit untuk diselesaikan. Mengingat dampaknya terasa langsung pada kinerja perdagangan, Indonesia terus melakukan beragam upaya untuk mengembangkan lingkungan perdagangan yang dapat mengurangi hambatan seperti itu.

Penurunan tarif masih dan akan terus menjadi agenda untuk diselesaikan. Strategi 'beri-dan-ambil' diterapkan sebagai pendekatan umum yang lazim dalam diplomasi tarif. Namun demikian, hal ini memerlukan pemahaman menyeluruh dalam hal-hal teknis yang rinci atas barang-barang perdagangan yang dinegosiasikan, khususnya struktur mata rantai yang saling terkait antarbarang-barang itu. Mengingat barang-barang perdagangan itu saling terkait, penetapan tarif pada suatu produk akan berdampak pada produk lain dalam struktur mata rantai itu.

4. Data dan Statistik

Ketersediaan data dan statistik dalam penerapan SDGs amat fundamental. Saat ini sebagian besar indikator SDGs telah berhasil didefinisikan, diidentifikasi, dan ditransformasi ke dalam basis data yang informatif. Namun demikian, pemilahan data masih menjadi tantangan, khususnya data terkait kelompok-kelompok khusus diantaranya disabilitas, gender, umur ditargetkan oleh SDGs untuk menjadikan tidak seorangpun tertinggal dari dinamika pembangunan. Pada saat yang sama, pemekaran daerah administrasi, khususnya pada yurisdiksi administrasi terbawah, cenderung terus berlangsung, sehingga membuat manajemen data menjadi lebih rumit.

Kebutuhan akan data SDGs, khususnya data untuk indikator yang tidak dapat secara langsung disediakan oleh BPS, juga terbilang tinggi. Data tersebut disiapkan oleh K/L, sehingga pendampingan teknis untuk pemenuhan kebutuhan ini amat diperlukan. Pada saat yang sama, data SDGs penting untuk diintegrasikan dan dinternalisasi ke dalam manajemen data K/L untuk menjamin ketersediaannya; dan, bahkan, lebih daripada itu, untuk membuat SDGs menjadi bagian dalam kinerja kementerian dan juga lembaga.

5. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

KSST penting untuk mewacanakan isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan, termasuk cukai dan tarif impor, sejalan dengan penerapan program-programnya. Secara khusus, KSST perlu membahas secara komprehensif dan rinci hambatan-hambatan teknis dalam penerapan program, utamanya tatkala program membutuhkan sumber daya dan material yang harus dipertukarkan antarnegara.

Program KSST juga perlu untuk diintegrasikan ke dalam program-program K/L. Integrasi ini membuka kemungkinan bagi K/L untuk mendukung program KSST melalui beragam sumber daya pendukung. Dalam hal ini, KSST tidak hanya patut diarahkan untuk mencapai *outputs* dan *deliverables* yang ditargetkan, tetapi lebih penting lagi untuk memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang dijalankan dengan metodologi andal, dengan demikian, akan menjadi konsekuensi logis bagi program-program KSST dan K/L.



III. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST)

Dibidang KSST, Indonesia juga telah mencatat beberapa *milestones*. Pertama, intervensi kebijakan. Ini meliputi (a) Penentuan *flagship* program dan koridor pelaksanaan KSST bagi Kementerian/Lembaga; (b) Pemetaan negara prioritas; (c) Pengembangan modalitas kerjasama triangular yang inovatif dengan mitra pembangunan; (d) Pengembangan Strategi Komunikasi (Strakom) KSST untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan; dan (e) Pembentukan *single agency* KSST Indonesia.

Kedua, pengembangan dan penguatan kapasitas. Hal ini dijalankan melalui (a) Penguatan koordinasi melalui *Standard Operational Procedure* (SOP) Tim Koordinasi Nasional (Tim Kornas) KSST; (b) *Mapping Indonesia's Resource Center* sebagai referensi negara berkembang untuk berbagi pengetahuan dengan *center of excellence* yang dimiliki Indonesia; (c) Penyusunan Panduan Evaluasi Pengembangan Kapasitas Internasional Indonesia; (d) Pengukuran kapasitas (*capacity assesment*) Tim Kornas KSST sebagai referensi penguatan kapasitas dari level kelembagaan hingga individual; (e) Pengukuran manfaat kegiatan Kerjasama Pembangunan Internasional sebagai umpan balik pelaksanaan KSST; (f) Peningkatan kapasitas para kepentingan dalam implementasi kemitraan untuk mencapai agenda pembangunan internasional melalui Panduan Kemitraan Multi-Pihak (KMP).

Ketiga, Pengembangan dan pemantapan *eminent persons group* dengan melibatkan pejabat tingkat tinggi/ahli dalam penyusunan dokumen pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang Politik Luar Negeri dan buku rekam jejak KSST Indonesia. Keempat, promosi KSST dengan cara menyelenggarakan kegiatan *roadshow* di berbagai universitas di Indonesia, forum internasional seperti BAPA+4, GSSD Expo, Asia-Africa *Forum Commemoration* dan sebagainya melalui penyelenggaraan pameran atau lokakarya.

Akhirnya, kelima, pengembangan model insentif. Hal ini dilakukan melalui (a) Pengembangan konsep keterlibatan sektor swasta dalam KSST melalui beberapa jenis insentif, antara lain: insentif keuangan dan insentif fiskal; (b) Panduan KMP untuk meningkatkan partisipasi aktor nonpemerintah dalam mencapai agenda pembangunan nasional.



IV. KEBIJAKAN KE DEPAN

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target di Tujuan 17 yang komprehensif tersebut dijabarkan dalam cluster kebijakan yaitu: (1) mobilisasi sumber daya domestik; (2) perdagangan internasional; (3) peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; (4) ketersediaan data dan; (5) kemitraan global dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Arah kebijakan 2020-2024 yang selaras untuk mencapai target-target Tujuan 17 adalah sebagai berikut:

1. Mobilisasi Sumber Daya Domestik.

a. Penerimaan Pajak.

Optimalisasi penerimaan negara diarahkan untuk mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Optimalisasi perpajakan mencakup pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*) dan *smart customs and excise system*, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai, penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

b. Remitansi.

Menggerakkan pekerja-pekerja migran untuk memasuki sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi, sehingga pekerja-pekerja migran ini mendapatkan imbal jasa yang juga tinggi. Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya peningkatan remitansi pekerja migran adalah:

- Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi. Salah satu kebijakannya terkait dengan perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi dilaksanakan antara lain melalui reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan *collective bargaining*, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi meningkatkan pendalaman sektor keuangan baik konvensional maupun syariah, dilaksanakan dengan: (1) peningkatan akses keuangan masyarakat (inklusi keuangan); (2) perluasan inovasi produk keuangan dengan pemanfaatan teknologi; (3) pengembangan infrastruktur sektor keuangan.

c. Hutang

Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi salah satunya terkait strategi penguatan reformasi fiskal difokuskan pada optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan utang yang produktif dan efisien. Pemerintah berupaya menjaga kesinambungan fiskal, dengan berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Defisit akan dijaga pada 1,5 - 1,7 persen PDB pada tahun 2024, berada di bawah batas defisit yang diamanatkan oleh undang-undang. Keseimbangan primer diarahkan menuju *positif*. Dengan



komposisi tersebut, rasio utang akan dijaga di bawah 30 persen PDB.

2. Perdagangan Internasional.

Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (3) mengelola impor; (4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; serta (7) meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung penuntasan infrastruktur TIK adalah: 1) Optimalisasi dana *Universal Service Obligation (USO)* dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet, melalui penyediaan BTS untuk desa non komersil, dan penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet; 2) Penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan internet; dan 3) Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar hingga ke kecamatan-kecamatan, dengan prioritas pada kawasan pariwisata strategis, kawasan industri, perguruan tinggi, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar, dan peningkatan kapasitas industri lokal pendukung jaringan tetap pitalebar.

4. Ketersediaan Data.

Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi difokuskan melalui (1) peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; (2) peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; (3) peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; (4) peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; (5) peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; dan (6) peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.

5. Kemitraan Global dalam Kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular.

Memperkuat kerja sama pembangunan internasional melalui: (1). Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru; (2). Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerja sama pembangunan internasional; (3). Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi; (4). Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN SDGs

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Kementerian Keuangan	%	13,08	13,50	12,38	
17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Kementerian Keuangan	%	10,76	>12	9,76	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Kementerian Keuangan	%	66,73	70,80	65,18	
Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.							
17.3.2. (a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2TKI dan Bank Indonesia	%	1,13	0,79	1,1	
Target 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.							
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.	Bank Indonesia	%	30,57	-	26,86	
Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17.6.1. (a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular.	Bappenas/ KL Pelaksana KSS	Kegiatan	45	-	76*	

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
17.6.2. (a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	BPS Susenas	%	77,8	100	100	●
17.6.2. (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika) dan BPS	%	38% perkotaan; 26% perdesaan	71% perkotaan; 49% perdesaan	2,64% populasi atau 10,30 % rumah tangga pada perkotaan	▶
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika)	%	93	100	120,53 (2018)	●
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	APJII	%	43,1	-	64,8	●
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika)	%	99 (2016)	100	AI: 93,57% BTS: 65 %	●
Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.							
17.9.1. (a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS	Milyar	110,5	120	112*	●
Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i>.							
17.10.1. (a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) (6 negara).	Kementerian Perdagangan	%	9,31	-	4,34	●

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.							
17.11.1. (a)	Pertumbuhan ekspor produk nonmigas	BPS	%	-9,8	5	-4,82	
Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.							
17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	Kementerian Koordinator Bidang Per-ekonomian, BAPPENAS, BPS, dan BI	Dash-board	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.							
17.17.1. (a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kementerian Koordinator Bidang Per-ekonomian; Kementerian Keuangan; BAPPENAS;	Doku- men ber- isi daftar proyek KPBU	1 buku (36 proyek) (2015)	1 buku	1 buku (47 proyek)	
17.17.1. (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kementeri- an Pekerjaan Umum dan Pe- rumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian En- ergi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Koordi- nasi Penanaman Modal; Pemerin- tah Daerah.	Alokasi	-	-	18.662.674.074	
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional							
17.18.1. (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutu- han Data dan Survei Kepuasan Konsumen.	%	93,7 (2016)	85	98,78	
17.18.1. (b)	Persentase kon- sumen yang men- jadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Badan Pusat Statistik: Sur- vei Kebutu- han Data.	%	91,35 (2016)	90	89,83	

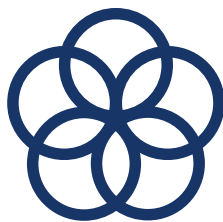
TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPI TUJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
17.18.1. (c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Badan Pusat Statistik: 1. SIRuSa (Sistem Informasi Rujukan Statistik); 2. Kuesioner metadata statistik dasar, sektoral dan khusus	Metadada-ta	850 (2016)	900	4232*	
17.18.1. (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BPS	Persen-tase	-	100	48 (2018)	
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	BPS	UU	1 (1997)		Tercapai: Indonesia memiliki UU Statistik	
17.18.2.(a)	Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	Badan Pusat Statistik mengajukan review melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).	Review	-	1	-	
17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).	BPS	Strategi Nasional	-	1	-	
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melingkupi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.1. (a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga.	%	3.728 (2016)	6.000	6.783	
17.19.1. (b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga.	%	59 (2017)	70	68	

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
17.19.1. (c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.	Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga	%	-	30	51	●
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 2020.	Sensus Penduduk	2010	2020	Tercapai	●
17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kementerian Dalam Negeri.	Data Registrasi	-	1	-	▼
17.19.2 (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Badan Pusat Statistik : 1. Statistik pengunjung web: Informasi publik; 2. Berkala: Laporan Pelayanan Data; 3. Website Badan Pusat Statistik.	Pengunjung	1.002.812	865.000	3.118.501	●
17.19.2 (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data.	%	81,93	80	98,86	●
17.19.2. (e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data.	%	20,46	48	72,25	●

(*) Indikasi 2019 dalam RPJMN 2020-2024



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2015. *Kajian Indikator Lintas-sektor: Kajian Indikator Sustainable Development Goals*. Jakarta

Badan Pusat Statistik. 2016. *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta

Badan Pusat Statistik. 2018. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. *Voluntary National Review (VNR) 2019*. Jakarta

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta





We support the Sustainable Development Goals



We support the Sustainable Development Goals